



Pemerintah Kabupaten Solok
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2021

RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22860);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok, dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Solok.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2000-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk periode 1 (satu) tahun
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil Program Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Pasal 2

Pengaturan RPJMD bertujuan untuk :

- a. sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- b. memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- c. memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
- d. mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMN.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra-PD.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2021

BUPATI SOLOK,

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/92/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

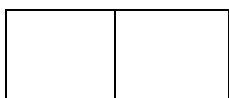
I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Tahun 2021-2026 tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dokumen RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penutup.



Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

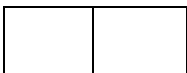
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	I 1
1.1 Latar Belakang	I 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I 3
1.4 Maksud dan Tujuan	I 7
1.5 Sistematika Penulisan	I 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II 18
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II 32
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II 73
2.5 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2016-2021	II 77
2.6 Capaian Penerapan (Standar Pelayanan Minimal) SPM	II 83
2.8 Capaian SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>)	II 88
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III 1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu	III 19
3.3 Kerangka Pendanaan	III 23
3.4 Realisasi Anggaran Untuk Penanganan <i>Covid-19</i>	III 30
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV 1
4.2 Isu Strategis	IV 13
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V 1
5.1 Visi	V 1
5.2 Misi	V 2
5.3 Tujuan dan Sasaran	V 7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI 1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI 1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI 5



	6.3 Program Pembangunan Daerah	VI	11
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII	1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII	1
BAB IX	PENUTUP	IX	1
	9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX	1
	9.2 Pengendalian Dan Evaluasi	IX	2



DAFTAR TABEL

2.1	Luas Wilayah Per-Kecamatan	II	2
2.2	Klasifikasi Lereng di Kabupaten Solok	II	3
2.3	Jumlah Sungai di Kabupaten Solok	II	4
2.4	Jumlah Danau di Kabupaten Solok	II	7
2.5	Penggunaan Lahan di Kabupaten Solok Tahun 2020	II	8
2.6	Jenis Tanah dan Komoditi yang Cocok di Kembangkan di Kabupaten Solok	II	9
2.7	Sejarah Kegiatan Gunung Talang di Kabupaten Solok	II	13
2.8	Jumlah Penduduk Per Kecamatan pada Tahun 2020	II	14
2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Jiwa)	II	15
2.10	Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Per Kecamatan Tahun 2020	II	16
2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020	II	16
2.12	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	18
2.13	Pertumbuhan Kabupaten Solok dibanding Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	II	19
2.14	Komposisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Solok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II	19
2.15	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	II	21
2.16	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	28
2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	30
2.18	Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	31
2.19	Perkembangan Urusan Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	32
2.20	Capaian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	35
2.21	Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	39
2.22	Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi di Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2016-2019	II	41
2.23	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	42
2.24	Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	43
2.25	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	45
2.26	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	46
2.27	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	47



2.28	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	49
2.29	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	49
2.30	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	50
2.31	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Tahun 2016-2019	II	53
2.32	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	53
2.33	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	54
2.34	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	55
2.35	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	56
2.36	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	57
2.37	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	58
2.38	Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	59
2.39	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	59
2.40	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	60
2.41	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	61
2.42	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	61
2.43	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	62
2.44	Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	63
2.45	Perkembangan Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	65
2.46	Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	65
2.47	Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	66
2.48	Perkembangan Indikator Urusan Bidang Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	67
2.49	Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	68
2.50	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	68
2.51	Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	69
2.52	Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	70
2.53	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020	II	71
2.54	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perizinan Tahun 2016-2020	II	72
2.55	Perkembangan Capaian Kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020	II	72



2.56	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintah Lainnya Tahun 2016-2020	II	73
2.57	Perkembangan Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	73
2.58	Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	74
2.59	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Solok Tahun 2016-2029 (Rp.Juta)	II	75
2.60	Angka Kriminalitas Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	75
2.61	Rekap Penjabaran Visi RPJMD 2016-2021	II	77
2.62	Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021	II	78
2.63	Jenis Pelayanan pada Standar Pelayanan Kabupaten / Kota	II	84
2.64	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Solok Tahun 2020	II	84
2.65	Jumlah Indikator SDG's Kewenangan Kabupaten Solok Berdasarkan Pilar	II	89
2.66	Tujuan dan Indikator Sustainable Development Goals	II	90
2.67	Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana dan Mencapai Target di Kabupaten Solok	II	92
2.68	Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target	II	94
2.69	Indikator SDGs/TPB yang Belum Memiliki Data di Kabupaten Solok	II	95
3.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d Tahun 2021	III	3
3.2	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021 Kabupaten Solok	III	5
3.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d Tahun 2021	III	8
3.4	Realisasi dan Tahun Berjalan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d Tahun 2021	III	10
3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d Tahun 2021	III	13
3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Solok	III	15
3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III	21
3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	III	22
3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2016-2019	III	22
3.10	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2026	III	25
3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026	III	29
3.12	Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020	III	30
4.1	Permasalahan Menurut penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	IV	4
5.1	Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024	V	2
5.2	RPJMD Kabupaten – Kota Tetangga	V	3



5.3	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten 2021-2026	V	6
5.4	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Solok Tahun 2021-2026	V	8
5.5	Tujuan,Sasaran dan Indikator Misi 1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat	V	9
5.6	Tujuan,Sasaran dan Indikator Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan	V	9
5.7	Tujuan,Sasaran dan Indikator Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	V	10
5.8	Tujuan,Sasaran dan Indikator Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	V	11
5.9	Tujuan,Sasaran dan Indikator Misi 5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	V	12
5.10	Tujuan,Sasaran dan Indikator Misi 6. Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	V	14
5.11	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Solok	V	15
6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI	2
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI	5
6.3	Program Prioritas Pembangunan	VI	14
6.4	Keselarasan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dan Program Prioritas Kabupaten Solok	VI	17
6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Solok	VI	20
6.6	Proyeksi Anggaran Per Misi	VI	45
7.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2026	VII	3
7.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Solok	VII	6
s8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Tahun 2021-2026	VIII	1
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok	VIII	3



DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	I	5
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Solok	II	1
2.2	Peta Rawan Bencana Kabupaten Solok	II	11
2.3	Peta sebaran permasalahan Kesehatan utama di Kabupaten Solok	II	38
4.1	Kerangka Berpikir Permasalahan	IV	1
5.1	Pemetaan Misi 1 (Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat)	V	89
5.2	Pemetaan Misi 2 (Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan)	V	91
5.3	Pemetaan Misi 3 (Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan dan Pariwisata)	V	93
5.4	Pemetaan Misi 4 (Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih)	V	95
5.5	Pemetaan Misi 5 (Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas)	V	98
5.6	Pemetaan Misi 6 (Meningkatkan tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK))	V	100
6.1	Tiga Kawasan Utama Kabupaten Solok	VI	10

DAFTAR GRAFIK

2.1	Komposisi Penggunaan Lahan (Ha) Tahun 2019	II	9
2.2	Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	15
2.3	Laju Pertumbuh an Penduduk Tahun 2016-2020	II	17
2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Solok Tahun 2020	II	17
2.5	Garis Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	27
2.6	Trend Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	27
2.7	Perkembangan Rasio Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Solok Tahun 2016-2019	II	28
2.8	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Solok dengan Provinsi dan Nasional	II	29
2.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	30
2.10	Perbandingan Usia Harapan Hidup antara Nasional Propinsi dan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	30
2.11	Perbandingan Angka Kematian Ibu antara Propinsi dan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	35
2.12	Perbandingan Angka Kematian Bayi antara Propinsi dan Kabupaten Solok tahun 2016-2020	II	36
2.13	Perbandingan Prevelensi Stunting Antara Propinsi dan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	36
2.14	Gambaran Kasus Covid-19 Per Daerah di Sumatera Barat	II	37



2.15	Gambaran Kasus Covid-19 Kabupaten Solok	II	37
2.16	Perkembangan Indikator Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	42
2.17	Keterwakilan Perempuan dalam Pembangunan	II	47
2.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	II	51
2.19	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	II	51
2.20	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Solok Tahun 2016-2019	II	60
2.21	Capaian Indikator SDGs Kewenangan Kabupaten Solok Berdasarkan Pilar	II	90
2.22	Capaian Indikator SDGs Kabupaten Solok	II	92
2.23	Persentase Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana dan Mencapai Target di Kabupaten Solok	II	93
2.24	Persentase Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Solok	II	95
2.25	Persentase Indikator SDGs/TPB yang Tidak Memiliki Data	II	96

Pendahuluan

BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Kepala Daerah yang terpilih untuk menyusun RPJMD sesuai dengan masa jabatan yang diembannya. RPJMD yang harus disusun tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang disampaikan Kepala Daerah terpilih pada saat proses pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Solok terpilih berdasarkan hasil PILKADA Serentak Tahun 2020, H. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024 telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 26 April 2021. Dengan pelantikan ini, maka H. Epyardi Asda, M. Mar dan Jon Firman Pandu, SH, mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan visi, misi yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, perodesasi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 tidak sama dengan periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir pada Tahun 2024. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang menegaskan bahwa RPJMD harus berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat, sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan PILKADA Serentak Tahun 2020 adalah 2021-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 telah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten, mengarah pada percepatan pembangunan daerah



tertinggal, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Adapun pendekatan politik yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Solok.

Lebih lanjut, secara substansi RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 mengemukakan visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, kapasitas keuangan daerah, program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang disertai dengan pagu indikatif pendanaan untuk jangka 5 (lima) tahun menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Program-program yang akan dilaksanakan telah mempertimbangkan keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga dan RPJMN 2020-2024 serta kapasitas keuangan daerah.

RPJMD ini juga merupakan tahapan IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025, yang memprioritaskan terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri, penataan masyarakat yang mampu menyelaraskan kehidupan dengan arus modernisasi dan globalisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, antisipatif, fasilitatif, profesional, proporsional, transparan dan akuntabel serta tersedianya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang Kabupaten Solok.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



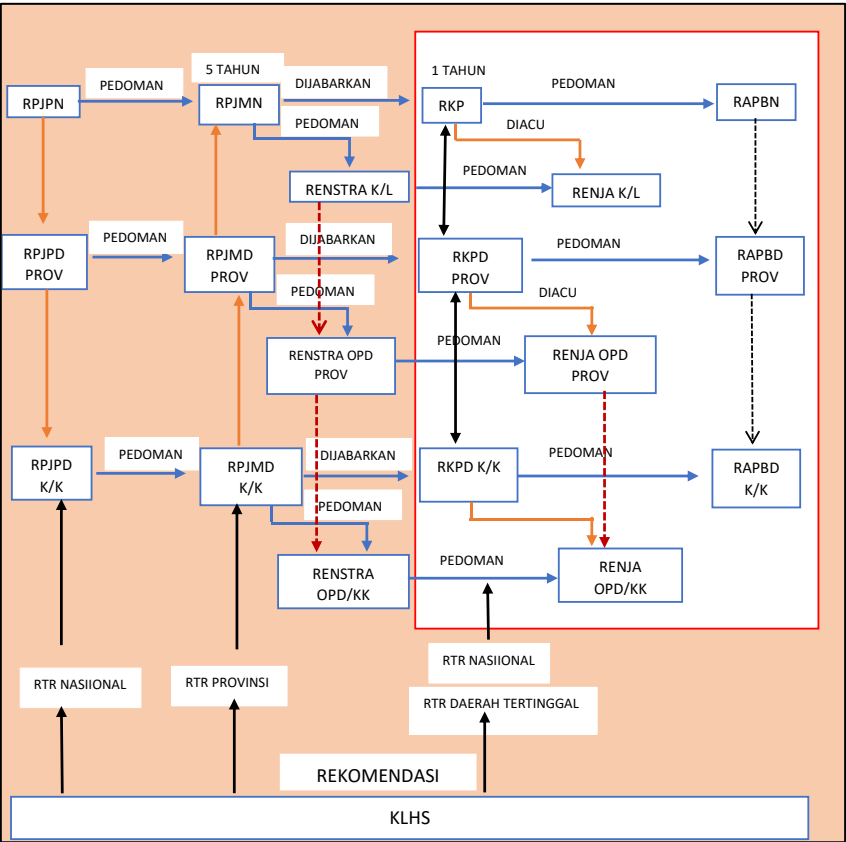
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah urusan yang bersifat konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Merujuk Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kedua urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut menjadi bahan dan pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Untuk menyelaraskan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dengan kebijakan pembangunan nasional dan pemerintah provinsi telah dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.





Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Disamping itu, telaahan juga telah dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras serta sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Lebih lanjut, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD ini selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, dan arah kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan arah kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD yang mencakup tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, telah diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD untuk dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok 2021-2026.



b. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok berpedoman pada RTRW Kabupaten Solok dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok tersebut, Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Solok meliputi:

- a. Pengembangan organisasi ruang yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten Solok;
- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang mengintegrasikan seluruh pusat kegiatan wilayah Kabupaten Solok dan memberikan layanan sebesar-besarnya bagi pemukiman yang ada pada wilayah Kabupaten Solok;
- c. Pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung sesuai kewenangan daerah;
- d. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, pariwisata dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. RPJMD Kabupaten Solok dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Solok

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. KLHS adalah



rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Rekomendasi yang tertuang dalam dokumen KLHS menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen RPJMD khususnya dalam menetapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

d. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 telah berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJM Nasional 2020-2024.

e. RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD, dimaknai perlunya keserasian dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah provinsi. Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi tentu lokusnya berada pada daerah kabupaten/kota, di samping itu pelaksanaan asas dekonsentrasi berada di tingkat provinsi sebagai konsekuensi dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dibarengi pula dengan kewenangan otonomi yang bersifat konkuren. Secara eksternalitas hubungan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 semakin kuat dan harus bersinergi antara pola perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi. Sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Solok dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasinya akan saling mendukung dan mengisi serta memperkuat hubungan kabupaten dengan provinsi yang pada gilirannya keberhasilan pembangunan Kabupaten Solok juga merupakan keberhasilan pembangunan provinsi.

f. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.

g. RPJMD Kabupaten Solok dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD



merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Solok yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD Kabupaten Solok lima tahun mendatang harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta RPJM Nasional 2020-2024. Dengan demikian prioritas dan sasaran pembangunan serta program prioritas RKPD Kabupaten Solok setiap tahunnya harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

h. RPJMD Kabupaten Solok dengan (Rencana Strategis) Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.

i. RPJMD Kabupaten Solok dengan (Rencana Strategis) Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota tetangga terkait dengan strategi dan arah kebijakan seperti Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud :

- 1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok pada Tahun 2021-2026;
- 2. Sebagai landasan penyusunan RKPD setiap tahun selama periode 2021-2026;
- 3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok periode Tahun 2021-2024; dan
- 5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok periode Tahun 2021-2026;



1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut :

- 1. Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2. Menjadi pedoman sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- 3. Mengemukakan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 4. Menjadi dasar dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 5. Memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- 6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- 7. Memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
- 8. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab.
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Memuat berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran



RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan bertujuan untuk memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan,dan sasaran serta tagert pencapaian tahun 2021-2026 .

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menguraikan peran RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.



Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB II

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

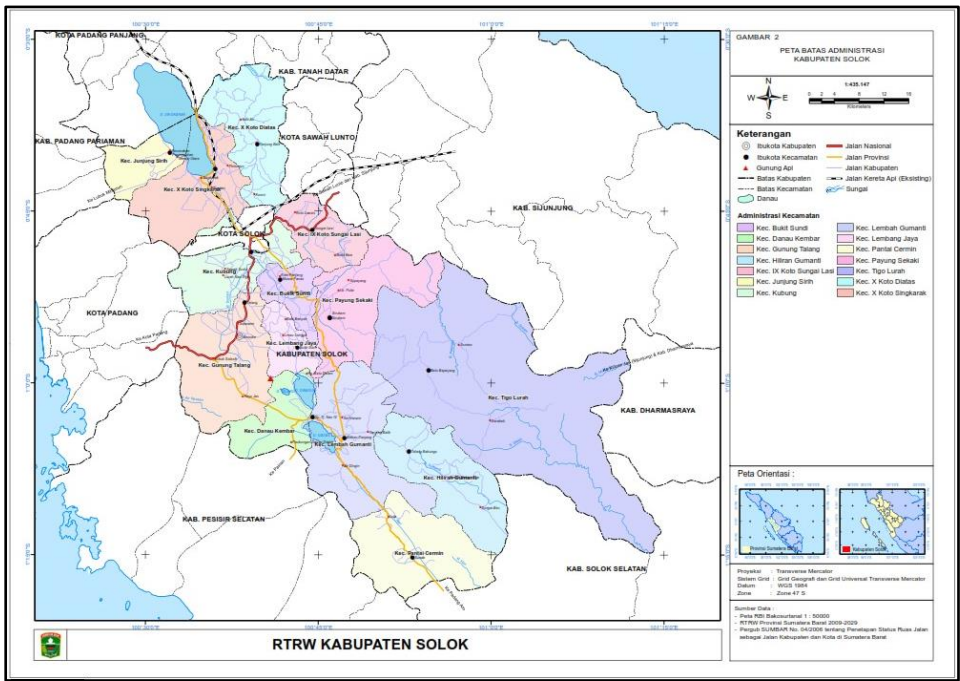
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Solok berada pada posisi 00°32'14" - 01°46'45" Lintang Selatan, 100°25'00" - 101°41'41" Bujur Timur dengan luas 373.800 Ha (3.738 Km²) dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang; dan Kabupaten Padang Pariaman;
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.

Wilayah administrasi Kabupaten Solok diperlihatkan pada Gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Solok

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa secara administratif Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan, 74 nagari dan 414 jorong. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan X Koto Diatas merupakan kecamatan yang memiliki nagari paling banyak, masing-masing 9 nagari, sedangkan kecamatan yang memiliki sedikit nagari adalah Kecamatan Pantai Cermin, Danau Kembar dan Junjung Sirih, masing-masing dua nagari. Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto Diatas, sebanyak 52 jorong dan kecamatan yang memiliki sedikit jorong adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Junjung Sirih, masing-masing 11 jorong. Informasi lengkap sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Solok Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari	Jorong	Luas Daerah (Ha)
1.	Pantai Cermin	Surian	2	28	36.600
2.	Lembah Gumanti	Alahan Panjang	4	39	43.900
3.	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	3	20	28.400
4.	Payung Sekaki	Kubang Nan Duo	3	11	39.200
5.	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	5	20	57.500
6.	Lembang Jaya	Bukik Sileh	6	43	9.400
7.	Danau Kembar	Sp. Tj. Nan IV	2	19	7.600
8.	Gunung Talang	Talang	8	40	38.500
9.	Bukit Sundi	Muaro Paneh	5	20	10.900
10.	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Lasi	9	28	17.100
11.	Kubung	Selayo	8	37	19.200
12.	X Koto Singkarak	Singkarak	8	46	25.113
13.	Junjung Sirih	Paninggahan	2	11	14.687
14.	X Koto Diatas	Tanjung Balik	9	52	25.700
Total			74	414	373.800

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2020

Dari Tabel 2.1 terbukti bahwa terdapat ketimpangan luas wilayah administratif kecamatan secara signifikan dimana kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tigo Lurah dengan luas 57.500 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Danau Kembar dengan luas 7.600 Ha. Dengan demikian terdapat ketimpangan luas wilayah secara signifikan yang mempunyai implikasi luas terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Solok.

2.1.2 Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Solok sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit mulai dari dataran tinggi di bagian selatan hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 329 m hingga 1.458 m diatas permukaan laut.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Solok ini dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian antara 100 – 500 m diatas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X Koto Singkarak, Junjung Sirih, IX Koto Sungai Lasi, Kubung, dan Bukit Sundi;
2. Ketinggian antara 500 – 1.000 m diatas permukaan laut, tersebar dibagian utara, yaitu Kecamatan Tigo Lurah, Gunung Talang, Kecamatan X Koto Diatas dan Payung Sekaki; dan
3. Ketinggian 1.000 – 1.500 m diatas permukaan laut, tersebar di Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, Lembang Jaya dan Danau Kembar.
4. Ketinggian lebih dari 1.500 m diatas permukaan laut, tersebar di Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Tigo Lurah.

Selanjutnya berdasarkan kemiringan lereng dan luasnya yang bersumber dari data Status Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011,



wilayah Kabupaten Solok dapat dibagi atas beberapa klasifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Klasifikasi Lereng di Kabupaten Solok

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Datar, Agak Landai	0 – 8	84.642,97	22,64
2.	Landai	8 – 15	90.005,35	24,08
3.	Agak Curam	15 – 25	118.176,04	31,61
4.	Curam	25 – 40	70.286,53	18,80
5.	Sangat Curam	> 40	10.689,11	2,86

Sumber: Hasil Analisis Peta, 2011

Berdasarkan kondisi kemiringan lereng pada Tabel 2.2, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0 – 8% (datar), terkonsentrasi di beberapa tempat yang mencakup sebagian Kecamatan X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Kubung, Bukit Sundi, Gunung Talang, Payung Sekaki, Danau Kembar, dan Lembah Gumanti;
2. Kondisi kemiringan 8 – 15% (datar s/d landai), yang terkonsentrasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok;
3. Kondisi kemiringan 15 – 25% (agak curam), yang menyebar secara merata di semua kecamatan;
4. Kondisi kemiringan 25 – 40% (curam), yang terkonsentrasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Solok khususnya pada daerah barat dan selatan;
5. Lahan dengan kemiringan >40% (sangat curam), tersebar secara merata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Solok dan lebih terkonsentrasi pada daerah bagian barat dan selatan.

2.1.3 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi skala 1 : 250.000 Lembar Solok (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1995) Strata Batuan Penyusun Kabupaten Solok adalah:

1. Endapan Permukaan (Qal dan Qf)
2. Endapan Gunung Api Muda (Qyu, Qatg)
3. Endapan Gunung Api Tua (Qtau, Qou, Qol)
4. Endapan Sedimen (Tmo, Pbl)
5. Batuan Metamorfosis (Pb, PCkq, PCks, Rts)
6. Batuan Terobosan (Kgr, gd,g)

Sedangkan struktur geologi yang berkembang adalah:

1. Struktur patahan aktif adalah struktur yang paling dominan dengan arah jalur struktur patahan ini berarah barat laut – tenggara. Mulai dari Danau Atas, Danau Bawah menerus ke arah barat laut ke Danau Singkarak. Struktur ini termasuk dalam jalur Patahan Besar Sumatera yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi konvergen antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Benua Asia. Pergerakan struktur patahan aktif menghasilkan juga dataran antar perbukitan (graben) di sekitar Solok.
2. Patahan-patahan yang terbentuk sebagai akibat pergerakan patahan utama Sumatera, dengan sebaran hampir merata khususnya di wilayah bagian



selatan mulai dari Danau Dibawah ke arah selatan meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti dan Tigo Lurah. Sedangkan wilayah dengan sebaran patahan kecil meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kubung, X Koto Singkarak, IX Koto Sungai Lasi dan Payung Sekaki.

3. Kekar/rekahan berkembang pada batuan dan untuk batuan malihan dan terobosan berkembang struktur kekar/rekahan berkembang di Kecamatan Tigo Lurah dan sekitarnya.

2.1.4 Hidrologi

Hidrologi merupakan kondisi tata air yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan (faktor internal) dan kondisi tutupan lahan (kondisi eksternal). Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Solok dapat dikatakan sangat baik seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.3. Dengan pola aliran pada umumnya adalah bersifat dendritik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber air baik yang berupa air permukaan maupun mata air dan air tanah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Air Permukaan

Keadaan air permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan materi penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air mengalir melalui sungai-sungai kecil dengan membentuk pola aliran yang berbentuk dendritik dan karena sifat hujan arografisnya yang tinggi memungkinkan kondisi sungai untuk mengalir sepanjang tahun. Sebagian besar wilayah Kabupaten Solok merupakan bagian dari dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir kearah timur yaitu DAS Agam Kuantan – Indragiri dan DAS Batang Hari.

Tabel 2.3
Sebaran Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
1.	Pantai Cermin	Batang Lolo	Lolo
		Batang Indarung	Surian / Lolo
		Batang Kulemban	Surian
		Batang Pisau Hilang	Lolo
		Batang Air Dalik	Lolo
		Batang Hari	Lolo
2.	Lembah Gumanti	Batang Gumanti	Alahan Panjang
		Batang Hari	Alahan Panjang
		Batang Sarasah	Sungai Nanam/ Salimpat
		Batang Air Dingin	Air Dingin
		Batang Galagah	Alahan Panjang
3.	Hiliran Gumanti	Batang Lolo	Sarik Alahan Tigo
		Batang Gumanti	Salimpat/ Talang Babungo/Sungai



No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
			Abu/ Sarik Alahan Tigo
		Batang Baliang Besar	Talang Babungo
		Batang Baliang Kecil	Talang Babungo
4.	Payung Sekaki	Batang Sikinjang	Sirukam
		Batang Sungai	Supayang
5.	Tigo Lurah	Batang Palangki	Muaro Sabik Aie/ Rangkiang Luluhi/ Batu Bajanjang
		Batang Sungai Gemuruh	Rangkiang Luluhi
		Batang Sibaso	Garabak
		Batang Momongan	Lubuak Tareh
		Batang Simanau	Rangkiang Luluhi
		Batang Kapujan	Rangkiang Luluhi/ Kapujan
6.	Lembang Jaya	Batang Lembang	Taluak Nan Tigo/ Limau Lunggo/ Batu Banyak/ Koto Anau/ Balai Bawah
		Batang Lurah Aie Abu	Balai Bawah
		Batang Sungai Badak	Koto Anau
7.	Danau Kembar	Batang Lembang	Kampung Batu Dalam
8.	Gunung Talang	Batang Cupak	Cupak/ Sungai Janiah
		Batang Paneh Gadang	Sungai Janiah /Cupak
		Batang Sumani	Batang Barus/ Koto Gadang Jawi-Jawi/ Koto Gaek/ Guguak/ Talang/ Cupak
		Batang Paneh Kaciak	Sungai Janiah/ Cupak
		Batang Sungai Dareh	Batang Barus
		Batang Air Baliang	Batang Barus
		Batang Sipatah	Jawi-jawi Guguak
9.	Bukit Sundi	Batang Halim	Dilam/ Parambahan/ Kinari
		Batang Lembang	Kinari/Muaro Paneh
		Batang Paneh Gadang	Muara Panas
		Batang Sungai Badak	Muara Panas
		Batang Sungai Dareh	Kinari
		Batang Andaleh	Parambahan/ Kinari
10.	IX Koto Sungai Lasi	Batang Sungai Lasi	Guguak Sarai/ Sungai Jambur/ Pianggu
		Batang Rimbo Batang	Guguak Sarai
		Batang Lawas	Sungai Durian/ Bukit Bais/ Siaro-aro
		Batang Laing	Guguak Sarai
		Batang Indudur	Indudur/ Pianggu



No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
		Batang Luak Sungkai	Koto Laweh/ Indudur
		Batang Sungai Sariak	Sungai Jambur
		Batang Sei. Jambak	Pianggu
		Batang Sei. Batuang	Pianggu
		Batang Sigaranggan	Taruang-taruang
		Batang Koto Tuo	Taruang-taruang/ Pianggu
		Batang Sei. Pisang	Siaro-aro
		Batang Swi Tengah	Bukit Bais
		Batang Sikabu	Bukit Bais
		Batang Sonsang	Sungai Durian
11.	Kubung	Batang Gantuang	Gantung Ciri
		Batang Sungai Sarik	Gantung Ciri
		Batang Gawan Kaciak	Koto Hilalang
		Batang Gawan Besar	Koto Hilalang/ Selayo
		Batang Cupak	Koto Baru
		Batang Sumani	Koto Baru/ Selayo/ Tanjung Bingkuang
		Batang Lembang	Koto Baru
		Batang Manungguang	Gantung Ciri/ Selayo
		Batang Anak Air Gantung	Gantung Ciri/ Selayo
		Batang Sungai Buluh	Koto Baru
		Batang Simo	Panyakalan/ Gaung/ Saok Laweh
12.	X Koto Singkarak	Batang Imang	Koto Sani
		Batang Sumani	Sumani
		Batang Saniang Bakar	Saniang Baka
		Batang Air Raso	Saniang Baka
		Batang Rimbo Panjang	Sumani
13.	Junjung Sirih	Batang Paninggahan	Paninggahan
		Batang Ulu Air	Paninggahan
		Batang Ondoh	Paninggahan
		Batang Muara Pingai	Muara Pingai
		Batang Taraso	Muara Pingai
14.	X Koto Diatas	Batang Katialo	Katialo/Sulit Air
		Batang Aia Tabek	Tanjung Balit



No	Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
		Batang Kajai	Sibarambang
		Batang Balansiah	Paninjauan
		Batang Batu Laweh	Paninjauan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, 2021

Selain sungai, Kabupaten Solok juga mempunyai 5 (lima) Danau dengan data lengkapnya sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Danau di Kabupaten Solok

No	Nama Danau	Kecamatan	Luas (Km²)
1.	Danau Diatas	Lembah Gumanti, Danau Kembar	17,2
2.	Danau Dibawah	Danau Kembar	16,9
3.	Danau Talang	Danau Kembar	1,3
4.	Danau Singkarak	X Koto Singkarak, Junjung Sirih	129,7
5.	Danau Tuo	X Koto Singkarak	0,084

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2020 dan DPUPR, 2021

Dari Tabel 2.4, dapat terlihat danau yang terluas yaitu Danau Singkarak yang berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dengan luas 129,7 km².

2. Mata Air

Kondisi alam di Kabupaten Solok banyak dijumpai mata air yang berasal dari lembah atau kaki perbukitan. Hal ini disebabkan adanya lapisan batuan yang kedap air dibawahnya yang mengalami peregangan tidak terus ke dalam melainkan ke arah lateral dan muncul di kaki tebing (lembah) atau kaki perbukitan sebagai mata air. Adanya mata air dapat dimanfaatkan menjadi cadangan sumber air bersih.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber mata air di Kabupaten Solok belum optimal. Pemanfaatan sumber mata air yang ada selama ini, sebagian besar dikelola/dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok, seperti di Nagari Selayo dan Nagari Gaung Kecamatan Kubung. PDAM juga memanfaatkan sumber mata air di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, Nagari Kacang dan Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya.

3. Air Tanah

Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh faktor hujan, luas dan kondisi daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah bebas yang cukup besar dapat dijumpai di sekitar Kabupaten Solok yang berkisar antara 1 – 3 meter dibawah permukaan air tanah.

Sedangkan di wilayah lainnya relatif berkedudukan dalam, yaitu berkisar antara 5 – 15 meter dibawah permukaan air tanah, kecuali sekitar daerah lembah yang agak lebar dengan air tanahnya yang dangkal.



2.1.5 **Klimatologi**

Secara umum daerah Kabupaten Solok beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 12^oC hingga 30^oC. Ketinggian daerah berkisar antara 329 sampai diatas 1.500 meter di atas permukaan laut. Dengan curah hujan rata-rata 178.3 mm/bulan dan hampir merata di sepanjang tahun dengan hari hujan berkisar rata-rata 14 hari hujan perbulan.

Daerah bagian utara mempunyai curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan bagian tengah dan selatan. Bulan Oktober merupakan bulan yang paling rendah curah hujannya sementara bulan November hingga Mei cukup banyak hari hujannya. Curah hujan di Kabupaten Solok berada pada kisaran rata-rata Kabupaten 2.139,6mm/tahun, dengan distribusi yang merata di beberapa daerah sepanjang tahun, misalnya di Kecamatan Lembah Gumanti, Gunung Talang, Lembang Jaya dan Danau Kembar. Sedangkan di kecamatan lainnya curah hujan terkumpul pada bulan-bulan basah antara bulan November hingga April. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air untuk sektor pertanian pada bulan-bulan kering harus diupayakan melalui sistem irigasi pertanian terpadu yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah bersama masyarakat setempat.

2.1.6 **Penggunaan Lahan**

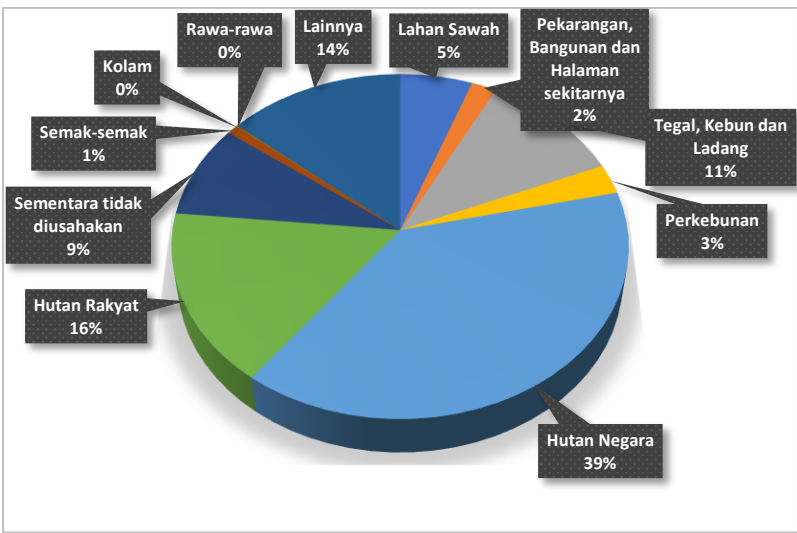
Berdasarkan data BPS Kabupaten Solok tahun 2021, penggunaan lahan di Kabupaten Solok terdiri dari sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Solok Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) Tahun 2020
1	Lahan Sawah	20.959
2	Pekarangan, Bangunan dan Halaman sekitarnya	7.256
3	Tegal, Kebun dan Ladang	41.439
4	Perkebunan	10.373
5	Hutan Negara	145.320
6	Hutan Rakyat	60.893
7	Sementara tidak diusahakan	32.558
8	Semak-semak	3.242
9	Rawa-rawa	4
10	Kolam	334
11	Lainnya	51.421
Total		373.799

Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2021





Sumber : BPS Kabupaten Solok Tahun 2021

Grafik 2.1
Komposisi Penggunaan Lahan (Ha) Tahun 2020

Berdasarkan Grafik 2.1, penggunaan lahan yang paling dominan di Kabupaten Solok adalah hutan negara seluas 39 persen dan hutan rakyat seluas 16 persen. Sementara penggunaan lahan yang paling kecil adalah rawa-rawa seluas 4 Ha. Dari data tersebut luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebesar 61 persen.

Dalam rangka meningkatkan produksi komoditi unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Solok, pembangunan pertanian berskala ekonomi harus dilakukan melalui perencanaan wilayah secara komprehensi dan terpadu. Pada Tabel 2.6 dapat dilihat jenis tanah per kecamatan dan komoditi yang cocok untuk dibudidayakan.

Tabel 2.6
Jenis Tanah dan Komoditi Yang Cocok di Kembangkan di Kabupaten Solok

No	Jenis Tanah	Kecamatan	Jenis Komoditi
1	Andosol	X Koto Diatas, X Koto Singkarak, Kubung, Bukit Sundi, Payung Sekaki, Lembang Jaya, Gunung Talang, Danau Kembar, Lembah Gumanti, Pantai Cermin	Padi, Manggis, Durian, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa, Cengkeh, Pisang, Alpukat, Sereh Wangi, Ubi Jalar, Cabai, Bawang, Tanaman Hias, Tanaman Sayur, Markisa, Kelapa, Cengkeh, Teh
2	Gleisol	Junjung Sirih, X Koto Singkarak, Kubung, Bukit Sundi, Lembah Gumanti	Padi, Durian, Bawang, Tanaman Sayur, Markisa, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Sereh Wangi
3	Kambisol	X Koto Diatas, Junjung Sirih, X Koto Singkarak, Kubung, IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi, Payung Sekaki, Gunung Talang, Danau Kembar, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin, Tigo Lurah	Padi, Pisang, Manggis, Durian, Alpukat, Cabai, Bawang, Tanaman Sayur, Markisa, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa, Cengkeh, The, Sereh Wangi, Tebu
4	Mediteran	X Koto Diatas, Junjung Sirih, X Koto Singkarak	Durian, Kopi, Kelapa, Cengkeh



No	Jenis Tanah	Kecamatan	Jenis Komoditi
5	Podsolik	X Koto Diatas, Junjung Sirih, X Koto Singkarak, Kubung, IX Sungai Lasi, Payung Sekaki, Tigo Lurah	Pisang, Manggis, Durian, Alpukat, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa, Cengkeh

Sumber : RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2021 dan SK Bupati Solok tentang Penetapan Kawasan Pertanian di Kab. Solok Tahun 2020

Pada Tabel 2.6 sebaran jenis tanah yang paling banyak di Kabupaten Solok adalah jenis tanah kambisol yang tersebar di 12 Kecamatan dengan jenis budidaya Padi, Pisang, Manggis, Durian, Alpukat, Cabai, Bawang, Tanaman Sayur, Markisa, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa, Cengkeh, Teh, Sereh Wangi, Tebu.

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Secara geografis dan administratif Kabupaten Solok memiliki potensi pengembangan, hal ini didasarkan kepada masih banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran serta wisata budaya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012 – 2031, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Solok dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi:

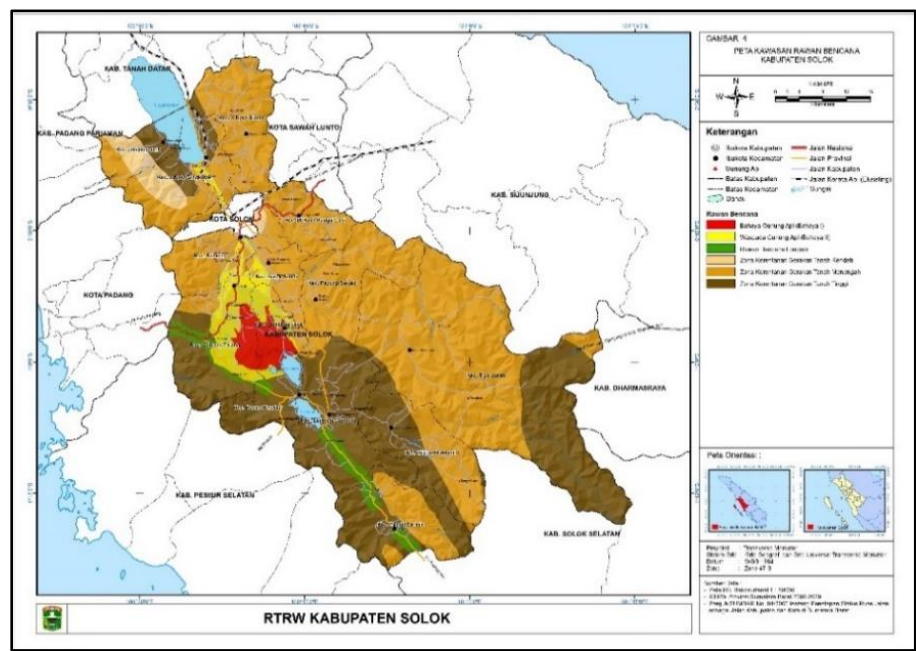
- Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - Kawasan wisata Danau Singkarak;
 - Kawasan wisata Danau Kembar (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Talang);
 - Kawasan perkotaan Arosuka;
 - Kawasan agropolitan di Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Kawasan perkotaan Alahan Panjang di Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Kawasan perkotaan Sumani di Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Kawasan perkotaan Muara Panas di Kecamatan Bukit Sundi.
- Kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 - Kawasan Masjid Tuo Kayu Jao dan sekitarnya di Kecamatan Gunung Talang;
 - Kawasan Masjid Raya Tanjung Bingkung dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
 - Kawasan Makam Datuk Perpatih Nan Sabatang dan sekitarnya di Kecamatan Kubung;
 - Kawasan Balairung Sari dan sekitarnya di Kecamatan X Koto Diatas;
 - Kawasan Rumah Gadang Sulit Air dan sekitarnya di Kecamatan X Koto Diatas;
 - Kawasan Makam Syech Muchsin dan sekitarnya di Kecamatan Payung Sekaki;
 - Kawasan Makam Syech Imam Marajo dan sekitarnya di Kecamatan Kubung; dan
 - Kawasan Sentra Pendidikan Koto Baru dan sekitarnya di Kecamatan Kubung.



3. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria :
- a. Diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
 - b. Diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem persenjataan.

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

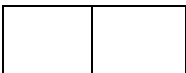
Wilayah Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Salah satu penyebabnya adalah karena kedudukan Kabupaten Solok secara tektonik yang termasuk dalam lempeng Benua Asia yang ditunjang lempeng Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera. Penunjangan kedua lempeng tersebut menghasilkan beberapa patahan aktif didaratan Sumatera berupa Patahan Besar Sumatera (Patahan Semangko).



Sumber: RTRW Kabupaten Solok Tahun 2012-2031

Gambar 2.2
Peta Rawan Bencana Kabupaten Solok

Patahan aktif Semangko tersebut memanjang pada ruas Kecamatan Pantai Cermin, Danau Datas, Danau Dibawah ke utara sampai Danau Singkarak dan membentuk graben Kota Solok yang merupakan bagian dari patahan aktif sepanjang Sumatera. Jalur patahan – patahan aktif di Kabupaten Solok melintas mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Datas – Danau Dibawah, Lembang Jaya, Bukit Sundi, X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak. Akibat pergerakan patahan aktif utama timbul patahan aktif ikutan lain yang berdimensi lebih kecil sejajar dengan jalur patahan utama (Sumatera) yang tersebar di Kecamatan Gunung Talang dan Kubung. Patahan ini juga menyebar sedikit sampai ke Kecamatan Hiliran Gumanti, Tigo Lurah, Payung Sekaki terus ke utara.



Jalur gempa utama di Kabupaten Solok berada pada sepanjang jalur patahan Sumatera yang melintasi Kabupaten Solok. Bila terjadi pelepasan energi di Samudera Hindia dengan kekuatan > 7 SR, maka akan sangat berpotensi menghasilkan gempa sepanjang patahan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian serta observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kabupaten Solok terdiri dari:

1. Bencana Alam Gempa Bumi Patahan Aktif

Kabupaten Solok didominasi oleh perbukitan dan pegunungan serta dijumpai Gunung Api Talang yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Potensi bahaya gempa di bagian tengah Kabupaten Solok sangat besar, hal ini mengingat daerah bagian tengah khususnya jalur patahan aktif di Kabupaten Solok yang melintasi mulai dari Kecamatan Pantai Cermin terus ke utara melewati Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Ditas – Danau Dibawah Kecamatan Lembang Jaya, Bukit Sundi, X Koto Singkarak terus ke Danau Singkarak sangat rentan terjadinya pergerakan.

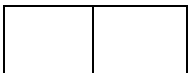
Gempa Bumi yang besar terjadi pada tahun 2007 yang berpusat di Singkarak dengan kekuatan 5,8 Skala Richter dan menimbulkan korban jiwa dan harta yang cukup banyak.

2. Bencana Alam Gunung Api Talang

Kabupaten Solok mempunyai satu gunung api yaitu Gunung Talang, yang sampai sekarang masih aktif. Potensi yang paling besar terhadap bencana letusan Gunung Api Talang terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Talang, Bukit Sundi dan Lembang Jaya. Dimana keberadaan wilayah tersebut berada pada lereng utara Gunung Talang. Letusan yang terjadi sebelumnya, baik yang terjadi pada Pleistosen maupun Holosen telah mengeluarkan lahar dan material lainnya (Qyu, Qatg, Qou) yang cukup luas di Kecamatan Gunung Talang dan Lembang Jaya.

Gunung api Talang merupakan gunung api aktif bertipe strato atau berlapis, memiliki lapangan fumarola yaitu Solfatara Gabuo Gadang Bawah dan Gabuo Gadang Ateh. Gunung api ini kembar dengan pasar Arbaa yang telah padam. Di puncak tidak terdapat kawah. Tempat terjadinya letusan dan lapangan fumarola merupakan sebuah lembah sepanjang 300 m dengan lebar 30 sampai 90 meter. Terdapat dua buah danau yang mungkin dulunya kawah yaitu Danau Talang dan Danau Kecil. Mata air panas terdapat di kaki Gunung Talang, di antara Bt. Kili, Batu Bajanjang, Buah Batung dan Sapan.

Letusan Gunung Talang pada tahun 2005 mengakibatkan rekahan sepanjang 500 meter di selatan puncak Gunung Talang dan paling tidak ada tiga lobang letusan dalam segaris. Letusan pada tahun itu dipicu oleh adanya peningkatan aktifitas tumbukan lempeng di Selatan Sumatera menyebabkan gempa tektonik (Mentawai) pada 10 April 2005, dengan magnitude 6,8. Selanjutnya terjadi peningkatan gejala kegempaan di Gunung Talang berupa gempa tektonik lokal dan gempa vulkanik. Beberapa sejarah kegiatan Gunung Talang dapat dilihat pada Tabel 2.7.



Tabel 2.7
Sejarah Kegiatan Gunung Talang di Kabupaten Solok

Tahun	Kegiatan
1833	Letusan dengan tiang asap tebal dan batu membara dari kawah parasit.
1843	Letusan serupa dengan letusan Tahun 1833.
1845	Letusan pada tiap asap raksasa berwarna hitam dari kawah parasit.
1883	Terbentuknya sistem rekahan NE – SW, rekahan di lereng Selatan sangat aktif.
1963	Peningkatan kegiatan.
1967	Peningkatan kegiatan tembusan fumarola pada satu retakan sepanjang 800 m, lebar 10 – 50 m, dengan 7 lubang utama tanpa letusan.
1980-1981	Peningkatan kegiatan, 65 kali gempa tektonik, 10 kali gempa vulkanik disertai suara gemuruh dan asap putih tebal dari kepundan Panjang.
2000	Peningkatan kegiatan.
2003	Peningkatan kegiatan diikuti dengan letusan preatik di Kawah Gabuo Ateh (Atas).
2005	Letusan abu.
2007	Letusan Central Vent Eruption dan Explosive Eruption

Sumber: Pengamatan Gunung Api Talang (PGA Talang)

Setelah tahun 2007, kegiatan Gunung Talang bersifat fluktuatif tetapi tidak ada status yang membahayakan masih dalam kategori siaga.

3. Gerakan Tanah (Longsor)

Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi di Kabupaten Solok umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geologi, morfologi, curah hujan, bahaya gunung api dan kegempaan. Hasil pengamatan di lapangan, daerah yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit dan serpih Formasi Tuhur (PCks) dan batuan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).

Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan, berdimensi panjang antara 10 - 15 m, lebar antara 5 - 7 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40 - 50 persen. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu. Menurut informasi penduduk gerakan tanah berupa galodo pernah terjadi di desa Anau Kadok, Gunung Talang pada tahun 1926 dan tahun 1987, mengakibatkan rusaknya lahan pertanian di daerah tersebut. Galodo termasuk salah satu tipe gerakan tanah yang dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di Kabupaten Solok dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan



utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan dan kegempaan.

4. Bencana Alam Erosi

Bencana alam erosi dikelompokkan menjadi (tiga) tingkatan erosi yaitu:

- a. Tinggi; Erosi tertinggi terjadi di wilayah yang tersusun oleh batuan hasil letusan gunung api muda, berupa pasir – pasir krikilan seperti yang terdapat di sekitar wilayah Gunung Api Talang dan Aripan Paninjauan. Di daerah ini erosi pasir lepas sangat aktif bahkan pada waktu musim hujan material pasir dapat terbawa oleh air permukaan;
- b. Sedang; Erosi sedang umumnya terjadi pada daerah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan tufa dan breksi berupa lempung – lempung lanauan.
- c. Rendah; Erosi sedang umumnya terjadi pada daerah yang dibentuk oleh tanah hasil pelapukan lava, breksi dan pada endapan aluvium serta kipas aluvium. Pada wilayah ini erosi jarang terjadi karena tingkat pelapukannya cukup rendah dengan vegetasi lebat.

5. Banjir

Daerah yang paling rawan terhadap banjir di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dimana hal ini dipicu karena luapan air dari Sungai Batang Lembang, dan Sungai Batang Sungai Lasi. Penyebab utama banjir di Kabupaten Solok disebabkan karena tingginya curah hujan dan terjadinya pendangkalan dan penyempitan sungai.

2.1.9 Demografi

Aspek kependudukan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Penduduk dalam proses pembangunan merupakan objek dan subjek pembangunan nantinya. Penduduk diharapkan terlibat mulai dari proses perencanaan, implementasi rencana serta menikmati hasil dari implementasi tersebut. Penyebaran penduduk Kabupaten Solok tidak merata disetiap kecamatan. Selengkapny jumlah penduduk Kabupaten Solok menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Per Kecamatan pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Pantai Cermin	11.176	11.170	22.346
2.	Lembah Gumanti	30.667	30.047	60.714
3.	Hiliran Gumanti	9.209	8.949	18.158
4.	Payung Sekaki	4.530	4.523	9.053
5.	Tigo Lurah	5.347	5.334	10.681
6.	Lembang Jaya	14.995	14.725	29.720
7.	Danau Kembar	11.204	10.856	22.060
8.	Gunung Talang	26.613	26.815	53.428
9.	Bukit Sundi	13.022	13.440	26.462
10.	IX Koto Sei. Lasi	5.439	5.301	10.740



No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
11.	Kubung	30.805	30.460	61.265
12.	X Koto Diatas	9.371	9.538	18.909
13.	X Koto Singkarak	16.848	17.128	33.976
14.	Junjung Sirih	6.415	6.400	12.815
	Jumlah	195.641	194.686	390.327

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk Kabupaten Solok tahun 2020 berjumlah 390.327 jiwa meningkat sebesar 2.459 jiwa dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Solok tahun 2019 sebanyak 387.868 jiwa. Kecamatan Kubung memiliki proporsi jumlah penduduk yang paling besar yakni sebanyak 61.265 jiwa disusul Kecamatan Lembah Gumanti dengan proporsi sebesar 60.714 jiwa. Kecamatan Payung Sekaki menjadi kecamatan dengan proporsi jumlah penduduk paling kecil yakni 9.053 jiwa.

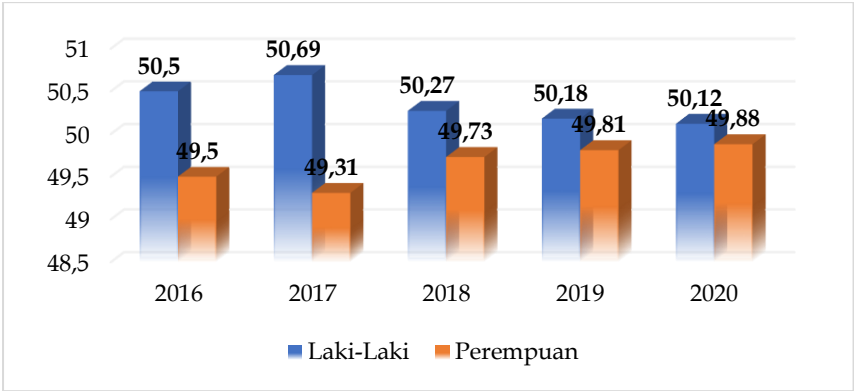
Ditinjau dari segi gender, penduduk Kabupaten Solok memiliki rasio yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	2016	374.676	189.217	50,50	185.459	49,50
2	2017	377.292	191.256	50,69	186.036	49,31
3	2018	384.091	193.310	50,27	190.781	49,73
4	2019	387.868	194.661	50,18	193.207	49,81
5	2020	390.327	195.641	50,12	194.686	49,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Dilihat dari jenis kelamin, penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2020 terdiri dari 195.641 laki-laki dan 194.686 perempuan. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun terakhir relatif sama, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sekitar 50 persen dan perempuan sekitar 49%.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020



Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Solok tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Hal ini disebabkan karena penyebaran penduduk yang tidak merata. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Solok Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk		Kepadatan Jiwa/Km
			Jumlah	%	
1	Pantai Cermin	366,00	22.346	5,72	61
2	Lembah Gumanti	459,72	60.714	15,55	132
3	Hiliran Gumanti	263,28	18.158	4,65	69
4	Payung Sekaki	364,50	9.053	2,32	25
5	Tigo Lurah	602,50	10.681	2,74	18
6	Lembang Jaya	99,90	29.720	7,61	297
7	Danau Kembar	70,10	22.060	5,65	315
8	Gunung Talang	385,00	53.428	13,69	139
9	Bukit Sundi	109,00	26.462	6,78	243
10	IX Koto Sei. Lasi	171,00	10.740	2,75	63
11	Kubung	192,00	61.265	15,70	319
12	X Koto Diatas	257,00	18.909	4,84	74
13	X Koto Singkarak	295,50	33.976	8,70	115
14	Junjung Sirih	102,50	12.815	3,28	125
Jumlah		3.738	390.327	100,00	104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2021

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Solok lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk sebesar 104 jiwa/km², sedangkan tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa/km², hanya mengalami kenaikan sebesar 4 jiwa/km². Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Solok relatif tidak merata. Kecamatan Kubung adalah kecamatan yang paling padat diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Solok yaitu sebesar 319 jiwa/km² dan Kecamatan Payung sekaki merupakan kecamatan yang paling renggang penduduknya yaitu sebesar 2,32 persen.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok pun mengalami peningkatan. Lebih lengkap laju pertumbuhan penduduk pertahun dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020

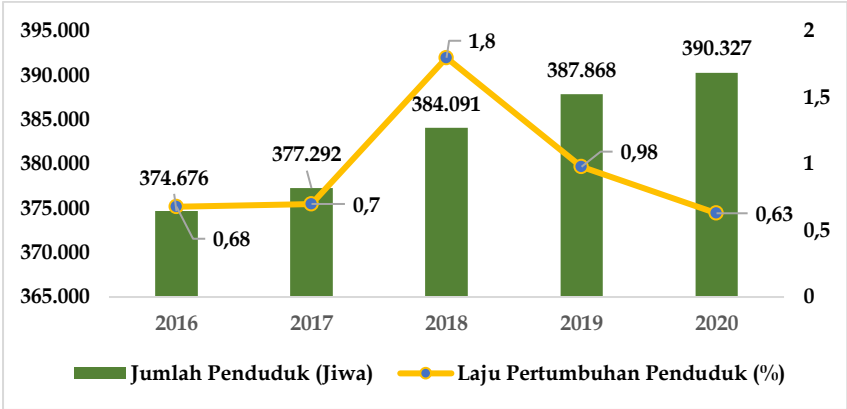
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,68	0,70	1,80	0,98	0,63



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	374.676	377.292	384.091	387.868	390.327

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

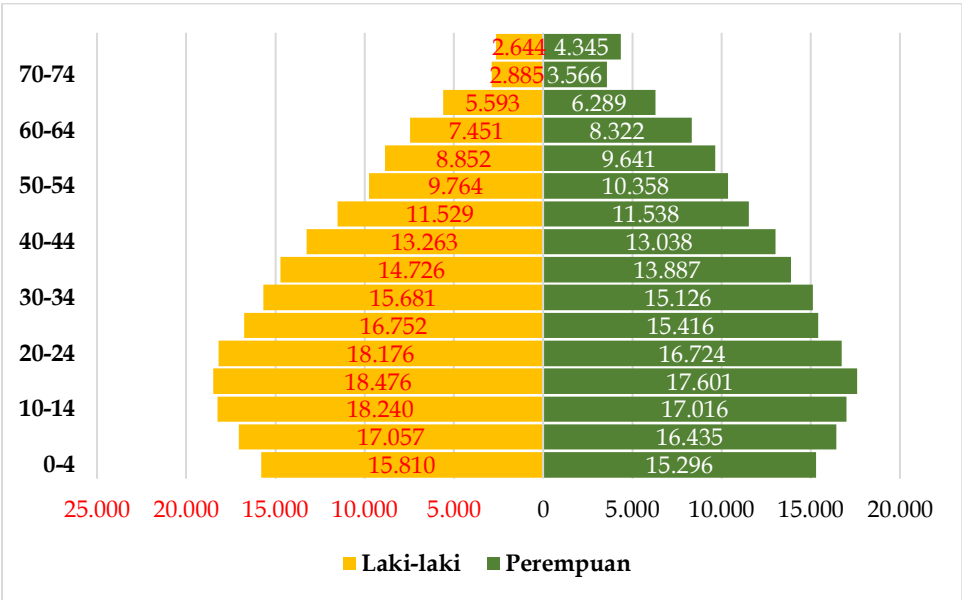
Jika melihat data jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk 5 (lima) tahun terakhir sebesar 4,18. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertahun paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,80 dan terendah tahun 2020 sebesar 0,63.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

Secara komposisi, jumlah penduduk Kabupaten Solok hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk yang mendominasi di Kabupaten Solok berada pada rentang usia 15-19 Tahun, secara lebih rinci dapat dilihat pada Grafik 2.4.



Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Solok Tahun 2020

Berdasarkan Grafik 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-60 tahun) Kabupaten Solok adalah sebesar 76,44 persen dari total penduduk Kabupaten Solok. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok memiliki potensi atau bonus demografi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Solok.



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi fokus pada perkembangan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, gini rasio, dan tingkat pengangguran terbuka.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional diukur melalui 17 (tujuh belas) lapangan usaha struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 5,04 persen lebih lanjut di tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,12 persen akibat dari pandemi Covid-19.

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Solok tahun 2016-2020 menurut lapangan usaha, terlihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industri	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,97	4,34	2,60	2,70	0,86
2	Pertambangan dan Penggalian	4,82	2,88	2,90	3,09	-3,15
3	Industri Pengolahan	6,77	-2,50	6,20	-2,12	-3,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,50	4,25	2,49	2,00	-6,01
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	-1,82
6	Konstruksi	8,38	8,72	9,10	9,59	-3,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	10,43	10,73	11,01	-0,78
8	Transportasi dan Pergudangan	12,15	12,23	12,19	12,17	-11,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,81	0,84	0,91	-9,87
10	Informasi dan Komunikasi	5,40	5,60	5,88	6,41	7,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	1,75	1,70	1,67	0,26
12	Real Estate	0,83	0,82	0,83	0,85	0,01
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	-4,55
14	Admnistrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	5,72	5,77	6,12	0,60
15	Jasa Pendidikan	3,14	3,27	3,41	3,66	4,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,25	1,29	1,39	7,22
17	Jasa lainnya	0,94	0,97	1,00	1,08	-11,66
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,31	5,32	5,32	5,04	-1,12

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan usaha PDRB mengalami kontraksi kecuali terdapat 7 (tujuh) sektor lapangan usaha yang tetap tumbuh diantaranya sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *Real estate*, Administrasi Pemerintahan,



Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib, Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Bahkan sektor informasi dan komunikasi, jasa Pendidikan dan jasa Kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Dibanding Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kabupaten (%)	Prov. Sumbar (%)	Nasional (%)
1	2014	5.79	5.88	5.02
2	2015	5.44	5.53	4.79
3	2016	5.31	5.27	5.02
4	2017	5.32	5.29	5.07
5	2018	5.32	5.14	5.17
6	2019	5.04	5.05	5.02
7	2020	-1.12	-1.60	-2.07

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Peningkatan regional diukur melalui 17 (tujuh belas) lapangan usaha struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, namun di tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 5,04 persen lebih lanjut di tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,12 persen akibat dari pandemi Covid-19. Namun apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi, Kabupaten Solok masih berada diatas Nasional dan Provinsi. Contohnya pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok sebesar 5,07 persen sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat 5,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02 persen.

Selanjutnya struktur PDRB Kabupaten Solok tahun 2016-2020 dijelaskan pada Tabel 2.14. Dari Tabel 2.14 terlihat bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Solok. Namun demikian kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 kontribusi sektor ini mencapai 38,18 persen dan turun menjadi 34,76 persen pada tahun 2020. Pengurangan luas lahan merupakan salah satu penyebab utama menurunnya kontribusi sektor ini.

Tabel 2.14
Komposisi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Solok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha/Industri	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,18	37,54	36,29	34,81	34,76
2	Pertambangan dan Penggalian	5,72	5,60	5,55	5,48	5,37
3	Industri Pengolahan	5,54	5,12	5,25	4,69	4,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



No	Lapangan Usaha/Industri	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
6	Konstruksi	8,38	8,72	9,10	9,59	9,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	10,43	10,73	11,01	10,90
8	Transportasi dan Pergudangan	12,15	12,23	12,18	12,17	11,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,81	0,84	0,91	0,84
10	Informasi dan Komunikasi	5,40	5,60	5,88	6,41	6,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	1,75	1,70	1,67	1,72
12	Real Estate	0,83	0,82	0,83	0,85	0,86
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07
14	Admnistrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	5,72	5,77	6,12	6,62
15	Jasa Pendidikan	3,14	3,27	3,41	3,66	3,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,25	1,29	1,39	1,54
17	Jasa lainnya	0,94	0,97	1,01	1,08	0,98
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Sektor lainnya yang juga berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Solok adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Secara rata-rata kontribusi sektor ini selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 11,95 persen. Pada sisi lain sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor dengan kontribusi yang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Solok. Kontribusi masing-masing sektor ini secara rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir hanya 0,03 persen dan 0,05 persen. Kontribusi kedua sektor ini relatif tetap atau tidak mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir.



Tabel 2.15
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,234,299.0	4,219,994.2	3,374,679.2	4,423,476.9	3,461,725.5	4,591,976.9	3,553,655.8	4,726,667.3	3,584,341.8	4,696,682.2
2	Pertambangan dan Penggalan	474,556.4	632,284.1	488,200.8	659,918.2	502,358.8	702,895.9	517,879.7	743,538.7	501,584.2	725,175.8
3	Industri Pengolahan	505,920.9	612,614.3	493,252.0	603,564.9	523,738.7	663,911.3	512,532.0	637,226.9	497,166.1	643,106.8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,226.5	3,537.5	2,321.2	3,743.5	2,379.0	3,941.1	2,426.5	4,397.0	2,280.7	4,161.0
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,905.2	5,944.4	5,174.7	6,361.5	5,444.2	6,823.8	5,651.3	7,327.8	5,548.5	7,207.2
6	Konstruksi	694,530.9	926,765.1	759,216.5	1,027,515.3	825,497.3	1,151,991.9	898,914.4	1,301,769.5	867,736.2	1,307,539.2
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	890,161.4	1,134,991.1	959,314.3	1,229,029.6	1,036,656.6	1,358,042.9	1,117,550.4	1,495,323.0	1,108,826.3	1,473,341.0
8	Transportasi dan Pergudangan	954,920.2	1,342,681.2	1,001,906.2	1,441,205.4	1,046,784.1	1,541,770.3	1,113,239.0	1,652,074.4	983,960.8	1,489,428.5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62,432.6	85,546.6	68,874.9	95,786.4	74,918.7	106,611.6	82,150.2	123,629.9	74,040.0	1,113,668.8
10	Informasi dan Komunikasi	561,976.5	597,004.9	612,033.6	659,678.3	668,891.8	743,937.1	735,454.5	869,885.1	793,243.2	932,760.5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	150,358.8	194,462.6	157,494.4	206,386.2	159,525.4	215,530.1	163,873.0	227,235.0	164,307.2	232,251.0
12	Real Estate	68,854.6	91,568.4	72,798.4	97,045.5	76,991.6	105,365.5	81,594.0	115,440.0	81,605.4	116,835.9



No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
13	Jasa Perusahaan	5,711.8	7,928.8	6,026.4	8,484.2	6,367.1	9,303.1	6,735.5	10,187.4	6,429.3	9,902.3
14	Admnistrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	465,252.6	610,635.5	490,987.1	674,617.5	526,356.6	730,202.1	555,200.4	831,307.9	551,842.9	895,090.9
15	Jasa Pendidikan	252,844.2	347,060.6	276,554.8	385,140.4	300,634.0	431,026.3	328,663.0	497,134.0	343,453.9	523,513.4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105,734.0	136,300.4	112,849.0	147,658.4	122,016.2	163,356.0	132,515.8	188,993.3	142,081.5	207,639.1
17	Jasa lainnya	76,969.2	104,169.7	83,190.8	114,255.7	89,939.3	127,172.9	97,107.0	146,232.0	85,788.1	132,820.4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8,511,654.8	11,053,489.4	8,964,874.3	11,783,867.9	9,430,224.9	12,653,858.8	9,905,142.5	13,578,369.2	9,794,236.1	14,511,124.0

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021



Tabel 2.15 menunjukkan Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Kabupaten Solok tahun 2016-2020. Nilai PDRB Kabupaten Solok atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 adalah 11,05 triliun rupiah dan naik menjadi 14,51 triliun rupiah di tahun 2020. Sementara itu PDRB ADHK pada tahun 2016 adalah sebesar 8,51 triliun rupiah dan naik menjadi 9,79 triliun rupiah pada tahun 2020. Namun demikian nilai PDRB ADHK pada tahun 2020 lebih kecil dibanding PDRB ADHK tahun 2019 yang mencapai 9,91 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya sebagian besar PDRB lapangan usaha akibat pandemi Covid-19.

Berikut akan diuraikan secara lebih rinci nilai PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Solok berdasarkan lapangan usaha :

1. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 4,6 triliun rupiah atau sebesar 34,76 persen. Kontribusi sektor ini cenderung menurun tiap tahunnya, 38,18 persen pada tahun 2016, 37,54 persen pada tahun 2017, 36,29 persen pada tahun 2018 dan 34,81 persen pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan adanya perkembangan dari sektor-sektor lainnya dalam mendukung perekonomian Kabupaten Solok, serta banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan permukiman. Serta karena kebutuhan akan pupuk bagi petani yang belum terpenuhi pasokannya.
2. Pertambangan dan Penggalian
Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 632,3 milyar rupiah atau sekitar 5,72 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 725,2 milyar rupiah atau sekitar 5,37 persen pada tahun 2020. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kategori ini tumbuh 4,82 persen, kemudian meningkat 3,09 persen di tahun 2019 dan turun 3,15 pada tahun 2020.
3. Industri Pengolahan
Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 612,61 milyar rupiah tahun 2016 menjadi 643,10 milyar rupiah tahun 2020. Namun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Solok terus menurun dalam lima tahun terakhir, yaitu 5,54 persen di Tahun 2016, dan terakhir 4,76 persen pada tahun 2020. Begitu juga dengan pertumbuhannya yang berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 6,77 persen di tahun 2016 menurun menjadi 3,00 di tahun 2020.
4. Pengadaan Listrik dan Gas
Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 4,16 miliar rupiah atau sekitar 0,031 persen terhadap perekonomian Kabupaten Solok pada tahun 2020, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kategori ini mengalami perlambatan ekonomi sebesar 6,25 persen di tahun 2020. Naiknya tarif listrik baik tegangan rendah, menengah, dan tinggi yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2017 menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kategori ini.



5. **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll.
Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Solok selama tahun 2020 relatif kecil, hanya 7,20 miliar rupiah atau sebesar 0,05 persen dengan pertumbuhan yang relatif fluktuatif.
6. **Konstruksi**
Pada tahun 2020, kontribusi kategori konstruksi mencapai 1,30 triliun rupiah atau sebesar 9,68 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Solok dan menduduki peringkat keempat. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 8,38 persen per tahun.

Selesainya beberapa proyek perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan perbaikan saluran air, serta proyek pembangunan gedung mendorong pertumbuhan kategori ini. Kontribusi kategori ini relatif meningkat selama periode 2016-2020 yaitu 8,72 persen pada tahun 2017 menjadi 9,10 persen pada tahun 2018. Dengan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kabupaten Solok tahun 2020 sedikit naik dibandingkan tahun 2019, yakni 9,68 persen.
7. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**
Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 10 persen. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 1,47 triliun rupiah atau sekitar 10,90 persen yang merupakan penyumbang nomor tiga terbesar setelah Transportasi dan Pergudangan.

Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuatif selama periode 2016-2020. Laju pertumbuhan sebesar 6,15 persen di tahun 2016 turun menjadi 0,78 persen di tahun 2020 karena kelesuan perekonomian akibat dampak Covid-19.
8. **Transportasi dan Pergudangan**
Kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan mencapai 1,48 triliun rupiah atau sekitar 11,22 persen terhadap PDRB Kabupaten Solok pada tahun 2020.
9. **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**
Tahun 2020 kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Solok sebesar 113,66 milyar rupiah atau 0,84 persen. Kategori ini merupakan kategori dengan laju pertumbuhan terendah ketiga di Tahun 2020. Pada tahun 2020, kategori ini tumbuh sebesar 9,87 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 9,65 persen.
10. **Informasi dan Komunikasi**
Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.



Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Solok selama tahun 2016-2020 relatif stabil, di kisaran 5 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan kategori ini menunjukkan perlambatan, yaitu tahun 2019 yaitu sebanyak 6,41 persen, menjadi 7,86 persen di tahun 2020. Percepatan pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan *fiber optic*. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi online juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi
- Kontribusi kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap perekonomian Kabupaten Solok berkisar antara 1,72 persen selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020, PDRB kategori ini mencapai 232,25 milyar rupiah atau 1,72 persen, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 227,23 milyar rupiah atau 1,67 persen. Begitu juga dengan laju pertumbuhannya yang mengalami perlambatan 0,26 persen. Dari 17 kategori yang ada, kategori ini merupakan salah satu yang bernilai positif di tahun 2020.
12. Real Estate
- Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Kabupaten Solok dengan peranan sekitar 0,8 persen periode tahun 2016-2020. Sumbangan kategori ini di tahun 2020 sebesar 116,83 milyar rupiah atau 0,86 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini fluktuatif selama 2016-2020. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 0,01 persen.
13. Jasa Perusahaan
- Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 0,07 persen untuk tahun 2016-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan peranan kategori lain. Laju pertumbuhan kategori Jasa Perusahaan cenderung mengalami penurunan diangka 4,62 persen pada tahun 2016 menurun hingga minus 4,55 persen pada tahun 2020.
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2016-2020 peranannya menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 5,52 persen di tahun 2016 hingga 6,62 persen di tahun 2020. Sedangkan laju pertumbuhannya hampir selalu positif dan mengalami perlambatan di tahun 2020, dari 5,52 persen di tahun 2016 menjadi 0,60 persen di tahun 2020.
15. Jasa Pendidikan
- Pada tahun 2020 jasa pendidikan menyumbang sebesar 3,87 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Solok, naik dari tahun 2016 yang sebesar 3,14 persen. Kontribusinya meningkat dari 347 milyar rupiah menjadi 523 milyar rupiah di tahun 2020. Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi namun cenderung sedikit menurun, dari 3,14 persen menjadi 4,52 persen pada periode 2016-2020.



16. **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**
Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Solok sebesar 1,54 persen dan laju pertumbuhan sebesar 7,22 persen. Selama tahun 2016-2020 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,23 persen, 1,25 persen, 1,29 persen, 1,39 persen, dan 1,54 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu lebih kecil dari 5 persen dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2020.
17. **Jasa lainnya**
Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Solok tahun 2020 yaitu 132,82 milyar rupiah. Kontribusinya sejak 2016-2020 terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dari 0,94 persen di tahun 2016 hingga 1,08 persen di tahun 2019. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 0,1 persen menjadi 0,98 persen tahun 2020 akibat *pandemic* Covid 19.

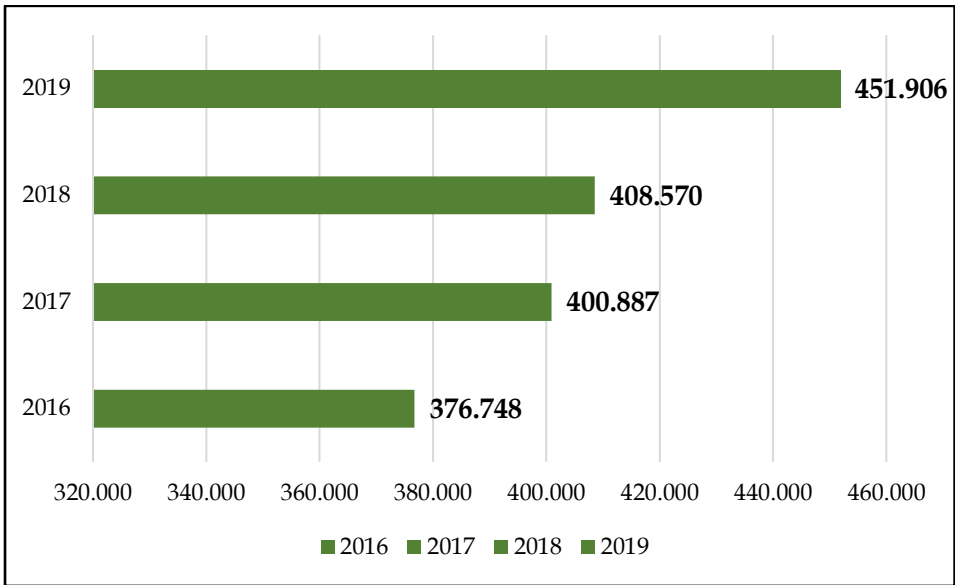
Berdasarkan Tabel 2.13 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Solok memiliki 4 (empat) sektor/lapangan usaha yang merupakan keunggulan komparatif selama tahun 2016-2020 di Provinsi Sumatera Barat. Keempat sektor unggulan tersebut adalah 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Transportasi dan Pergudangan; dan 4) Konstruksi. Namun fenomena unik terjadi untuk tahun 2020 disaat isu pandemi global melanda dunia tak terkecuali Kabupaten Solok, yakni terdapat penambahan satu sektor keunggulan komparatif yaitu sektor Informasi dan Komunikasi. Hal ini ditengarai sebagai akibat terjadi peningkatan usaha masyarakat di bidang online dan proses belajar mengajar secara daring. Satu sisi dengan kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk selalu berada di rumah, di lain sisi untuk pemenuhan kebutuhan aktifitas jual beli banyak dilakukan masyarakat melalui online. Hal demikian ini yang menyebabkan nilai sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan.

2.2.1.2 Angka Kemiskinan

Pandemi Covid-19 merupakan guncangan ekonomi yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka menurunkan penyebaran Covid-19, seperti PSBB dan pembatasan kegiatan ekonomi lainnya berdampak luas terhadap penurunan konsumsi dan investasi.

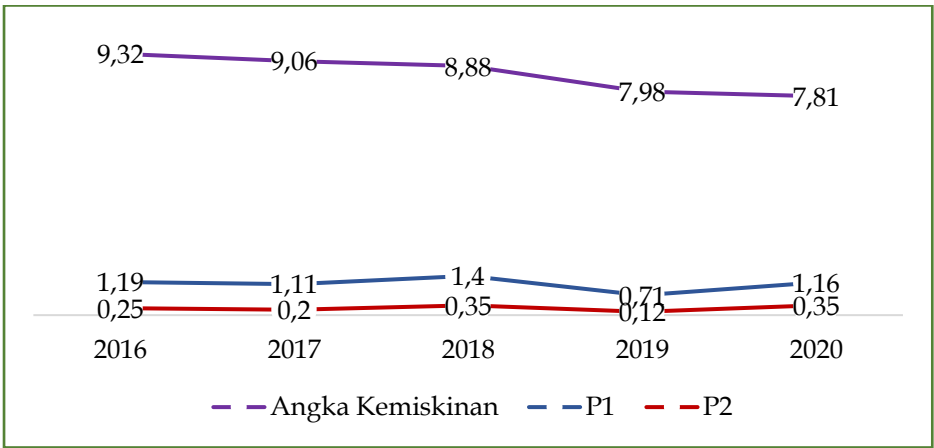
Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Grafik 2.4 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Solok. Pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar 376.748,- rupiah per kapita per bulan. Nilai ini naik menjadi 451.906,- rupiah perkapita per bulan di tahun 2020.





Grafik 2.5
Garis Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Sejalan dengan kenaikan garis kemiskinan Kabupaten Solok tren kemiskinan di Kabupaten Solok juga menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase kemiskinan di Kabupaten Solok sebesar 9,32 persen pada tahun 2016 menjadi 7,81 persen pada tahun 2020. Namun demikian kinerja penurunan kemiskinan ini belum diikuti oleh perbaikan *Poverty Gap Indeks* (P1) atau indeks kedalaman kemiskinan dan *Poverty Saverity Indeks* (P2) atau indeks keparahan kemiskinan. Kedua indeks ini masih terlihat berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat dijelaskan pada Grafik 2.6



Grafik 2.6
Trend Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Fenomena ini menunjukan bahwa meskipun jumlah orang miskin menurun, akan tetapi pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari dari garis kemiskinan dengan sebaran pengeluaran yang timpang dan tidak merata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok hanya efektif dalam mengurangi jumlah orang miskin (terutama mereka yang dekat dengan garis kemiskinan), tetapi tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling miskin. Setidaknya hingga berada di dekat garis kemiskinan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dapat meningkatkan kesejahteraan semua orang yang menderita kemiskinan tanpa mengabaikan siapapun.



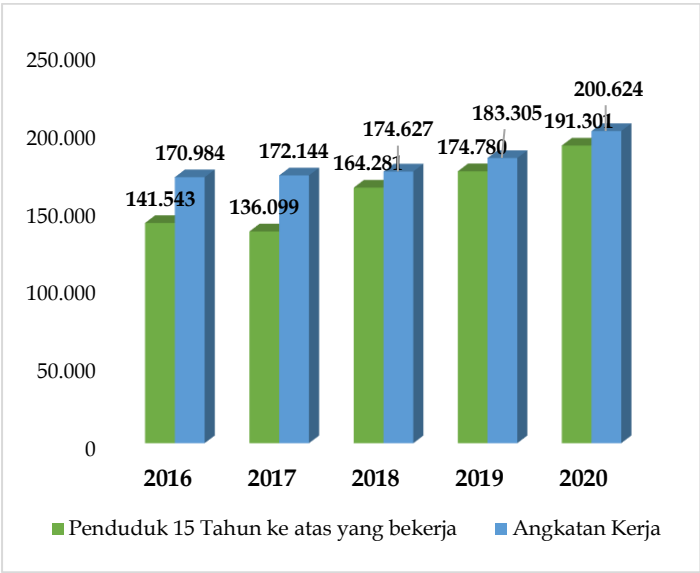
2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Solok cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2016 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Solok sebesar 68,46 persen meningkat menjadi 74,64 persen di tahun 2020. Sejak tahun 2017 kenaikan angka TPAK mencerminkan perbaikan kondisi ketenagkerjaan di Kabupaten Solok. Hal ini terlihat dari sejalannya angka TPAK dengan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.16
Tingkat Pengangguran di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja (Jiwa)	170.984	172.144	174.627	183.305	200.624
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	68,46	67,49	68,10	70,60	74,64
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,97	6,05	5,92	4,65	4,65
4	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja (Jiwa)	141.543	136.099	164.281	174.780	191.301

Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Grafik 2.7
Perkembangan Rasio Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Grafik 2.7 menjelaskan bahwa angkatan kerja terus meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 seiring dengan meningkatnya penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran yang cenderung menurun setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020 seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.16.

2.2.1.4 Indeks Gini

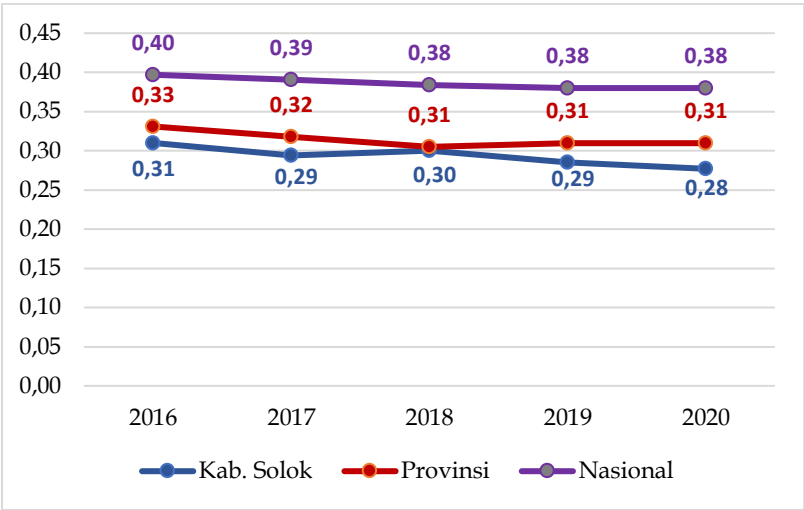
Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0



(nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetail :

- 1. Indeks Gini <0,3 = Ketimpangan rendah
- 2. Indeks Gini = 0,5 = Ketimpangan sedang
- 3. Indeks Gini > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan, di Kabupaten Solok masih berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 indeks gini di Kabupaten Solok sebesar 0,31 turun menjadi 0,28 pada tahun 2020, yang artinya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan di Kabupaten Solok semakin mengecil. Namun di tahun 2018 indeks gini Kabupaten Solok sempat mengalami kenaikan sebesar 0,006 walau tidak terlalu signifikan. Jika dibanding dengan provinsi dan nasional Indeks Gini Kabupaten Solok masih rendah atau berada dibawah provinsi dan nasional. Hal ini dapat terlihat pada Grafik 2.8



Grafik 2.8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Solok dengan Provinsi dan Nasional

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kriminalitas dan Rasio Penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

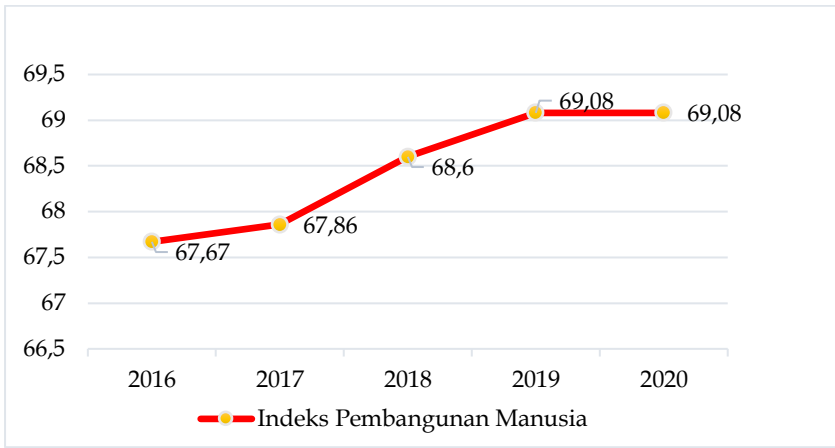
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari dimesi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM Kabupaten Solok memperlihatkan *trend* yang meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir, walaupun sempat mengalami stagnansi pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pengeluaran riil perkapita masyarakat. Namun demikian perubahan pertumbuhan IPM masih terlihat berfluktuasi pada periode yang sama. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.17.



Tabel 2.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

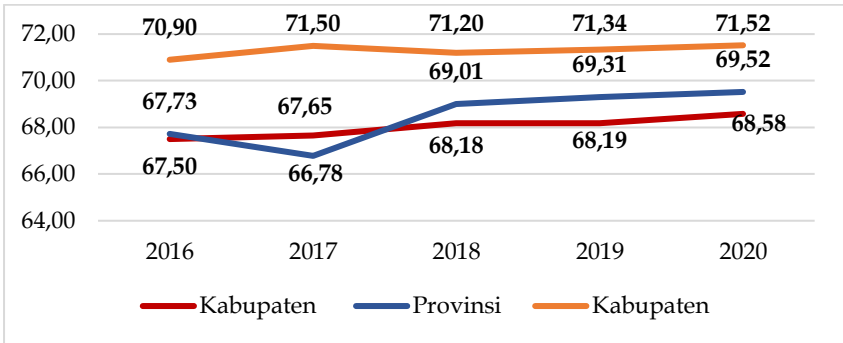
No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,5	67,65	68,18	68,19	68,58
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86
4	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rupiah)	908.267	918.667	924.261	1.083.699	1.053.705
Indeks Pembangunan Manusia		67,67	67,86	68,60	69,08	69,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 2.10
Perbandingan Usia Harapan Hidup antara Nasional, Propinsi dan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Trend Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Solok pada tahun 2020 mencapai umur 68,58 tahun. Angka ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Solok meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Solok masih berada dibawah capaian provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan



pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok masih perlu ditingkatkan, begitu pula dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Perkembangan IPM baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Solok cenderung berfluktuatif, namun demikian kinerja IPM Kabupaten Solok relatif lebih rendah dibanding dengan Provinsi dan Nasional. Hal ini terlihat dari masih rendahnya rata-rata capaian IPM Kabupaten Solok sebesar 68,46 dibanding provinsi sebesar 69,21 dan Nasional sebesar 71,29.

Berdasarkan indikator penyusunnya indikator IPM Kabupaten Solok memperlihatkan kinerja yang terus membaik (Tabel 2.15). Namun akibat pandemi Covid-19 dimensi ekonomi yang dicerminkan dari pengeluaran riil perkapita sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019.

2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Fokus seni, budaya dan olahraga dalam aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia menuju masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Analisis kinerja pada bidang seni dan budaya serta olah raga dapat dilakukan terhadap indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, lapangan olahraga, penyelenggaraan festival seni budaya dan beberapa indikator lainnya. Perkembangan terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Perkembangan Indikator Kinerja Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni & budaya (Kali)	4	4	4	4	1
2	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	271	290	296	309	317
3	Terlestarikannya Cagar Budaya (Cagar Budaya)	7	7	7	10	23
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persen)	8	9	10	15	10
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (Buah)	28	28	28	28	28
6	Lapangan olahraga (Buah)	309	309	309	309	309
7	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan (Orang)	350	350	350	350	350
8	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	0	0	0	1	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok Tahun 2021

Berdasarkan data sebagaimana dilihat pada Tabel 2.18 dapat dilihat bahwa perkembangan olah raga di Kabupaten Solok kurang mengalami kemajuan dimana pada tahun 2020 tingkat partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri baru mencapai 10 persen dari total pemuda yang ada di Kabupaten Solok. Begitu juga



dengan jumlah gelanggang yang tersedia saat ini hanya 28 unit. Terkait dengan Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Solok sangat jauh dari prestasi dimana pada tahun 2019 hanya memperoleh 1 medali dan tahun 2020 tidak diselenggarakannya *event* terkait adanya kondisi pandemi Covid 19 di Indonesia.

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya mengalami perkembangan yang cukup signifikan, pada tahun 2020 terdapat 23 Cagar Budaya yang telah dilestarikan. Tetapi masih banyak cagar budaya lain yang belum tersentuh dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sedangkan bidang seni dan budaya perkembangannya sangat lambat yang ditandai dengan kurangnya *event* penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sangat minimnya sarana penyelenggaraan seni, budaya dan olahraga dimana pada tahun 2020 tidak terselenggara sama sekali dikarenakan pandemi Covid-19 yang mewajibkan protokol kesehatan dan dihindarinya kerumunan serta kegiatan yang mengumpulkan orang banyak untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Kabupaten Solok.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan media dalam menggerakkan sumber daya yang tersedia dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek ini secara substansi menggambarkan capaian indikator kinerja dari setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, terdiri dari : Layanan urusan wajib dasar (konkuren), Layanan urusan wajib non dasar, Layanan urusan pilihan dan penunjang urusan.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Perkembangan Urusan Pendidikan di Kabupaten Solok tahun 2016 2020 melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Perkembangan Urusan Pendidikan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	• PAUD	87,50	90,37	92,34	105,41	83,50
	• SD/MI/Paket A	109,65	107,19	105,03	105,03	126,91
	• SMP/MTS/Paket B	103,34	105,75	104,99	104,99	127,49
2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	• SD/MI/Paket A	94,82	92,85	89,31	91,69	99,57
	• SMP/MTS/Paket B	56,46	57,50	55,26	76,12	86,59
3	Presentase Sekolah yang berakreditasi A					
	• SD/MI/Paket A	18,80	38,20	38,20	38,50	38,50
	• SMP/MTS/Paket B	17,00	20,00	24,00	18,31	18,31



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase Penerapan SUBP - SD - SMP	0 0	0 24,94	24,74 100	36,03 100	39,82 100
5	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Persen)	0.05	99,78	99,93	100	100
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (Persen)	0.01	0,19	0,18	0,11	0,11
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (Persen)	0.02	0.03	0,78	0,29	0,29
8	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	40,00	47,60	47,60	53,51	53,51
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Persen)	100	99,97	100	100	100
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Persen)	91.61	92,17	94,16	62,58	63,29
11	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	19,1	19,1 %	19,1 %	33,5 %	33,5 %
12	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	49,5	49,5	35,6	78,0	78,0
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/paket A (Persen)	99,33	98,75	99,20	99,21	99,21
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/paket B (Persen)	96,70	96,38	95,88	95,24	95,24
15	Rasio Guru/Murid sekolah Pendidikan Dasar	1:15	1:13	1:16	1:15	1:15
16	Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah	1:12	1:11	1:13	1:11	1:11

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.Solok Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK), pada tahun 2019 APK pada jenjang PAUD 105,41 persen (artinya bahwa ada kelebihan anak yang berada pada jenjang PAUD yang bukan berada di usia PAUD sebesar 5,41 persen) dan pada tahun 2020 menurun menjadi 83,50 persen. Pada jenjang Sekolah Dasar atau Sederajat mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari 105,03 persen menjadi 126,91 persen.



Pada jenjang SMP APK mengalami kenaikan dari tahun 2019 dengan persentase 104,99 persen meningkat menjadi 127,49 persen. Data ini menunjukkan ada banyak anak yang sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu di luar usia jenjang Pendidikan tersebut atau anak dari luar daerah Kabupaten Solok yang sekolah ke wilayah Kabupaten Solok.

Begitu juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP), namun harus dipahami bahwa Pengukuran Indikator APM adalah menurun atau disebut dengan Indikator Negatif dan APM akan berada pada kondisi ideal jika telah mencapai 100 persen. Pada Sekolah Dasar atau Sederajat di tahun 2019 APM telah mencapai 91,69 dan semakin mendekati sempurna pada tahun 2020 dengan capaian 99,57 persen (artinya persentase anak yang berada di jenjang Sekolah Dasar yang tepat berada di usianya telah 99,57 persen).

Kemudian pada jenjang SMP atau sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) atau persentase anak yang bersekolah di jenjang SMP yang tepat berada di usianya pada tahun 2019 sebesar 76,12 persen dan tahun 2020 telah meningkat menjadi 86,59 persen. Berarti masih terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs.

Pendidikan dasar secara keseluruhan perkembangan kinerjanya cukup baik karena mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan yang paling mewakili dari keseluruhan indikator ini adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik jenjang SD maupun jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada Jenjang SD Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2020 mencapai 99,21 persen artinya anak usia sekolah sudah berpartisipasi secara keseluruhan sesuai usianya sebesar 99,21 persen di jenjang Pendidikan Dasar, begitu juga dengan jenjang SMP sebesar 95,24 persen anak telah berada di bangku sekolah SMP. Begitu juga dengan Indikator lainnya seperti Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs. Sedangkan bidang pendidikan menengah mengalami peningkatan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi mengalami peningkatan dengan capaian 78,0 persen.

Dilihat dari minat masyarakat Kabupaten Solok dalam menempuh jenjang pendidikan, yang terlihat dari Angka Melek Huruf yang sudah mencapai 100 persen dan angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang semakin membaik, menggambarkan bahwa masyarakat usia sekolah telah memiliki kesadaran untuk menempuh jenjang pendidikan, namun disisi lain terlihat masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Solok, membuktikan beban masyarakat untuk mencapai pendidikan berkualitas masih tinggi, sehingga kedepannya diharapkan adanya suatu program pemerintah dalam menjembatani hal ini agar penduduk usia sekolah dapat menamatkan jenjang pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) dan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) merupakan bagian penting dari pembangunan daerah dalam rangka meningkat kualitas kehidupan



masyarakat. Selain itu sektor kesehatan juga berpengaruh kepada sektor lainnya seperti pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan tersebut dilakukan melalui upaya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, penyediaan farmasi, alat kesehatan dan keamanan makanan/minuman serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

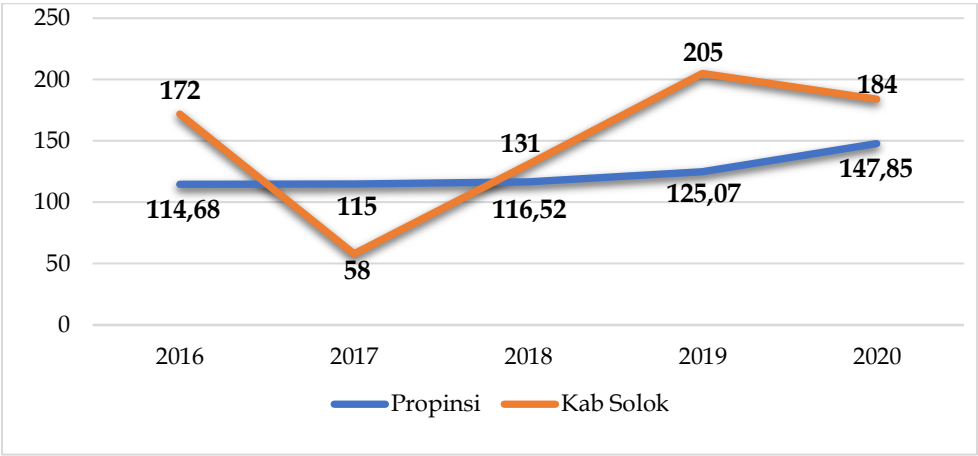
Untuk mengukur perkembangan kinerja pelayanan umum urusan wajib di bidang kesehatan digunakan indikator capaian kinerja urusan kesehatan sebagaimana tertuang pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu (Jiwa)	172	58	131	205	184
2	Angka Kematian Bayi (Jiwa)	14	12	9	9	10
3	Prevelensi gizi kurang pada anak balita (Persen)	16,9	17,3	11	7,8	4,6
4	Prevelensi Stunting pada anak balita (Persen)	27,7	39,9	30,5	13,9	18,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Solok Tahun 2021

Pada aspek Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat berfluktuatif, dan cenderung meningkat bahkan diatas angka provinsi, meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penurunan AKI di tahun 2017 tidak bisa dijelaskan dengan detail karena belum pernah dilakukan riset untuk kejadian ini. Sedangkan program dan kegiatan untuk penurunan AKI di tahun 2017 sama dengan tahun yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan gebrakan dari dari pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka kematian ibu ini. Trend AKI di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Grafik 2.11.

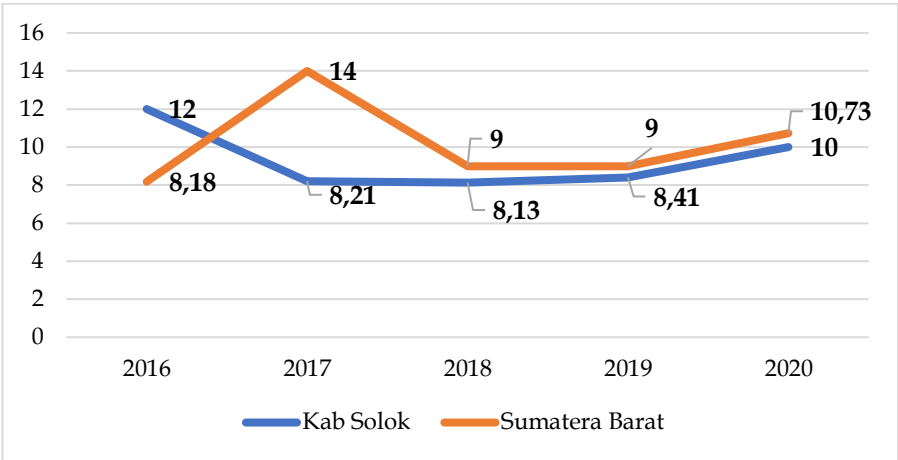


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021

Grafik 2.11
Perbandingan Angka Kematian Ibu antara Propinsi dan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020



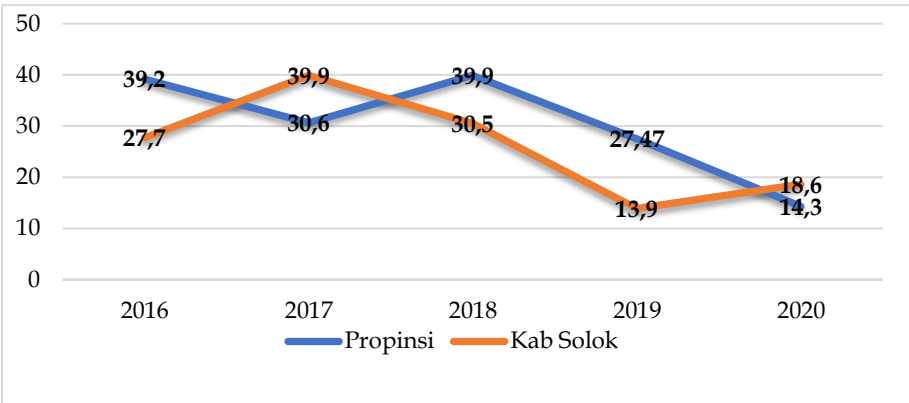
Untuk aspek angka kematian bayi meskipun dibawah capaian provinsi Sumatera barat, akan tetapi terlihat adanya peningkatan. Sehingga untuk mencegah angka ini terus meningkat, perlu perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah.



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021

Grafik 2.12
Perbandingan Angka Kematian Bayi antara Propinsi dan Kabupaten Solok tahun 2016-2020

Kabupaten Solok merupakan kabupaten lokus intervensi *stunting* nasional semenjak tahun 2019. Jika dilihat prevalensi *stunting* di Kabupaten Solok pada tahun 2018 sebagai dasar penetapan lokus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 30,5 persen, Kabupaten Solok berada diatas batas toleransi *stunting* suatu wilayah menurut WHO sebesar 20 persen. Namun jika dibandingkan dengan prevalensi Sumatera Barat pada tahun tersebut, Kabupaten Solok masih berada dibawah prevalensi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada Grafik 2.13



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021

Grafik 2.13
Perbandingan Prevalensi *Stunting* Antara Provinsi dan Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

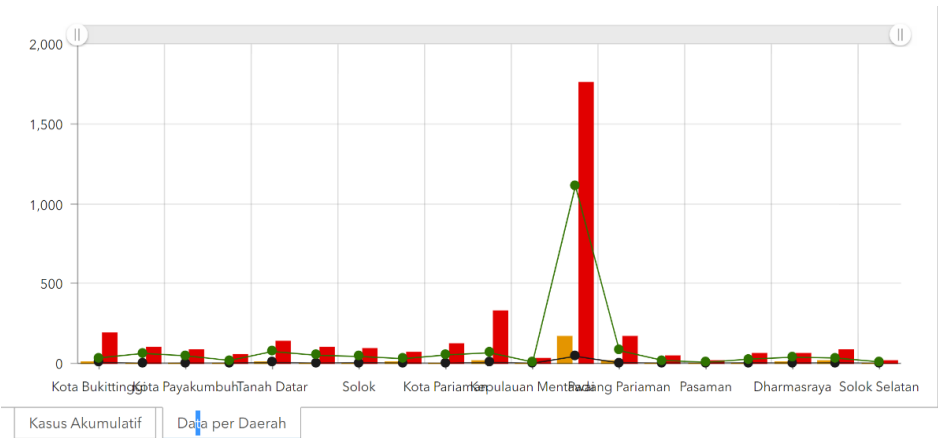
Dengan berjalannya program percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Solok, terjadi penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Solok pada tahun 2020 ke angka 18,6 persen. Data yang digunakan ini merupakan data hasil penimbangan masal di Kabupaten Solok yang menjadi data resmi Dinas Kesehatan pada profil Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Data penimbangan masal digunakan karena tidak tersedianya data survey secara series untuk prevalensi *stunting*. Data ini digunakan karena tidak dapat dipastikan ditahun berikutnya akan tersedia data survey untuk mengevaluasi penurunan stunting tiap tahunnya. Meskipun angka ini



sudah dibawah batas toleransi *stunting* suatu wilayah WHO, akan tetapi capaian ini diatas capaian provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai prevalensi 14,3 persen. Oleh karena itu untuk mencapai target penurunan *stunting* nasional sebesar 14 persen, masih diperlukan upaya dan perhatian secara konvergen semua pihak terkait percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Solok.

Terjadinya Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada capaian bidang kesehatan dan juga perekonomian. Saat ini jumlah kasus dibandingkan kota lainnya masih termasuk yang rendah. Selanjutnya perlu upaya preventif dan promotif untuk penyebaran Covid-19 dimasyarakat dan pencegahan angka kematiannya.

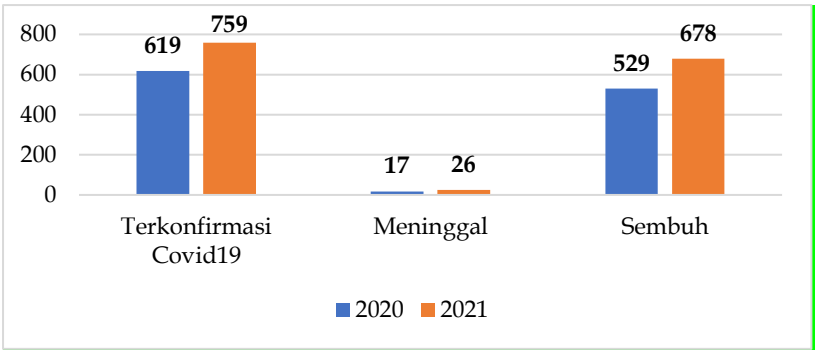
Berikut data terakhir yang diambil data info web Corona-Sumatera Barat :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit se-Sumatera Barat dan Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset, 2021

Grafik 2.14
Gambaran Kasus Covid-19 Per Daerah di Sumatera Barat

Dari Grafik 2.14 dapat diketahui bahwa kasus Covid-19 di Kabupaten Solok jika dibandingkan dengan kasus Covid-19 di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 7 diakhir tahun 2020. Untuk melihat pergerakan kasus Covid-19 dari tahun 2020 dan trimester 1 tahun 2021, dapat dilihat pada Grafik 2.15.



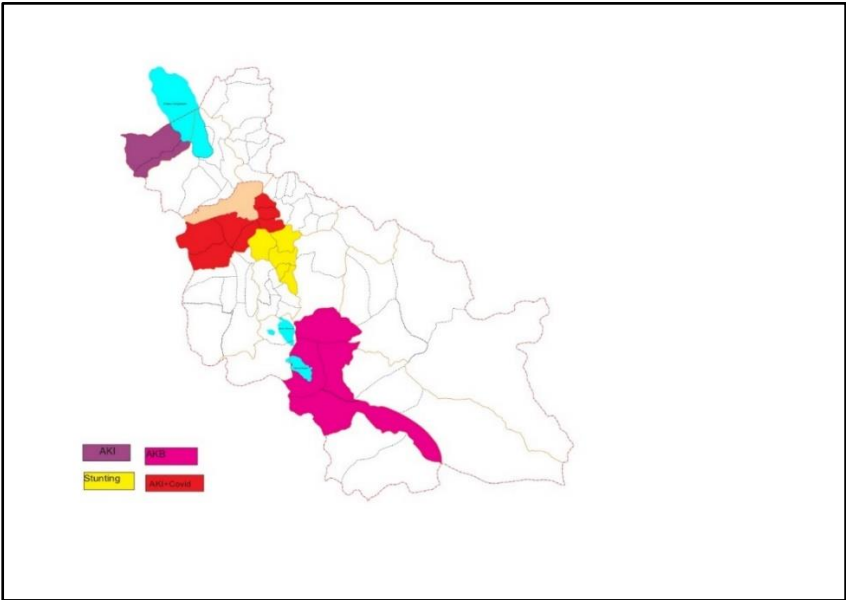
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab.Solok, 2021

Grafik 2.15
Gambaran Kasus Covid-19 Kabupaten Solok

Dari Grafik diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan kasus Covid-19 di tahun 2021. Hal ini harus menjadi perhatian bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman dan perlu penanganan komprehensif dari berbagai sektor sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan di daerah dapat di minimalisir.



Untuk melihat bagaimana penyebaran indikator-indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3
Peta Sebaran Permasalahan Kesehatan Utama di Kabupaten Solok

Berdasarkan Gambar 2.3, terlihat bahwa kematian ibu terbanyak terdapat di Kecamatan Junjung Sirih sebesar 25 persen dan di Kecamatan Kubung sebesar 25 persen. Untuk Kecamatan Kubung selain kematian ibu, penyebaran Covid-19 terbanyak juga berada di Kecamatan ini sebesar 46,36 persen. Sementara itu untuk kematian bayi terbanyak di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Lembah Gumanti sebesar 18 persen, dan untuk prevalensi balita *stunting* terbanyak berada di Kecamatan Bukit Sundi sebesar 20,40 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesehatan di Kabupaten Solok tidak merata, sehingga perlu penekanan terhadap lokasi khusus penanganan masalah, sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan lokomotif pembangunan di daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002).

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran masyarakat dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989 dan Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60 persen (Suyono Dikun, 2003).

Untuk Kabupaten Solok, ketercapaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami peningkatan seperti dijelaskan pada Tabel 2.21.



Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi jalan mantap (Persen)	60,22	56,91	57,96	58,78	59,90
2	Luas area Pertanian terlayani irigasi dalam kondisi Baik (Persen)	47,77	62,26	63,43	71,01	74,85
3	Rumah Tangga Bersanitasi Layak (Persen)	67,54	69,29	69,40	69,97	70,13
4	Rumah tangga pengguna air bersih yang aman (Persen)	64,42	74,60	75,07	76,27	78,95
5	Ketaatan terhadap RTRW (Persen)	40	42	45	47	50
6	Persentase gedung dan lingkungan pemerintah yang ber kondisi baik	40	42	45	46	48
7	Rasio tenaga Operator/Teknisi/ Analis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	10,70	11,20	12,51	14,91	17,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Solok Tahun 2021, Dinas Kesehatan Kab.Solok Tahun 2021

Indikator panjang jalan Kabupaten Solok dalam kondisi baik menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2016 sebesar 3,31 persen dari 60,22 persen menjadi 56,91 persen pada tahun 2017, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 59,90 persen. Kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan status jalan nagari menjadi jalan kabupaten.

Jumlah daerah irigasi di Kabupaten Solok adalah 308 daerah irigasi yang tersebar di 14 kecamatan dengan luas areal yang dialiri 31.139,00 Ha. Pada tahun 2019, irigasi ber kondisi baik sebesar 71,01 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 74,85 persen. Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemutakhiran data irigasi.

Sedangkan layanan sanitasi layak di Kabupaten Solok di tahun 2019 sebanyak 69,97 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,13 persen. Dimana angka ini masih jauh dibawah dari angka Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100 persen. Sejauh ini pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Solok lebih banyak mengandalkan dana dari DAK dan APBN.

Begitu juga untuk layanan air bersih dimana pada tahun 2019 jumlah rumah tangga dengan akses air minum yang aman di Kabupaten Solok sebesar 76,27 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,90 persen, angka ini juga masih dibawah angka pelayanan minimal sebesar 100 persen.

Untuk urusan tata ruang, Kabupaten Solok telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031, sedangkan untuk Rencana Detail Tata Ruang belum tersedia. Sejauh ini implementasi tata ruang dalam pembangunan masih belum optimal dan hal ini dapat dilihat pada tingkat ketaatan tata ruang dimana pada tahun 2020 masih di angka 50 persen. Hal ini disebabkan oleh belum adanya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam



pembangunan termasuk peran masyarakat dan kelembagaan lainnya dalam kelembagaan.

Kondisi gedung bangunan pemerintah di Kabupaten Solok secara keseluruhan belum dalam kondisi baik karena masih terdapat gedung-gedung yang sudah tua yang perlu diperbaiki bahkan diganti dengan gedung baru khususnya kantor-kantor Camat. Disamping itu, lingkungan gedung pemerintah pun belum tertata dengan baik seperti penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di masing-masing kantor dan tempat parkir.

Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi Teknis Bidang Infrastruktur masih sangat terbatas dimana pada tahun 2020 jumlah nya baru 17,26 persen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk mengikuti pelatihan keteknisan PU.

Dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan sarana penunjang khususnya alat berat seperti *excavator*, *wheel loader*, *crane*, *bulldozer* dan sarana pendukung lainnya. Sampai dengan tahun 2020, jumlah alat berat yang dimiliki adalah 2 buah *excavator* (1 dalam kondisi rusak berat), *backhole loader* 1 unit (rusak ringan), *motor grader* 1 unit (rusak ringan). Alat berat ini juga digunakan untuk penanganan bencana alam sehingga perlu penambahan jumlah alat berat yang memadai.

Disamping itu masih terdapat daerah terisolir di Kabupaten Solok, karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur publik yang layak khususnya jalan dan jembatan. Beberapa nagari yang masih terisolir antara lain Nagari Tanjung Balik Sumiso dan Nagari Garabak Data di Kecamatan Tigo Lurah. Permasalahan lain untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah belum tersedianya *database* infrastruktur yang valid dan lengkap. Dimana hal ini menyulitkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Jalan, jembatan dan irigasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, untuk melihat kondisi infrastruktur tersebut di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.22.



Tabel 2.22
Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi di Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2016-2019

KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI	PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	THN	JALAN			JEMBATAN			IRIGASI		
			BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)	BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)	BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK (%)
Arosuka-Alahan Panjang-Surian	Arosuka	2016	43,25	13,90	42,84	61,54	20,00	18,46	43,48	19,85	3,46
	Alahan Panjang	2017	34,76	20,40	44,84	63,08	18,46	18,46	65,40	33,41	1,19
		2018	35,42	18,57	46,00	63,08	18,46	18,46	69,42	29,41	1,18
		2019	44,28	11,45	44,27	63,08	18,46	18,46	68,28	30,87	0,85
		2020	31,99	24,14	43,87	69,23	21,54	9,23	54,11	27,80	18,09
Arosuka-Sumani	Sumani	2016	51,29	21,57	27,14	56,63	22,89	20,48	46,94	36,70	16,36
		2017	51,28	15,32	33,40	60,24	21,69	18,07	70,85	22,73	3,44
		2018	53,18	15,32	31,49	60,24	21,69	18,07	57,23	19,96	3,12
		2019	53,03	17,40	29,57	60,24	21,69	18,07	71,07	21,47	7,47
		2020	39,45	30,08	30,48	48,19	39,76	12,05	54,75	18,09	27,16
Arosuka-Muara Panas-Kubang nan Duo-Sirukam-Batu Bajanjang	Batu Bajanjang	2016	37,92	12,56	49,52	67,74	12,90	19,35	45,43	42,07	12,50
	Muara Panas	2017	37,72	10,93	51,35	70,97	14,52	14,52	48,99	41,37	9,64
		2018	38,40	10,93	50,66	72,58	12,90	14,52	46,69	39,75	9,82
		2019	41,66	8,43	49,91	70,97	14,52	14,52	61,62	31,72	5,13
		2020	35,92	18,46	45,62	66,13	16,13	14,52	50,69	21,72	26,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Solok Tahun 2020



Berdasarkan Tabel 2.22 infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi yang berada pada Kawasan Pertumbuhan Ekonomi seperti Kawasan Arosuka, Kawasan Alahan Panjang, Kawasan Sumani, dan Kawasan Muara Panas pada umumnya mengalami kerusakan dimana untuk jalan yang berkondisi baik masih dibawah 50 persen, sementara untuk jembatan yang berkondisi baik masih di angka sekitar 60 persen dan untuk irigasi masih di bawah 70 persen.

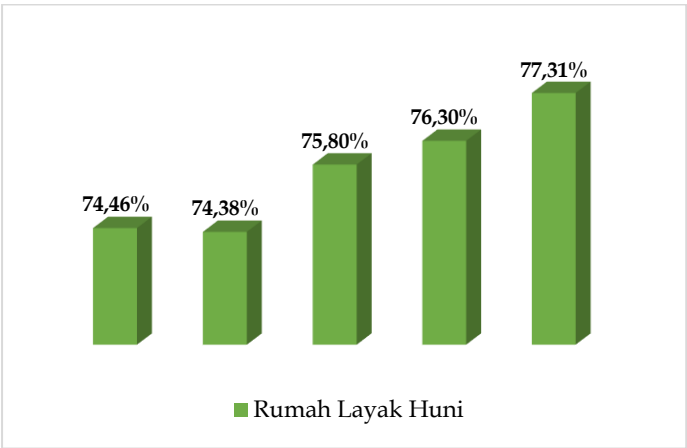
2.3.1.4 **Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**

Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman berhubungan dengan penyediaan kawasan permukiman yang layak huni serta perumahan yang layak huni bagi masyarakat, disamping itu juga mengurus penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha. Kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Layak Huni (Persen)	74,46	74,38	75,80	76,30	77,31
2	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani (Persen)	10	12	13	14	14
3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	48	52	56	60	60

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kab.Solok Tahun 2021



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kab.Solok Tahun 2021

Grafik 2.16
Perkembangan Indikator Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Kinerja pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman di Kabupaten Solok antara lain diukur dengan indikator rumah layak huni. Pada tahun 2016 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Solok adalah 74,46 persen dari total rumah yang ada di Kabupaten Solok (Grafik 2.16). Dengan meningkatnya rumah



layak huni pada tahun 2020 sebesar 77,31 persen berarti rumah tidak layak huni mengalami penurunan menjadi 2,85 persen. Sedangkan berdasarkan indikator Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani, pada Tahun 2020 sebesar 14 persen. Kawasan perumahan di Kabupaten Solok yang dilengkapi dengan PSU yang layak masih belum optimal dimana pada tahun 2019 masih sekitar 60 persen dan di tahun 2020 angka ini tidak mengalami peningkatan karena tidak adanya anggaran untuk penyediaan PSU. Tidak terjadinya peningkatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan penyediaan PSU di tahun 2020 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang perumahan rakyat dan permukiman. Disamping itu, juga belum tersedia *database* perumahan dan permukiman yang valid untuk menjadi dasar dalam memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh dan pembangunan PSU di perumahan. Selain hal tersebut diatas, juga terdapat kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman yaitu penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Sejauh ini kedua hal tersebut belum terakomodasi secara optimal.

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2016-2020 terlihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Persen)	61,89	63,24	63,24	87,31	87,59
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Persen)	86,66	70	70	84,86	61,53
3	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kabupaten (Persen)	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)	0	57,77	53,22	75,64	57,89
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
7	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	30	30	30	40	40
8	Persentase jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
	terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana					
9	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	100	100	100	100	100
10	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Solok Tahun 2021

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah mencapai 100 persen adalah Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, Persentase jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, dan Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana. Hal ini karena indikator ini dihitung terhadap jumlah kejadian per tahun, sehingga pada tahun berikutnya harus tetap menjadi indikator kinerja dengan target sebanyak kejadian yang diperkirakan pada tahun berkenaan. Pencapaian kinerja penegakan Perda ini juga tidak terlepas dari adanya peningkatan Personil Satpol PP berkualitas PPNS. Tahun 2019 terjadi peningkatannya cukup signifikan yaitu 10 persen dari tahun 2018, atau sejumlah 4 orang dari target 10 orang.

Permasalahan lain yang ada pada urusan kebencanaan antara lain belum adanya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan konsep kesiap siagaan bencana, pengaduan dan layanan informasi kebencanaan belum berbasis teknologi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kebencanaan.

Disamping penegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga menyelesaikan kasus pelanggaran K3 serta pengamanan demo yang rata-rata terjadi 1 (satu) kali dalam setahun.



2.3.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Program Rehabilitasi Sosial tahun 2020-2024, sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Untuk mengukur perkembangan kinerja pelayanan umum urusan wajib di bidang sosial dapat menggunakan indikator yang terdapat pada bidang sosial sebagaimana tertuang pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Urusan Sosial
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	100	100	100	19,16
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten (Persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Solok Tahun 2021

Dari Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa kinerja urusan sosial secara umum mencapai target, kecuali lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti yang masih rendah dan jauh dari target SPM. Penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19, dimana sebagian besar anggaran APBD yang mendukung program ini terimbas *refocusing* di tahun berjalan.

Merujuk kepada indikator sosial yang hampir seluruhnya mengarah kepada PPKS, maka ketersediaan data PPKS yang valid dan termutakhirkan merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus menjadi perhatian.



2.3.2 Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan utama yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi tingkat TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Di Kabupaten Solok Pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak terhadap tingkat pengangguran karena sebagian besar penduduk Kabupaten Solok bekerja di sektor pertanian. Namun permasalahan yang ada di Kabupaten Solok masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta terbatasnya peluang dan kesempatan kerja yang tersedia sehingga banyak penduduk Kabupaten Solok yang mencari pekerjaan diluar Kabupaten Solok.

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada indikator Kinerja Layanan Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Solok tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Persentase tenaga terja yang bersertifikat kompetensi cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi akan semakin memperbesar peluang tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan.

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan tersebut maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok juga cenderung menurun setiap tahunnya. Ini terlihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan (Orang)	86	177	112	186	108
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	5,30	5,35	5,50	5,89	7,90
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	11,40	14,81	33,11	45,20	53,79

Sumber : Dinas PM, PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok Tahun 2021



2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dua hal yang saling berhubungan, dimana perempuan dan anak merupakan hulu kualitas generasi penerus bangsa. Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan peran perempuan yang mandiri dan tangguh dalam bekarya sehingga terwujud kesetaraan gender dalam pembangunan.

Selain pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah bersama orang tua, keluarga dan masyarakat. Perlindungan bagi anak bertujuan untuk mewujudkan jaminan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal, sehingga memiliki daya saing global dimasa depan.

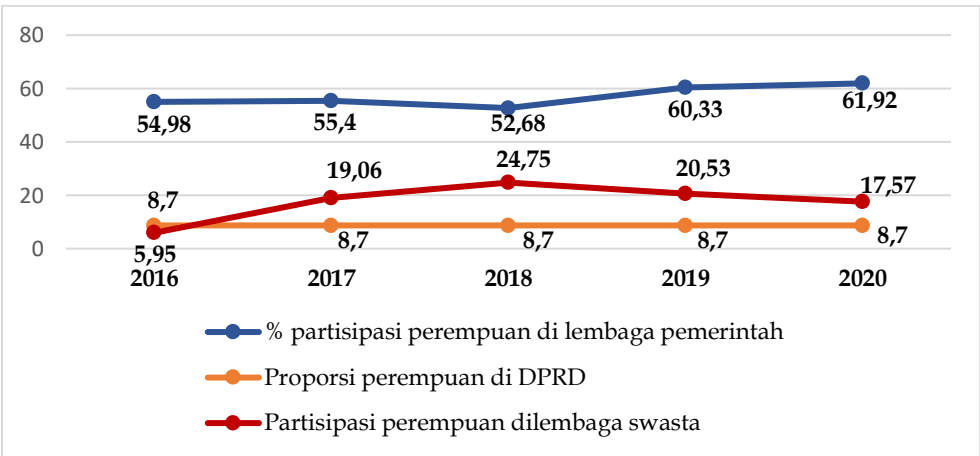
Untuk mengukur capaian kinerja pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender	95,55	95,73	96,20	96,17	96,18
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (Nilai)	0	0	0	600	0

Sumber :BPS Tahun 2021, DPPKBP3A Kab Solok 2020

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa meskipun terdapat penurunan capaian pada tahun 2019, secara umum Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Solok mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dilihat dari indikator yang mendukung capaian Indeks Pemberdayaan Gender, masih ada yang belum memenuhi target minimal seperti terlihat pada Grafik 2.17.



Grafik 2.17
Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan

Sementara itu untuk capaian Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Solok baru satu (1) kali mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak masih di kategori Pratama dengan nilai 600. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Solok baru di tahun 2019 masuk nominasi untuk penilaian Kabupaten Layak Anak, dan untuk tahun 2020 tidak ada evaluasi dilakukan karena adanya pandemi Covid-19. Capaian tersebut



mencerminkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Solok masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

2.3.2.3 Urusan Pangan

Ketersediaan pangan bertujuan menjamin pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Tiga sumber pemenuhan ketersediaan pangan diantaranya : produksi dalam negeri, impor pangan dan pengelolaan cadangan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia juga sebagai salah satu hak asasi dengan harapan terbebasnya masyarakat dari kekurangan pangan/kelaparan. Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa ketersediaan pangan harus dipenuhi ditingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan pangan yaitu menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri, (2) import pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumberdaya alam, prasarana dan sarana produksi, sumberdaya manusia dan kelembagaan, keanekaragaman dan keamanan pangan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Kabupaten Solok membentuk Satgas Pangan melalui SK Bupati yang diperbaharui setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Kabupaten Solok telah menetapkan regulasi tentang Kebijakan Ketahanan Pangan sehingga ketersediaan pangan utama yaitu beras terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016 digunakan mencapai 563,58 persen dengan perkembangan harga beras yang juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 12.000,-/Kg pada tahun 2016. Perkembangan harga yang cukup baik ini dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 13.700/kg mendorong petani atau masyarakat untuk meningkatkan produksi padinya. Dari sisi konsumsi, rasio penduduk yang telah menerapkan Pola Pangan Harapan juga terus meningkat dimana pada tahun 2019 adalah sebesar 85,2 persen dijelaskan pada Tabel 2.28.

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumberdaya alam, prasarana dan sarana produksi, sumberdaya manusia dan kelembagaan, keanekaragaman dan keamanan pangan masyarakat.



Data Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Solok tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (beras) berdasarkan neraca bahan makanan (Ton)	547,97	592,36	577,10	547,57	532,13
2	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun (Buah)	4	0	1	0	0
3	Skor pola pangan harapan (Angka)	81,1	82,3	84,8	85,2	84,8
4	Kawasan rumah pangan lestari (Buah)	41	68	26	15	5

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok Tahun 2021

Dari Tabel 2.28 dapat dilihat ketersediaan pangan utama (beras) berdasarkan neraca bahan pangan mengalami kenaikan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dari sisi konsumsi, rasio penduduk yang telah menerapkan Pola Pangan Harapan terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,4 persen dari 85,2 persen turun menjadi 84,8 persen.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Solok selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat bahwa indikator luas lahan bersertifikat pada tahun 2016 sebesar 0,28 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,86 persen. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Luas lahan bersertifikat	0,28	0,34	0,46	0,66	0,86
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kab.Solok Tahun 2021

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dinas



Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menyelenggarakan tata kebijakan pada urusan pertanahan yang diarahkan pada upaya penyediaan tanah (*land banking*) yang *clean* dan *clear* untuk kepentingan pembangunan pemerintah daerah serta peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan, masalah-masalah atau konflik pertanahan.

Sementara itu, untuk konflik pertanahan setiap tahunnya telah difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan khususnya untuk pertanahan milik Pemerintah Daerah, disamping itu juga dilaksanakan ganti rugi tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintah daerah dan fasilitas umum. Berdasarkan data dari Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, total Percil tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2020 baru sebanyak 330 Percil dari total 1019 Percil.

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari beberapa indikator kinerja seperti ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan, Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan. Untuk lebih detailnya capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

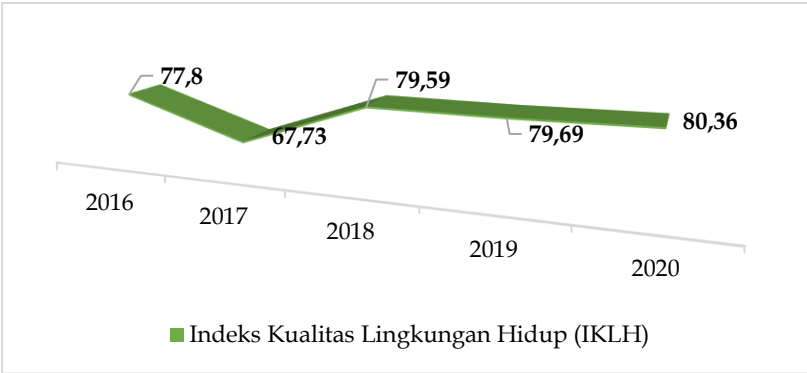
No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tdk Ada	Tdk Ada	Proses	Proses	Proses
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,80	67,73	79,59	79,69	80,36
3	Persentase ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	61,90	42,86	60,00	70,00	50,00
4	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten	100	100	100	100	100
5	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	7,91	9,26	10,37	11,61	11,73
6	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (Rasio)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok Tahun 2021

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Solok baru mulai disusun pada tahun 2018, sampai dengan tahun 2020 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH telah selesai disusun. Akan tetapi belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



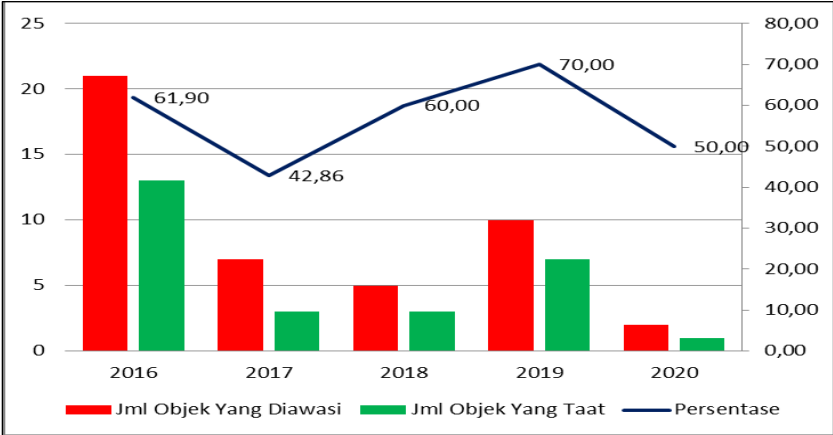
Pengukuran kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan penetapan Indikator Kinerja urusan Lingkungan Hidup yaitu diantaranya meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan peningkatan penanganan persampahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan gambaran dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Informasi tentang kondisi lingkungan hidup pada IKLH berdasarkan data kualitas air, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. IKLH Kabupaten Solok rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 67,73 persen (Grafik 2.18). Penurunan IKLH tersebut terjadi karena menurunnya nilai indeks pencemaran air akibat tingginya pencemaran yang terjadi pada sungai di Kabupaten Solok.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok Tahun 2021

Grafik 2.18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Untuk capaian indikator kinerja ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) setiap tahunnya masih berfluktuatif (Grafik 2.18). Perhitungan persentase ini dipengaruhi oleh jumlah objek kegiatan yang dilakukan pengawasan setiap tahunnya. Terhadap indikator penanganan pengaduan masyarakat, capaian pelaksanaan kegiatan ini selalu 100 persen, artinya setiap kasus pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Solok telah ditindaklanjuti seluruhnya untuk dicarikan solusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tabel 2.30).



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok Tahun 2021

Grafik 2.19
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Terhadap
Izin Lingkungan dan Izin PPLH



Sejak tahun 2016 persentase penanganan persampahan setiap tahunnya meningkat dari 9,26 persen pada tahun 2017 sampai 11,73 persen pada tahun 2020 (Tabel 2.30). Kenaikan persentase pengelolaan sampah ini didukung oleh adanya penambahan sarana prasarana persampahan yang didanai oleh dana DAK sehingga dapat menambah rute layanan persampahan pada tahun 2019. Penanganan persampahan di Kabupaten Solok baru sebatas melakukan pengangkutan sampah dari titik pelayanan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Solok yang berlokasi di Ampang Kualo, Kota Solok. Sementara itu, Kabupaten Solok belum memiliki TPA kabupaten. Adapun prasarana dan sarana persampahan masih kurang, kondisi saat ini baru terdapat 6 (enam) unit *Dump Truck*, 2 (dua) unit *Armroll Truck* dan 3 (tiga) unit Becak Motor dengan jumlah titik pelayanan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lokasi diantaranya pasar tradisional, Nagari, perumahan, perusahaan, perkantoran pemerintah, Puskesmas, Perguruan Tinggi, Bank dan Sekolah.

Ruang Terbuka hijau di Kabupaten Solok meliputi daerah sekitar sungai, lapangan olah raga, makam, pekarangan rumah penduduk, pekarangan perkantoran dan tempat pariwisata. Berbagai program telah dilakukan untuk penataan ruang terbuka hijau diantaranya adalah program Pembuatan Taman Hutan Kota Wisata (THKW) seluas 17 Ha di daerah kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok bertujuan untuk menambah luasan ruang terbuka hijau, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktifitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (Rasio) masih di angka 1,40 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, angka ini tidak mengalami peningkatan karena tidak adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau baru. Sejauh ini Pemerintah Daerah hanya melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada.

Berkurangnya jumlah objek yang diawasi pada tahun 2020 disebabkan pengurangan taget karena adanya *refocussing* anggaran. Ketidaktaatan penanggung jawab usaha/kegiatan rata-rata disebabkan karena tidak adanya menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan setiap semesternya dan tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah cair serta limbah B3. Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Solok sejauh ini bekerja sama dengan pihak ketiga khususnya limbah B3 yang berasal dari RSUD Arosuka dan Puskesmas.

2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 menetapkan target pencapaian pelayanan perekaman KTP elektronik 100 persen dari jumlah penduduk wajib KTP dan 85 persen untuk target kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun. Hal ini juga mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri yang menargetkan 100 persen kepemilikan kartu keluarga sampai tahun 2015, 100 persen untuk kepemilikan KTP sampai tahun 2015, 90 persen penerbitan akta kelahiran sampai tahun 2020, 70 persen penerbitan akta kematian sampai tahun 2020. Disamping itu guna menunjang wajib pilih berkelanjutan pemilihan umum tahun 2019 juga harus dilakukan perekaman KTP elektronik mulai usia 17 tahun. Adapun data-data kependudukan selama lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada Tabel 2.31.



Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,80	0,81	0,90	0,98	0,99
2	Kepemilikan Akta Kelahiran (Persen)	77,77	80,86	85,64	89,78	92,05
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0	0	0,96	18,02	25,88
4	Cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	0,43	0,58	0,76	0,84	0,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Solok Tahun 2021

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus meningkat meskipun belum mencapai 100 persen sesuai dengan amanat Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil pada tahun 2018. Tahun 2020 penduduk Kabupaten Solok telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebanyak 99 persen. Begitupun juga dengan kepemilikan Akte Kelahiran terus meningkat dengan capaian tahun 2020 sebesar 92,05 persen. Semestinya saat masyarakat mengurus Akta Kelahiran sekaligus mengurus KIA sehingga kenaikan capaian kepemilikan Akta Kelahiran sebanding dengan peningkatan capaian persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA.

Untuk capaian indikator kinerja cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan pada tahun 2020 masih di angka 88 persen. Masih belum optimalnya capaian indikator kinerja ini disebabkan karena masyarakat belum memahami pentingnya data kematian ini sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dan nagari adalah untuk meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya supaya berkembang, sehingga berkontribusi untuk kemajuan nagari yang meliputi pemerintahan desa, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi dan pendidikan.

Perkembangan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Desa Membangun	0	0,629	0,631	0,654	0,672
2	Peningkatan status desa mandiri (Nagari)	0	0	0	0	1
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	6,89	11,11	29,16	29,41	8,3



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
4	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari	100	100	100	100	100
5	Persentase BUMNAG yang dibina dan difasilitasi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021

Indeks Desa Membangun merupakan fokus dalam pembangunan di nagari. Berdasarkan indikator diatas terlihat peningkatan yang cukup berarti terhadap status desa mandiri. Dimana pada tahun 2020 terdapat 1 nagari di Kabupaten Solok dengan status nagari mandiri. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 1 (satu) nagari di Kabupaten Solok yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan di nagari untuk peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat nagari dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, yaitu terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 Tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Disamping itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak serta perempuan. Keberhasilan program Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	TFR (Angka Kelahiran Total) (Nilai)	2,72	2,69	2,69	2,39	2,80
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,60	0,57	0,74	0,75	1,17

Sumber : Kabupaten Solok dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.33 terlihat bahwa program Keluarga Berencana mengalami penurun di Kabupaten Solok. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya TFR Kabupaten Solok di tahun 2020 dan berada diatas target 2,1. Angka 2,1 merupakan standar ideal dimana 2 orang anak yang dilahirkan nantinya akan menggantikan kedua orang tuanya.

TFR akan berdampak kepada laju pertumbuhan penduduk. Menekan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu upaya untuk mencapai indikator SDGs. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dikhawatirkan akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu menekan TFR dan laju pertumbuhan penduduk merupakan upaya yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.



2.3.2.9 Urusan Perhubungan

Analisis Kinerja atas Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Solok dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,27	0,29	0,31	0,33	0,27
2	Kinerja Lalu Lintas (Rasio)	0,20	0,21	0,23	0,24	0,20
3	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	133	119	127	43	117
4	Rasio Izin Trayek	0,43	0,45	0,48	0,51	0,54
5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	682843	691751	743400	766100	861120
6	Jumlah terminal bis/dermaga	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Solok Tahun 2021, Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.34 dapat dilihat bahwa rasio konektivitas kabupaten pada tahun 2020 sebesar 0,27. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 0,33. Hal ini disebabkan masih rendahnya layanan transportasi di Kabupaten Solok karena minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) dan jaringan transportasi diantaranya masih terbatasnya ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalan-jalan utama seperti jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Selain itu, keberadaan LPJU juga diperlukan untuk jalan-jalan ke akses fasilitas publik seperti masjid dan perkantoran. Untuk kinerja lalu lintas, pada tahun 2020 sebesar 0,20. Hal ini juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar yang mempunyai nilai 0,24. Sedangkan untuk jumlah kecelakaan lalu lintas menunjukkan angka yang fluktuatif di setiap tahunnya, namun mengalami penurunan yang signifikan dari 127 di tahun 2018 menjadi 43 di tahun 2019 dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020 menjadi 117.

Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana di perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, dan pengaman jalan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berkendara. Saat ini Kabupaten memiliki 3 terminal bis yang berada di Surian, Alahan Panjang dan Sumani. Selain itu, untuk fasilitas transportasi air khususnya di Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah masih sangat terbatas, yaitu 1 dermaga di Danau Singkarak, dan 1 dermaga di Danau Diatas. Sedangkan untuk kapal penyeberangan masih belum tersedia untuk ketiga danau tersebut yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk akses transportasi.

Rasio ijin trayek di Kabupaten Solok memperlihatkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah kendaraan yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Untuk jumlah barang dan jasa yang terangkut oleh angkutan umum karena ada bertambahnya jumlah trayek angkutan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



2.3.2.10 **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki dua tujuan yaitu penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. SPBE atau yang lebih populer dengan istilah *e-Government* merupakan sebuah tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE bukan hanya semata-mata penyediaan perangkat/infrastruktur dan aplikasi elektronik semata, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai upaya penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika maka perlu didukung dengan berbagai indikator kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika, yang mana perkembangannya dapat dirinci pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	26	26	36	36	87
2	Pesentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan perangkat sistem komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46	50	55	63	100
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan domain solokkab.go.id	7	29	87	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memiliki portal <i>website</i>	7	29	87	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus	100	100	100	100	100
6	Persentase Layanan SPBE yang telah diimplementasikan secara Elektronik	30	33	38	92	100
7	Persentase Layanan SPBE yang telah memanfaatkan sertifikat Elektronik	0	0	2	7	25
8	Persentase Layanan Publik dan Layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	45	48	53	76	100
9	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan Layanan Pusat Data	7	29	87	100	100
10	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	0	0	0	7	24
11	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	0	ada	ada	ada	ada



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
12	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah	40	46	50	56	60
13	Jumlah Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	1	1	3	5	6
14	Jumlah Konten Informasi Publik yang disusun	1	1	12	40	136
15	Jumlah Diseminasi Informasi Publik yang dilaksanakan	1	75	161	338	302

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Solok Tahun 2021

2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat yang menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Solok dari tahun 2016 -2020 cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.36. Namun disamping itu masih banyak kelompok usaha yang belum paham arti penting dan tujuan koperasi dalam peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat sehingga mereka belum mau bergabung jadi keanggotaan koperasi.

Usaha kecil merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang, perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pasca Covid-19, perlu dilakukan pengembangan usaha mikro kecil berbasis sumber daya lokal seperti pembuatan gula tebu, tenun dan anyaman pandan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Solok melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk memberdayakan Lembaga Keuangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi aktif (Persen)	47,17	63,41	58,13	60,47	69,50



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
2	Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Persen)	99,00	99,54	100	100	100
3	Koperasi yang berkualitas (Persen)	45,23	45,85	46,00	48,00	47,69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Solok Tahun 2021

Oersentase koperasi yang aktif di Kabupaten Solok mengalami kenaikan sebesar dari 16,24 persen pada tahun 2017 menjadi 63,41 persen. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,28 persen dibanding tahun 2017. Dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 60,47 persen. Di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,03 persen menjadi 69,50 persen.

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Solok berbagai usaha dilakukan untuk menggaet investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Solok. Dari tahun 2016 jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) yang menanamkan modal di Kabupaten Solok terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebanyak 5 investor menurun -2,82 persen dibanding tahun sebelumnya dan terus mengalami penurunan yang signifikan hingga di tahun 2020 sebesar -46,50 persen. sebagaimana terlihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-2,82	- 25,74	-6,57	1,95	-46,50

Sumber : Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Solok Tahun 2021

Dengan menurunnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Solok, maka kesempatan kerja di Kabupaten Solok juga menurun. Penyebab menurunnya nilai investasi di Kabupaten Solok adalah adanya perusahaan yang sudah beroperasi tetapi belum mengurus izin sehingga belum terdata, kesulitan untuk memperoleh lahan usaha dan kepastian status kepemilikan lahan yang dimohon pelaku usaha serta peruntukan yang tidak sesuai dengan RTRW, tidak akuratnya data potensi peluang investasi yang disampaikan SKPD terkait, potensi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, kurangnya sarana promosi sehingga terbatasnya kemampuan untuk memperkenalkan potensi peluang investasi pada kalangan luar, kurang optimalnya sosialisasi terhadap pemanfaatan potensi investasi dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

2.3.2.13 Urusan Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pada bidang Pemuda dan Olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Salah satu indikator yang dapat mengukur hal ini adalah angka partisipasi masyarakat dalam



berolahraga. Permasalahan pembangunan olahraga di Kabupaten Solok selain tingkat partisipasi pemuda dalam berolahraga juga dapat terlihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Kinerja Layanan Urusan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persen)	8	9	10	15	10
2	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (Unit)	28	28	28	28	28
3	Lapangan olahraga (Unit)	309	309	309	309	309
4	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan (Orang)	350	350	350	350	350

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Solok Tahun 2021

Dari Tabel 2.38 terlihat dengan jelas tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi masih sangat rendah dimana pada tahun 2020 hanya 10 persen, hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dengan luasnya Kabupaten Solok jumlah gelanggang 28 unit yang tidak bertambah tiap tahunnya juga merupakan faktor penghambat berkembangnya kegiatan keolahragaan ditengah masyarakat dari tahun 2016 s/d tahun 2020.

2.3.2.14 Urusan Statistik

Ketersediaan data perencanaan merupakan Urusan Statistik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penyediaan data tersebut Pemerintah Kabupaten Solok bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Data tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan. Tingkat perangkat daerah yang sudah menggunakan data statistik dapat dilihat pada Tabel 2.39.

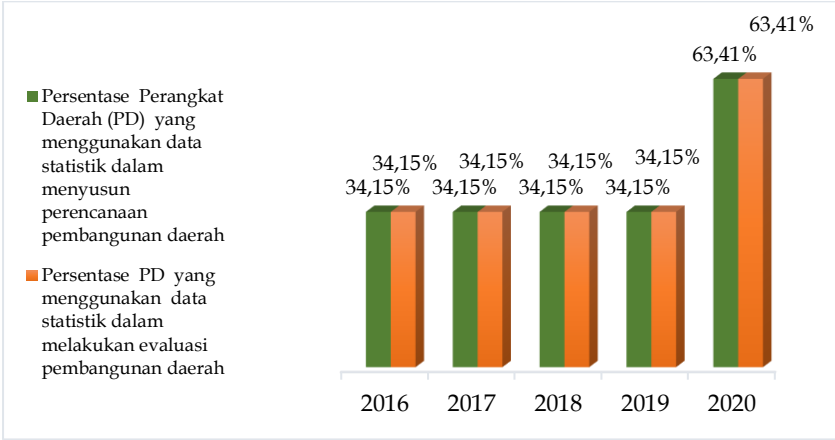
Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	34,15	34,15	34,15	34,15	63,41
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	34,15	34,15	34,15	34,15	63,41

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Tahun 2021



Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 63,41 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 34,15 persen. Peningkatan ini disebabkan karena sudah dilaksanakannya koordinasi dengan SKPD terkait penggunaan data statistik dalam perencanaan dan di Kabupaten Solok telah terdapat aplikasi Lumbung Data sebagai media publikasi data statistik sektoral.



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Tahun 2021

Grafik 2.20
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

2.3.2.15 Urusan Persandian

Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2019 telah melakukan pengamanan untuk sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Saat ini ada beberapa aplikasi yang dikelola oleh dinas terkait dilakukan *penetration test* dari beberapa aplikasi yang terinventarisir sebagai upaya untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut sehingga relatif aman dari serangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Aplikasi Elektronik yang diamankan	30	40	50	60	80

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Solok Tahun 2021

Persentase Aplikasi Elektronik di Kabupaten Solok yang telah diamankan pada tahun 2020 sebanyak 80 persen dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20 persen. Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok telah melakukan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengamankan beberapa aplikasi penting di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok dan telah menerapkan sertifikat elektronik dalam legalisasi dokumen elektronik.



2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung kelestarian budaya di Kabupaten Solok maka telah dilakukan berbagai *event* penyelenggaraan festival seni dan budaya diantaranya adalah Festival Lima Danau, dimana pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 kali namun karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hanya terlaksana 1 kali. Kegiatan pelestarian benda cagar budaya telah mengalami peningkatan dengan dilestarikannya 23 cagar budaya di Kabupaten Solok. Perkembangan Indikator kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlestarikannya Cagar Budaya (Cagar Budaya)	7	7	7	10	23
2	Penyelenggaraan festival seni & budaya (Kali)	4	4	4	4	1
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok Tahun 2021

2.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Perkembangan indikator dalam mengukur urusan bidang perpustakaan dari tahun 2016 s/d 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Budaya	0	0	0,1	0,2	0,3
2	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun	7,98	8,97	8,97	9,72	1,33
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun (Orang)	6.347	26.226	67.210	68.062	5.185
4	Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat (Orang)	3	3	3	3	3
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	7.458	7.507	7.665	8.327	9.775

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Solok Tahun 2021



Dilihat sekilas dari Tabel 2.42 terlihat Kinerja Urusan Bidang Layanan Perpustakaan tidak menunjukkan perkembangan, hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun yang masih rendah, di tahun 2019 persentase jumlah kunjungan hanya 9,72 persen dengan total jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 68.062 orang. Angka ini menurun drastis di tahun 2020 yakni hanya 1,33 persen dengan jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan 5.185 orang dimana penurunan ini disebabkan oleh adanya kasus pandemi Covid 19 pada tahun 2020 yang mewajibkan sekolah dilaksanakan secara daring dan tanpa tatap muka sehingga menyebabkan jumlah pengunjung perpustakaan pun menjadi turun drastis, namun angka ini belum dapat mewakili jumlah seluruh masyarakat yang datang ke seluruh perpustakaan yang ada di Kabupaten Solok karena angka ini hanyalah menjelaskan jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke Perpustakaan Daerah saja.

Selanjutnya adalah kinerja pelayanan perpustakaan, dimana layanan terhadap masyarakat dibidang perpustakaan terus ditingkatkan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah dan perpustakaan keliling dimana pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 9.775 judul buku.

2.3.2.18 Urusan Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintah, peran dan fungsi arsip sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi kekinian, maka arsip-arsip bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Kondisi ketersediaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
di Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	30	30	35	40	45
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan	30,72	30,72	42,30	45,17	50,00



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
	publik dan kesejahteraan rakyat (Persen)					
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara Baku	8	12	14	19	13

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Solok Tahun 2021

Perkembangan kegiatan pada urusan kearsipan sebagai bentuk dari penyelamatan arsip yang dapat menjadi sejarah telah terlihat dari Tabel 2.43. Dari tabel terlihat perkembangan urusan kearsipan sudah mulai membaik dari indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada tahun 2020 telah mencapai 45 persen, Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat juga telah memperlihatkan perkembangan yang cukup baik di tahun 2020 sebesar 50 persen, Indikator yang tidak berkembang dengan baik adalah Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dimana pada tahun 2020 hanya 13 persen dari SKPD yang ada yang telah mengelola arsip secara baku dimana hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana serta petugas pengelola kearsipan di setiap SKPD yang ada di Kabupaten Solok.

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan yaitu Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Industri dan Ketransmigrasian.

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Selain bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, khususnya perikanan air tawar juga menunjukkan kinerja yang semakin meningkat yaitu dengan produksi perikanan mencapai 4.505,15 Ton pada tahun 2020. Angka ini jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019 yang berjumlah 7.018,26 Ton. Meningkatnya produksi perikanan ini tentunya merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Solok diantaranya adalah Rehabilitasi atau Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan seperti BBI, pengadaan jaring langli dan keramba serta pengadaan induk ikan dan benih ikan serta pakan ikan baik melalui sumber dana APBD Kabupaten Solok maupun dari dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih jelasnya kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Solok tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Bidang Perikanan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (Ton)	3.884,95	4.967,00	5.888,21	7.018,26	4.505,15



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
2	Konsumsi ikan (Persen)	32,00	33,40	34,40	35,36	36,05
3	Cakupan bina kelompok nelayan (Persen)	69,70	39,39	7,69	40,00	31,25
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	426,14	482,83	507,14	558,06	648,35

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok Tahun 2021

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Kabupaten Solok memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk wisata alam Kabupaten Solok memiliki 5 danau dengan pemandangan nan sungguh elok sedangkan untuk wisata budaya ada Kampung Budaya Jawi-Jawi, Kampung Budaya Selayo, Kampung Budaya Paninggahan dan Kampung Budaya Koto Anau. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisataan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Solok termasuk daerah tujuan wisata dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). khususnya Kawasan Pariwisata Alam dan Geowisata Singkarak -Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya.

Sektor pariwisata di Kabupaten Solok dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, namun perkembangan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Solok yang tidak mengalami kenaikan yang cukup baik pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Solok dalam hal pariwisata adalah terbangunnya destinasi wisata alam baru dan wisatawan yang akan berkunjung akan disuguhi dengan pemandangan alam nan elok dengan pesona lima danaunya dan suhu udara yang sejuk.

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Solok tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana di sektor pariwisata seperti restoran, penginapan yang belum representatif serta fasilitas destinasi wisata yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memajukan sektor pariwisata. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembenahan sarana dan prasarana objek wisata di Kawasan Singkarak (Danau Singkarak dan Danau Tuo) dan Danau Kembar (Danau Diateh, Danau Dibawah dan Danau Talang).

Disamping pembenahan sarana dan prasarana objek wisata juga telah dilakukan promosi melalui berbagai *event* nasional dan internasional seperti pameran dan *Tour De Singkarak*. Perkembangan bidang pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.45.



Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	20,86	46,34	12,28	12,95	-90,95
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	17,37	25,66	86,19	28,93	-50,39
3	Tingkat hunian akomodasi (Angka)	3,00	3,50	5,34	7,29	4,60
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB (Persen)	0,73	0,76	0,82	0,83	0,74
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD (Persen)	0,25	0,27	0,23	0,34	0,16

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.45, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan wisatawan pada tahun 2020 sebesar -50,39 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Begitu juga dengan tingkat hunian yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,6 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan objek-objek wisata ditutup dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

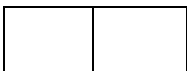
2.3.3.3 Urusan Pertanian

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pertanian, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumber daya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk besar. Meskipun memiliki potensi yang besar, namun perkembangan pertanian pada komoditi tanaman pangan dan holtikultura belum berkembang dengan optimal, karena ketersediaan benih tanaman pangan dan holtikultura yang unggul bersertifikat belum mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Solok. Sementara di sub sektor peternakan untuk komoditas *Ayam Kukuak Balenggekek* merupakan ternak endemik yang hanya dimiliki di Kabupaten Solok, akan tetapi perlu untuk pengembangan plasma nutfah *Ayam Kukuak Balenggek* di Kabupaten Solok. Populasi *Ayam Kukuak Balenggek* saat ini sebanyak 5045 ekor, dan itu tersebar di wilayah Kabupaten Solok, populasi terbanyak terdapat di Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Danau Kembar dan Lembah Gumanti.

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Secara umum peran sektor pertanian cukup dominan dalam pembangunan di Kabupaten Solok dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Urusan Pertanian
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,21	5,81	6,37	5,62	6,45



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Persen)	38,18	37,54	36,39	34,81	34,76
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (persentase/Th)	34,11	33,20	30,20	28,46	13,04

Sumber : Dinas Pertanian Kab. SolokTahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.46, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya produktivitas pertanian komoditi pangan per hektar mengalami peningkatan kecuali di tahun 2019 yaitu hanya sebanyak 5,62 ton. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2019 sebesar 34,81 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 34,76 persen. Namun demikian kontribusinya di setiap tahun mengalami penurunan disebabkan alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan menular mengalami penurunan di setiap tahunnya yaitu sebesar 34,11 persen di tahun 2016, 33,20 persen di tahun 2017, 30,20 persen di tahun 2018, 28,46 persen di tahun 2019 dan 13,04 persen di tahun 2020.

2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen sebagaimana disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persen)	10,27	10,43	10,73	11,01	10,90
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0	0,485	6,52
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30	30	31	31	5,72

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Solok Tahun 2021

Berdasarkan data sebagaimana tertuang pada Tabel 2.47, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto



mengalami peningkatan tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Solok pada tahun 2018 sebesar 10,73 persen meningkat pada tahun 2019 sebesar 11,01 persen sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10,90 persen. Sementara untuk alat-alat, ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) baru tersedia di tahun 2018.

2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Perindustrian di Kabupaten Solok lebih bertumpu pada sektor industri kecil dan menengah. Kabupaten Solok telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha, perluasan dan kawasan industri kecil dan industri menengah. Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian di Kabupaten Solok, dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persen)	5,54	5,12	5,25	5,69	4,76
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Solok Tahun 2021

2.3.4 Layanan Urusan Penunjang

2.3.4.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusunlah dokumen perencanaan. Adapun dokumen perencanaan untuk menunjang urusan perencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.49.



Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Solok
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	28	31	32	41	45

Sumber : Barenlitbang Kab. Solok Tahun 2021

Dokumen perencanaan yang mesti dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah dipenuhi dengan disusunnya RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Untuk memastikan perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka program pembangunan diarahkan untuk lebih bisa mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang. Tahun 2020 usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (RKPD) masih di angka 45 persen. Kondisi ini disebabkan karena masih terdapat usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan kewenangan kabupaten dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga sebagian usulan masyarakat diteruskan dalam musrenbang provinsi.

2.3.4.2 Urusan Keuangan

Capaian kinerja urusan keuangan diukur melalui beberapa indikator kinerja seperti yang diuraikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Urusan Keuangan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	4,40	9,64	5,67	5,99	6,14
3	Persentase Belanja Modal terhadap APBD	19,37	17,39	14,32	15,61	9,93

Sumber : BKD Kabupaten Solok Tahun 2021

Opini BPK terlihat ada nya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 diperoleh opini WDP, pada tahun – tahun berikut nya tahun 2017 s.d 2020 Kabupaten Solok memperoleh opini WTP. Opini BPK sangat di pengaruhi oleh laporan keuangan organisasi perangkat daerah, Sistem Pengendalian Intern, laporan



berkala hasil kegiatan penyelesaian terhadap temuan atau catatan BPK – RI serta laporan penataan asset.

Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sangat di pengaruhi oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok tergolong sangat kecil. Hal ini menandakan masih besarnya ketergantungan keuangan Kabupaten Solok terhadap pusat.

Untuk belanja modal, dalam persentase belanja modal terhadap Belanja Daerah, terlihat bahwa dari tahun 2016 s.d 2020 sangat fluktuatif dan menunjukkan angka yang sangat kecil. Pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 s.d 2020 menunjukkan persentase masih di bawah 15 persen. Anggaran terbesar dialokasikan pada belanja pegawai. Dan pada tahun 2020 sangat kecil yang disebabkan oleh *refocusing* Covid 19.

2.3.4.3 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diwakili dengan beberapa indikator kinerja. Umumnya capaian indikator menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 telah berhasil meningkatkan kinerja indikator-indikator bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Adapun kegiatan-kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat teknis, uji kompetensi dan sertifikasi, dan pembinaan disiplin dan perceraian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Orang)	29	31	31	31	31
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah (Orang)	731	599	599	599	604
3	Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat manajerial	58,36	56,38	59,64	60,93	65,38
4	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis	2,61	3,29	3,29	5,58	5,08
5	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	45,00	45,00	45,34	89,05	89,05
6	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	100	100	100	100	100
7	Persentase data kepegawaian yang akurat	68,80	68,80	80	98,03	98,50
8	Indeks kepuasan masyarakat ASN	3,02	3,10	3,22	3,49	3,40
9	Indeks Profesionalitas ASN	20,34	20,56	20,95	20,95	46,20



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
10	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	58,36	56,38	59,64	60,93	65,38

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Solok Tahun 2021

Dari Tabel 2.51, terlihat perkembangan dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dari tahun 2016 s/d 2020 di Kabupaten Solok, dimana Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun 2020 sebanyak 31 Orang, serta Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah pada tahun 2020 sebanyak 604 orang yang tersebar diseluruh OPD yang ada di Kabupaten Solok dengan Indikator keakuratan data pegawai sebesar 98,50 persen di tahun 2020.

Dalam urusan Pendidikan dan Pelatihan Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis sangat berjalan lambat dimana pada akhir tahun 2020 hanya 5,08 persen dari ASN yang ada yang baru mengikuti diklat kompetensi teknis sesuai bidangnya dalam menunjang kinerja ASN yang ada di Kabupaten Solok. Dilihat dari Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural pada tahun 2020 telah mengalami peningkatan dengan capaian 65,38 persen seiring dengan upaya Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam mengukur keberhasilan kinerjanya.

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik. Kondisi ini didukung oleh komitmen pimpinan untuk memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	70	70	70	78	100

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab.Solok Tahun 2021

Penelitian/kajian pada tahun 2020 masih dilaksanakan di bidang-bidang koordinasi di Barenlitbang, untuk itu perlu penguatan fungsi litbang dengan menjadikan litbang berada pada level eselon III bukan eselon IV. Perubahan Nomenklatur ini telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kedepannya akan dilakukan perubahan nomenklatur OPD Barenlitbang, sekarang menunggu pengukuhan atau pengangkatan pejabat strukturalnya pada nomenklatur tersebut.



2.3.4.5 **Urusan Pengawasan**

Perkembangan capaian kinerja urusan pengawasan tahun 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	68,00	72,00	73,17	69,80	78,90
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal	NA	71,53	81,80	71,79	71,68
3	Level maturitas SPIP	NA	2	2	3	3
4	Level APIP Kabupaten Solok	2	2	3	3	3
5	Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi LAKIP minimal B	NA	60	92,31	95,00	100
6	Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2021

Capaian terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP maupun tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal harus dapat ditindaklanjuti dalam 60 hari setelah diterbitkan LHP, namun belum semua objek pengawasan memenuhinya, sehingga capaian indikator kinerjanya belum mencapai 100 persen.

Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP berdasarkan pelaksanaan *Quality Assurance* oleh BPKP RI Perwakilan Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Level Maturitas SPIP dinilai terhadap lima unsur penilaian yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Sedangkan Penilaian Level Kapabilitas APIP meliputi 6 elemen yaitu Peran dan pelayanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen kerja, Budaya dan hubungan, Struktur Tata Kelola. Untuk mencapai level tertinggi 4 masih diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan kedepan, karena level kapabilitas APIP adalah cerminan dari Inspektorat Daerah yang terus berbenah diri meningkatkan kinerja dan profesionalitas, hasil yang diharapkan adalah peningkatan *score* penilaian yang lebih signifikan.

Hasil penelian LAKIP SKPD didapatkan dari hasil penilaian dokumen AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berpedoman kepada Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meningkatnya persentase SKPD dengan nilai LAKIP minimal B menunjukkan telah terjadinya perbaikan kinerja pada masing-masing SKPD. Kedepan diharapkan hasil capaian dapat lebih maksimal dan berada pada level BB dan A.

Opini BPK atas LKPD dapat dipertahankan dengan predikat terbaik yakni WTP dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai implikasi dari penerapan sistem tata kelola keuangan yang konsisten, taat azas serta komitmen yang tinggi pengelola keuangan untuk melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.4.6 **Urusan Perizinan**

Capaian kinerja urusan perizinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 hingga 2020, menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini



terlihat cenderung meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari sisi pelayanan publik tiga tahun terakhir ini. Sementara itu, lama proses perizinan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan proses perizinan di Kabupaten Solok sangat baik karena telah sesuai kebutuhan investasi saat ini. Perkembangan capaian kinerja urusan perizinan tahun 2016-2020, terlihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perizinan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama proses perizinan (hari)	5	5	5	5	5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,17	3,10	3,14	3,35	3,40

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Tahun 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 3,40 persen dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 sebesar 3,35 persen. Hal ini disebabkan karena standar pelayanan perizinan telah terpenuhi dan didukung sistem perizinan secara *online*.

2.3.4.7 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui 5 indikator, lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Partai politik yang terfasilitasi	100	100	100	100	100
2	Persentase ormas yang terfasilitas	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
3	Persentase penyelesaian konflik	100	100	100	100	100
4	Pravalensi Penyalahgunaan Narkoba (orang)	NA	NA	39	24	28

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Solok Tahun 2021

Untuk fasilitasi partai politik dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan untuk fasilitasi ormas, dari 75 yang terdaftar, hanya 35 yang dapat difasilitasi. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi berupa bantuan keuangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada parpol dan ormas. Sedangkan untuk persentase konflik dilakukan dengan upaya koordinasi bersama *stakeholder* dan Forkompimda. Penyelesaian konflik terselesaikan 100 persen dari data laporan yang masuk, sementara kejadian konflik yang tidak dilaporkan belum dideteksi. Untuk penyalahgunaan narkoba juga menjadi tanggung jawab koordinasi dan fasilitasi dari urusan kesbangpol. Terlihat masih fluktuatif prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Solok. Upaya yang mendukung pencapaian ini adalah melalui sinergi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan yang mengkoordinir langsung terkait narkoba.



2.3.4.8 **Urusan Penunjang Pemerintahan Lainnya**

Capaian kinerja urusan pemerintah lainnya dalam kurun lima tahun terakhir (2016-2020) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Lainnya
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	CC
2	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B
3	Nilai LPPD	3,10	2,99	3,15	NA	NA
4	Leveling maturitas SPIP	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2021

Dari sisi pencapaian reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih pada kategori CC. Hal ini disebabkan karena APIP belum melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi hingga tahun 2019 sebagai dasar penilaian oleh kementerian terkait. Disisi lain, kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai cenderung meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 SAKIP Pemerintah Kabupaten Solok masih bernilai CC, meningkat menjadi kategori B dari tahun 2017-2020.

Pada tahun 2019, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk tahun 2020 belum dilakukan evaluasi.

2.4 **Aspek Daya Saing Daerah**

Aspek daya saing daerah menggambarkan perkembangan kemampuan ekonomi suatu daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan namun tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain, baik kabupaten/kota maupun provinsi yang berdekatan.

2.4.1 **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran riil per kapita, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan pendapatan perkapita.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rupiah)	908.267	918.667	924.261	1.083.699	1.053.705



No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Rupiah)	6 152,56	6 691,51	7 224,53	7 332,47	7 443,53
3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Rupiah)	99,48	102,10	111,27	113,27	118,32
4	Pendapatan Perkapita (Rupiah)	8511,65	8964,87	9430,22	9905,14	9794,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Tabel 2.57 menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Pengeluaran Riil Per Kapita penduduk Kabupaten Solok cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dan pengeluaran konsumsi Non Pangan Perkapita cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Solok dilakukan terhadap indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan seperti terlihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (km/kendaraan)	0,39	0,46	0,46	0,53	0,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Untuk indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan angka yang terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Solok semakin meningkat setiap tahunnya.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Pembangunan ekonomi nasiona l yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat menanam modal.

Kabupaten Solok memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Fokus investasi Kabupaten Solok di dorong untuk mendukung Kabupaten Solok sebagai destinasi wisata berdasarkan rencana umum penanaman modal Kabupaten Solok, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya



pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan warga dapat terwujud di Kabupaten Solok.

Tabel 2.59
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala Nasional	5	1	6	7	7
2	Nilai Investasi (Juta)	254,914	189,29	176,84	180,3	78,5
3	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persen)	-	-65,625	-12,440	3,452	-83,885

Sumber : Dinas DPMPSTP NAKER Tahun 2021

Namun menurunnya nilai investasi di Kabupaten Solok disebabkan oleh adanya perusahaan yang sudah beroperasi tetapi belum mengurus izin sehingga belum terdata, kesulitan untuk memperoleh lahan usaha dan kepastian status kepemilikan lahan yang dimohon pelaku usaha serta peruntukan yang tidak sesuai dengan RTRW, tidak akuratnya data potensi peluang investasi yang disampaikan SKPD terkait, potensi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, kurangnya sarana promosi sehingga terbatasnya kemampuan untuk memperkenalkan potensi peluang investasi pada kalangan luar, kurang optimalnya sosialisasi terhadap pemanfaatan potensi investasi dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam 1 (satu) bulan tertentu. Artinya dalam 1 (satu) bulan rata-rata terjadi beberapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Indeks Kriminalitas merupakan indikator *outcome* yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Berdasarkan data yang di peroleh dari Kapolres Solok yang merupakan lembaga resmi yang mengeluarkan indikator Angka Kriminalitas terdapat 58 perkara di Kabupaten Solok. Berikut tabel rincian angka kriminalitas pada tahun 2016-2020.

Tabel 2.60
Angka Kriminalitas Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

No	Perkara	Angka Kriminalitas (Perkara)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Curat	25	12	4	10	4
2	Curas	6	5	2	4	0
3	Anirat	0	0	2	1	1
4	Curanmor	75	57	59	49	12
5	Kebakaran	0	1	0	2	0
6	Pembunuhan	0	0	1	0	0
7	Perkosaan	1	0	0	0	1



No	Perkara	Angka Kriminalitas (Perkara)				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Serobot tanah	0	1	0	0	0
9	Pengeroyokan	2	7	0	0	2
10	Perjudian	7	4	3	3	3
11	Sajam	0	0	0	0	0
12	Pemalsuan surat	7	12	5	3	3
13	Unras	0	0	0	0	1
14	Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
15	Illegal Logging	1	0	0	1	0
16	Illegal mining	0	0	1	0	1
17	Illegal Fishing	0	0	0	0	0
18	Aniaya ringan	140	148	87	94	87
19	Curbis	109	113	85	57	21
20	Penggelapan	29	41	20	21	14
21	Penipuan	38	43	22	14	7
22	BBM	0	0	0	0	2
23	Pengrusakan	34	37	11	9	4
24	Penghinaan	4	7	2	3	0
25	Peras dan ancam	18	18	5	8	5
26	Pencabulan	30	21	28	13	15
27	Obat keras / Narkoba	0	0	0	0	0
28	Keterangan palsu	0	0	0	0	0
29	Bawa lari / perempuan	3	3	1	2	2
30	Coba curi	0	0	0	0	1
31	Perzinahan	1	2	2	0	0
32	Poligami	6	6	0	0	0
33	Poliandri	0	1	0	0	0
34	Cemar nama baik	8	8	1	2	5
35	Miras	0	0	0	0	0
36	Senpi / handak	0	0	0	0	0
37	Temu mayat	0	0	0	0	0
38	Bunuh diri	0	0	0	0	0
39	VCD porno	0	0	0	0	0
40	Laka air	0	0	0	0	1
41	Kekerasan dalam RT	24	12	18	10	3
42	Korupsi	1	1	2	1	0
43	Money Laundering	0	0	0	0	0
44	Perbuatan Tidak Menyenangkan	3	2	0	0	1
45	Jambret	0	0	0	0	0
46	Penadah	0	0	0	0	0
47	Pupuk	0	1	0	0	0
48	Hak Cipta	0	0	0	0	0
49	Perampasan Hak	46	34	23	11	9
50	Keterangan palsu	0	1	1	0	0
51	Cukai	0	1	0	0	0
52	Lingkungan Hidup	0	1	0	0	0
53	Fidusia	2	1	1	4	1
54	Perlindungan konsumen	0	1	0	0	0
55	pelecehan	0	1	0	0	0
56	Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	12	11
57	Pencurian Dalam Keluarga	0	2	8	1	0

No	Perkara	Angka Kriminalitas (Perkara)				
		2016	2017	2018	2019	2020
58	Kelalaian mengakibatkan orang mati	0	0	0	1	0
59	Lain-lain	5	0	2	0	0
TOTAL		625	605	396	336	217

Sumber : Polres Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Capaian angka kriminalitas dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, dimana kondisi awal tahun 2016 angka kriminalitas adalah 623 perkara dan menjadi 217 perkara di tahun 2020. Capaian ini terlihat sangat signifikan dengan rata-rata penurunan tiap tahun 81 perkara.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2016-2021

RPJMD Tahun 2016-2021, dijabarkan dalam 5 Misi dan beberapa tujuan dan sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Rekap Penjabaran Visi RPJMD 2016-2021

Visi :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 1 : Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun	1	2	14
Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat	2	3	15
Misi 3 : Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai	1	4	11
Misi 4: Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari	1	1	3
Misi 5 : Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih	1	2	9
Jumlah	6	12	52

Sumber : Barenlitbang Kab Solok Tahun 2021



Capaian kinerja RPJMD diukur dari indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 2.62

Tabel 2.62
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	CAPAIAN					Target Tahun 2020	Interpretasi Capaian
			2016	2017	2018	2019	2020		
Misi I. Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.58	7.60	7.84	7.85	7.86	7.62	>
	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	- PAUD	%	87,5	90,37	92,34	105,41	83,50	81,71	>
	- SD/MI/Paket A	%	109,65	107,19	105,03	105,03	126,91	126,91	=
	- SMP/MTSN/Paket B	%	103,34	105,75	104,99	104,99	127,29	127,29	=
	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	- SD/MI/Paket A	%	92,39	90,47	89,31	91,69	99,57	97,03	>
	- SMP/MTSN/Paket B	%	56,46	57,5	55,26	76,12	86,59	79,68	>
	Nilai rata-rata Ujian Nasional UN								
	- SD/MI	Nilai	70.60	71.7	70.62	73.68	-	74.19	<
	- SMP/MTSN/Paket B	Nilai	50.03	48.44	48.71	50.25	-	52.97	<
	Tingkat kelulusan								
	- SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	=
	- SMP/MTSN	%	100	100	100	100	100	100	=
	Persentase sekolah yang terakreditasi A								
	- SD/MI	%	56	108	108	38,53	38,53	90	<
	- SMP/MTSN/Paket B	%	17	20	24	18,31	18,31	69	<
	Persentase penerapan SUBP								
	- SD	%	NA	NA	36,03	36,03	39,82	66	<
	- SMP	%	NA	24,63	100	100	100	87	>



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	CAPAIAN					Target Tahun 2020	Interpretasi Capaian
			2016	2017	2018	2019	2020		
Misi II. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan hidup bersih dan lingkungan sehat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67.50	67.65	68.95	68.34	68.58	68.50	=
	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	172	58	131	205	184	230	<
	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	14	12	9	9	10	21	<
	Prevalensi gizi kurang pada anak balita	%	16,9	17,3	11	7,8	4,5	9	<
	Prevalensi Stunting pada anak balita	%	27,7	39,9	30,5	13,9	18,6	26	<
	Persentase Penurunan PMKS	%	35			55	95,25	60	>
	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah anak	2.72	2.69	2.70	2.39	2.80	2.63	>
	Pertumbuhan penduduk	%	0.65	0.68	0,68*	0.72	0.63	0.72	<
	Rasio KDRT	%	0,000133	0,00023	0,00017	0,00098	0,0002	0,011	<
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.55	95.73	96.20	96.17	96.18	95.74	>
	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	77.8	67.73	79.49	79.5	80.36	80	>
	Cakupan Rumah Tangga dengan air minum layak	%	70,27	71,21	78,92	73,25	78,95	74	>
	Cakupan Rumah Tangga dengan sanitasi layak	%	68,5	68,84	69,38	51,25	70,13	74,3	<
	Level ketahanan daerah terhadap bencana	Level	2	2	3	3	3	3	=
	persentase kawasan perumahan dan lingkungan yang tertata	%	NA	9,99	22,31	30,7	35	35	=
Misi III	Pertumbuhan ekonomi	%	5.31	5.32	5.19	5.04	-1,12	5.49	<



Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	CAPAIAN					Target Tahun 2020	Interpretasi Capaian
			2016	2017	2018	2019	2020		
Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai	PDRB perkapita (ADHK)	Rp.Juta	23,24	24,32	25,41	26,53	26,07	26,07	>
	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,294	0,30	0,285	0,277	0,270	>
	Angka kemiskinan	%	9,32	9,06	8,88	7,98	7,98	8,75	<
	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3.97	6.05	6.12	4.72	4.65	3.88	>
	Nilai investasi	Milyar rupiah	254.91	189.29	176.84	189.3	96.41	218.79	<
	PDRB sektor Akomodasi dan makan minum	Milyar rupiah	62	68	74	82	74	80	<
	PDRB Sektor Pertanian, kehutan dan perikanan	Milyar rupiah	3,234.0	3,374.7	3,462.5	3,555.9	3,584.3	3,768.0	<
	Ketersediaan pangan utama	Kg/kapita/ thn	547.97	592.36	577.1	547.47	532.57	594,47	<
	Skor PPH	Skor	81,10	82,30	84,80	85,20	84,80	84,00	>
	Persentase infrastruktur pendukung di kawasan pertumbuhan ekonomi	%	58.90	62.32	62.05	65.58	66.78	55.00	>
Misi IV Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABSSBK	Indeks Nagari Madani	Indeks	NA	NA	0.77	0.88	0.93	0.65	>
	Angka kriminalitas	Angka	625	605	396	336	217	500	<

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	SATUAN	CAPAIAN					Target Tahun 2020	Interpretasi Capaian
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Persentase Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsi (KAN dan MUI)	%	100	100	100	97,30	99,65	100	<
Misi V Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	Indeks	3.17	3.10	3.14	3.35	3.40	3.60	<
	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	CC	CC	CC	B	<
	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	CC	B	B	B	B	BB	<
	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	<
	Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Level	NA	NA	2.02	2.78	3.5	2.9	>
	persentase Nagari dengan Indek Desa Membangun (IDM) :								
	- IDM $\leq$ 0,8155 - $\geq$ 0,7072 (Nagari maju)	%	6,76	13,51	13,51	13,51	19,91	13,59	>
	- IDM $\leq$ 0,7072 - $\geq$ 0,5989 (Nagari berkembang)	%	48,65	40,54	40,54	50,00	54,05	41,51	>
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WDP	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP	=
	persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	12	9.64	5.67	5.99	6.41	4.72	>

Sumber : Barenlitbang Tahun 2021
Keterangan : > Tercapai, < Tidak tercapai, = Sama dengan target



1. Misi 1 (Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun)

Berdasarkan tabel di atas diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja sasaran pada misi mensukseskan program wajib belajar 12 sebagian telah tercapai. Keberhasilan pada misi ini didukung oleh:

- a. jumlah sekolah yang memadai, dengan jumlah sekolah SD 361, MI 10, SMP 71 dan MTsN 25; dan
- b. adanya bantuan siswa kurang mampu berupa KIP; dan cukup optimalnya aksesibilitas pendidikan.

Faktor penghambat pada misi ini adalah :

- a. belum maksimalnya dukungan operasional dan perlengkapan operasional;
- b. adanya bantuan operasional PAUD yang belum memadai; dan
- c. belum maksimalnya dana nagari untuk pembangunan fisik PAUD.

2. Misi 2 (Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat)

Berdasarkan tabel di atas diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja sasaran pada misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan hidup bersih dan lingkungan sehat telah tercapai. Pencapaian target ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. penanganan yang cepat tanggap dalam menyikapi terjadinya bencana dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- b. adanya sinergi antara SKPD. Kabupaten Solok dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Solok Tahun 2020 dan adanya penyediaan serta pemanfaatan data terpilah gender pada SKPD Kabupaten Solok; dan
- c. berkurangnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida oleh petani yang beralih ke pupuk organik dan semakin baiknya fungsi koordinasi antara lembaga pengawasan lingkungan hidup dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya.

3. Misi 3 (Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, Didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai)

Berdasarkan tabel di atas diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja sasaran pada misi meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai secara umum telah tercapai, namun terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi yaitu:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. nilai investasi;
- c. PDRB sektor akomodasi dan makan minum ; dan
- d. ketersediaan pangan utama.

Faktor penghambat dari masalah tersebut adalah:

- a. menurunnya laju PDRB dari 17 lapangan usaha;

- b. menurunnya nilai investasi di Kabupaten Solok dari angka 180,3 milyar pada tahun 2019 menjadi 95,21 milyar pada tahun 2020;
- c. menurunnya pengembangan infrastruktur pendukung dikawasan pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2020 dibangun 7 buah jembatan tetapi tidak ada yang selesai karena anggaran mengalami *refocusing*; dan
- d. menurunnya penghasilan para pelaku usaha mikro kecil karena kurangnya permintaan pasar.

4. Misi 4 (Membangun Karakter Masyarakat Sesuai Filosofi ABS-SBK)

Berdasarkan tabel di atas diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja sasaran pada misi membangun karakter masyarakat sesuai filosofi ABS SBK telah tercapai. Hal ini didukung oleh :

- a. adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Solok dengan Kementerian Agama, Pemerintahan Nagari dan Lembaga keagamaan; dan
- b. dampak dari program magrib Al-quran dan subuh berjamaah, program pemberian bantuan operasional bagi penyuluh agama dan Da'I daerah terpencil dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaran agama.

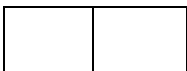
5. Misi 5 (Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih)

Berdasarkan tabel di atas diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja sasaran pada misi memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara keseluruhan telah tercapai, tapi masih ada yang belum tercapai yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan, Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh:

- a. rata-rata perangkat daerah di Kabupaten Solok belum memiliki dan menerapkan standar pelayanan sehingga pelayanan belum memenuhi 9 unsur layanan secara optimal;
- b. Kabupaten Solok belum memiliki Mall pelayanan Publik; dan
- c. perlu peningkatan pembenahan dalam manajemen dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mulai dari sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta sumber daya yang handal.

2.6 Capaian Penerapan (Standar Pelayanan Minimal) SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal dan Permendagrri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi pelayanan pada 6 urusan pemerintahah wajib terkait pelayanan dasar. Untuk Kabupaten kota terdapat 29 pelayanan yang harus di penuhi sebagaimana Tabel 2.63.



Tabel 2.63
Jenis Pelayanan pada Standar Pelayanan Kabupaten / Kota

No	Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan	SKPD penanggung Jawab
1	Urusan Pendidikan	3	Disdikpora
2	Urusan Kesehatan	12	Dinkes
3	Urusan Pekerjaan Umum	2	DPUPR
4	Urusan Perumahan Rakyat	2	DPRKPP
5	Urusan Ketentraman, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	5	Satpol PP dan BPBD
6	Urusan Sosial	5	Dinsos
Total pelayanan		29	

Sumber : Barenlitbang Kabupaten Solok 2021

Penerapan SPM Kabupaten Solok, dimulai tahun 2018 sejak di berlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Namun terdapat perbedaan nomenklatur indikator pada Tahun 2018/ 2019 dan tahun 2020, hal ini di sebabkan karena telah ditetapkannya Paraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Dasar Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah mengadopsi semua indikator perjenis layanan sesuai dengan Permen teknis masing-masing urusan. Berikut capaian indikator SPM pada 6 urusan dan 29 jenis pelayanan yang dijelaskan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Solok Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target	Capaian		
				2018	2019	2020
I	Urusan Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Persentase masyarakat usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	100	100	100	99,57
		Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP	100	100	100	86,59
2	Pendidikan Kesenjangan	Persentase masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	61,81



No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target	Capaian		
				2018	2019	2020
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah masyarakat usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	74,84
II	Urusan Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	98,09	100	81,13
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	98,23	97,92	81,88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	98,36	100	84,64
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	89,69	100	79,10
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Presentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	98,14	100	51,20
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase orang usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	100	82,11	80,09	53,38
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Presentase Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	100	81,20	100	92,07
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	81,28	99,46	21,40
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Presentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	81,65	100	131
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Presentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	98,98	101
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	84,43



No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target	Capaian		
				2018	2019	2020
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	83,25	100	47
III	Urusan Pekerjaan Umum					
1	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari - hari	Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum spam dan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Ruma tangga di daerah	100	75,07	76,27	78,95
2	Penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	69,40	69,97	70,13
IV	Urusan Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten terhadap total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemda	Persentase jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100	100	100	100
V	Urusan Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target	Capaian		
				2018	2019	2020
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	19,16
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah	100	100	100	100
VI	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kerugian materil dan/atau pengobatan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	100	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target	Capaian		
				2018	2019	2020
		layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana				
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Daerah dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh perangkat daerah pelaksana urusan/fungsi pemadam kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di Daerah dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan perangkat daerah pelaksana urusan/fungsi pemadam kebakaran terhadap jumlah kejadian kebakaran di daerah	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Bag. Pemerintahan Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal dengan target capaian 100 persen untuk masing-masing indikator. Capaian indikator penerapan SPM pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar rata-rata mencapai 100 persen. Terdapat 3 urusan yang capaiannya masih di bawah 100 persen, diantara nya urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan dan Urusan Pekerja Umum.

Urusan pendidikan pada Tahun 2020 rata-rata capaian di bawah 100 persen, terjadi penurunan capain di bandingkan tahun-tahun sebelum nya. Hal ini berkaitan dengan masih belum maksimalnya peningkatan kapasitas Kepala Sekolah dan guru melalui penyelenggaraan diklat cakep dan beasiwa untuk guru-guru Paud, SD dan SMP.



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian SPM Urusan Kesehatan sampai tahun 2019 selalu meningkat hingga mencapai 100 persen untuk Sebagian besar indikator. Akan tetapi dengan terjadinya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 hampir seluruh indikator SPM mengalami penurunan sehingga jauh dari target yang diharapkan, meskipun ada beberapa indikator yang melebihi target. Data ini menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pelayanan Kesehatan di Kabupaten Solok.

Selain itu, pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 rata-rata capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik masih dibawah 100 persen disebabkan oleh sebagian masyarakat belum memiliki fasilitas air minum dan sanitasi layak karena masih banyaknya masyarakat miskin dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi penyediaan fasilitas pendukung tersebut.

2.7 Capaian SDG’s

Sustainable Development Goals (SDGs) atau disebut juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, kategori evaluasi SDGs atau TPB dikelompokan sebagai berikut:

- 1. Sudah mencapai target (SS)
- 2. Belum mencapai target (SB)
- 3. Tidak ada data atau belum terlaksana (NA)
- 4. Bukan Kewenangan (BK)

Secara umum indikator SDGs dapat dikelompokan menjadi 4 pilar yaitu: pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Adapun pengelompokan dan capaian menurut pilar dapat dilihat pada Tabel 2.65 dan Grafik 2.21.

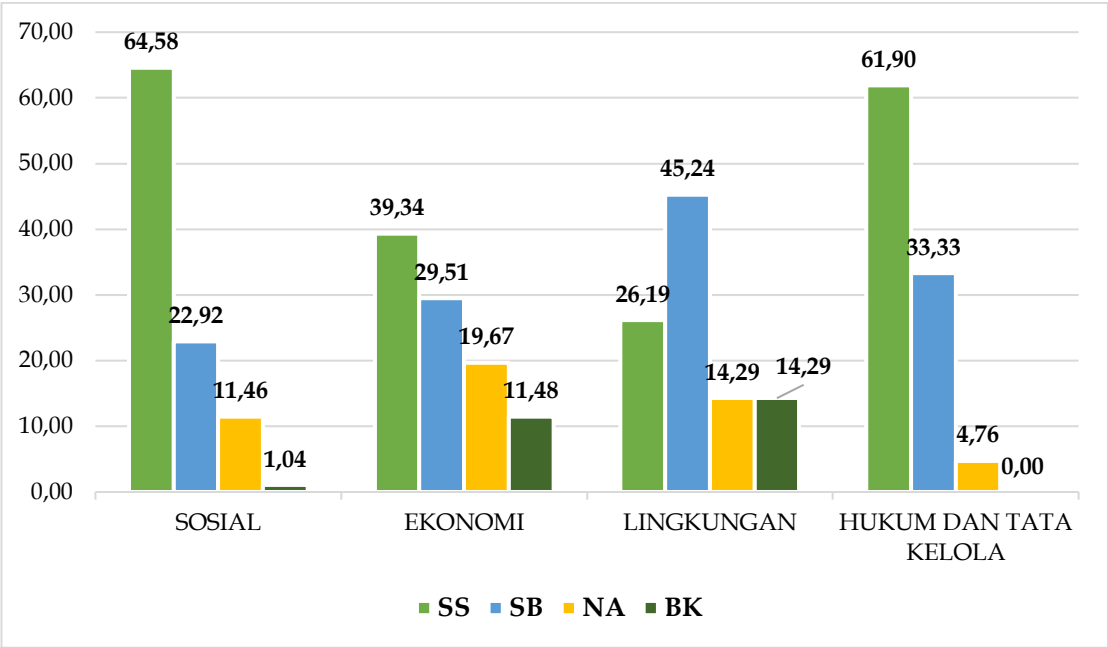
Tabel 2.65
Jumlah Indikator SDGs Kewenangan Kabupaten Solok Berdasarkan Pilar

No	Pilar	Jumlah indikator	Persentase
1	Sosial	96	44%
2	Ekonomi	61	28%
3	Lingkungan	42	19%
4	Hukum dan tata kelola	21	10%
Jumlah		220	100%

Sumber: Dokumen KLHS Kab Solok Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.65 diketahui bahwa pilar sosial memiliki indikator paling banyak di SDGs sebanyak 44 persen. Sementara itu pilar hukum dan tata kelola merupakan indikator paling sedikit di SDGs sebanyak 10 persen. Untuk melihat seberapa besar capaian indikator SDGs berdasarkan pilar, dapat dilihat pada Grafik 2.21





Grafik 2.21
Capaian Indikator SDGs Kewenangan Kabupaten Solok Berdasarkan Pilar

Dari Grafik 2.21 dapat diketahui bahwa indikator yang sudah mencapai target paling banyak terdapat pada kelompok pilar sosial sebanyak 64,58 persen dan diikuti oleh indikator pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 61,90 persen. Sedangkan indikator yang belum mencapai target paling banyak terdapat pada pilar lingkungan sebanyak 5,24 persen. Untuk indikator yang tidak tersedia paling banyak terdapat pada pilar ekonomi sebanyak 29,51 persen, sementara itu indikator yang bukan kewenangan paling banyak terdapat pada pilar lingkungan sebanyak 14,29 persen.

Secara rinci SDGs atau TPB terdiri atas 17 tujuan dan 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok seperti yang tercantum pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Tujuan dan Indikator Sustainable Development Goals

No	Tujuan	Jumlah Indikator	Keterangan	Pilar
1	Tanpa kemiskinan	24	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan diseluruh tempat	Sosial
2	Tanpa kelaparan	11	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi sertya menggalakan pertanian yang berkelanjutan	Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	Menggalakan hidup sehatn dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia	Sosial
4	Pendidikan yang bekualitas	13	Memastikan Pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang	Sosial
5	Kesetaraan Gender	14	Mencapai kesetaraan gender dan	Sosial



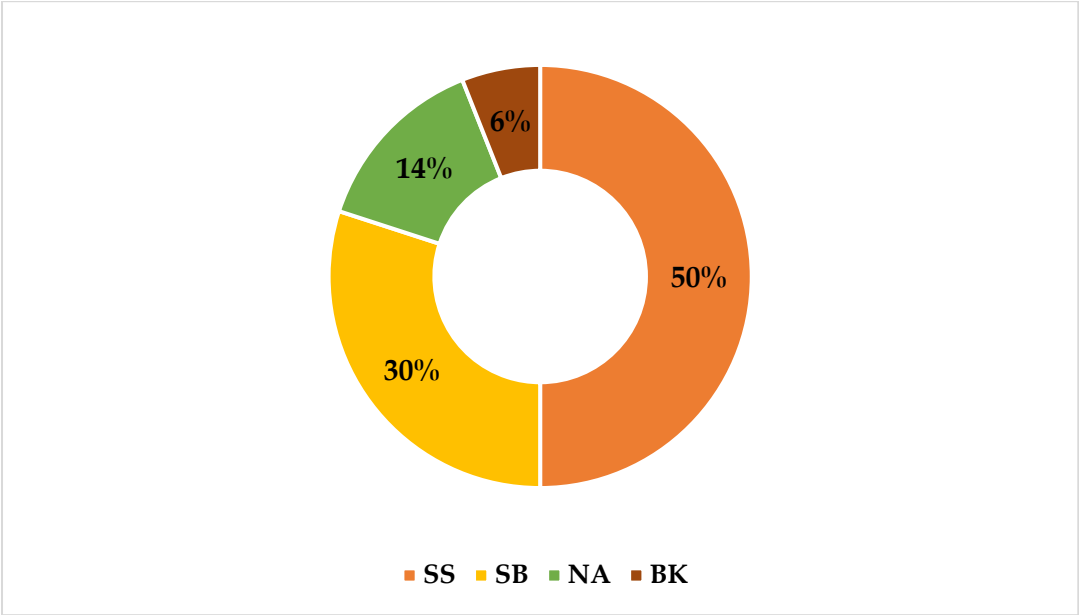
No	Tujuan	Jumlah Indikator	Keterangan	Pilar
			memberdayakan perempuan	
6	Air Bersih dan sanitasi layak	18	Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua	Lingkungan
7	Energi bersih dan terjangkau	2	Memastikan akses pada energy yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua	Ekonomi
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua	Ekonomi
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	13	Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi	Ekonomi
10	Berkurangnya kesenjangan	11	Mengurangi kesenjangan didalam dan antara negara-negara	Ekonomi
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	13	Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan	Lingkungan
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Lingkungan
13	Penanganan perubahan iklim	2	Mengambil Langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya	Lingkungan
14	Ekosistem laut	-	Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan	Lingkungan
15	Ekosistem Darat	4	Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati	Humum dan tata kelola
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	21	Mendorong masyarakat adil, damai dan inklusi	Ekonomi
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	Menghidupkan Kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan	
JUMLAH		220		

Sumber: Dokumen KLHS Kab Solok Tahun 2021



Dari 17 Indikator SDGs, hanya 16 Indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok. Hal ini disebabkan karena indikator 14 (Kewenangan Laut) bukan menjadi kewenangan di Kabupaten Solok (BK).

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian SDGs di Kabupaten Solok menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dapat diketahui bahwa 110 indikator (50 persen) sudah mencapai target (SS) dan 66 indikator (30 persen) belum mencapai target (SB). Sementara itu terdapat 30 indikator (14 persen) tidak tersedia (NA) dan 14 indikator (6 persen) bukan kewenangan (BK). Untuk lebih jelasnya tergambar pada Grafik 2.22



Grafik 2.22
Capaian Indikator SDGs Kabupaten Solok

2.7.1 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

Hasil analisis capaian SDGs pada dokumen KLHS Kabupaten Solok, indikator yang sudah terlaksana dan mencapai target (SS) di Kabupaten Solok untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.67.

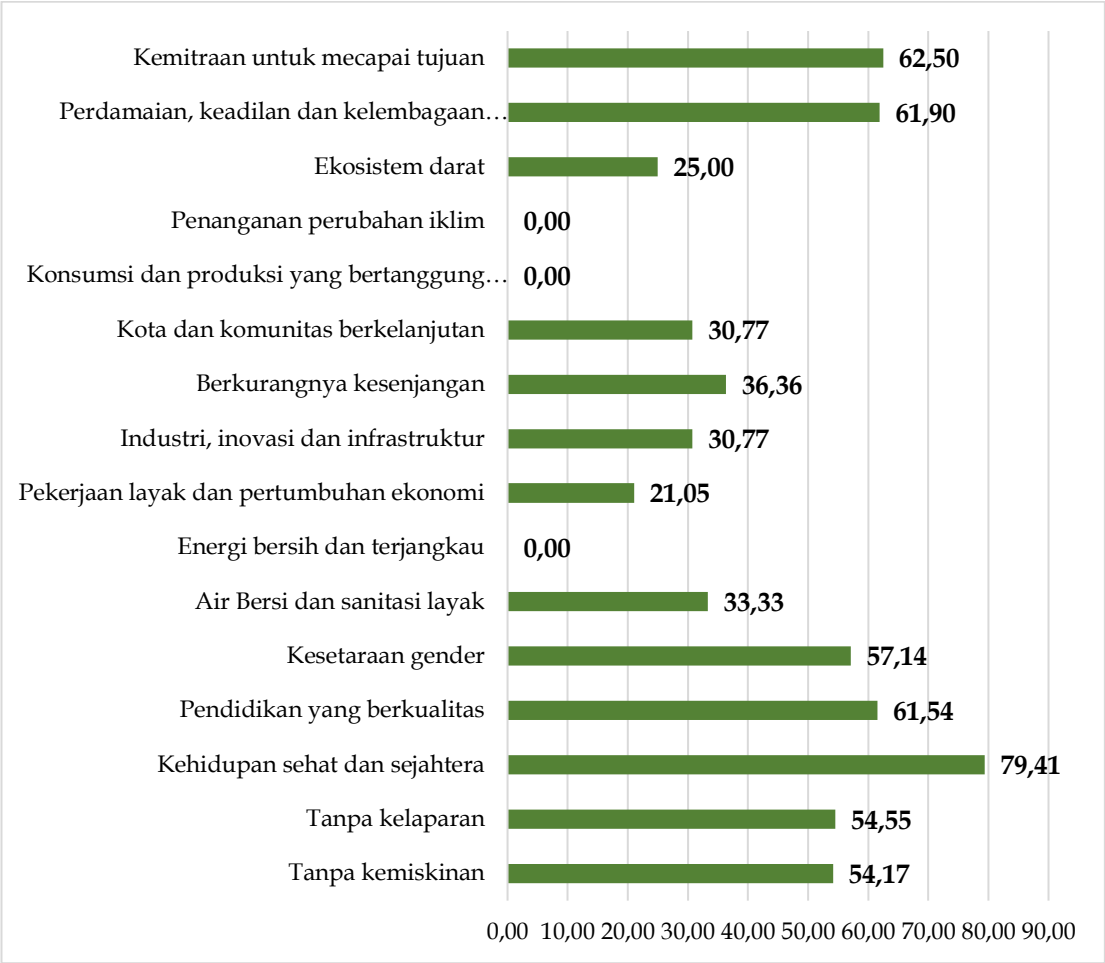
Tabel 2.67
Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana dan Mencapai Target di Kabupaten Solok

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	SS	Pilar
1	Tanpa kemiskinan	24	13	Sosial
2	Tanpa kelaparan	11	6	Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	27	Sosial
4	Pendidikan yang berkualitas	13	8	Soial
5	Kesetaraan Gender	14	8	Sosial
6	Air Bersih dan sanitasi layak	18	6	Lingkungan
7	Energi bersih dan terjangkau	2	0	Ekonomi
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	4	Ekonomi
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	13	4	Ekonomi
10	Berkurangnya kesenjangan	11	4	Ekonomi



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	SS	Pilar
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	13	4	Lingkungan
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	0	Lingkungan
13	Penanganan perubahan iklim	2	0	Lingkungan
14	Ekosistem Darat	4	1	Lingkungan
15	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	21	13	Humum dan Tata Kelola
16	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	10	Ekonomi
TOTAL		220	110	

Tabel 2.67 menjelaskan bahwa dari 220 indikator SDGs/TPB kewenangan Kabupaten Solok, 110 indikator (50 persen) sudah terlaksana dan sudah mencapai target. Persentase capaian untuk indikator yang sudah terlaksana dan mencapai target dapat dilihat pada Grafik 2.23.



Grafik 2.23
 Persentase indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana dan Mencapai Target di Kabupaten Solok

Grafik 2.23 menunjukan bahwa indikator yang terlaksana dan mencapai target paling banyak adalah indikator dari tujuan kehidupan sehat dan sejahtera sebesar 79,41 persen. Sementara indikator yang paling sedikit capainnya selain 3 indikator tujuan yang memang belum terlaksana adalah indikator tujuan pekerjaan layak dan ekonomi.



2.7.2 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

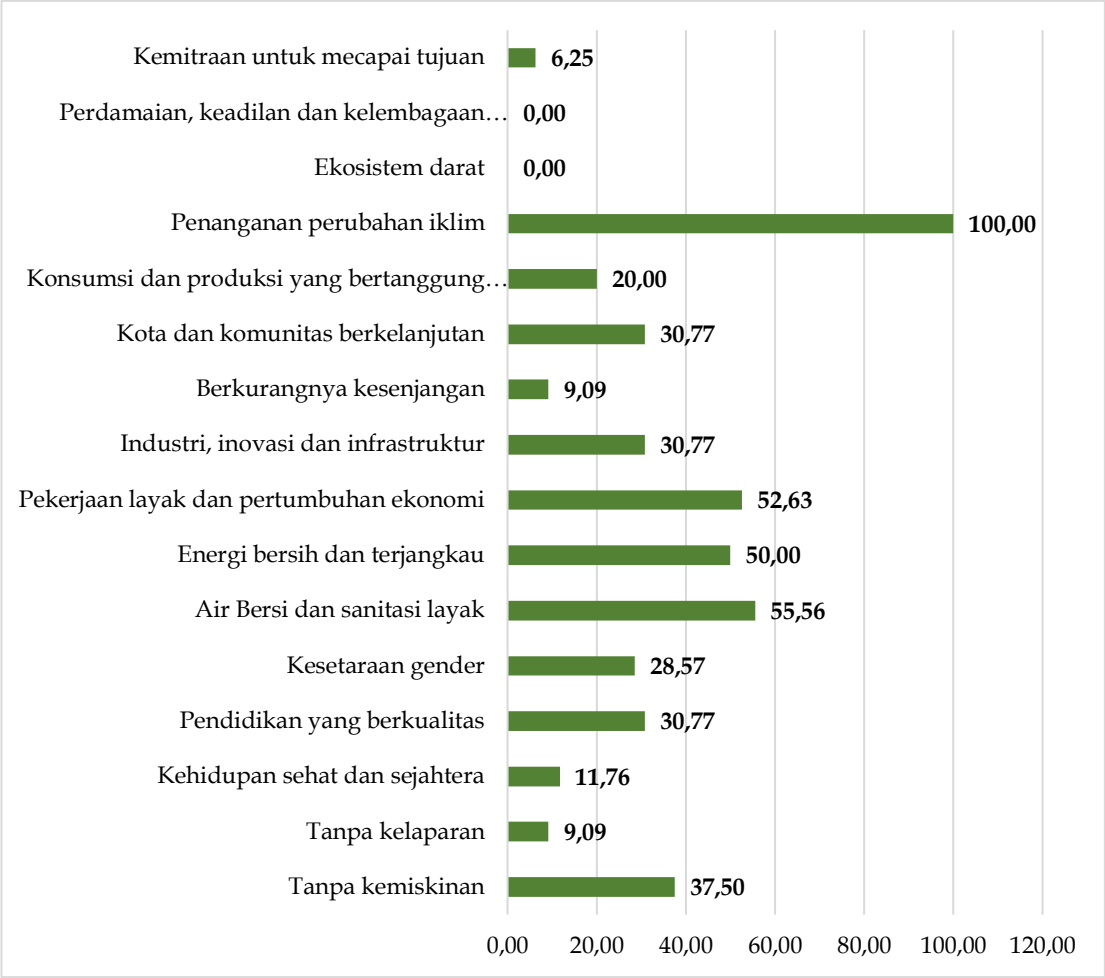
Hasil analisis capaian SDGs pada dokumen KLHS Kabupaten Solok, indikator yang sudah terlaksana dan belum mencapai target (SB) di Kabupaten Solok untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Solok

No	Tujuan pembangunan berkelanjutan	Jumlah Indikator	SB	Pilar
1	Tanpa kemiskinan	24	9	Sosial
2	Tanpa kelaparan	11	1	Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	4	Sosial
4	Pendidikan yang berkualitas	13	4	Soial
5	Kesetaraan Gender	14	4	Sosial
6	Air Bersih dan sanitasi layak	18	10	Lingkungan
7	Energi bersih dan terjangkau	2	1	Ekonomi
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	10	Ekonomi
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	13	4	Ekonomi
10	Berkurangnya kesenjangan	11	1	Ekonomi
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	13	4	Lingkungan
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	1	Lingkungan
13	Penanganan perubahan iklim	2	2	Lingkungan
14	Ekosistem Darat	4	0	Lingkungan
15	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	21	0	Humum dan Tata Kelola
16	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	1	Ekonomi
TOTAL		220	66	

Tabel 2.63 menjelaskan bahwa dari 220 indikator SDGs/TPB kewenangan Kabupaten Solok, 66 indikator (30 persen) sudah terlaksana dan belum mencapai target. Persentase capaian untuk indikator yang sudah terlaksana dan belum mencapai target dapat dilihat pada Grafik 2.24





Grafik 2.24
Persentase Indikator SDGs/TPB yang Sudah Terlaksana Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Solok

Grafik 2.24 menunjukkan bahwa indikator yang terlaksana tapi belum mencapai target paling banyak adalah indikator dari tujuan penanganan perubahan iklim sebesar 100 persen. Indikator yang terlaksana tapi belum mencapai target paling sedikit terdapat pada indikator tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan sebesar 6,25 persen.

2.7.3 Indikator Yang Belum Memiliki Data (NA)

Hasil analisis capaian SDGs pada dokumen KLHS Kabupaten Solok, indikator yang belum memiliki data (NA) di Kabupaten Solok untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.69.

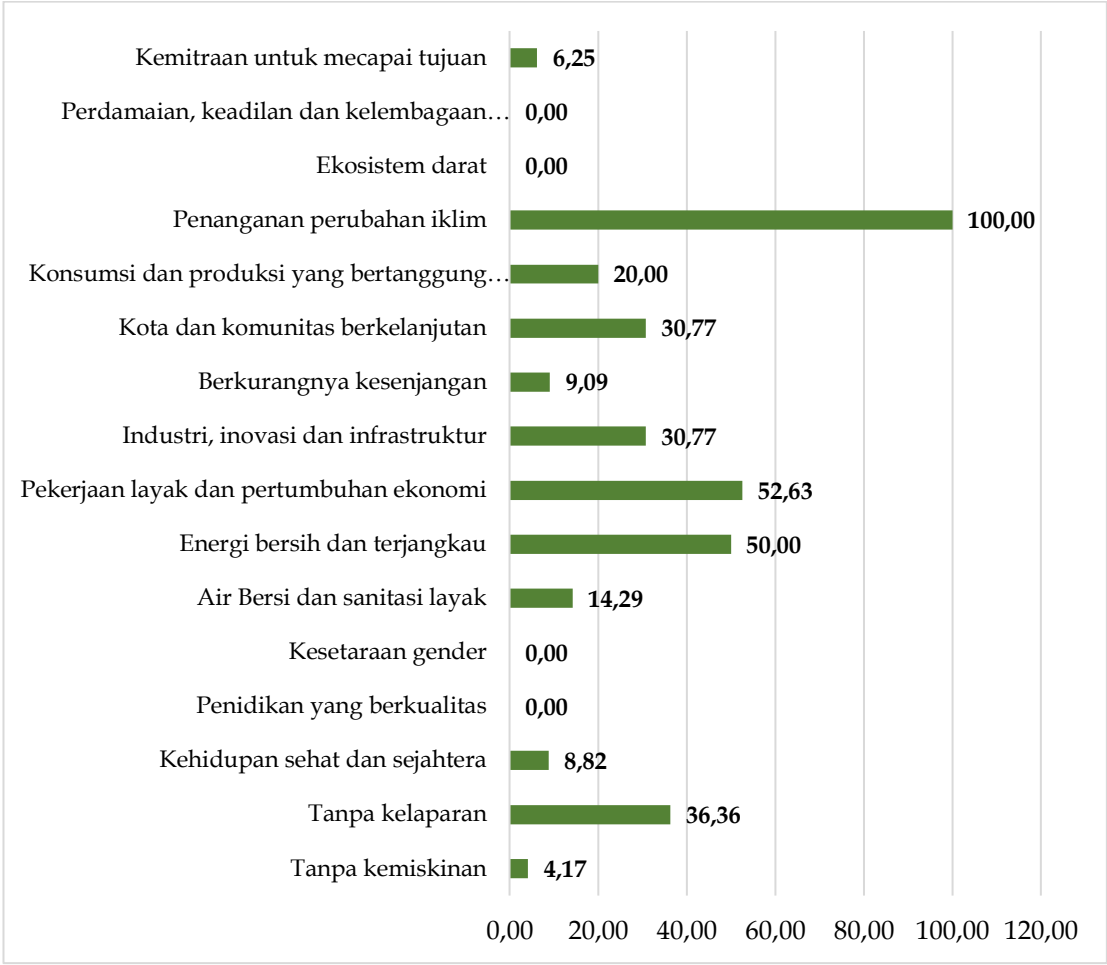
Tabel 2.69
Indikator SDGs/TPB yang Belum Memiliki Data di Kabupaten Solok

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	SB	Pilar
1	Tanpa kemiskinan	24	1	Sosial
2	Tanpa kelaparan	11	4	Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	3	Sosial
4	Pendidikan yang berkualitas	13	0	Sosial
5	Kesetaraan Gender	14	2	Sosial
6	Air Bersih dan sanitasi layak	18	1	Lingkungan



No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	SB	Pilar
7	Energi bersih dan terjangkau	2	0	Ekonomi
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	5	Ekonomi
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	13	1	Ekonomi
10	Berkurangnya kesenjangan	11	2	Ekonomi
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	13	1	Lingkungan
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	3	Lingkungan
13	Penanganan perubahan iklim	2	0	Lingkungan
14	Ekosistem Darat	4	1	Lingkungan
15	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	21	1	Humum dan Tata Kelola
16	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	3	Ekonomi
TOTAL		220	30	

Tabel 2.69 menjelaskan bahwa dari 220 indikator SDGs/TPB kewenangan Kabupaten Solok, 30 indikator (14 persen) belum memiliki data. Persentase capaian untuk indikator yang belum memiliki data dapat dilihat pada Grafik 2.25.



Grafik 2.25
Persentase indikator SDGs/TPB yang Tidak Memiliki Data



Grafik 2.25 menunjukan bahwa indikator yang belum memiliki data paling banyak adalah indikator dari tujuan penanganan perubahan iklim sebesar 100 persen. Indikator yang tidak ada lagi yang belum memiliki data terdapat pada indikator tujuan Pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, ekosistem darat serta perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh.

Selain 3 (tiga) kategori diatas, terdapat 14 (6 persen) indikator lagi yang bukan kewenangan Kabupaten Solok. Sehingga untuk indikator tersebut tidak dijelaskan pada dokumen ini.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka Pendanaan

BAB III

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

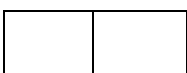
Analisis gambaran keuangan daerah bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP No 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pembaharuan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam bab ini, ditampilkan tentang gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD tahun 2021-2026.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pengelolaan kewenangan keuangan daerah dengan kewenangan yang berdasarkan atas otonomi daerah memiliki tantangan tersendiri. Untuk mencapai target pembangunan yang berkualitas maka penting mengelola keuangan daerah secara baik, efektif dan efisien sehingga potensi-potensi yang ada dalam pembangunan bisa dioptimalkan. Pemahaman yang baik terhadap objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur APBD merupakan instrumen kunci untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas riil keuangan daerah sekaligus untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang adaptif sesuai dengan kondisi daerah.

Untuk memahami kinerja keuangan Kabupaten Solok maka dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan dimasa lalu meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2016-2020. Pemahaman yang baik terhadap kondisi keuangan daerah di masa lalu menjadi panduan bagi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang yang tersusun dalam rumusan strategi dan kebijakan pendanaan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan.



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain pendapatan (*revenue*) daerah dan belanja pengeluaran (*expenditure*) daerah. Kedua komponen ini mencerminkan mandiri atau tidaknya daerah dalam hal kemampuan fiskal.

a. Kinerja Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Solok selama periode tahun Anggaran 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,42 persen per tahun. Peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan yang mengalami penurunan dari 1.128.678.628.074,52 rupiah pada tahun 2016 menjadi 1.139.147.681.879,33 rupiah pada tahun 2020. Sedangkan perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari 58.803.477.232,52 di tahun 2016 menjadi 70.572.545.436,33 rupiah pada tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,19 persen per tahun. Rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami peningkatan sebesar 18,55 persen, dimana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami *trend* kenaikan. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5 persen yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

2. Pendapatan Transfer

Untuk Pendapatan Transfer dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sampai dengan 1,24 persen dimana hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Solok mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2018 Dana Alokasi Umum sebanyak 710.962.915.000,00 rupiah sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 731.032.814.000,00 rupiah sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 661.472.507.000,00 rupiah. Hal ini juga terjadi pada transfer Dana Alokasi Khusus yang mengalami rata-rata penurunan sebesar 3,08 persen, dimana pada tahun 2018 jumlah Dana Alokasi Khusus sebesar 212.776.602.312,00 rupiah, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 239.755.309.253,00 rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 190.930.132.003,00 rupiah.

Disamping Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sumber Pendapatan Transfer juga berasal dari tranfser Pemerintah Provinsi. Salah satunya Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38 persen. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tahun 2016 sebesar 40.286.912.481,00 rupiah, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 50.241.804.550,00 rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 44.067.212.947,00 rupiah. Sumber Pendapatan Transfer lainnya adalah berupa Dana Hibah yaitu Dana BOS yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 167 persen.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d Tahun 2020 (Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	6	4	5
PENDAPATAN	1.128.678.628.074,52	1.144.553.785.047,73	1.163.604.738.667,08	1.254.704.484.574,82	1.139.147.681.879,33	0,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.803.477.232,52	113.269.815.423,73	68.301.516.506,08	74.595.911.758,82	70.572.545.436,33	14,19
Pendapatan Pajak Daerah	11.441.155.032,33	14.717.757.802,29	19.015.027.864,53	20.193.380.838,77	19.015.335.312,05	14,55
Pendapatan Retribusi Daerah	13.198.160.412,00	5.590.150.086,00	6.048.791.115,00	7.116.946.801,00	5.135.788.917,00	-14,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.509.481.945,00	6.839.378.883,00	6.044.383.899,00	6.917.861.764,00	7.210.424.094,00	3,03
Lain-lain PAD yang sah	27.654.679.843,19	86.122.528.652,44	37.193.313.627,55	40.367.722.355,05	39.210.997.113,28	40,07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	58.803.477.232,52	113.269.815.423,73	68.301.516.506,08	74.595.911.758,82	70.572.545.436,33	14,19
PENDAPATAN TRANSFER	1.066.765.102.592,00	1.021.162.705.982,00	1.041.835.273.093,00	1.115.789.009.816,00	1.006.247.096.443,00	-1,24
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	967.169.382.111,00	911.897.537.818,00	936.193.160.458,00	980.735.199.266,00	863.880.874.496,00	-2,55
Dana Bagi Hasil Pajak	12.391.042.924,00	10.929.496.866,00	10.218.439.468,00	7.287.880.778,00	9.391.953.203,00	-4,53
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.991.815.043,00	2.667.931.288,00	2.235.203.678,00	2.659.195.235,00	2.086.282.290,00	3,79
Dana Alokasi Umum	723.675.568.000,00	710.962.915.000,00	710.962.915.000,00	731.032.814.000,00	661.472.507.000,00	-2,11
Dana Alokasi Khusus	229.110.956.144,00	187.337.194.664,00	212.776.602.312,00	239.755.309.253,00	190.930.132.003,00	-3,08
Jumlah pendapatan Transfer Dana Perimbangan	967.169.382.111,00	911.897.537.818,00	936.193.160.458,00	980.735.199.266,00	863.880.874.496,00	-2,55
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	50.220.928.000,00	64.082.138.000,00	62.971.507.000,00	84.812.006.000,00	98.299.009.000,00	19,11



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	6	4	5
Dana Penyesuaian	50.220.928.000,00	64.082.138.000,00	62.971.507.000,00	84.812.006.000,00	98.299.009.000,00	19,11
Jumlah pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	50.220.928.000,00	64.082.138.000,00	62.971.507.000,00	84.812.006.000,00	98.299.009.000,00	19,11
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	49.374.792.481,00	45.183.030.164,00	42.670.605.635,00	50.241.804.550,00	44.067.212.947,00	-2,15
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.286.912.481,00	42.283.030.164,00	42.670.605.635,00	50.241.804.550,00	44.067.212.947,00	2,83
Pendapatan Lainnya	9.087.880.000,00	2.900.000.000,00	-	-	-	-17,02
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	49.374.792.481,00	45.183.030.164,00	42.670.605.635,00	50.241.804.550,00	44.067.212.947,00	-2,15
Total Pendapatan Transfer	1.066.765.102.592,00	1.021.162.705.982,00	1.041.835.273.093,00	1.115.789.009.816,00	1.006.247.096.443,00	-1,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.110.048.250,00	10.121.263.642,00	53.467.949.068,00	64.319.563.000,00	62.328.040.000,00	167,73
Pendapatan Hibah	3.110.048.250,00	10.121.263.642,00	53.467.949.068,00	64.319.563.000,00	62.328.040.000,00	167,73
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.110.048.250,00	10.121.263.642,00	53.467.949.068,00	64.319.563.000,00	62.328.040.000,00	167,73
JUMLAH PENDAPATAN	1.128.678.628.074,52	1.144.553.785.047,73	1.163.604.738.667,08	1.254.704.484.574,82	1.139.147.681.879,33	0,42

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021

Tabel 3.2 memperlihatkan distribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Solok dimana selama lima tahun terakhir distribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Solok mengalami fluktuasi sebagai dampak dari perkembangan makro ekonomi nasional dan daerah. Perkembangan perekonomian makro nasional yang cenderung melamban dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 telah berpengaruh pada menurunnya penerimaan daerah yang terlihat dari penurunan besaran transfer ke daerah. Kondisi ini juga berdampak pada Kabupaten Solok sebagai daerah otonom dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat.

Tabel 3.2
Distribusi Sumber Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020 Kabupaten Solok (%)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5,21	9,90	5,87	5,95	6,20
1.1.1	Pajak Daerah	1,01	1,29	1,63	1,61	1,67
1.1.2	Retribusi Daerah	1,17	0,49	0,52	0,57	0,45
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,58	0,60	0,52	0,55	0,63
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,45	7,52	3,20	3,22	3,44
1.2	Pendapatan Transer	95	89	90	89	88
1.2.1	Dana Perimbangan	85,69	79,67	80,46	78,16	75,84
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak	1,10	0,95	0,88	0,58	0,82
1.2.3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,18	0,23	0,19	0,21	0,18
1.2.4	Dana Alokasi Umum	64,12	62,12	61,10	58,26	58,07
1.2.5	Dana Alokasi Khusus	20,30	16,37	18,29	19,11	16,76
1.3	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	4,45	5,60	5,41	6,67	8,63
1.3.1	Dana Penyesuaian	4,45	5,60	5,41	6,67	8,63



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4	Tranfser Pemerintah Provinsi	4,37	3,95	3,67	4,00	3,87
1.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3,57	3,69	3,67	4,00	3,87
1.4.2	Pendapatan Lainnya	0,81	0,25	-	-	-
1.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,28	0,88	4,60	5,13	5,47
1.5.1	Hibah	0,28	0,88	4,60	5,13	5,47
1.3.2	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021

Distribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Solok paling besar bersumber dari Dana Perimbangan seperti pada tahun 2020 sebesar 75,84 persen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 58,07 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 16,76 persen. Sedangkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 sebesar 6,20 persen yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar 1,67 persen, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,45 persen, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,63 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 3,44 persen.

b. Kinerja Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dinyatakan bahwa belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan yang tidak terkait pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh daerah.



Namun, semenjak tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas mendapatkan anggaran. Oleh sebab itu, perkembangan belanja daerah Kabupaten Solok tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diwarnai oleh kedua peraturan tersebut seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2016 s/d Tahun 2020 (Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	6	4	5
BELANJA	1.056.989.893.017,85	1.035.544.129.158,80	1.028.481.783.757,84	1.095.235.401.850,06	984.201.658.384,05	-1,59
BELANJA OPERASI	849.815.544.953,32	829.944.730.115,80	861.017.445.564,19	900.110.242.112,50	847.838.293.017,03	0,03
Belanja Pegawai	636.739.711.957,00	569.189.186.450,00	604.923.835.768,22	638.290.163.588,00	617.864.539.686,00	-0,50
Belanja Barang dan Jasa	202.379.190.093,32	251.164.143.665,80	210.441.529.154,00	222.639.343.019,50	181.232.913.331,03	-1,23
Bunga	-	-	-	-	-	
Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	10.211.642.903,00	9.591.400.000,00	24.270.007.840,00	39.180.735.505,00	48.740.840.000,00	58,20
Bantuan Sosial	485.000.000,00	-	21.382.072.801,97	-	-	
Jumlah Belanja Operasi	849.815.544.953,32	829.944.730.115,80	861.017.445.564,19	900.110.242.112,50	847.838.293.017,03	0,03
BELANJA MODAL	205.316.599.064,53	204.616.665.888,00	167.162.730.043,65	194.815.396.237,56	110.707.851.887,02	-11,32
Belanja Tanah	1.020.950.564,00	-	746.593.421,00	14.951.300,00	-	-98,00
Belanja Peralatan dan Mesin	36.331.760.919,53	44.728.800.740,00	35.252.143.620,50	31.849.567.091,34	28.225.024.698,50	-4,78
Belanja Gedung dan Bangunan	35.663.367.490,00	26.922.205.080,00	28.515.301.779,15	69.211.923.289,22	43.475.475.219,52	21,74
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.798.862.591,00	121.954.095.387,00	91.701.868.975,00	83.384.853.277,00	31.089.290.307,00	-25,84
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.501.657.500,00	11.011.564.681,00	10.941.822.248,00	10.314.881.280,00	7.918.061.662,00	150,92
Belanja Aset Lainnya	-	-	5.000.000,00	39.220.000,00	-	684,40



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	6	4	5
Jumlah Belanja Modal	205.316.599.064,53	204.616.665.888,00	167.162.730.043,65	194.815.396.237,56	110.707.851.887,02	-11,32
BELANJA TAK TERDUGA	1.857.749.000,00	982.733.155,00	301.608.150,00	309.763.500,00	25.655.513.480,00	2017,15
Belanja Tak Terduga	1.857.749.000,00	982.733.155,00	301.608.150,00	309.763.500,00	25.655.513.480,00	2017,15
Jumlah Belanja Tak Terduga	1.857.749.000,00	982.733.155,00	301.608.150,00	309.763.500,00	25.655.513.480,00	2017,15
Jumlah Belanja	1.056.989.893.017,85	1.035.544.129.158,80	1.028.481.783.757,84	1.095.235.401.850,06	984.201.658.384,05	-1,59
TRANSFER	128.181.339.981,16	141.055.724.040,42	139.025.102.524,70	152.485.561.515,75	150.431.644.280,75	4,23
TRANSFER/ BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA	2.900.500.035,16	1.888.254.833,88	2.572.244.979,70	2.907.018.315,75	4.098.526.960,75	13,83
Bagi Hasil Pajak	1.098.739.223,42	1.066.329.558,00	1.404.952.385,00	1.745.708.440,00	2.668.798.607,00	26,48
Bagi Hasil Retribusi	1.407.981.618,32	424.705.854,00	523.256.203,00	580.686.489,00	809.023.732,00	0,92
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	393.779.193,42	397.219.421,88	644.036.391,70	580.623.386,75	620.704.621,75	15,02
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	2.900.500.035,16	1.888.254.833,88	2.572.244.979,70	2.907.018.315,75	4.098.526.960,75	13,83
TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	125.280.839.946,00	139.167.469.206,54	136.452.857.545,00	149.578.543.200,00	146.333.117.320,00	4,15
Bantuan Keuangan ke Desa	124.383.306.996,00	138.269.938.000,00	135.555.326.495,00	148.741.082.800,00	145.458.384.100,00	4,18
Bantuan Keuangan Lainnya	897.532.950,00	897.531.026,54	897.531.050,00	837.460.400,00	874.733.220,00	-0,56
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	125.280.839.946,00	139.167.469.206,54	136.452.857.545,00	149.578.543.200,00	146.333.117.320,00	4,15
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.185.171.232.999,01	1.176.599.853.199,22	1.167.506.886.282,54	1.247.720.963.365,81	1.134.633.302.664,80	-0,92
SURPLUS/(DEFISIT)	-56.492.604.924,49	-32.046.068.151,49	-3.902.147.615,46	6.983.521.209,01	4.514.379.214,53	-111,35

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021



Berdasarkan Tabel 3.3 realisasi belanja daerah Kabupaten Solok rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,59 persen, dimana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 984.201.658.384,05 rupiah atau -10,14 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1095235401850,06 rupiah, hal ini disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Penjelasan lebih rinci terkait realisasi belanja per komponen dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
- Belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen yang terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berfluktuasi setiap tahunnya. Untuk belanja pegawai rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,50 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya ASN yang memasuki masa pensiun. Khusus untuk belanja barang dan jasa hal ini juga dipengaruhi oleh *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19. Sementara untuk dana hibah mengalami rata-rata peningkatan sebesar 58,20 persen yang merupakan hibah kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum serta BOP PAUD.
2. Belanja Modal
- Belanja modal rata-rata mengalami penurunan sebesar 11,32 persen yang dipengaruhi oleh penurunan rata-rata pendapatan setiap tahunnya. Belanja gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar 21,74 persen yang disebabkan karena adanya pembangunan gedung kantor bupati baru yang telah selesai pengerjaannya pada tahun 2020. Sedangkan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan 25,84 persen karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
3. Belanja Lainnya
- Yang termasuk ke belanja lainnya adalah belanja tak terduga dan transfer atau bantuan keuangan. Untuk belanja tidak terduga mengalami peningkatan sebesar 2017,15 persen yang merupakan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk transfer atau bantuan keuangan adalah bantuan keuangan ke Pemerintahan Nagari dan bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan lainnya ke nagari.

Pada tahun 2016 terdapat defisit anggaran dari -56.492.604.924,49 rupiah. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga terjadi defisit anggaran, hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat surplus anggaran yaitu sebesar 6.983.521.209,01 rupiah dan 4.514.379.214,53 rupiah.

Tabel 3.4
Retribusi Belanja Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2016 s/d Tahun 2020 (%)

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Operasi	71,70	70,54	73,75	72,14	74,72
2.1.1	Belanja Pegawai	53,73	48,38	51,81	51,16	54,45
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17,08	21,35	18,02	17,84	15,97
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-



NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	0,86	0,82	2,08	3,14	4,30
2.1.2	Belanja Bantuan Sosial	0,04	-	1,83	-	-
2.2	Belanja Modal	17,32	17,39	14,32	15,61	9,76
2.2.1	Belanja Tanah	0,09	-	0,06	0,001	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3,07	3,80	3,02	2,55	2,49
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	3,01	2,29	2,44	5,55	3,83
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,04	10,36	7,85	6,68	2,74
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,13	0,94	0,94	0,83	0,70
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	0,0004	0,0031	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,16	0,08	0,03	0,02	2,26
2.4	Belanja Transfer	10,82	11,99	11,91	12,22	13,26
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa	0,24	0,16	0,22	0,23	0,36
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,09	0,09	0,12	0,14	0,24
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,12	0,04	0,04	0,05	0,07
2.4.1.3	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	10,57	11,83	11,69	11,99	12,90
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Desa	10,49	11,75	11,61	11,92	12,82
2.4.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
JUMLAH BELANJA		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.4 realisasi belanja daerah pada tahun 2020 paling banyak adalah untuk belanja operasi sebesar 74,72 persen yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 54,45 persen dan belanja barang dan jasa 15,97. Sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar 9,76 persen yang terdiri dari belanja gedung dan bangunan sebesar 3,83 persen, belanja peralatan dan mesin sebesar 2,49 persen, belanja jalan irigasi dan jaringan sebesar 2,74 persen dan belanja asset tetap lainnya sebesar 0,70 persen. Selanjutnya belanja transfer yang berupa bantuan keuangan ke nagari sebesar 12,82 persen.

c. Kinerja Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Sesuai dengan Pasal 57

ayat (3), dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka untuk menutup defisit tersebut ditetapkan melalui pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur APBD, kelompok pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara simultan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah.

Penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Solok masih mengharapkan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pengeluaran lebih diarahkan pada penyertaan modal pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 3.5 sumber penerimaan pembiayaan paling besar berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 SiLPA sebesar 81.459.582.177,62 rupiah yang berasal dari penggunaan SiLPA pada tahun 2016 sebesar 144.951.973.172,11 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 dana SiLPA yang digunakan sebesar 40.948.677.485,68 rupiah yang berasal dari SiLPA pada tahun 2019. Untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ke PDAM dan Bank Nagari dimana pada tahun 2016 sebesar 7.090.945.570,00 rupiah. Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.500.000.000,00 rupiah dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada penyertaan modal dari Pemerintah Daerah karena terkait dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun tersebut yang tidak mencukupi.



Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2016 Tahun 2020 (Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	4
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	145.043.132.672,11	81.493.304.677,62	40.263.652.391,13	34.838.379.521,67	40.963.451.485,68
Penggunaan SiLPA	144.951.973.172,11	81.459.582.177,62	40.231.339.391,13	34.812.232.521,67	40.948.677.485,68
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	91.159.500,00	33.722.500,00	32.313.000,00	26.147.000,00	14.774.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.090.945.570,00	9.136.450.000,00	1.500.000.000,00	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.090.945.570,00	9.136.450.000,00	1.500.000.000,00	-	-
Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	137.952.187.102,11	72.356.854.677,62	38.763.652.391,13	34.838.379.521,67	40.963.451.485,68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	81.459.582.177,62	40.310.786.526,13	34.861.504.775,67	41.821.900.730,68	45.477.830.700,21
Koreksi Silpa	-	56.666.087,00	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	40.367.452.613,13	34.861.504.775,67	41.821.900.730,68	45.477.830.700,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2021

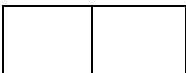


3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca memberikan informasi mengenai posisi keuangan daerah berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana per tanggal neraca tersebut dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Perkembangan jumlah asset Pemerintah Kabupaten Solok mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Rata-rata peningkatan asset sebesar 0,60 persen. Untuk asset lancar mengalami penurunan sebesar 3,18 persen. Sedangkan untuk investasi jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 3,57 persen yang berupa investasi Pemerintahan Daerah ke BUMD SOLINDA, PDAM Kabupaten Solok, Bank Nagari dan Balairung. Sementara untuk asset tetap mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,42 persen yang berupa asset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan asset tetap lainnya.

Sementara itu, kewajiban Pemerintah Kabupaten Solok memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 41,96 persen yang merupakan utang pajak, utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, utang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan, utang belanja transfer dan lain-lain. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Solok tidak memiliki kewajiban jangka panjang dan rata-rata peningkatan kewajiban dan ekuitas dana sebesar 0,60 persen.



Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Solok (Rupiah)

Nomor	Neraca	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Aset	1.576.779.654.243,73	1.535.448.946.175,37	1.698.249.570.573,29	1.710.627.043.381,63	1.602.995.895.680,48	0,60
1.1	Aset lancar	102.994.409.426,28	59.969.064.344,77	62.616.419.352,32	82.989.710.788,29	76.452.382.467,39	-3,18
1.1.1	Kas	83.155.509.914,62	40.996.377.075,13	34.861.504.775,67	41.821.900.730,68	45.487.810.460,21	-9,23
1.1.2	Piutang	7.391.844.881,66	7.067.852.825,64	13.866.109.686,61	17.697.986.588,38	17.928.790.057,92	30,19
1.1.3	Belanja Dibayar Dimuka	-	175.394.500,00	170.347.906,84	280.152.293,15	133.758.425,21	3,11
1.1.4	Persediaan	12.447.054.630,00	11.729.439.944,00	13.718.456.983,20	23.189.671.176,08	12.902.023.524,05	8,97
	Jumlah Aset Lancar	102.994.409.426,28	59.969.064.344,77	62.616.419.352,32	82.989.710.788,29	76.452.382.467,39	-3,18
1.2	Investasi Jangka Panjang	72.406.896.492,00	81.543.346.532,09	83.043.346.532,09	82.892.350.532,81	82.887.602.942,66	3,57
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
1.2.2	Investasi Permanen	72.406.896.492,00	81.543.346.532,09	83.043.346.532,09	82.892.350.532,81	82.887.602.942,66	3,57
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	72.406.896.492,00	81.543.346.532,09	83.043.346.532,09	82.892.350.532,81	82.887.602.942,66	3,57
1.3	Aset tetap	1.342.660.942.356,73	1.292.791.201.349,71	1.439.482.464.688,38	1.508.778.763.038,78	1.406.420.170.307,75	1,42
1.3.1	Tanah	284.146.665.014,00	270.285.561.058,00	278.847.929.042,36	279.481.169.904,36	301.546.265.904,36	1,60
1.3.2	Peralatan dan mesin	237.259.982.045,91	222.794.312.161,36	245.837.917.616,36	278.737.494.796,05	307.562.069.981,80	6,99



Nomor	Neraca	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.3	Gedung dan bangunan	646.763.479.338,02	597.711.661.422,91	634.219.879.096,75	664.016.724.547,84	723.800.406.378,86	3,06
1.3.4	Jalan, irigasi dan jaringan	827.843.491.485,00	702.087.163.051,34	776.303.802.690,66	876.454.328.056,46	943.121.165.532,22	3,97
1.3.5	Aset tetap lainnya	41.879.033.280,80	277.846.884.689,33	275.540.520.849,17	269.504.984.119,71	109.422.788.683,80	125,26
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	9.267.573.561,00	21.482.997.228,00	22.460.537.728,87	53.903.879.366,66	26.809.256.469,75	56,52
1.3.7	Akumulasi penyusutan	-704.499.282.368,00	-799.417.378.26123	-793.728.122.335,79	-913.319.817.754,30	-1.005.841.782.643,04	2793,38
	Jumlah Aset Tetap	1.342.660.942.356,73	1.292.791.201.349,71	1.439.482.464.688,38	1.508.778.763.038,78	1.406.420.170.307,75	1,42
1.4	Aset lainnya	58.717.405.928,63	101.145.333.948,80	113.107.340.000,50	35.966.219.021,75	37.235.739.962,68	4,85
1.4.1	Aset Tidak Berwujud	-	-	5.000.000,00	124.780.000,00	124.780.000,00	1197,80
1.4.2	Tuntutan Ganti Rugi	1.244.260.353,43	1.244.260.353,43	1.244.260.353,43	1.514.654.571,11	1.787.494.271,11	9,94
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	6.112.500.000,00	7.625.546.000,00	24,75
1.4.4	Aset Lain-lain	57.473.145.575,20	99.901.073.595,37	111.858.079.647,07	66.804.377.018,15	64.092.749.059,33	-22,17
1.4.5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-32.445.000,00	-64.890.000,00	-100,00
1.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset	-	-	-	-38.557.647.567,51	-36.329.939.367,76	5,78



Nomor	Neraca	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Kondisi Rusak Berat						
	Jumlah Aset Lainnya	101.833.878.081,83	201.046.407.544,17	224.965.419.647,57	141.328.243.607,41	137.658.428.389,77	17,39
	Jumlah Aset	1.576.779.654.243,73	1.535.448.946.175,37	1.698.249.570.573,29	1.710.627.043.381,63	1.602.995.895.680,48	0,60
2	Kewajiban	10.195.842.089,50	4.669.864.721,86	11.782.059.949,19	5.024.821.280,18	11.410.920.666,39	41,96
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	10.195.842.089,50	4.669.864.721,86	11.782.059.949,19	5.024.821.280,18	11.410.920.666,39	41,96
2.1.1	Utang Pajak pada Negara	19.048.571,00	12.335.122,00	9.174.932,00	9.174.932,00	13.269.199,00	-4,06
2.1.2	Utang Belanja Pegawai	88.331.875,00	43.316.875,00	234.952.752,00	408.453.837,00	3.108.863.530,96	281,60
2.1.3	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-	8.245.444.512,00	152.128.700,00	1.398.675.487,00	360,62
2.1.4	Utang Belanja Modal	-	-	1.449.575.803,00	841.183.464,00	5.810.766.536,00	274,41
2.1.5	Utang kepada Pihak Ketiga yang Belum Dibayarkan	8.464.799.924,00	514.631.950,00	-	-	-	-93,92
2.1.6	Utang Belanja Transfer	687.555.411,00	1.306.729.483,75	1.667.192.532,75	2.028.526.430,50	913.016.241,75	21,08
2.1.7	Utang Belanja Tak Terduga	-	-	-	502.261.000,00	-	-
2.1.8	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	167.964.305,50	159.176.137,11	175.719.444,44	163.892.916,68	111.392.916,68	-8,40



Nomor	Neraca	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.9	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Diterima Dimuka	752.143.403,00	998.938.976,00	-	-	-	-33,59
2.1.10	Pendapatan Hibah Diterima Dimuka	-	-	-	919.200.000,00	54.936.755,00	-94,02
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.998.600,00	1.634.736.178,00	-	-	-	10118,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.179.843.489,50	3.035.128.543,86	11.782.059.976,19	5.024.821.280,18	11.410.920.666,39	71,94
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	10.195.842.089,50	4.669.864.721,86	11.782.059.949,19	5.024.821.280,18	11.410.920.666,39	41,96
3	Ekuitas	-	-	-	-	-	-
3.1	Ekuitas	1.566.583.812.114,14	1.530.779.081.453,51	1.686.467.510.624,10	1.705.602.222.101,45	1.591.584.975.014,09	0,58
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.576.779.654.243,73	1.535.448.946.175,37	1.698.249.570.573,29	1.710.627.043.381,63	1.602.995.895.680,48	0,60

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2021



3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah mengutamakan dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komperabilitas, akurat, efesien dan efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Solok telah berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Upaya peningkatan PAD tersebut telah diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan lebih mudah, tepat dan cepat. Dengan memperhatikan tujuan kebijakan yang dikemukakan ini, maka kebijakan pendapatan diambil dengan jalan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan asli daerah secara subjektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, dengan uraian sebagai berikut :

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolak ukur kemampuan keuangan daerah sehingga optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus diupayakan. Kontribusi PAD terhadap APBD merupakan cerminan dari perkembangan ekonomi daerah. Secara umum besaran PAD menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang menjadi objek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD sekaligus merupakan indikator penting untuk menilai laju pembangunan di daerah.

Intensifikasi pendapatan asli daerah, dalam operasionalnya meliputi tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan

mencakup aspek personalisasinya serta penerapan sanksi hukum yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Memperbarui/ *updating* data pajak dan retribusi yang sudah ada.
2. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Cetak massal SPPT PBB dan penyediaan bukti pungut PAD lainnya.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat, wajib pajak dengan melibatkan SKPD.
5. Penjajakan kerjasama dengan pihak ke-III dalam upaya peningkatan PAD.
6. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dalam membayar pajak seperti pagelaran penyeteroran perdana PBB-P2 bersama kepala daerah.
7. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi kewajiban.
8. Memperbaiki dan merawat sarana dan prasarana penghasil retribusi daerah.
9. Melakukan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan pihak terkait misalnya Satpol PP.

b. Ekstensifikasi PAD

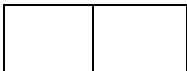
Ekstensifikasi didalam operasionalnya meliputi usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Upaya-upaya yang dilakukan dalam ekstensifikasi PAD yaitu :

1. Melakukan pendataan objek dan subjek PBB-P2 baru yang belum terdata.
2. Melakukan inventarisasi terhadap potensi sumber-sumber PAD yang ada di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok.
3. Mendorong para pengusaha yang memiliki potensi pajak untuk segera mengurus perizinan sehingga lebih mudah dalam pengelolaan pajak.
4. Mendorong SKPD pengelola retribusi daerah untuk mengadakan/menciptakan sumber retribusi baru (Objek Wisata, Wahana Permainan, meningkatkan dan menambah sarana prasarana yang menghasilkan retribusi daerah).
5. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan aplikasi yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan daerah.

c. Inovasi Pendapatan Daerah

Meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan PAD selama periode 2016-2020, peningkatan PAD masih relative rendah dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Agar peningkatan PAD dapat dipertahankan, telah dilakukan berbagai inovasi sebagai berikut :

1. Bekerja sama dengan Bank Nagari dalam bentuk perluasan jaringan pembayaran PBB-P2 melalui *e-Channel* Bank Nagari (ATM, NCM, Nagari Mobile)
2. Penyediaan aplikasi pendapatan daerah untuk 11 jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang langsung terkoneksi secara *host to host* dengan BPN, Notaris, Bank, dan instansi terkait lainnya.
3. Adanya virtual account untuk 11 jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk memudahkan penyeteroran dan pelaporan.



3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu indikator keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat adalah proporsi penggunaan anggaran atau belanja untuk kebutuhan aparatur. Semakin mengecil proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur dan secara bersamaan semakin besar proporsi penggunaan anggaran untuk program pembangunan dapat mencerminkan semakin besar keberpihakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tabel 3.7 memperlihatkan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan proporsi dari 53,41 persen pada tahun 2016 menjadi 48,38 persen pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena adanya beberapa ASN yang memasuki masa pensiun dan ASN yang pindah ke pemerintah provinsi karena perubahan kewenangan seperti guru SMA, ASN di Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan. Sedangkan pada tahun 2020 proporsi belanja aparatur mengalami peningkatan menjadi 54,45 persen karena adanya penerimaan CPNS baru dan pegawai PPPK khususnya tenaga guru.

Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rupiah)

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi
		(a)	(b)	(a/b) x 100%
1	2016	636.739.711.957	1.192.262.178.569,01	53,41
2	2017	569.189.186.450	1.185.736.303.199,22	48,00
3	2018	604.923.835.768	1.169.006.886.282,54	51,75
4	2019	638.290.163.588	1.247.720.963.366,81	51,16
5	2020	617.864.539.686	1.134.633.302.665,00	54,45

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2021

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat pula dilakukan dengan menelusuri surplus/ defisit riil anggaran. Defisit riil mengimplikasikan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah melebihi realisasi pendapatan daerah. Kondisi pembiayaan Kabupaten Solok pada tahun 2016 mengalami defisit riil sebesar 56.492.604.924,49 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 mengalami defisit sebesar 32.046.068.151,49 rupiah selanjutnya pada tahun 2018 mengalami defisit sebesar 3.902.147.615,46 rupiah. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 3.8.



Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.128.678.628.074,52	1.144.553.785.047,73	1.163.604.738.667,08	1.254.704.484.574,82	1.139.147.681.879,33
2	Belanja Daerah	1.185.171.232.999,01	1.176.599.853.199,22	1.167.506.886.282,54	1.247.720.963.365,81	1.134.663.302.664,80
3	Surplus/ Defisit riil	-56.492.604.924,49	-32.046.068.151,49	-3.902.147.615,46	6.983.521.209,01	4.514.379.214,53

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021

Sedangkan pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar 6.983.521.209,01 rupiah. sedangkan pada tahun 2020 pembiayaan daerah mengalami surplus sebesar 4.514.379.214,53 rupiah.

Selanjutnya, Tabel 3.9 memperlihatkan komposisi penutup defisit riil. Sisa anggaran tahun 2017 sebesar 40.367.452.613,33 rupiah, sementara SiLPA pada tahun 2018 sebesar 34.861.504.775,67 rupiah. Sisa anggaran tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 41.821.900.730,68 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 45.477.830.700,21 rupiah.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.128.678.628.074,52	1.144.553.785.047,73	1.163.604.738.667,08	1.254.704.484.574,82	1.139.147.681.879,33
2	Belanja Daerah	1.185.171.232.999,01	1.176.599.853.199,22	1.167.506.886.282,54	1.247.720.963.365,81	1.134.633.302.664,80
Defisit riil		-56.492.604.924,49	-32.046.068.151,49	-3.902.147.615,46	6.983.521.209,01	4.514.379.214,53
3	Penerimaan Pembiayaan	145.043.132.672,11	81.493.304.677,62	40.263.652.391,13	34.838.379.521,67	40.963.451.458,68
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	144.951.973.172,11	81.459.582.177,62	40.231.339.391,13	34.812.232.521,67	40.948.677.485,68
b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	91.159.500,00	33.722.500,00	32.313.000,00	26.147.000,00	14.774.000,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	7.090.945.570,00	9.136.450.000,00	1.500.000.000,00	-	-
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.090.945.570,00	9.136.450.000,00	1.500.000.000,00	-	-
Pembiayaan Neto		137.952.187.102,11	72.356.854.677,62	58.763.652.391,12	34.838.379.521,67	40.963.451.485,68



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Koreksi Silpa	-	56.666.087,00	-	-	-
	Sisa Anggaran Tahun Berkenaan	81.459.582.177,62	40.367.452.613,33	34.861.504.775,67	41.821.900.730,68	45.477.830.700,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama. Semakin besar kapasitas riil, semakin besar peluang untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan.

Setelah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah selanjutnya dilakukan pengalokasian sumber penerimaan tersebut ke pos-pos belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengalokasian masing-masing sumber penerimaan daerah memiliki sejumlah kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain (a) penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan retribusi dan pajak yang dipungut; (b) penerimaan dan pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah; (c) penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah; (d) penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan dan (e) penerimaan dana bagi hasil agar dialokasi secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

a. Ruang Fiskal

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Melalui kebijakan-kebijakan yang tercermin dari komposisi belanjanya, APBD diharapkan mampu menstimulus kegiatan ekonomi untuk lebih produktif sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Agar hal ini dapat terpenuhi, maka perlu diketahui ruang fiskal Kabupaten Solok untuk lima tahun mendatang.

Ruang fiskal menunjukan tingkat keleluasaan pemerintah daerah menggunakan anggaran yang dimilikinya setelah memenuhi semua kewajibannya. Semakin besar ruang fiskal, maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan untuk program dan kegiatan termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian ruang fiskal diperlukan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengalokasikan APBD bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan.



Secara umum ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan penggunaanya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran disuatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan penjelasan ini, perkembangan ruang fiskal Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk mengetahui perkiraan pendapatan dan belanja dilakukan proyeksi untuk tahun 2021-2026. Proyeksi memberikan panduan kerangka pendanaan pembangunan lima tahun ke depan. Proyeksi kerangka pendanaan memperkiraan besaran penerimaan yang mungkin didapat dan besaran pengeluaran daerah yang mungkin terjadi seperti yang tercantum pada Tabel 3.10.



Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	75,264,756,698.00	82,016,536,505.00	86,818,890,956.98	91,913,977,703.55	97,320,379,452.36	103,057,904,003.39
4.1.01	Pajak Daerah	18,829,226,376.00	21,078,700,000.00	22,659,602,500.00	24,359,072,687.50	26,186,003,139.06	28,149,953,374.49
4.1.02	Retribusi Daerah	4,101,935,584.00	6,982,405,069.00	7,506,085,449.18	8,069,041,857.86	8,674,219,997.20	9,324,786,496.99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,123,169,476.00	7,020,000,000.00	7,371,000,000.00	7,739,550,000.00	8,126,527,500.00	8,532,853,875.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46,210,425,262.00	46,935,431,436.00	49,282,203,007.80	51,746,313,158.19	54,333,628,816.10	57,050,310,256.90
4.2	Pendapatan Transfer	1,113,578,100,906.00	1,103,126,790,832.00	1,183,580,015,923.60	1,270,003,205,323.53	1,362,845,908,639.99	1,462,591,982,182.41
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,053,103,431,000.00	1,053,103,431,000.00	1,131,055,488,100.00	1,214,852,451,108.75	1,304,937,616,714.47	1,401,788,275,660.62
4.2.01.01	Dana Perimbangan	931,816,802,000.00	931,816,802,000.00	1,001,703,062,150.00	1,076,830,791,811.25	1,157,593,101,197.09	1,244,412,583,786.88
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	40,029,310,000.00	40,029,310,000.00	44,032,241,000.00	48,435,465,100.00	53,279,011,610.00	58,606,912,771.00
4.2.01.03	Dana Desa	81,257,319,000.00	81,257,319,000.00	85,320,184,950.00	89,586,194,197.50	94,065,503,907.38	98,768,779,102.74
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60,474,669,906.00	50,023,359,832.00	52,524,527,823.60	55,150,754,214.78	57,908,291,925.52	60,803,706,521.79
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	60,474,669,906.00	50,023,359,832.00	52,524,527,823.60	55,150,754,214.78	57,908,291,925.52	60,803,706,521.79
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,922,000,000.00	50,922,000,000.00	53,468,100,000.00	56,141,505,000.00	58,948,580,250.00	61,896,009,262.50
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,922,000,000.00	50,922,000,000.00	53,468,100,000.00	56,141,505,000.00	58,948,580,250.00	61,896,009,262.50
	PENDAPATAN	1,239,764,857,604.00	1,236,065,327,337.00	1,323,867,006,880.58	1,418,058,688,027.08	1,519,114,868,342.35	1,627,545,895,448.30



No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5.1	Belanja Operasi	959,445,618,750.00	971,358,333,583.14	997,097,896,665.83	1,012,982,092,217.65	1,045,665,480,167.47	1,094,211,743,776.43
5.1.01	Belanja Pegawai	654,950,579,794.00	666,950,579,794.00	682,162,979,495.39	682,727,296,530.82	654,950,579,794.00	666,950,579,794.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236,957,389,797.00	254,813,572,632.70	252,897,965,336.98	253,338,373,746.00	295,188,668,582.63	306,867,204,738.22
5.1.03	Belanja Hibah	67,397,649,159.00	46,503,322,047.20	58,484,485,801.60	73,015,606,464.56	92,070,114,677.84	116,923,618,361.56
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	140,000,000.00	3,090,859,109.24	3,552,466,031.86	3,900,815,476.27	3,456,117,113.00	3,470,340,882.65
5.2	Belanja Modal	171,218,090,943.00	133,337,559,332.42	152,096,464,107.19	216,191,738,183.76	268,702,009,989.97	311,030,455,322.42
5.2.01	Belanja Tanah		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	57,274,282,647.00	42,692,679,590.32	45,428,473,514.02	49,239,043,622.03	23,840,149,425.00	23,840,149,425.00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	36,722,787,522.00	36,722,787,522.00	39,538,951,129.22	45,847,324,153.83	48,569,333,387.09	36,722,787,522.00
5.2.04	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	76,021,203,774.00	46,617,740,122.30	62,381,755,777.31	119,597,423,789.49	195,785,527,177.88	249,960,518,375.42
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,199,817,000.00	6,304,352,097.80	3,747,283,686.64	507,946,618.41	507,000,000.00	507,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	153,570,358,227.00	162,743,664,750.64	171,672,646,107.55	185,884,857,625.68	201,747,378,184.92	219,303,696,349.46
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,578,219,927.00	5,731,151,785.15	6,854,430,699.78	6,762,725,214.86	3,578,219,927.00	7,590,790,292.16
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149,992,138,300.00	157,012,512,965.49	164,818,215,407.77	179,122,132,410.82	198,169,158,257.92	211,712,906,057.30
	BELANJA	1,286,734,067,920.00	1,270,439,557,666.20	1,323,867,006,880.58	1,418,058,688,027.08	1,519,114,868,342.35	1,627,545,895,448.30
6.1	Penerimaan Pembiayaan	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.02	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.03	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.1.04	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Pembiayaan Neto	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Data Makro Tahun 2020



3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan digunakan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Perhitungan kerangka pendanaan setidaknya memperhatikan beberapa hal diantaranya besaran penerimaan yang mungkin didapat dan besaran pengeluaran daerah yang mungkin terjadi. Belanja terdiri dari belanja wajib dan mengikat. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran tersebut yang nantinya akan menjadi kapasitas riil keuangan daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Solok dari tahun 2021-2026 diproyeksi mengalami *trend* peningkatan, sekalipun ada kemungkinan mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh dinamika perekonomian secara nasional, dimana perekonomian menghadapi banyak tantangan khususnya ketidakpastian ekonomi global. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.11. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan negara yang memiliki efek terhadap besaran transfer ke daerah.

Berdasarkan proyeksi terhadap pendapatan pada tahun 2022 sebesar 1,236,065,327,337.00 rupiah, dengan SiLPA sebesar 34,374,230,329.20 rupiah sehingga total penerimaan menjadi 1,270,439,557,666.20 rupiah dengan asumsi belanja pegawai sebesar 666,950,579,794.00 rupiah sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang bisa digunakan untuk pembangunan sebesar 631,783,488,126.00 rupiah.

Sementara untuk proyeksi tahun 2026, jumlah pendapatan sebesar 1,627,545,895,448.30 rupiah dengan perkiraan belanja pegawai sebesar 666,950,579,794.00 rupiah. Sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebesar 864,164,288,548.35 rupiah.

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,239,764,857,604.00	1,236,065,327,337.00	1,323,867,006,880.58	1,418,058,688,027.08	1,519,114,868,342.35	1,627,545,895,448.30
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih riil Perhitungan Anggaran	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	-	-	-	-
	Total Penerimaan	1,286,734,067,920.00	1,270,439,557,666.20	1,323,867,006,880.58	1,418,058,688,027.08	1,519,114,868,342.35	1,627,545,895,448.30
4	Belanja Pegawai	654,950,579,794.00	666,950,579,794.00	682,162,979,495.39	682,727,296,530.82	654,950,579,794.00	666,950,579,794.00
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-		
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	631,783,488,126.00	631,783,488,126.00	603,488,977,872.20	641,704,027,385.19	735,331,391,496.26	864,164,288,548.35

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Solok Tahun 2021



3.4 Realisasi Anggaran Untuk Penanganan Covid 19

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap anggaran yang di *refocusing* pada tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 yang ditujukan untuk pelayanan kesehatan, jaringan pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Tabel 3.12
Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

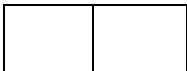
No.	Penggunaan Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	Penanganan Kesehatan	10.590.042.500,00	9.328.265.942,00	88,08
2	Jaringan Pengaman sosial	6.937.310.220,00	5.869.341.970,00	84,60
3	Penanganan dampak ekonomi	8.553.572.250,00	6.514.051.568,00	76,16

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran Covid-19 paling banyak untuk penanganan kesehatan. Namun penyerapan anggaran untuk Covid-19 yang dialokasikan tidak mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana seperti penyediaan tempat karantina untuk pasien Covid-19. Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat setempat untuk diadakannya tempat karantina Covid-19 diwilayah tersebut.

Selain itu adanya kegagalan pada proses pengadaan yang disebabkan karena gagal tender dan kesalahan mata rekening dalam penganggaran. Gagal tender disebabkan karena harga RAB tidak sesuai dengan harga satuan yang ditayangkan di LPSE, dan juga mengingat waktu pelaksanaan yang sudah mendekati akhir tahun sehingga kegiatan ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kesalahan mata rekening dalam belanja yang bersumber dari anggaran penanganan Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Kesalahan mata rekening tersebut terjadi pada belanja HEPA filter, dimana pengadaan alat ini bukan kewenangan Dinas Kesehatan, karena tidak termasuk kedalam kelompok alat kesehatan.



Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV

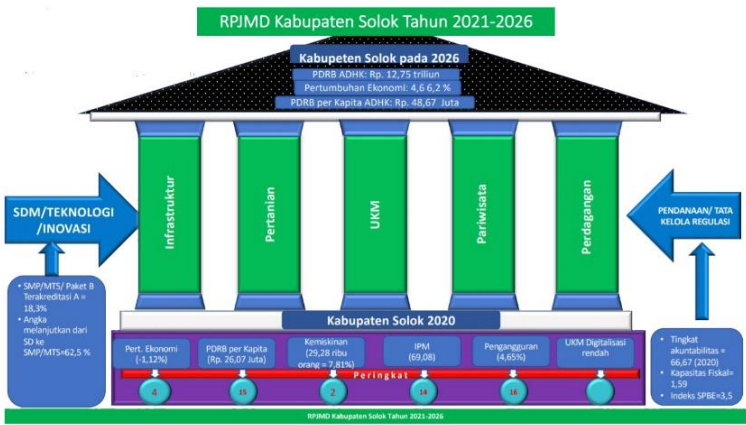
BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Permasalahan Makro Daerah

Berdasarkan pembahasan Bab II dan evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 serta capaian SDGs di Kabupaten Solok, maka dapat dikemukakan permasalahan pembangunan Kabupaten Solok yang dihadapi saat ini dan yang harus mendapat perhatian pada periode lima tahun ke depannya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1
Kerangka Berpikir Permasalahan

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat permasalahan makro yang dihadapi oleh Kabupaten Solok dari data-data indikator makro yang ada. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok pada tahun 2020 -1,12 persen dimana angka ini berada pada peringkat 4 terbawah di Provinsi Sumatera Barat. Angka PDRB Per Kapita yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok pada tahun 2020 sebesar 26,07 juta rupiah dan ini berada pada peringkat 15 di Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok masih jauh dibawah rata-rata provinsi. Sedangkan untuk angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 7,81 persen dan merupakan peringkat 2 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok masih diangka 69,08 dan berada peringkat 14 di Provinsi Sumatera Barat. Angka pengangguran di Kabupaten Solok pada tahun 2020 berada di peringkat 16 dengan persentase 4,65 persen. Sedangkan UKM Digitalisasi di Kabupaten Solok masih rendah yang seharusnya bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menyongsong revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan ilmu teknologi.

Sedangkan sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok adalah pemenuhan infrastruktur, pertanian, UKM, pariwisata dan perdagangan. Untuk meningkatkan capain indikator makro tersebut yang masih rendah dapat diwujudkan dengan meningkatkan sektor sumber daya manusia, teknologi dan inovasi dan dengan meningkatkan alokasi pendanaan dan tata kelola regulasi. Akan tetapi sektor-sektor



tersebut juga berada dalam posisi yang tidak baik seperti sekolah tingkat menengah yang terakreditasi A hanya 18,3 persen. Angka melanjutkan anak-anak dari SD ke SMP yaitu 62,5 persen. Untuk sektor kesehatan, angka ibu melahirkan dengan pelayanan kesehatan sebesar 32,85 persen. Selanjutnya kemampuan fiskal Kabupaten Solok pada tahun 2020 hanya sebesar 1,59 persen dan tingkat akuntabilitas baru diangka 66,67 persen. Melihat kondisi eksisting dan permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Solok tentu diperlukan upaya dan strategi yang jitu sehingga kedepannya terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan makro sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan hidup adalah bagaimana kehidupan manusia berubah ke arah yang lebih baik dan sebaliknya. Aspek kesejahteraan salah satunya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi dan kemiskinan. Kompleksnya permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dapat dipisahkan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, gender dan kondisi lingkungan. Data keluarga miskin yang valid dan *up to date* merupakan kontrol dalam intervensi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, tidak berjalannya proses verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Solok sangat berdampak terhadap proses penurunan kemiskinan di Kabupaten Solok.

2. Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat

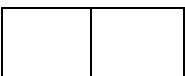
Suatu wilayah tidak akan terlepas dari tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, transportasi, sanitasi, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan. Dalam penyediaan infrastruktur tersebut, terdapat beberapa permasalahan diantaranya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan juga faktor geografis sehingga pemenuhan infrastruktur masih belum optimal. Saat ini, sebagai unsur penunjang konektivitas kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Solok, persentase kondisi Jalan Mantap Kabupaten masih rendah. Selain itu, sebagai pendukung sektor pertanian, irigasi ber kondisi baik juga masih rendah. Sama halnya dengan kondisi infrastruktur dasar lainnya, masih belum mencapai angka minimal yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga fungsi dari adanya infrastruktur tersebut belum terpenuhi.

3. Masih Rendahnya Perekonomian Masyarakat

Untuk menyelaraskan rencana pembangunan nasional dan propinsi, dirasa perlu menyusun rencana pembangunan daerah. Rencana tersebut disusun dengan menekankan pada pencapaian daya saing perekonomian yang kompetitif yang merata di semua bidang. Tujuan dari rencana tersebut ditetapkan berpedoman kepada keunggulan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan berkualitas serta didukung oleh peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan dalam setiap periode penyusunannya.

4. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia

Sistem pendidikan yang tangguh dan berdaya saing kedepannya akan memiliki peran dan kontribusi penting untuk menentukan kualitas SDM sebagai tokoh utama dalam pembangunan daerah. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keunggulan diberbagai bidang, diharapkan akan mampu memenuhi



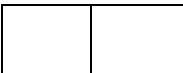
persaingan di pasar tenaga kerja baik nasional maupun regional. Permasalahan pendidikan di Kabupaten Solok terdapat pada tidak meratanya kesempatan pendidikan, kurangnya mutu pendidik dan persebarannya serta belum efisiennya manajemen dan sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan di masa depan.

Ikhtiar membangun manusia yang berkualitas terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan, yang diukur antara lain melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Solok belum menitik beratkan pada pemenuhan layanan dasar terkait pendidikan yang berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya saing dan sumberdaya manusia serta mengendalikan pertumbuhan penduduk dan optimalisasi pendidikan berkarakter

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Keberhasilan pelaksanaan tata kelola kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat di lihat dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan namun belum signifikan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi capaian reformasi birokrasi antara lain :

- 1. Belum optimalnya kinerja instansi pemerintah
Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kriteria penting menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penilaian akuntabilitas dimulai dari proses perencanaan dan implementasinya. Permasalahan perencanaan terdapat pada konsistensi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan lainnya masih rendahnya implementasi Sakip untuk mendukung pencapaian kinerja serta belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan. Adapun indikator untuk penilaian kinerja yang digunakan antara lain Nilai LPPD, Nilai akuntabilitas dan Opini BPK.
- 2. Belum optimalnya kapabilitas birokrasi
Birokrasi yang kapabel merupakan faktor pengungkit keberhasilannya tata kelola pemerintahan. Permasalahan pada birokrasi kapabel antara lain belum optimalnya penerapan sistem merit, belum terciptanya budaya kerja yang baik. Di tataran penataan organisasi belum tersusunnya peta bisnis, belum optimalnya deregulasi peraturan perundangan-undangan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap ketetapan fungsi dan ukuran organisasi. Permasalahan lainnya belum optimalnya adalah dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam reformasi birokrasi. Indikator keberhasilan birokrasi yang kapabel adalah Indeks profesionalitas ASN dan Indeks SPBE
- 3. Belum optimalnya pelayanan publik
Pelayanan publik merupakan wujud keberadaan pemerintah bagi masyarakat. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak – hak masyarakat.
Yang menjadi tolak ukur kepuasan terhadap layanan adalah Indeks



Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang merupakan angka yang memuat data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Permasalahan layanan publik terlihat dari masih rendah nya standar pelayanan publik dan dukungan inovasi yang belum tersaji dengan baik.

4.1.2 Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

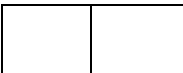
Perencanaan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional maupun regional, serta keberlanjutan pembangunan setiap periode sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, proses pelaksanaannya dilakukan dari menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan periode sebelumnya.

Dari hasil evaluasi dan analisa tersebut, akan dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul. Selain itu juga perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat pembangunan itu sendiri baik yang berasal dari internal maupun eksternal dengan pertimbangan dan masukan-masukan dari berbagai pihak. Dari permasalahan yang ada, tidak akan mungkin semuanya dapat dijadikan prioritas dalam penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode RPJMD, tetapi akan tetap dilaksanakan untuk melanjutkan kinerja yang telah dicapai sebelumnya maupun untuk memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan masih belum optimal. Indikator-indikator pembangunan pada RPJMD sebelumnya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu diberikan solusinya pada pembangunan periode tahun 2021-2026. Permasalahan yang timbul sebagai penyebab dari tidak tercapainya kinerja tersebut dapat dirinci sebagaimana data Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
1.	Pendidikan	1.	Masih belum tercapainya SPM	1.	Masih rendahnya kualitas Pendidikan khususnya PAUD
				2.	Relatif rendahnya kualitas proses belajar mengajar di sekolah (SD dan SMP)
				3.	Masih rendahnya kualifikasi Guru sebagai Tenaga Pendidik sesuai dengan SPM (S1/D4)
				4.	Sangat kurangnya peningkatan kapasitas SDM Tenaga Pendidik dalam menunjang Proses Belajar Mengajar untuk mencapai SPM
				5.	Sarana dan prasarana penunjang SPM yang masih kurang.
		2.	Masih belum tercapainya 8 (delapan) standar nasional Pendidikan (SNP)	1.	Mutu pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah
				2.	Persebaran guru yang belum merata
				3.	Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya memenuhi SNP (standar Nasional Pendidikan).



No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
				4.	Masih rendahnya jumlah sekolah yang terakreditasi A dan B pada jenjang PAUD dan satuan Pendidikan Dasar.
		3.	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah	1.	Masih rendahnya angka partisipasi Murni pada jenjang PAUD
				2.	Masih Rendahnya angka partisipasi Murni pada Satuan Pendidikan Dasar
2.	Kesehatan	1.	Masih rendahnya angka harapan hidup dibandingkan angka provinsi dan nasional		Masih rendahnya kualitas, pemerataan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan di setiap kecamatan
				1.	Masih rendahnya kualitas, pemerataan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan di setiap kecamatan
				2.	Belum semua penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan
				3.	Terjadinya transisi epidemiologi dengan pergeseran pola penyakit dan penyebab penyakit terlihat dengan turunnya angka penyakit menular dan meningkatnya angka penyakit tidak menular
				4.	Masih adanya kelompok risiko terinfeksi HIV yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar
				5.	Masih ada usia pendidikan dasar dan penduduk usia 15-59 tahun yang belum mendapatkan pelayanan <i>screening</i> kesehatan
				6.	Masih rendahnya penemuan kasus hipertensi pada usia lebih dari 15 tahun
		2.	Masih cukup tingginya kematian ibu dan bayi dibanding target SDGs	1.	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pendeteksian faktor risiko
				2.	Masih rendahnya capaian kunjungan ibu hamil pertama (K1) yang berkualitas
				3.	Cakupan pelayanan bayi, balita dan anak belum mencapai target
		3.	Belum tercapainya target penurunan stunting sebesar 14%	1.	Belum maksimalnya pelaksanaan konvergensi penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Solok
				2.	Belum optimalnya pelaksanaan 5 pilar strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan anak kerdil Tahun 2018-2024
		4.	Tidak tercapainya target SPM bidang Kesehatan	1.	Terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan pelayanan kesehatan
				2.	Data sasaran yang digunakan adalah data sasaran dari Pusdatin karena data real yang tersedia tidak valid. Sehingga terdapat ketidaksesuaian data
				3.	Pemahaman petugas terhadap Defenisi Operasional belum merata
				4.	Kebiasaan, budaya lokal dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Belum meratanya penyediaan dan pemeliharaan	1.	Belum validnya ketersediaan <i>database</i> infrastruktur
				2.	Belum meratanya pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan



No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
			infrastruktur secara dan kuantitas		jalan mantap dan jembatan, serta irigasi
				3.	Belum meratanya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
				4.	Masih terdapat daerah yang sulit untuk diakses karena keterbatasan infrastruktur publik
				5.	Belum representatif nya kondisi gedung dan lingkungan pemerintah
				6.	Masih kurangnya jumlah tenaga teknis ke PU an yang memiliki Sertifikat Kompetensi
		2.	Belum meratanya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	1.	Belum meratanya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pembangunan
				2.	Belum adanya penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang
				3.	Belum meratanya peran masyarakat serta kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang (perencanaan, pengawasan dan pengendalian)
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan	1.	Belum tersedianya regulasi perumahan dan permukiman
				2.	Belum validnya data perumahan dan permukiman
				3.	Belum optimalnya bantuan RTLH
				4.	Belum optimalnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman
				5.	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
				6.	Belum terpenuhinya SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Kabupaten Solok merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam.	1.	Terdapatnya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor dan lain-lain.
				2.	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan konsep kesiap siagaan bencana
				3.	Pengaduan dan layanan informasi kebencanaan belum berbasis teknologi
				4.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kebencanaan
		2.	Belum optimalnya pengakuan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Trantibum	1.	Rendahnya rasio personil Satpol PP yang berkualitas PPNS dibandingkan jumlah penduduk
				2.	Rendahnya cakupan patroli petugas Satpol PP sehingga meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan daerah
		3.	Belum optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran	1.	Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada
				2.	Kurangnya sosialisasi tentang layanan informasi kebakaran
		4.	Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	1.	Terbatasnya ketersediaan unit pemadam kebakaran
				2.	Kurangnya sosialisasi tentang layanan informasi kebakaran



No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
				3.	Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada
6.	Sosial	1.	Masih ada program-program pengentasan kemiskinan yang belum tepat sasaran	1.	Belum optimalnya sistem pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Solok
				2.	Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi
				3.	Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTKS sebagai basis data
7.	Tenaga Kerja	1.	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	1.	Penduduk usia kerja belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha
				2.	Terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang ada
				3.	Jumlah pelatihan belum sebanding dengan angkatan kerja
				4.	Kurangnya sarana dan prasarana BLK
		2.	Terbatasnya peluang dan kesempatan kerja yang tersedia	1.	Rendahnya motivasi pencari kerja untuk berwirausaha
				2.	Kurangnya informasi lowongan kerja
				3.	Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
				4.	Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri
		3.	Belum tercapainya hubungan industrial yang harmonis	1.	Belum terlaksananya standar pengupahan (UMP)
				2.	Belum optimalnya perlindungan bagi tenaga kerja
				3.	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan belum memadai
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok masih di tingkat Pratama	1.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak
				2.	Belum optimalnya indikator pembentukan Kabupaten Layak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011
				3.	Belum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
				4.	Belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		2.	Belum optimalnya kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki	1.	Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan
9.	Pangan	1.	Belum optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1.	Belum optimalnya fungsi lumbung pertanian masyarakat
				2.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan
				3.	Rendahnya kesadaran masyarakat



No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
					terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
				4.	Kurangnya pengawasan dan keamanan pangan terpadu
				5.	Masih tingginya fluktuasi harga pada beberapa komoditi pangan strategis
10.	Pertanahan	1.	Belum optimalnya penataan pertanahan Pemerintah Daerah	1.	Belum adanya regulasi tentang tata kelola pertanahan Pemerintah Daerah
				2.	Belum validnya data pertanahan pemerintah daerah
				3.	Masih banyaknya konflik pertanahan Pemerintah Daerah
				4.	Masih adanya ganti rugi tanah masyarakat yang belum diselesaikan
11.	Lingkungan Hidup	1.	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	1.	Belum optimalnya implementasi regulasi persampahan dan belum komprehensifnya NSPK bidang persampahan
				2.	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan dan limbah B3
				3.	Masih terkendalanya penyediaan lahan untuk sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan
				4.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan menerapkan teknologi 3R
		2.	Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
				2.	Masih rendahnya kualitas lahan (RTH, Kebun Raya) dan Daerah Tangkapan Air
				3.	Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	1.	Kurangnya fasilitas pendukung kependudukan dan pencatatan sipil
				2.	Akses jaringan komunikasi data belum merata di setiap wilayah
				3.	Topografi wilayah yang sangat bervariasi antara daratan lembah dan berbukit-bukit.
		2.	Masih rendahnya kepemilikan data kependudukan masyarakat	1.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Status Kabupaten Solok dalam Indeks Desa Membangun masih di posisi berkembang	1.	Masih ada nagari tertinggal
				2.	Pembangunan nagari dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan belum maksimal
				3.	Pemanfaatan dana desa belum optimal
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	Masih tingginya TFR dan laju pertumbuhan penduduk	1.	Pelaksanaan advokasi dan KIE belum maksimal
				2.	Kurangnya SDM penyuluh KB
				3.	Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan /klinik pelayanan KB

No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
				4.	Belum maksimalnya kegiatan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga akseptor KB
				5.	Belum optimalnya pelaksanaan Bina Keluarga Balita, kampung KB dalam percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i> dan penurunan TFR
15.	Perhubungan	1.	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	1.	Banyaknya titik rawan kecelakaan lalu lintas
				2.	Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai
				3.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
				4.	Kurangnya LPJU di jalan utama
		2.	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum	1.	Rasio konektivitas angkutan umum yang masih rendah
				2.	Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi air
16.	Komunikasi dan Informatika	1.	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika	1.	Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi
				2.	Pemanfaatan sebagian aplikasi belum diiringi dengan penyusunan regulasi yang relevan.
				3.	Masih kurangnya sarana dan prasarana penyebaran informasi
				4.	Masih adanya daerah <i>Blankspot</i>
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Masih rendahnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	1.	Banyaknya kelompok usaha yang belum paham arti penting dan tujuan koperasi dalam peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat
				2.	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi pada sektor koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
				3.	Masih rendahnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk Usaha Mikro dan Kecil
				4.	Masih rendahnya informasi, akses permodalan, pemasaran dan promosi bagi usaha mikro dan kecil
18.	Penanaman Modal	1.	Masih rendahnya capaian target investasi	1.	Belum adanya regulasi untuk kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
				2.	Belum adanya dokumen kawasan potensi investasi
				3.	Status tanah yang ada bersifat tanah ulayat dan belum bersertifikat
				4.	Belum adanya dokumen informasi dan dokumen perencanaan pendukung investasi
				5.	Belum optimalnya promosi dalam menggaet investor
				6.	Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari SKPD teknis terkait
		2.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang dilaksanakan	1.	Adanya penolakan dari masyarakat terhadap investor baru
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	1.	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan	1.	Kurangnya pembinaan serta fasilitas pemuda dalam menunjang kegiatan olahraga
				2.	Kurangnya pembinaan serta fasilitas pemuda dalam menunjang kegiatan kepemudaan

No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
				3.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		2.	Belum optimalnya kepemudaan serta keolahragaan dalam menunjang prestasi	1.	Terbatasnya kualitas dan kuantitas pembina dan tenaga olahraga dalam mencapai prestasi
				2.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Prestasi keolahragaan
				3.	Kurangnya <i>event</i> yang menunjang olahraga prestasi
20.	Statistik	1.	Belum optimalnya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah	1.	Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan lemahnya validasi data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik
				2.	Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral.
21.	Persandian	1.	Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah	1.	Belum ada regulasi yang mengatur tentang keamanan komunikasi dan informasi
				2.	Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>)
				3.	Belum optimalnya <i>Vurnerability Asessment</i> (VA) pengaman informasi baik jaringan maupun aplikasi.
22.	Kebudayaan	1.	Belum tergalinya secara optimalnya benda cagar budaya di Kabupaten Solok	1.	Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda cagar budaya
				2.	Kurangnya sosialisasi terhadap pelestarian benda cagar budaya
				3.	Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengembangan cagar budaya di Kabupaten Solok
		2.	Kurang optimalnya kegiatan promosi kesenian, tradisi dan budaya daerah di Kabupaten Solok	1.	Kurangnya sarana dan prasarana promosi kesenian, tradisi dan budaya daerah di Kabupaten Solok
				2.	Kurang optimalnya promosi budaya lokal didalam dan diluar negeri.
				3.	Kurang optimalnya promosi kesenian, tradisi dan budaya daerah lokal didalam dan diluar negeri.
				4.	Keberadaan kesenian, tradisi dan budaya daerah yang rentan terpengaruh dengan budaya asing.
		3.	Belum kuatnya kelembagaan adat, perangkat adat dan bundo kanduang	1.	Kurangnya perhatian serta pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan adat, perangkat adat dan bundo kanduang
				2.	Belum kuatnya kelembagaan adat untuk mendukung dan memelihara kebudayaan daerah.
		4.	Belum optimalnya keterlibatan lembaga adat dalam kegiatan pembangunan di Nagari	1.	Belum optimalnya kapasitas individu dalam menyelenggarakan fungsi kelembagaan adat
23.	Perpustakaan	1.	Masih rendahnya minat baca masyarakat	1.	Belum tersedianya perpustakaan yang representatif dan sesuai dengan perkembangan zaman dalam upaya menarik minat masyarakat untuk meningkatkan minat baca di perpustakaan.
				2.	Kurangnya koleksi bacaan di



No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
					perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka dalam menunjang pendidikan.
				3.	Belum meratanya layanan perpustakaan.
				4.	Belum adanya siswa yang terlibat dalam tes <i>reading text levelling</i> .
				5.	Kurangnya peningkatan Kapasitas terhadap Pustakawan yang ada di Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Sekolah
				6.	Belum optimalnya Gerakan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Masyarakat)
24.	Kearsipan	1.	Belum terkelolanya arsip sesuai dengan aturan yang berlaku	1.	Masih rendahnya penerapan arsip secara baku
				2.	Terbatasnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya.
				3.	Sangat kurangnya tenaga pengelola arsip di SKPD
				4.	Belum adanya Depo Arsip yang representatif sesuai kebutuhan
				5.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kearsipan di SKPD
25.	Perikanan	1.	Masih rendahnya produksi perikanan	1.	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan perikanan
				2.	Masih terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM Perikanan
				3.	Masih belum optimalnya benih/bibit unggul serta sarana dan prasarana produksi
				4.	Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pengolahan dan pemasaran dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan (ikan bilih)
		2.	Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	1.	Belum memasyarakatnya gemar makan ikan
				2.	Kurang berkembangnya produk olahan perikanan
				3.	Belum optimalnya diversifikasi olahan perikanan
26.	Pariwisata	1.	Belum optimalnya daya saing pariwisata	1.	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah
				2.	Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung usaha dan promosi pariwisata daerah
				3.	Belum optimalnya investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata.
				4.	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan pariwisata yang akan dikembangkan oleh investor.
27.	Pertanian	1.	Masih rendahnya produktifitas komoditas pertanian	1.	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani
				2.	Tingginya ancaman alih fungsi lahan pertanian
				3.	Masih terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh
				4.	Masih belum tercukupinya benih/bibit unggul
				5.	Sarana dan prasarana produksi yang belum memadai
				6.	Belum optimalnya teknologi budidaya pengolahan dan pemasaran
28.	Perdagangan	1.	Rendahnya	1.	Masih rendahnya Perlindungan

No	Urusan	Permasalahan		Akar Masalah	
			produktifitas, daya saing dan pangsa produk perdagangan		Konsumen dan pengawasan perdagangan
				2.	Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi sektor perdagangan
				3.	Masih rendahnya akses Informasi perdagangan
				4.	Belum optimalnya promosi perdagangan dalam dan atau luar negeri
				5.	Kualitas dan kuantitas infrastuktur pasar tradisional belum memadai
				6.	Terjadinya kelangkaan pupuk dan barang penting lainnya
29.	Perindustrian	1.	Rendahnya produktifitas, daya saing dan pangsa produk	1.	Masih rendahnya kapasitas SDM IKM
				2.	Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi IKM.
				3.	Belum optimalnya akses informasi dan kemitraan bagi IKM.
				4.	Belum adanya kawasan khusus untuk penembangan industri potensial
				5.	Keterbatasan sumber daya IKM dalam upaya pengembangan usaha
30.	Penunjang	1.	Belum optimalnya implementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai dengan Permenpan 25 Tahun 2020	1.	Belum terciptanya budaya kerja yang baik
				2.	Belum optimalnya deregulasi peraturan perundang-undangan
				3.	Belum dilakukan evaluasi terhadap ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
				4.	Sistem merit belum diterapkan
				5.	Peta proses bisnis belum disusun
				6.	Masih rendahnya kualitas implementasi SAKIP untuk mendukung pencapaian target kinerja
				7.	Kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan secara maksimal
				8.	Kepatuhan terhadap standar pelayanan masih rendah
		2.	Belum optimalnya penerapan inovasi	1.	Inovasi yang dimiliki belum disajikan dengan baik
31.	Kesatuan bangsa dan politik	1.	Belum optimalnya pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan	1.	Belum optimalnya peran dan fungsi ormas
				2.	Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi berbagai gejala sosial politik
				3.	Masih rendah pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba
				4.	Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap keberadaan orang asing yang mengancam ideologi pancasila
		2.	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	1.	Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat

No	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Pemilu	

Dari data pokok dan akar masalah, dapat diketahui masih banyak kondisi-kondisi yang perlu dicarikan solusi di masa yang akan datang.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Pengidentifikasian isu strategis dapat dilakukan melalui perumusan berbagai isu internasional, nasional dan regional.

4.2.1 Isu Internasional

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015. MDGs terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 185 indikator kewenangan Kabupaten. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2016-2030 antara lain :

- Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- Menjamin akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- Membangunan infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan mendorong inovasi;
- Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
- Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;



- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Penerapan Revolusi Industri 4.0

Secara umum, Industri 4.0 menggambarkan *trend* yang berkembang menuju otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu sama lain. Teknologi ini juga akan membantu memecahkan masalah dan melacak proses, sekaligus meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan manufaktur di berbagai skala. Tentunya, penerapan industri ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas demi hajat hidup orang banyak.

Harus diakui bahwa transformasi digital ini akan sangat besar manfaatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh keuntungan yang bisa didapatkan diantaranya adalah akan munculnya banyak industri di wilayah perkotaan, semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik, semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat, semua komponen di dalam wilayah kabupaten bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama.

Selain hal diatas, adanya revolusi industri 4.0 ini dalam sektor ekonomi umumnya perusahaan besar memilih untuk melakukan investasi untuk menambah alat teknologi canggih dalam perusahaannya untuk meningkatkan proses produktivitas menjadi lebih efektif dan maksimal. Dengan adanya berbagai macam teknologi yang canggih tersebut biaya produksi suatu barang menjadi semakin rendah sehingga dengan begitu konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih murah walaupun di sisi lain karena hal tersebut akan muncul semakin banyak pengangguran.

4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2005-2025 Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita kedua. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.



- 2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastuktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
- 4. Penyederhanaan birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
- 5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

4.2.3 Isu/kebijakan Sumatera Barat RPJPD Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut : “ **Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025**” sedangkan misi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”
- 2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik;
- 3. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi;
- 4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing didunia global;
- 5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahap IV tahun 2021-2025 Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1. Pembangunan agama dan budaya
 - a. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya, pembangunan agama dan budaya diarahkan pada peningkatan pemahaman keagamaan secara simultan. Disamping itu prasarana teknologi informasi perlu pula disediakan pada pusat-pusat kegiatan masyarakat. Nuansa keagamaan juga terwujud secara fisik seperti gapura dan bangunan lainnya pada setiap batas provinsi, kota kabupaten bahkan sampai ke nagari.
 - b. Untuk dapat mewujudkan Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan bernuansa Islam, diwujudkan melalui model sekolah dengan penggemblengan keagamaan yang intensif terutama moral, minimal disetiap kabupaten dan kota.
 - c. Dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial dan pengembangan



kelembagaannya direalisasikan melalui pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat serta institusi keagamaan sesuai syariah;

- d. Pengelolaam tanah ulayat sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan tidak terdapat lagi konflik-konflik sosial yang terjadi akibat pelaksanaan sistem tersebut.
 - e. Penguatan dan pemanfaatan keanekaragaman sosial budaya melalui berbagai ruang gerak pembangunan. Akses dan pemerataan modal sosial yang multikultural yang telah terjadi pola kebijakan yang inheren dalam pembangunan daerah.
 - f. Pelestarian tanah ulayat dengan membangun pola kemitraan antara tiga unsur utama yaitu pemerintahan daerah, masyarakat adat dan *stakeholders*.
2. Pembangunan hukum dan pemerintahan
- a. Memperkuat basis pengetahuan dan kinerja aparatur yang makin profesional dengan pemanfaatan lebih lanjut teknologi informasi dalam jaringan birokrasi, disamping pembinaan kesadaran moral dan loyalitas aparatur pemerintah/ pegawai negeri yang amanah dimata masyarakat.
 - b. Mengarahkan unsur dunia usaha swasta secara terus menerus meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal, nasional dan global guna memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan tata pemerintahan yang baik pada umumnya dan penguatan basis ekonomi rakyat khususnya.
 - c. Unsur masyarakat warga makin didorong untuk makin pro aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pembangunan sumber daya manusia
- a. Penyelenggaraan pendidikan yang terakreditasi dan masing-masing daerah memiliki penyelenggaraan pendidikan rangking nasional. Penyelenggaraan pendidikan yang profesional.
 - b. Menerapkan standar pelayanan rumah sakit sesuai standar internasional
 - c. Menerapkan IPTEKS yang menghasilkan perbaikan teknologi terhadap kegiatan yang telah ada serta menghasilkan produk-produk baru yang dapat mendorong kegiatan produksi secara produktif dan efisien dan berdaya saing didunia global.
4. Pembangunan ekonomi
- a. Dalam rangka mewujudkan kegiatan pertanian modern dan agribisnis maju, pembangunan diprioritas kan pada kelanjutan pembangunan kawasan sentra produksi dan agroindustri dengan penerapan teknologi pertanian dan pengolahan hasil yang lebih maju
 - b. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah melalui subsektor perikanan laut upaya pemantapan tumbuhnya usaha dan bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi dan dipasarkan ke luar negeri.



- c. Untuk dapat mewujudkan kegiatan jasa yang efisien yang mampu bersaing, diwujudkan penggunaan teknologi tinggi dan modern dalam kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk jasa transportasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
 - d. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, prioritas pembangunan melanjutkan penggunaan teknologi yang lebih maju dan tepat untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi pariwisata
 - e. Dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai barat sumatera, maka prioritas pembangunan melanjutkan peningkatan teknologi maju dan tepat guna dalam rangka peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perdagangan, transportasi dan jasa lainnya.
5. Pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup
- a. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsekuen, maka seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat harus mempunyai dokumen RTRW dan telah melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat direalisasikan sehingga terwujud kondisi daerah dengan ruang apik dan teratur.
 - b. Untuk dapat mempertahankan kawasan konservasi alam yang telah ditetapkan, diupayakan terwujudnya pengembangan potensi flora dan fauna yang ada didalam kawasan tersebut. Perlindungan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan dilakukan secara lebih intensif, sehingga tercipta suatu kawasan yang asri dan hijau dengan ekosistem yang terjaga baik.
 - c. Dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, upaya untuk pengendalian kualitas lingkungan hidup terus dilakukan dan ditingkatkan. Sejalan dengan upaya tersebut, pengendalian terhadap kualitas air dan udara makin ditingkatkan, karena intensitas pembangunan semakin meningkat. Disamping itu pemantapan pemulihan lahan kritis dioptimalkan melalui diversifikasi tanaman untuk mengembalikan kondisi lahan secara alami dan kimiawi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar lingkungan, penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

4.2.4 Isu strategis Kabupaten Solok

Berdasarkan hasil telaahan terhadap identifikasi permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang terkait sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat beberapa isu strategis jangka menengah Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Belum Optimal Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Esensi dari pembangunan sesungguhnya adalah pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya banyak pembangunan hanya sebatas dari pemenuhan output, rutinitas dan kewajiban pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya dari secara optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Salah satu faktor penyebabnya adalah pembangunan belum memfokuskan dan memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang utuh tentu tidak dilihat dari pembangunan fisik saja, pembangunan sumber daya manusia merupakan poin penting yang perlu mendapat perhatian. Optimalisasi dan kolaborasi pembangunan yang menyeluruh ini nantinya di harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, tidak terlepas upaya mengoptimalkan tahapan perencanaan dan penganggaran. Pada tahapan perencanaan segala potensi dan sumber daya menjadi dasar pertimbangan, baik dari sumber pendanaan dan sumber daya manusia.

Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam tahapan perencanaan dilihat dari pendekatan *bottom up*, yang secara praktisnya yaitu pelaksanaan musrenbang. Musrenbang akan menjadi wadah untuk menghimpun permasalahan pembangunan pada masyarakat yang dituangkan dalam usulan-usulan pembangunan baik pembangunan fisik seperti infrastruktur, pembangunan yang mendukung perekonomian masyarakat lainnya maupun non fisik seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendidikan. Penekanan dalam pelaksanaan musrenbang ini lah perlu ditingkatkan kualitas nya baik dari segi usulan maupun proses nya. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang kewenangan dan dapat membedakan mana kebutuhan dan keinginan semata. Pada tahapan penganggaran nantinya, usulan-usulan ini perlu mendapat prioritas dalam perumusan kebijakan anggaran sehingga pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata.

2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Baik Dari Segi Kuantitas Maupun Kualitas

Pembangunan infrastuktur merupakan bagian integral pembangunan daerah sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan segala faktor yang mendukung termasuk kapasitas yang memadai dan merata mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah kabupaten sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan di segala sektor terutama sektor ekonomi.

Permasalahan dalam penyediaan infrastruktur disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan juga faktor geografis sehingga pembangunan infrastruktur belum merata kesetiap penjuru wilayah Kabupaten Solok. Sehingga menyebabkan adanya beberapa wilayah yang sulit untuk diakses yang menyebabkan daerah tersebut lebih tertinggal dari daerah lain



dari segi pembangunan. Kendala lain dalam penyediaan infrastruktur adalah ketersediaan lahan pemerintah yang bisa digunakan untuk pembangunan sehingga perlu dilakukan penataan aset lahan milik Pemerintah Daerah. Kawasan permukiman dan perumahan juga masih perlu ditata dan ditingkatkan kualitasnya karena masih terbatasnya prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia. Perlindungan lingkungan hidup khususnya air yang bersumber dari danau dan sungai yang ada, kualitas udara dan tanah serta pengelolaan sampah perlu mendapatkan perhatian. Se jauh ini tingkat layanan sampah di Kabupaten Solok masih rendah karena sarana dan prasarana persampahan yang masih terbatas. Kabupaten Solok juga merupakan daerah rawan bencana sehingga pembangunan infrastruktur harus memperhatikan daerah rawan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor dan lainnya. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bencana perlu terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya mitigasi.

Infrastruktur yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan belum dilaksanakan secara optimal melalui perwujudan sistem perkotaan dan jaringan prasarana, meliputi jaringan jalan, irigasi, transportasi, sumber daya air, energi, permukiman dan perumahan, dalam rangka meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan dan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk pemerataan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, sesuai dengan data capaian SPM yang telah dijelaskan di Bab II yaitu rata-rata capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik masih dibawah 100 persen disebabkan oleh sebagian masyarakat belum memiliki fasilitas air minum dan sanitasi layak karena masih banyaknya masyarakat miskin dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi penyediaan fasilitas pendukung tersebut.

3. Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Solok. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas potensi unggulan daerah, termasuk sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia khususnya, merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya, dan memerlukan sumber daya yang besar. Pendekatan pokok utama dalam mengatasi tantangan tersebut adalah melalui percepatan pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah.



Persaingan semakin tajam dalam meningkatkan daya saing daerah menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk menyiapkan daerahnya agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan faktor penentu daya saing ekonomi. Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Daya saing daerah sebagai kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Daya saing sebagai kemampuan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengelola asset, daya tarik investasi, globalitas serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu model ekonomi dan sosial.

Kabupaten Solok secara sumber daya lebih unggul dibanding daerah lainnya lain, baik dari sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan UMKM. Namun masalah utamanya yaitu masih rendahnya daya saing pada sektor tersebut disamping permasalahan lainnya dimasing-masing sektor tersebut. Permasalahan lainnya pada sektor koperasi dan usaha mikro kecil adalah, masih minimnya akses modal koperasi dan UMKM terhadap dunia perbankan, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukan masih tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, masih belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta belum meratanya standar produk pada koperasi serta usaha mikro dan kecil.

Pada sektor investasi, masih belum meratanya realisasi investasi di kecamatan maupun nagari, belum meratanya ketersediaan dan kualitas infrastuktur penunjang investasi, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada kegiatan PMA/PMDN, serta terjadinya dinamika sosial di masyarakat yang mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

Pada sektor pariwisata, masih ditemui belum optimalnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata, terbatasnya amenitas seperti restoran, rumah makan, pusat cendra mata/pusat oleh-oleh, sarana ibadah, sarana kesehatan dan taman pada destinasi wisata, belum tertanamnya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat, belum optimalnya penerapan *branding* dan aktifitas promosi seperti *geopark*, desa wisata, kampung budaya serta terbatasnya kuantitas maupun kualitas dari produk ekonomi kreatif. Dilihat dari potensi yang dimiliki Kabupaten Solok maka kekayaan alam Kawasan Singkarak sangat berpotensi untuk dijadikan warisan geologi, ekologi serta warisan budaya yang dalam dikemas dalam suatu kawasan *geopark* yang didalamnya termasuk kawasan *geosite* Gunung Talang, Danau Talang, Danau Dibawah dan Danau Diatas.



Pada sektor pertanian, produktifitas komoditas pertanian masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya aktifitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terbatasnya ketersediaan benih yang berkualitas, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan. Selain itu, menurunnya luas lahan pertanian yang disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi seperti pembangunan permukiman dan kawasan industri.

Pada sektor perikanan dan kelautan masih terdapat beberapa permasalahan, masih rendahnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan oleh nelayan, pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis, masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya.

Pada sektor pangan, skor pola pangan harapan Kabupaten Solok masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan pangan Kabupaten Solok masih mengalami ketimpangan, keragaman konsumsi pangan masih rendah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi.

Pada sektor perdagangan masih terdapat beberapa permasalahan yaitu dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, masih belum optimalnya pemasaran dan produk industri lokal, belum optimalnya rantai pasok pemasaran (pasar lokal yang tersertifikasi dan pasar regional), serta belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh infrastuktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik, terjadi ketimpangan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Solok, masih rendahnya peranan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) pada rantai pasok industri, belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri yang kompeten ataupun tersertifikasi.

4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan antara lain peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan kapabilitas birokrasi dan peningkatan layanan publik. Peningkatan akuntabilitas dapat dilihat dari terwujud dan tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Peran pengawasan menjadi hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Capaian pembangunan yang belum optimal akan menjadi evaluasi dan catatan kinerja pembangunan berikutnya.

Aspek kapabilitas birokrasi merupakan dukungan yang mutlak harus ada agar terselenggaraanya pemerintahan yang baik dan bersih. Dukungan sumber daya aparatur dan dukungan teknologi informasi menjadi salah satu poin penopang kapabilitas tersebut. Belum optimalnya peningkatan profesionlitas ASN perlu diupayakan melalui penerapan sistem merit dan



penataan SDM birokrasi. Penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan juga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur dalam membangun budaya kerja.

Aspek pelayanan publik merupakan wujud keberadaan pemerintah untuk masyarakat. Pemenuhan pelayanan publik dapat dilihat dari dimensi pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administratif. Kualitas pelayanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi dari terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak - hak masyarakat.

5. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Solok teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Seperti akses pendidikan 9 tahun sesuai kewenangan belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

Berdasarkan data yang terdapat pada Sub Bab 2.6 tentang capaian penerapan SPM Kabupaten Solok, dapat ketahui bahwa tidak tercapainya target SPM bukan hanya karena rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Namun juga dipengaruhi oleh terbatasnya layanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sistem pendidikan yang tangguh dan berdaya saing di masa depan memiliki peran dan kontribusi penting yang akan menentukan kualitas SDM sebagai penggerak utama dalam pembangunan daerah. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki unggulan komparatif dan unggulan kompetitif serta latar belakang pendidikan dan keahlian yang memenuhi kebutuhan zaman diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja baik regional maupun nasional. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Solok belum mampu menjalin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan di masa depan.

Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Solok juga masih rendah. Modal dasar bagi terbentuknya unggulan komparatif dan unggulan kompetitif adalah dimilikinya konsep diri dan kesadaran diri yang dalam proses belajar. Konsekuensinya, inovasi dalam wawancara pembelajaran menuntut agar semua institusi pendidikan di Kabupaten Solok mampu menanamkan kemampuan tentang bagaimana belajar untuk belajar bukan belajar untuk menghafal dan belajar untuk tergantung



kepada pihak lain. Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan kemajuan suatu daerah bahkan suatu negara.

Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan masih perlu untuk diperhatikan seperti halnya pada pelayanan kesehatan dasar. Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita *stunting* pada umumnya disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal. Selain itu jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai kebutuhan juga berpengaruh terhadap capaian pelayanan dasar. Hal ini juga dipengaruhi oleh perilaku dan persepsi masyarakat untuk kesehatan.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan tekanan tersendiri terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Solok. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik dibidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.

Kompleksitas yang tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan banyak faktor elemen yang terakit, yang penanganannya harus dilakukan melalui lintas sektor, lintas wilayah, dan adanya keterlibatan berbagai pihak. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan presentase penduduk miskin, akan tetapi akar penyebab kemiskinan adalah salah satunya pola hidup konsumtif.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Meningkatnya P1 dan P2 di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa kemiskinan di kelompok penduduk miskin bertambah dalam. Sehingga diperlukan strategi penurunan kemiskinan terpadu di Kabupaten Solok yang diartikan sebagai upaya penanganan kemiskinan haruslah integral, serasi, terstruktur, harmonis dan selaras meliputi berbagai pendekatan, fokus, terencana, holistik dan berkelanjutan serta adanya terobosan-terobosan baru.

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk penanganan lanjut usia terlantar diluar panti dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

6. Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Pelestarian Adat dan Budaya untuk Memperkuat Modal Sosial Masyarakat

Peningkatan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai agama, adat dan budaya merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian khusus agar gejala pergeseran nilai-nilai budaya ke arah yang kurang baik tidak berkembang lebih cepat dan mempengaruhi generasi muda. Antisipasi dan pencegahan dilakukan melalui penguatan nilai-nilai agama, adat dan budaya dengan penguatan peran lembaga daerah, lembaga sosial masyarakat, pemangku adat dan budaya dalam mewujudkan masyarakat dan pemuda yang bermartabat dan berkarakter. Kedepan, diperlukan penguatan terhadap modal



sosial masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama dan budaya didalam kehidupan masyarakat.

4.2.5 Analisis situasi Covid-19

Terjadinya Pandemi Covid-19 diawal tahun 2020 menimbulkan krisis yang tidak terduga di setiap aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara didunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan *surveilans*, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi diantaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti usaha mikro kecil, perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata hingga transportasi domestik.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia pemerintahan dan usaha menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing daerah lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*).

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara dan daerah, respon



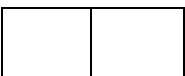
kebijakan untuk memitigasi dampak *Covid-19* dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi *Covid-19*.

Penyebaran virus corona di Kabupaten Solok pada awal berdampak pada perekonomian daerah yang mulai lesu, sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha reatil pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus *Covid-19*. Sepinya wisatawan berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset Usaha Mikro dan Kecil juga akan menurun.

Pandemi *Covid-19* juga berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pada sektor pendidikan seperti meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan. Selain itu penutupan berbagai kegiatan bisnis, pembatasan sosial berakibat terhadap menurunnya tingkat konsumsi dan investasi yang berpotensi pada terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *Covid-19* telah memberikan pukulan telak bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dipaksa harus hidup berdampingan dengan *Covid-19* hingga pandemic ini dapat diatasi. Belum dapat dipastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Penyesuaian demi penyesuaian dilakukan guna membatasi penyebaran *Covid-19* dan menuntut masyarakat untuk memulai kenormalan.

Peran pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam mengatasi *Covid-19* dituntut untuk dapat mengambil kebijakan yang dapat memberikan rasa aman dalam menghadapi kehidupan normal yang baru.



Visi, Misi, Tujuan & Sasaran

BAB V

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah pada daerah setempat. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih merupakan arah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan pada suatu daerah atau kondisi pada masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dan misi yang menjadi dasar serta acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 adalah visi dan misi serta janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yang terpilih. Oleh sebab itu visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode 2021-2026 yang terpilih langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut :

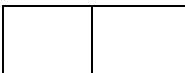
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok periode tahun 2021-2026 langsung menjadi visi pembangunan daerah sebagai berikut :

***“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok
Terbaik di Sumatera Barat”***

Visi pembangunan daerah ini mempunyai dua bahagian kalimat yang perlu mendapat perhatian, yaitu ***“Mambangkik Batang Tarandam”*** dan ***“Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”***. Makna dari kalimat ***“Mambangkik Batang Tarandam”*** adalah ungkapan untuk mengembalikan marwah Kabupaten Solok yang tenggelam semenjak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan indikator pembangunan sosial ekonomi selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Solok tidak berada pada peringkat teratas atau masuk kelompok terbaik di Sumatera Barat. Misalnya, Indeks Pembangunan Kabupaten Solok pada tahun 2020 hanya 68,60 menempati posisi 16 dari 19 daerah di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya data kemiskinan juga memperlihatkan bahwa peringkat kedua tertinggi di Sumatera Barat. Kedua indikator ini jelas memperlihatkan bahwa posisi Kabupaten Solok saat ini betul-betul pada posisi yang sangat tidak menggembirakan. Oleh sebab itu, pernyataan ***“Mambangkik Batang Tarandam”*** tidak lain untuk memberi semangat dan motivasi bagi semua *stakeholders* dan masyarakat Kabupaten Solok untuk bangkit dari keterpurukan kinerja pembangunan daerah.

Selanjutnya pernyataan ***“Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”*** untuk menjaga konsistensi atau relevansi dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Solok, ***“Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik”*** seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5.1. Selanjutnya pernyataan ***“Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”*** adalah bersifat heroik dan melambangkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan masyarakat Kabupaten Solok.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Solok maka untuk periode tahun 2021 – 2026 difokuskan untuk menjadi terbaik di bidang pertanian dan pariwisata. Spesifik Sektor Pertanian ini adalah Beras Kabupaten Solok yang telah mendapat sertifikat Indeks Geografis (IG) dari Kemenkum HAM sebagai produk



unggulan. Sedangkan untuk Sektor Pariwisata spesifiknya adalah pengelolaan terhadap Lima Danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Singkarak, Danau Talang, dan Danau Tuo/Danau Ujung Ladang) Destinasi Wisata Geosite Gunung Talang dan objek wisata lainnya yang dimiliki Kabupaten Solok.

Tabel 5.1
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025
dan RPJMD Kabupaten 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026	RPJPD Kabupaten Solok tahun 2006- 2025	RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026
Visi			
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong	Terwujudnya Sumatera Barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik	Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat

5.2 Misi

Misi merupakan upaya dalam mewujudkan rencana dalam bentuk cara serta langkah yang akan dikerjakan selama satu periode yang telah ditetapkan. Misi merupakan penggambaran dari visi yang ingin dicapai yang berisi uraian dari upaya-upaya apa yang harus dilakukan secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri. Dengan demikian misi memberikan arah dan juga batasan dalam upaya melakukan proses pencapaian tujuan.

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 berfokus pada pembangunan dan peningkatan kompetensi seluruh sumber daya yang terdapat di Kabupaten Solok dalam segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Solok. Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran belanja Kabupaten Solok dimaksimalkan untuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang akan melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan *stakeholder* yang ada di nagari, sehingga usulan dari Musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan

Misi ini dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur yang merata di setiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing-masing nagari. Kabupaten Solok memiliki kondisi geografis yang berbukit-bukit dan masyarakatnya tinggal menyebar diseluruh wilayah baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Keberadaan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar kegiatan dan



aktivitas di masyarakat khususnya di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur yang berkeadilan maksudnya adalah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing nagari. Selama ini pembangunan infrastruktur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah dan masih menyisakan beberapa daerah tertinggal.

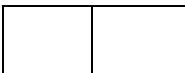
Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus untuk kedepannya adalah peningkatan jalan kabupaten yang berkualitas (jalan mantap) termasuk di dalamnya jembatan. Jalan kabupaten merupakan jalan poros utama yang menghubungkan antar nagari dan juga penghubung ke pusat-pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat kegiatan lainnya. Saat sekarang ini masih ada beberapa nagari yang masih sulit diakses karena belum tersedianya akses jalan yang layak. Disamping itu, untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya di jalan-jalan utama, perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana keselamatan seperti penyediaan rambu-rambu lalu lintas, guadril, deliniator dan juga Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Pembangunan dan perbaikan irigasi menjadi fokus selanjutnya karena merupakan pendukung utama sektor pertanian. Mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang utama PDRB Kabupaten Solok sekaligus menjadi lumbung pangan di Provinsi Sumatera Barat dan juga nasional. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan jaringan irigasi yang sudah rusak dan penambahan pembangunan irigasi baru guna meningkatkan produksi pertanian.

Infrastruktur air minum dan sanitasi juga perlu ditingkatkan karena terkait langsung dengan derajat kesehatan masyarakat dan faktor penyebab terjadinya *stunting*. Kabupaten Solok memiliki sumber air baku yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan layanan PDAM masih belum bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten. Sama hal nya dengan sanitasi, perlu disediakan sarana jamban yang sehat disetiap rumah masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Infrastruktur yang berkeadilan juga dimaksudkan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. Perubahan iklim dan juga bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan lingkungan hidup seperti penurunan kualitas air, udara dan tanah. Selanjutnya pengelolaan sampah juga perlu ditingkatkan karena disamping berdampak kepada kualitas lingkungan hidup juga berpengaruh kepada sektor pariwisata. Sejauh ini Kabupaten Solok memanfaatkan TPA regional yang berada di Ampang Kualo sebagai tempat pembuangan akhir sampah, yang mana usia penggunaanya sudah tidak lama lagi, untuk itu diperlukan pembangunan TPA sampah alternatif untuk menampung pembuangan sampah di Kabupaten Solok. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan meningkatkan kepatuhan pembangunan terhadap dokumen RTRW Kabupaten Solok. Kabupaten Solok juga merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan gunung api. Untuk itu kedepannya perlu ditingkatkan kesiap siagaan terhadap bencana baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Solok.

Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur penunjang sektor pariwisata baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jalan dan jembatan menuju



objek wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta transportasi menuju objek wisata.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Misi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata adalah upaya pemerintah Kabupaten Solok untuk mengawal perekonomian masyarakat Kabupaten Solok yang nantinya memberi dampak langsung serta nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk pencari kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian peningkatan ekonomi yang terjadi diharapkan akan dapat memberikan dampak nyata yang signifikan serta dapat diukur terhadap peningkatan pendapatan rata-rata atau daya beli masyarakat di Kabupaten Solok. Peningkatan ekonomi juga akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi berskala besar di Kabupaten Solok, yang sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil, koperasi dan menengah untuk ikut tumbuh. Oleh karena itu upaya Kabupaten Solok untuk dapat menciptakan peningkatan ekonomi berkelanjutan harus tetap dijaga. Peningkatan ekonomi yang berkesinambungan juga diharapkan dapat menciptakan berbagai peluang dalam kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan kondisi ini menjadikan perekonomian Kabupaten Solok yang lebih baik dan berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Produk-produk ciri kas lokal yang unik dan kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Kabupaten Solok diharapkan akan menjadi salah satu keunggulan produk yang akan di perjual belikan. Perkembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan akan sangat ditentukan oleh pemikiran serta ide ide baru, inovasi dan pengetahuan dari berbagai sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Dengan demikian, dalam mewujudkan perkembangan ekonomi kreatif akan membutuhkan keterlibatan banyak sumberdaya manusia dan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan volume dan transaksi ekonomi. Pada akirnya kondisi ini akan menyebabkan tumbuhnya ekonomi kreatif yang potensial berbasis lokal di Kabupaten Solok antara lain, seperti kuliner, kerajinan, dan berdampak terhadap peningkatan sektor perdagangan dan PDRB di Kabupaten Solok.

Di Kabupaten Solok pariwisata termasuk sektor penentu dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan menjadi industri dan dasar pembangunan Kabupaten Solok untuk lima tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Solok berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah melalui pengelolaan pariwisata halal, wisata nyaman dan berkesan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Solok yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, nilai budaya yang Islami dan menghargai kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada prinsipnya adalah suatu upaya tentang pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan



yang baik dan bersih pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berujung pada reformasi birokrasi. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, tidak akan berjalan dengan efektif, apabila peran dan kontribusi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol, tidak diberdayakan.

Dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan menghasilkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkualitas sehingga akuntabilitas, transparansi dan kinerja birokrasi akan meningkat, transparansi dan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam peningkatan kualitas pemerintahan daerah harus didukung oleh komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi secara terus menerus di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sampai kepada pemerintahan terendah di Nagari-Nagari yang ditopang dengan ketersediaan ASN yang profesional serta dukungan pemanfaatan teknologi informasi dengan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (IT).

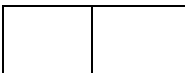
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima (*excellent service*) kepada masyarakat Kabupaten Solok. Selain itu pemerintah Kabupaten Solok juga dapat menghadirkan inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien.

5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini bertujuan pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta optimalisasi pembangunan kepemudaan dan olahraga, karena sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting terutama dalam kondisi saat ini. Perubahan yang sangat cepat dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang juga sangat cepat. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok yang mampu bersaing dan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreatifitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun *networking* dengan berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang diharapkan terjadi di segala bidang kehidupan, dilakukan secara sengaja dan terencana. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Solok merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. Kekayaan intelektual serta sumber daya manusia sebagai potensi yang terdapat dalam diri



manusia itu sendiri harus mampu mewujudkan peran manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam dalam mencapai kesejahteraan.

6. Meningkatkan Tatahan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran *Tungku Tigo Sajaringan* dan *Tali Tigo Sapilin* yang merupakan ciri kas daerah. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, dimana salah satunya adalah norma agama.

Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya didunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Enam misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2020 juga mempertimbangkan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Solok yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Relevansi misi kedua dokumen perencanaan daerah ini diperlihatkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.2
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006-2025
dan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026

RPJPD Kabupaten Solok tahun 2006-2025	RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026
Misi	
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah	Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata
Misi 2 : Mewujudkan penataan masyarakat yang mampu menyelaraskan kehidupannya dengan arus modernisasi dan globalisasi	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas Misi 6 : Meningkatkan tatahan hidup masyarakat berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah (ABS-SBK)
Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, antisipatif, fasilitatif, profesional dan proporsional, transparansi dan akuntabel	Misi 1 : Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



RPJPD Kabupaten Solok tahun 2006-2025	RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana	Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan

5.3 Tujuan dan Sasaran

5.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pembangunan Kabupaten Solok adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan pembangunan yang sedang dihadapi. Persoalan pembangunan tersebut antara lain tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan dan ketimpangan pembangunan antar nagari.

Sasaran peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian permasalahan pembangunan Kabupaten Solok selama periode tahun 2021-2026 diperlihatkan dari beberapa indikator pembangunan daerah yang disajikan pada Tabel 5.4.



Tabel 5.3
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,50	3,00	4,81	5,15	5,25	5,39	5,39
2	Gini Ratio	rasio	0,279	0,277	0,273	0,268	0,262	0,255	0,255
3	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	25.930.000	26.530.000	27.480.000	28.570.000	29.720.000	30.970.000	30.970.000
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	69,99	70,54	71,11	71,69	72,16	72,16
5	Persentase penduduk miskin	%	7.56	7.31	7.06	6.81	6.56	6.31	6.31
6	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05	4,05



5.3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Menurut Misi

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Solok. Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*).

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat terukur, spesifik dan dapat tercapai, rasional selama 5 tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021 s/d 2026 yang mengemban 6 misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 1: Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang responsif. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya anggaran berbasis kebutuhan masyarakat dapat dijelaskan pada Tabel 5.5

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Misi 1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang responsif	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya Anggaran Berbasis kebutuhan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.5 merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis.

2. Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan

Misi kedua ini bertujuan untuk Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (1) Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah, (2) Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan, (3) Meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan, (4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan (5) Meningkatnya ketahanan terhadap bencana.

Tabel 5.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkeadilan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Berbasis Tata Ruang dan	1. Indeks Infrastruktur Daerah	1. Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah	1. Persentase kesesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang



Berwawasan Lingkungan		2. Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan 3. Meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 5. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	2. Persentase Infrastruktur Dasar berkondisi baik 3. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman berkondisi baik 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5. Level Ketahanan Bencana Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.6 merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis.

3. **Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata**

Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan (2) Menurunnya Tingkat Pengangguran seperti terlihat pada Tabel 5.7

Tabel 5.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 2. Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. PDRB Perkapita 2. Pengeluaran Riil 3. PDRB sektor pertanian 4. PDRB sektor perdagangan 5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB



			6. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil 7. Tingkat pengangguran terbuka

Misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.7 merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis.

4. **Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Sasaran yang akan dicapai adalah : (1) Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel (2) Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, (3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik seperti terlihat pada Tabel 5.8

Tabel 5.7
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK
		2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Level Maturitas SPIP 3. Indeks SPBE
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks Inovasi Daerah

Misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.8 merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis.

5. **Misi 5: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Sasaran yang akan dicapai yaitu: (1) Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat, (2) Meningkatnya Mutu Pendidikan Merata dan Berkeadilan, (3) Menguatnya Karakter Peserta Didik Religius, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan, (4) Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat, (5) Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga, (6) Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat, (7) Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



yang Holistik dan Integratif, serta (8) Menurunnya Tingkat Kemiskinan yang dapat dilihat pada Tabel 5.9

Tabel 5.8
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Misi 5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Merata dan Berkeadilan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 5. Angka Partisipasi Sekolah
		3. Menguatnya Karakter Peserta Didik Religius, Berbudaya dan Berwawasan Kebangsaan	1. Persentase siswa dengan nilai <i>kompetensi literasi</i> yang memenuhi kompetensi minimum 2. Persentase siswa dengan nilai <i>kompetensi numerasi</i> yang memenuhi kompetensi minimum.
		4. Meningkat	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
		nya Budaya Literasi Masyarakat	
		5. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	1. Peningkatan prestasi olahraga 2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 3. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri
		6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup 2. Prevelensi Stunting
		7. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif	1. Angka Kelahiran Total (TFR) 2. Indeks Pengarustamaan Gender
		8. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Persentase Tingkat Kemiskinan

Misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.9 merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis.

6. **Misi 6: Meningkatkan Tataan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)**

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Sosial Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti terlihat seperti Tabel 5.10.

Tabel 5.9
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Misi 6. Meningkatkan Tataan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Persentase Cakupan Ketahanan Sosial Budaya	1.Meningkatnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Desa Membangun

Misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Tabel 5.10 merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok yang kemudian dirumuskan menjadi isu strategis.



Tabel 5.10
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Solok
Visi : Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	MENGELOLA ANGGARAN BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT	1.1 MENINGKATKAN KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG RESPONSIF	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks	NA	70	76	84	88	94	94
		1.1.1. Meningkatnya Angaran Berbasis kebutuhan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	C	C	B	B	B	A	A
2	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN	2.1 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS BERBASIS TATA RUANG DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,59	62,45	63,71	64,82	65,98	67,14	67,14
		2.1.1. Meningkatnya Penataan Pembangunan Sesuai Aturan Tata Ruang Daerah	Persentase kesesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang	Persentase	54	55	57	58	59	60	60
		2.1.2. Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Dan Terintegrasi Dengan Sektor Unggulan	Persentase Infrastruktur Dasar berkategori baik	Persentase	62,14	63,64	65,14	66,89	68,89	70,89	70,89

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
		2.1.3. Meningkatnya Kondisi Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Yang Nyaman, Berkualitas Dan Berkelanjutan	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman berkondisi baik	Persentase	61,5	63,1	65,7	68,3	70,6	73,2	73,2
		2.1.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,30	70,50	70,70	70,90	71,40	71,60	71,60
		2.1.5. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Level Ketahanan Bencana Daerah	Level	3	3	3	3	4	4	4
3	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI SEKTOR PERTANIAN, UMKM, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	3.1 MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	2,69	3,18	4,47	4,81	4,91	5,05	5,05
		3.1.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	25.930.000	26.530.000	27.480.000	28.570.000	29.720.000	30.970.000	30.970.000
			Pengeluaran Perkapita	Rupiah	10.296.000	10.344.000	10.527.000	10.748.000	10.985.000	11.242.000	11.242.000
			PDRB Sektor pertanian	Rupiah	3.654.349	3.724.358	3.794.366	3.864.375	3.934.383	4.004.391	4.004.391
			Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	Persentase	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2	5,2
			PDRB sektor perdagangan	Rupiah	1.152.559	1.196.292	1.240.025	1.283.758	1.327.491	1.371.224	1.371.224
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase	0,77	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00
		3.1.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05	4,05



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
4	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	4.1 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKUALITAS	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (59,80)	B (60,20)	B (65,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	A (80,00)	A (80,00)
		4.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B (67,00)	B (69,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,00)	A (80,00)
			Nilai LPPD	Nilai	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,20
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4.1.2. Meningkatkan birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59	62	65	68	71	74	74
			Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4	4
			Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,3	2,5	2,8	3	3,2	3,4	3,4
		4.1.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,40	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65	3,65
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	62	64	66	68	70	70
5	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	5.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	69,99	70,54	71	71	72	72
		5.1.1. Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,90	7,95	8,0	8,05	8,10	8,10
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,7	13,9	14,4	14,7	15	15
		5.1.2. Meningkatnya Mutu Pendidikan; Merata Dan Berkeadilan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persentase	83,50	84	85	86	87	88	88



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase	99,57	99,59	99,61	99,63	99,65	99,67	99,67
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase	97,19	97,30	97,50	97,98	98,50	99	99
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persentase	4,25	4,50	4,75	5	5,25	5,50	5,50
			Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	97,88	98	98,25	98,50	98,75	99	99
		5.1.3. Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, Dan Berwawasan Kebangsaan	Persentase siswa dengan nilai <i>kompetensi literasi</i> yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	50	65	75	85	100	100	100
			Persentase siswa dengan nilai <i>kompetensi numerasi</i> yang memenuhi kompetensi minimum.	Persentase	50	65	75	85	100	100	100
		5.14. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	4,410	4,412	4,415	4,420	4,425	4,430	4,430



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
		5.1.5. Meningkatnya Daya Saing Pemuda Dan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0	4	5	6	7	8	8
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase	10,58	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,00
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri	Persentase	10	15	20	25	30	35	35
		5.1.6 Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,79	69,01	69,22	69,44	69,66	69,87	69,87
			Prevalensi stunting	Persentase	13,4	13,18	12,96	12,75	12,53	12,32	12,32
		5.1.7. Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik Dan Integratif	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,71	2,63	2,55	2,47	2,39	2,3	2,3
			Indeks Pengarustamaan Gender	Indeks	96,29	96,38	96,48	96,57	96,67	96,76	96,76
		5.1.8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	7.56	7.31	7.06	6.81	6.56	6.31	6.31
6	MENINGKATAN TATANAN HIDUP MASYARAKAT BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA, SYARA BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK)	6.1 MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT	Persentase cakupan ketahanan sosial budaya	Persentase	50	60	70	80	90	100	100
		6.1.1. Meningkatnya Ketahanan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.672	0.678	0.683	0.690	0.700	0.712	0.712

Tujuan dan sasaran, memberikan arah dan juga batasan dalam pencapaian visi dan misi daerah, dari Tabel 5.11 terlihat untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2021-2026 akan diwujudkan melalui 6 tujuan dengan 6 indikator dan 21 sasaran dengan 41 indikator. Semua indikator yang dikemukakan akan dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan daerah Kabupaten Solok lima tahun ke depan.



Strategi, Arah Kebijakan & Program Pembangunan Daerah

BAB VI

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yang merupakan metode dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tahapan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi memerlukan perubahan kearah yang lebih baik yang didasarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara menyeluruh. Isu strategis pembangunan daerah menjadi dasar dalam penelahaan strategi dan arah kebijakan yang akan disusun untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Kondisi eksternal dan internal yang ada di Kabupaten Solok juga menjadi pertimbangan dan dasar yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan.

Peningkatan nilai tambah bagi seluruh elemen dan *stakeholder* di daerah hanya bisa didapatkan apabila terdapat komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Solok yang tertuang didalam rumusan strategi dan arah kebijakan yang disusun. Ketercapaian strategi dapai dilihat dari indikator-indikator yang ditetapkan berdasarkan data kondisi eksisting yang ada di daerah. Sedangkan kebijakan merupakan langkah-langkah yang akan diambil dalam sebuah proses perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

Keselarsan strategi dan arah kebijakan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dengan perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Solok tahun 2006-2025 juga perlu diperhatikan. Berdasarkan RPJPD, masa RPJMD saat ini berada dalam tahapan keempat atau terakhir. Berdasarkan penjelasan tersebut dan juga mengacu kepada kesinambungan dan keberlanjutan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 yang merupakan kelanjutan dari tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di daerah baik dari segi perencanaan maupun pendanaan pembangunan dan juga sebagai fasilitator. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sehingga terdapat sinergitas yang kuat diantara semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Setiap strategi yang dirumuskan harus bisa menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi. Keterkaitan antara strategi dengan sasaran merupakan satu kesatuan utuh. Strategi yang dirumuskan harus bisa mencapai sasaran strategis daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran		Strategi	
Misi 1: Pengelolaan Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat				
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Yang Responsif	1	Meningkatnya Anggaran Berbasis kebutuhan Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan				
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang
			2	Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tata ruang
	2	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Sektor Unggulan	1	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk infrastruktur publik
			2	Menyediakan sarana (peralatan) pemeliharaan jalan, mendukung sektor unggulan dan penanganan bencana alam
			3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan Mantap sampai ke daerah terisolir/tertinggal
			4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi
			5	Meningkatkan layanan air bersih yang terlindungi
			6	Meningkatkan layanan sanitasi yang layak
			7	Meningkatan sarana dan prasarana transportasi
			8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung pemerintahan
	3	Meningkatnya Kondisi Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Nyaman, Berkualitas dan Berkelanjutan	1	Meningkatkan kuantitas rumah layak huni
			2	Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana permukiman
			3	Menurunkan luas kawasan kumuh
			4	Meningkatkan perbaikan rumah terdampak bencana
	4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)
			2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
			3	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan
			4	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah B3
	5	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	1	Meningkatkan penyediaan Dokumen Analisa Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana
			2	Meningkatkan mitigasi bencana
			3	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana
			4	Meningkatkan penanganan pasca bencana
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan Dan Pariwisata				
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1	Meningkatkan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan
			2	Meningkatkan daya saing industri kecil menengah berbasis Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan
			3	Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil



Tujuan	Sasaran		Strategi	
			4	Meningkatkan daya saing pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf)
			5	Meningkatkan produk unggulan lokal daerah
			6	Mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif
			7	Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan
			8	Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bada Usaha Milik Nagari (BUMNAG), dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BAKN)
			9	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif
	2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Peningkatan kesempatan kerja
			2	Meningkatkan keterampilan/ Kompetensi angkatan kerja
			3	Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.				
Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas	1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Menguatkan kelembagaan dan Personil Birokrasi Pemerintah
			2	Menyusun dan menata produk hukum daerah sesuai dengan prinsip Omnibuslaw
			3	Memantapkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
	2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	1	Mengoptimalkan integrasi kinerja birokrasi
			2	Meningkatkan profesionalisme birokrasi
			3	Optimalisasi penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
			4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengawasan
	3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Mengoptimalkan pelayanan publik yang berkinerja tinggi
			2	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
			3	Meningkatkan inovasi daerah
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan formal, non formal, dan informal
			2	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan
	2	Meningkatnya Mutu Pendidikan; Merata dan Berkeadilan	1	Membangun Gerakan Solok Bangkit Menjadi yang Terbaik
			2	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan
			3	Meningkatkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah dan Non pemerintah
			4	Mempercepat Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
			5	Meningkatkan Pembinaan Prestasi dan Daya Saing Sekolah
			6	Meningkatkan pemerataan ketersediaan guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan



Tujuan	Sasaran		Strategi	
	3	Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan	1	Mengoptimalkan Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Agama, Tahfidz Qur'an, dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
			2	Melibatkan Lembaga Keagamaan seperti MUI, BAZ dan Lembaga Adat seperti LKAAM dan KAN dalam Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran Agama dan ABS-SBK
			3	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penguatan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai-nilai Pancasila dengan Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal dan Organisasi terkait
			4	Membangun lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar
	4	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	1	Memfasilitasi keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak
			1	Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan
			1	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan
			2	Meningkatkan penyelenggaraan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional
	5	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	3	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan
			4	Mengembangkan Program Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Pemuda
			1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat, perseorangan, dan rujukan
			2	Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
	6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	3	Meningkatkan sistem kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi pada masa pandemi
			4	Memperkuat tata kelola manajemen kesehatan
	7	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif	1	Mengurangi kesenjangan gender melalui pengarusutamaan gender disegala bidang pembangunan
			2	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak
			3	Meningkatkan akses penyelenggaraan KBKR secara komprehensif
			4	Memperkuat kebijakan pengendalian penduduk
	8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin
Misi 6 : Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)				
Mewujudkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat	1	Meningkatnya ketahanan Sosial dan kesejahteraan masyarakat Nagari	1	Meningkatkan Pembangunan di Nagari yang Berkelanjutan pada aspek ekonomi Sosial dan Lingkungan



6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Langkah konkrit dari implementasi perencanaan pembangunan adalah penyusunan arah kebijakan sebagai panduan dan juga pedoman kepada pemerintah daerah yang terpadu dan terintegrasi. Dalam penentuan tema pembangunan setiap tahunnya dalam RPJMD selama lima tahun juga berpedoman kepada arah kebijakan yang telah ditentukan. Skala prioritas permasalahan dan isu strategis daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan menjadi pertimbangan yang perlu dikaji didalam penyusunan arah kebijakan.

Penyelarasan strategi pembangunan dan dokumen perencanaan lainnya dapat dilakukan melalui arah kebijakan sehingga dapat menghasilkan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk lima tahun kedepannya yang komprehensif. Perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting menjadi prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	I	II	III	IV	V
Misi 1 : Pengelolaan Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat					
Meningkatnya Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan partisipasi dan kualitas usulan masyarakat dalam musrenbang				
	Peningkatan koordinasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran				
	Peningkatan kualitas data evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan				
	Peningkatan peran kelitbangan dalam perencanaan				
	Optimalisasi alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat				
Misi 2. : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan					
Meningkatnya penataan pembangunan sesuai tata ruang daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen tata ruang				
	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan aturan tata ruang				
Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan	Peningkatan penataan dan pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur publik				
	Peningkatan sarana (peralatan) pemeliharaan jalan, mendukung sektor unggulan dan penanganan bencana alam				
	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan sampai ke daerah terisolir/tertinggal				
	Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi				
	Pemenuhan standar pelayanan minimal air minum terlindungi				
	Pemenuhan standar pelayanan minimal sanitasi layak				
	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan transportasi air guna menunjang keselamatan dan kenyamanan mobilitas masyarakat				
	Peningkatan sarana gedung pemerintahan dan infrastruktur publik lainnya				
Meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman				
	Peningkatan penanganan Kawasan Kumuh				
	Peningkatan perbaikan rumah terdampak bencana				



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	I	II	III	IV	V
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan				
	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan RTH Publik				
	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan				
	Peningkatan layanan sampah dan limbah B3 yang tertangani				
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri				
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Pemetaan potensi kawasan resiko bencana dan penanggulangan bencana (Tahun ke- 1 dan ke-2)				
	Pengurangan resiko bencana (mitigasi)				
	Pengembangan dan pemberdayaan Komunitas masyarakat Nagari sadar bencana dan lembaga kebencanaan daerah yang tangguh.				
	Penyediaan sistem informasi kebencanaan secara online, cepat, tepat dan terintegrasi				
	Peningkatan tanggap darurat kebencanaan				
	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan Dan Pariwisata					
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Penyediaan Benih/Bibit unggul, sarana dan prasarana produksi				
	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Penguatan Kelembagaan				
	Perlindungan lahan pertanian				
	Penyediaan sarana dan Prasarana Panen dan pasca panen				
	peningkatan teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran				
	Pengembangan pertanian organik				
	Pengembangan usaha dan diversifikasi produk IKM				
	Peningkatan kapasitas SDM IKM				
	Pemanfaatan digitalisasi untuk IKM				
	Peningkatan Akses Informasi dan Kemitraan bagi IKM				
	Mendorong pertumbuhan IKM termasuk <i>millenial enterpreuner dan women enterpreuner</i>				
	Mendorong pertumbuhan sentra-sentra IKM Potensial				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana sentra IKM				
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan koperasi baik dari segi kelembagaan maupun SDM Koperasi				
	Pengembangan usaha dan diversifikasi produk Usaha Mikro dan Kecil				
	Peningkatan kapasitas usaha dan SDM Usaha Mikro dan Kecil				
	Pemanfaatan digitalisasi untuk Usaha Mikro dan Kecil				
	Peningkatan Akses Informasi dan Kemitraan bagi Usaha Mikro dan Kecil				
	Mendorong penumbuhan Usaha Mikro dan kecil termasuk <i>millenial enterpreuner dan women enterpreuner</i>				
	Pengembangan destinasi wisata pada kawasan strategis				
	Peningkatan SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				
	Pembentukan badan pengelola destinasi (<i>destination management organization</i>)				
	Peningkatan inovasi produk ekonomi kreatif				
	Perluasan kesempatan investasi untuk kepariwisataan dan ekonomi kreatif				
	Penguatan program dan standarisasi <i>Clean, Health, Safety, and Environment</i> (CHSE)				
	Penumbuhan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
Pemasaran berbasis digital dan <i>marketplace</i> .					
Penyediaan Benih, pupuk,					
Penyediaan sarana dan prasarana					
Peningkatan Kompetensi SDM					

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	I	II	III	IV	V
	Pengembangan usaha berbasis produk unggulan lokal				
	Penguatan kerjasama dengan pihak terkait.				
	Peningkatan sarana dan prasarana pasar				
	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan				
	Mendorong digitalisasi sektor perdagangan				
	Peningkatan akses Informasi Perdagangan				
	Peningkatan promosi perdagangan dalam negeri dan atau luar negeri				
	Penyediaan dan pemenuhan ketahanan pangan,				
	Peningkatan Akses dan Keterjangkauan pangan,				
	Peningkatan Keamanan Pangan				
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasi sumberdaya pangan Lokal				
	Pemberdayaan BUMD,				
	Penumbuhan dan Pengembangan BUMNAG dan BKAN				
	Optimalisasi pengelolaan BUMD, BUMNAG dan BKAN				
	Peningkatan layanan Investasi dan Penanaman Modal,				
	Peningkatkan Realisasi Investasi				
	Pemberian kemudahan dan fasilitasi investasi serta pengembangan layananan investasi Berbasis teknologi				
	Deregulasi Investasi dalam membenetuk <i>image</i> lembaga perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi,				
	Peningkatan pengendalian pelaksanaan penamaman modal, peningkatan upaya promosi investasi,				
	Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin yang telah diterbitkan				
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD),				
	Penguatan Kerjasama (MoU) dengan Perusahaan				
	Optimalisasi penggunaan sistem informasi Pasar Kerja berbasis teknologi,				
	Peningkatan fasilitasi program magang kerja				
	Mendorong wirausaha baru melalui Inkubasi Bisnis/Tenaga Kerja Mandiri (TKM)				
	Mendorong terciptanya lapangan kerja Baru berbasis Padat Karya				
	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja				
	Penyediaan sarana dan prasarana BLK				
	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Instruktur				
	Pengoptimalan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), BLK Komunitas, dsb				
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih					
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah				
	Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah				
	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif				
Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Optimalisi penerapan integrasi kinerja birokrasi				
	Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan beroirientasi pada perubahan pola piker dan budaya kerja				
	Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan				
	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkan integrasi sistem layanan publik				
	Meningkatkan kualitas informasi publik				
	Optimaliasi pemanfaatan <i>website</i> Pemda Kab Solok				

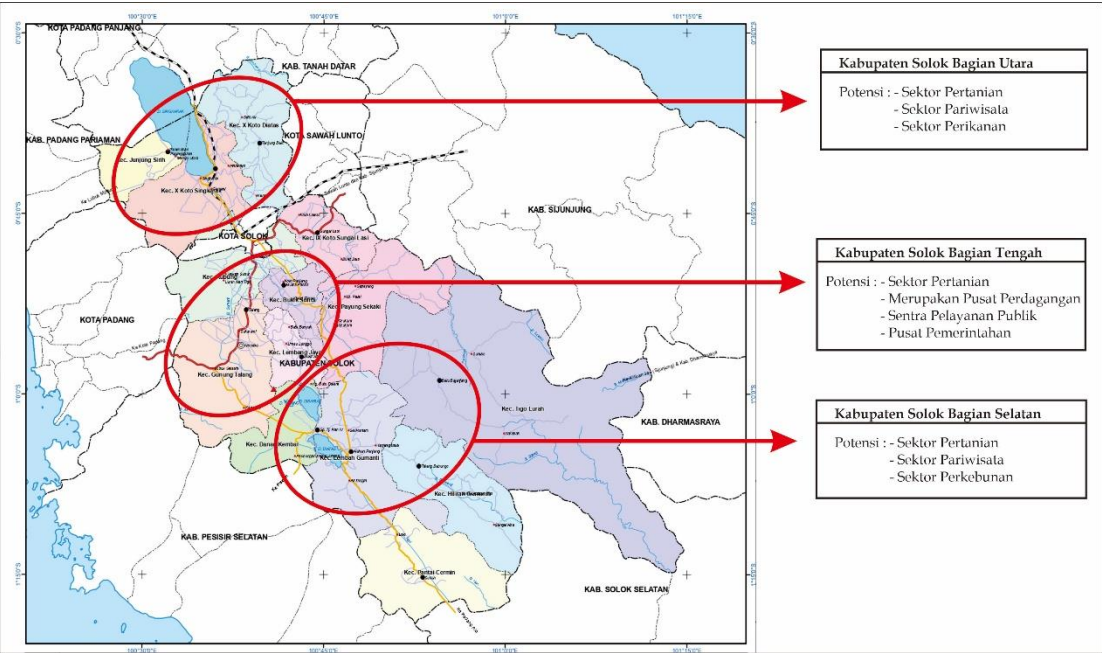
SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	I	II	III	IV	V
	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik				
	Meningkatkan kreatifitas perangkat daerah				
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas					
Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan terhadap layanan internet				
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan; PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS				
	Memberikan perhatian khusus pada PAUD dan kecamatan dengan APK/ APM rendah				
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)				
	Mengintensifkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama program pembangunan pendidikan dengan pemerintah dan nonpemerintah				
	Mendorong peningkatan efektifitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai mitra pemerintah daerah				
	Mendorong peningkatan efektifitas peran masyarakat dalam memajukan pendidikan				
Meningkatnya Mutu Pendidikan ; Merata Dan Berkeadilan	Mendorong pengembangan sistem jaminan sosial				
	Memperbaiki tata kelola pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel				
	Mengotpimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar				
	Membangun jejaring dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah (perguruan tinggi, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan lembaga swasta) dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidik,tenaga kependidikan dan lulusan pendidikan				
	Mengefektifkan upaya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan				
	Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama lintas OPD dan antarlembaga untuk percepatan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan dan SPM pendidikan				
	Meningkatkan program pembinaan prestasi, minat bakat dan daya saing sekolah				
	Meningkatkan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan				
Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, Dan Berwawasan Kebangsaan	Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum ABS-SBK sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah				
	Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan seperti MUI, BAZ dan Lembaga Adat seperti LKAAM dan KAN untuk Penyusunan Kurikulum dan Program; Ulama Masuk Sekolah, Tokoh Adat Masuk Sekolah				
	Meningkatkan Mutu Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Kegiatan Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler (Pramuka, Olahraga, Palang Merah, dan lain-lain)				
	Menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar				
	Menyusun regulasi daerah terkait suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar				
	Mendorong keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak				
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Mengoptimalkan layanan Perpustakaan				
	Meningkatkan Koleksi Bacaan Perpustakaan				
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perpustakaan				
	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengelola Perpustakaan (Pustakawan)				
	Menumbuhkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial				
	Mendorong tumbuh dan berkembangnya Komunitas Literasi berbasis Masyarakat				
	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat terhadap Pelestarian Naskah Kuno				



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	I	II	III	IV	V
Meningkatnya Daya Saing Pemuda Dan Olahraga	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi				
	Meningkatkan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasiona				
	Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan organisasi kepemudaan				
	Meningkatkan Kerjasama Singkronisasi Program Pembinaan dan Pemandirian Pemuda dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat				
	Meningkatkan program kemandirian, kreativitas dan daya saing pemuda melalui program wirausaha pemuda, taruna tani, dan lain-lain				
Meningkatnya Umur Harapan Hidup Dan Berkurangnya Kematian Bayi Dan Ibu Melahirkan	Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat;				
	Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat				
	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas				
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan				
	Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang menjangkau masyarakat miskin				
	Membangun dan memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi				
	Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan dengan perhitungan yang tepat dan sesuai kebutuhan program				
Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik Dan Integratif	Mengembangkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan				
	Meningkatkan capaian Kabuapen Layak Anak				
	Optimalisasi pencegahan dan penanganan perlindungan anak				
	Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui penerapan 8 fungsi keluarga				
	Meningkatkan kapasitas pelayanan dan jangkauan KBKR				
	Meningkatkan kemandirian PUS dalam ber-KB;				
	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki				
	Mengoptimalkan pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter				
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Mendorong pengembangan sistem jaminan sosial				
	Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan				
	Peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin				
Misi 6 : Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)					
Meningkatnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Mengoptimalkan fasilitas perencanaan pembangunan di Nagari				
	Meningkatkan potensi Nagari melalui pemekaran wilayah.				
	Penguatan Lembaga adat dan budaya yang ada di Nagari				
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pertunjukan seni dan budaya				
	Peningkatan kualitas MTTS dalam perencanaan pembangunan				
	Penguatan nilai-nilai ABS-SBK dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan				

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Solok berdasarkan wilayah dibagi menjadi tiga kawasan utama meliputi :



Gambar 6.1
Tiga Kawasan Utama Kabupaten Solok

A. Daerah Kabupaten Solok Bagian Utara

Pada daerah bagian utara ini akan dikembangkan sektor pariwisata khususnya Singkarak dimana Danau Singkarak juga merupakan destinasi wisata Geopark yang akan bekerja sama dengan UNESCO. Disamping itu juga terdapat potensi wisata seperti Puncak Gagoan, Bukik Cinangkiak, dan Gunung Merah Putih di Kecamatan X Koto Diatas. Selanjutnya karena daerah ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian khususnya beras di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Kemudian daerah ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan di Kecamatan X Koto Singkarak.

B. Daerah Kabupaten Solok Bagian Tengah

Untuk daerah Kabupaten Solok bagian tengah meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Bukit Sundi, daerah ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Solok dimana ibukota kabupaten terletak di Arosuka. Disamping itu, kawasan ini juga merupakan sentral pelayanan publik dimana akan dikembangkan pelayanan publik terpadu berupa *Mall Pelayanan Publik*. Selanjutnya kawasan ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian khususnya padi. Daerah yang paling berpotensi untuk pengembangan padi adalah Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan Lembang Jaya. Selanjutnya kawasan ini juga merupakan pusat perdagangan dimana nantinya akan dikembangkan Pusat Pengembangan UMKM di Kecamatan Kubung.

C. Daerah Kabupaten Solok Bagian Selatan

Kebijakan pembangunan pada kawasan ini meliputi sektor pertanian holtikultura dengan produknya antara lain bawang, cabe, kol dan lain-lain. Daerah yang berpotensi untuk pengembangan ini adalah Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Selain itu pada kawasan ini juga terdapat potensi sektor perkebunan seperti kopi, dan teh. Selanjutnya sektor pariwisata yaitu pengembangan



wisata 3 danau yaitu Danau Diatas, Danau Dibawah, dan Danau Talang. Disamping itu, juga terdapat pembangunan Geosite Gunung Talang yang merupakan destinasi wisata unggulan bertaraf Internasional yang juga merupakan program unggulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah merupakan terjemahan perencanaan strategis yang tercantum di dalam dokumen RPJMD. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis Bupati dan Wakil Bupati pada periode RPJMD yang telah ditetapkan selama lima tahun yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang kemudian dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Didalam dokumen RPJMD telah diselaraskan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang merupakan upaya strategis dari pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis. Dalam penyusunan program pembangunan juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan memiliki batas waktu. Program pembangunan juga bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan program prioritas atau program unggulan Kepala Daerah yang telah disampaikan ketika pilkada.

6.3.1 Program Prioritas Pembangunan

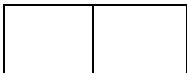
Janji kerja adalah serangkaian kegiatan-kegiatan janji yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok kepada masyarakat pada saat kampanye. Janji kerja berisikan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, mempunyai manfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.

Penjabaran janji kerja dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menuangkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengampu janji kerja tersebut. Adapun janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok tahun 2021-2026 yang harus dipenuhi adalah:

- 1. Penyediaan Alat Berat**
Penyediaan *excavator* dengan tujuan utamanya untuk pembangunan jalan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mempermudah mengangkut hasil pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat, serta untuk evakuasi pada saat penanggulangan bencana.
- 2. Membangun Sentra Pertanian dan Perdagangan Terpadu**
Bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian, meminimalkan campur tangan tengkulak dengan membentuk sistem perdagangan terpadu (pembangunan pasar terpadu pertanian). Pasar terpadu yang dimaksud direncanakan akan dibangun di Selayo atau Kotobaru (Kecamatan Kubung). Pembangunan ini dapat sejalan dengan tujuan pembangunan pabrik saus tomat dan cabe.
- 3. Pembibitan Bibit Unggul Holtikultura**
Dimaksudkan pada pengembangan bibit unggul khusus hortikultura (Durian, Alpokat, Manggis, Pepaya dsb) oleh Dinas Pertanian, dan bermitra dengan Balitbu Tropica, Balitbu Sumani dan BPTP Sukarami. Lokasi direncanakan di Arian. Outputnya bibit unggul holtikultura atau bersertifikat yang layak diberikan ke masyarakat untuk meningkatkan produksi hortikultura.

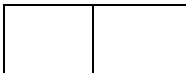


4. **Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN)**
Merupakan fasilitasi dari Pemda Kabupaten Solok untuk pembentukkan BUMD, BUMNAG dan BKAN, untuk jangka panjang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (dari BUMD) dan Nagari (dari Bumnag dan BKAN).
5. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Kemudahan Pelayanan dalam Perizinan dengan Waktu Pengurusan Maksimal 1 Minggu dan Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku**
Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyediaan *Mall* Pelayanan Publik yang representatif. Salah satu lokasi yang direncanakan adalah UMMY di Kotobaru Kecamatan Kubung sebagai lokasi *Mall* Pelayanan Publik, dengan pertimbangan lokasi yang mudah diakses. Upaya lain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang representatif, mempersiapkan tenaga pelayanan yang profesional.
6. **Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk Tempat-Tempat Ibadah**
Penyediaan lampu penerangan untuk jalan umum ke tempat-tempat ibadah yang tidak ada jaringan listriknya. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman ketika pergi beribadah khususnya pada malam hari.
7. **Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**
Bantuan Rumah Layak Huni diutamakan untuk memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, disamping itu program ini juga berkontribusi terhadap penurunan kawasan kumuh di Kabupaten Solok.
8. **Mendorong terbentuknya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan**
Pemerintah daerah mendorong berdirinya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang diharapkan nantinya dapat menunjang kemajuan dunia pendidikan terutama untuk keberlanjutan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Kemajuan dunia pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat bersaing di dunia kerja dan dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat.
9. **Penanganan Pandemi Covid-19**
Pandemi Covid-19 mulai terjadi pada akhir tahun 2019 dan berlanjut sampai tahun 2021 sekarang ini. Kondisi ini sangat mempengaruhi sektor perekonomian dan kesehatan masyarakat. Penanganan Covid-19, pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan yang sudah baku sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2020.
10. **Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta Validasi dan Verifikasi Data**
Permasalahan utama aset Kabupaten Solok adalah belum tertatanya dengan baik sehingga kedepannya diperlukan verifikasi dan penataan ulang aset daerah.
11. **Penyediaan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga HET**
Memfasilitasi penyediaan pupuk subsidi sesuai dengan HET. Menstabilkan harga pupuk dan ketersediaan pupuk, mengantisipasi kelangkaan pupuk petani.



- 12. Satu Kecamatan Satu Produk Unggulan**
Menginventaris produk unggulan dari 14 kecamatan. Di harapkan masing-masing kecamatan memiliki 1 produk unggulan. Produk yang dimaksud bisa dari Produk Pertanian, Perikanan, Peternakan atau Usaha Mikro dan Kecil.
- 13. Pembangunan Pabrik Saus Tomat dan Cabe**
Over produksi pada komoditas pertanian seperti tomat dan cabe pada musim panen raya mengakibatkan harga turun dan sampai tidak dibeli pedagang secara menyeluruh. Pedagang akan memilih komoditi yang berkualitas bagus, sehingga sisanya sering terbuang tertumpuk di tempat pertanian, yang akhirnya mendatangkan bau busuk serta merusak lingkungan dan menyebabkan polusi. Dengan kelebihan produksi ini menyebabkan masalah baru bagi masyarakat tani dan juga lingkungan. Maka dengan didirikannya pabrik saos tomat dan cabe akan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan diatas dimanan nanti nya berada dibawah wewenang dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).
- 14. Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Sumber Daya Lokal**
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pasca pandemi Covid-19 maka perlu mendorong penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang ada dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada.
- 15. Pengembangan Kawasan Danau**
Kabupaten Solok memiliki potensi 5 Danau yang dapat dikembangkan untuk pengembangan sektor pariwisata yang nantinya akan memberi dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
- 16. Wisata Berbasis Budaya dan Kesenian Lokal**
Melakukan pengembangan budaya dan kesenian dengan memperbanyak penampilan kesenian budaya lokal pada destinasi wisata serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok kesenian tradisional lokal yang bertujuan untuk memberikan daya tarik pariwisata daerah.
- 17. Sanitasi Padat Karya**
Program ini membangun fasilitas sanitasi yang layak khusus nya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan menyediakan toilet dan *septic tank* dimasing-masing rumah.
- 18. Kemandirian Lembaga Agama dan Adat**
Program ini memberikan dukungan pada lembaga adat dan agama untuk lebih mandiri dalam menjalankan peran dan fungsi adat dan agama dalam kehidupan sosial mayarakat.
- 19. Peningkatan kualitas SDM ASN**
Program ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM ASN agar lebih profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN dan pemerintah daerah.

Keterkaitan antara program prioritas kepala daerah dengan visi, misi,dan tujuan RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.3.



Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan

NO	Program Prioritas	Misi	Tujuan	Program Kepmen 50-3708 Tahun 2020	Keterangan
1	Penyediaan Alat Berat	Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan	Tujuan 1 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan alat berat seperti <i>excavator</i> dan alat berat lainnya di setiap kecamatan. Pembelian <i>excavator</i> tahun 2021 Selanjutnya dianggarkan operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya
2	Membangun Sentral Pertanian dan Perdagangan Terpadu	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2022 : Studi kelayakan, apraisal tanah, Tahun 2023 : Perencanaan Pasar, Pembangunan Pasar, Tahun 2024 : Bangunan gudang
3	Pembibitan Bibit Unggul Holtikultura	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan bibit Durian, alpukat, manggis, pepaya, pisang
4	Pengembangan BUMD, BUMNag dan BKAN	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemberntukan BUMNAG di setiap nagari
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Studi Kelayakan, Review Perda BUMD, Penyertaan Modal ke BUMD
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kemudahan Pelayanan Dalam Perizinan Dengan Waktu Pengurusan Maksimal 1 Minggu Dan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tata Kelola Pemerintahan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Perencanaan di DPUPR Renovasi Gedung UMMY sebagai Mall Pelayanan Publik Penyediaan sarana dan prasanara penunjang Mall Pelayanan Publik
6	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk tempat-tempat ibadah	Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan	Tujuan 1 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Memasang lampu LPJU di jalan menuju mesjid
7	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Misi 2 : Meningkatkan penyediaan	Tujuan 1 : Mewujudkan infrastruktur yang	Program Kawasan Permukiman	Pendataan calon penerima dan memperbaiki rumah



NO	Program Prioritas	Misi	Tujuan	Program Kepmen 50-3708 Tahun 2020	Keterangan
		infrastruktur yang berkeadilan	berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pendataan calon penerima dan memperbaiki rumah
8	Mendorong terbentuknya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan	Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mendorong terbentuknya yayasan yang bergerak di sektor pendidikan baik formal maupun non formal
9	Penanganan Pandemi Covid-19	Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Koordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi sampai pelaporan
					Investigasi penyebab terjadi kasus Pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi dan sosialisasi vaksinasi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan monitrong
					Pelaksanaan BIMTEK
					Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
					Penyediaan APD dan sarana prasarana penanganan COVID
				Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemberiaan insentif tenaga kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Insentif nakes non ASN
10	Penataaan dan Pemanfaatan Aset Daerah serta validasi dan verifikasi data	Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tata Kelola Pemerintahan	Program pengelolaan barang milik daerah	Inventarisasi aset, klasifikasi aset, rencana pemanfaatan, kelembagaan
11	Penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan harga HET	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Pengawasan, optimalisasi BUMNAG (pilot project di 1 nagari)



NO	Program Prioritas	Misi	Tujuan	Program Kepmen 50-3708 Tahun 2020	Keterangan
12	Satu kecamatan satu produk unggulan	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program pengelolaan perikanan tangkap	pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana seperti Perahu, Jaring, Mesin Tempel, Alat Keselamatan Nelayan (Ikan Bilih)
				Program Pengembangan UMKM	digitalisasi, pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana seperti Tenun, anyaman pandan, gula tebu, batik,
				Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan markisa (Bibit, saprodi, tiang)
					Bimtek Penyusunan GAP, GHP, sosialisasi Registrasi kebun (Bawang Merah SS Sakato, durian, alpukat, pisang kepok)
					Bantuan saprodi, pembinaan kelompok tani
				Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penangkaran dan kontes Ayam Kukuak Balenggek
13	Membangunan pabrik saos tomat dan cabe	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pembangunan pabrik saos tomat dan cabe melalui pendirian dan pengembangan BUMD yang mengolah hasil pertanian
14	Usaha Mikro dan Kecil Berbasis sumber daya lokal	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program Pengembangan UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan potensi
15	Pengembangan Kawasan Danau	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan 5 danau
					Optimalisasi amenitas (akomodasi, infrastruktur penunjang, toilet), aksesibilitas (peningkatan jalan) dan atraksi (event) dan pemasaran di kawasan 5 danau
16	Wisata Berbasis Budaya dan Kesenian Lokal	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor	Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan, pelatihan, penyediaan peralatan untuk tampil, branding dengan digitalisasi (pemasaran)



NO	Program Prioritas	Misi	Tujuan	Program Kepmen 50-3708 Tahun 2020	Keterangan
		Pertanian, Umkm, Perdagangan Dan Pariwisata	berkelanjutan dan berkeadilan	Program Pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan, pelatihan, penyediaan peralatan untuk tampil, branding dengan digitalisasi (pemasaran)
17	Sanitasi Padat Karya	Misi 2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan	Tujuan 1 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Membangun toilet dan WC di rumah MBR
18	Kemandirian Lembaga Agama dan Adat	Misi 6 : Meningkatkan Tatahan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Tujuan 1 : Mewujudkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi lembaga agama yang aktif
				Program Pengembangan Kebudayaan	Fasilitasi lembaga adat yang aktif
				Program penataan desa	Fasilitasi pendukung status desa
				Program peningkatan kerjasama desa	
				Program administrasi pemerintahan desa	
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
19	Peningkatan Kualitas SDM ASN	Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pelatihan dan diklat ASN, serta beasiswa bagi ASN berprestasi

6.3.2 Keselarasan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dan Program Prioritas Kabupaten Solok

Keselaran program unggulan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Keselarasan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat dan Program Prioritas Kabupaten Solok

Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Program Prioritas Kabupaten Solok
1. Sumbar Sehat dan Cerdas a. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan	a. Mendorong terbentuknya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan b. Penanganan Pandemi Covid-19 c. Peningkatan kualitas SDM ASN



Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Program Prioritas Kabupaten Solok
untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 b. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru c. Menjadikan stadion Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru. d. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) e. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 persen f. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru untuk pemerataan akses pendidikan g. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri h. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan	
2. Sumbar Religius dan Berbudaya a. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi b. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan c. Menjadikan gedung kebudayaan, museum, dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (<i>education tourism</i>) d. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan	a. Kemandirian lembaga agama dan adat b. Wisata berbasis budaya dan kesenian lokal
3. Sumbar Sejahtera a. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian b. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak	a. Membangun sentra pertanian dan perdagangan terpadu b. Pembibitan bibit unggul hortikultura c. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) d. Penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan harga HET



Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	Program Prioritas Kabupaten Solok
c. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian d. Mencetak 100 ribu <i>millennial entrepreneur</i> dan <i>women entrepreneur</i> serta pelaku ekonomi kreatif e. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula f. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital g. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan h. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional	e. Satu kecamatan satu produk unggulan f. Membangun pabrik saus tomat dan cabe g. Usaha Mikro dan Kecil berbasis sumber daya lokal h. Pengembangan kawasan Danau i. Wisata berbasis budaya dan kesenian lokal solok
4. Sumbar Berkeadilan a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan b. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang c. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas d. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif (<i>waste to energy</i>) dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) e. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-government</i>)	a. Penyediaan alat berat b. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk tempat-tempat ibadah c. Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) d. Sanitasi Padat Karya e. Penataan dan pemanfaatan aset daerah serta validasi dan verifikasi data f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan pelayanan perizinan dengan waktu pengurusan maksimal 1 minggu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.3.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program pembangunan yang mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk 5 tahun kedepan yang dapat dilihat pada Tabel 6.5.



Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Solok

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.	MENGELOLA ANGGARAN BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT					165,519,880,040		172,488,266,990		184,752,182,772		197,925,013,404		212,056,859,362		
1.1.	MENINGKATKAN KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG RESPONSIF	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks	70	76		84		88		94		94			
1.1.1.	Meningkatnya Anggaran berbasis Usulan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	C	C	165,519,880,040	B	172,488,266,990	B	184,752,182,772	B	197,925,013,404	A	212,056,859,362		
1.1.1.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	879,533,350	100	916,561,704	100	981,729,241	100	1,051,726,536	100	1,126,819,811	100	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
1.1.1.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	162,739,740,894	100	169,591,083,986	100	181,649,010,057	100	194,600,584,474	100	208,495,066,206	100	Badan Keuangan Daerah
1.1.1.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	6.62	6.64	1,900,605,796	6.56	1,980,621,300	6.48	2,121,443,474	6.41	2,272,702,394	6.33	2,434,973,345	6.33	Badan Keuangan Daerah
2.	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN					116,899,355,164		123,669,462,013		129,624,195,813		137,298,070,912		145,689,703,178		
2.1.	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS BERBASIS TATA RUANG DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	61,59	62,45		63,71		64,82		65,98		67,14			
2.1.1.	Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah	Persentase kesesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang	%	54	55	1,968,900,950	57	2,051,791,680	58	2,197,674,068	59	2,354,368,230	60	2,522,470,121		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.1.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	54	55	1,968,900,950	57	2,051,791,680	58	2,197,674,068	59	2,354,368,230	60	2,522,470,121	60	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.	Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor unggulan	Persentase Infrastruktur Dasar ber kondisi baik	%	62,14	63,64	96,915,685,087	65,14	102,844,479,428	66,89	107,318,556,971	68,89	113,402,040,018	70,89	120,087,495,678		
2.1.2.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	40.2	44.2	25,875,139,700	48.2	27,234,127,081	52.2	29,185,508,572	56.2	30,411,105,268	60.2	31,885,008,187	60.2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	%	78,27	79,27	7,689,887,000	80,27	8,013,631,243	82,27	8,583,400,424	84,27	9,195,396,874	86,27	9,851,948,211	86,27	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses air sanitasi layak	%	70,27	71,27	3,919,963,000	72,27	4,084,993,442	73,37	4,375,436,476	75,27	4,687,405,097	77,27	5,022,085,821	77,27	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Gedung dan Lingkungan Pemerintah Ber kondisi Baik	%	50	52	13,141,660,600	53	13,694,924,511	54	14,668,633,644	55	15,714,507,223	56	16,836,523,039	56	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	59,80	61,80	44,024,542,752	63,80	47,456,976,002	65,80	47,977,966,996	67,80	50,685,796,042	69,80	53,590,761,880	69,80	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	19,61	22,06	299,000,000	24,51	311,587,900	26,96	333,741,799	29,41	357,537,590	31,86	383,065,773	31,86	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.2.2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	5	5	1,907,365,435	5	1,987,665,520	5	2,128,988,538	5	2,280,785,421	5	2,443,633,500	5	Dinas Perhubungan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.2.2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan transportasi air	%	5	10	58,126,600	15	60,573,729	20	64,880,522	25	69,506,503	30	74,469,267	30	Dinas Perhubungan
2.1.3.	Meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan pemukiman yang nyaman, berkualitas dan berkelanjutan	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman berkategori baik	%	61,50	63,10	11,026,839,527	65,70	11,491,069,470	68,30	12,308,084,508	70,60	13,185,650,934	73,20	14,127,106,411		
2.1.3.1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni	%	100	100	664,158,350	100	692,119,416	100	741,329,107	100	794,185,872	100	850,890,743	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.1.3.1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	14	25	5,000,000,000	35	5,210,500,000	45	5,580,966,550	55	5,978,889,465	65	6,405,782,173	65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.1.3.1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	27,22	30,08	4,038,902,460	33,03	4,208,940,254	36,07	4,508,195,906	39,20	4,829,630,274	42,43	5,174,465,875	42,43	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.1.3.1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	60	62	533,150,117	65	555,595,736	70	595,098,593	75	637,529,123	80	683,048,703	80	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.1.3.2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah yang diselesaikan	%	100	100	69,100,500	100	72,009,631	100	77,129,515	100	82,628,850	100	88,528,550	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																Permukiman Dan Pertanahan
2.1.3.2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang diselesaikan	%	71,9	75	52,850,000	78	55,074,985	80	58,990,816	90	63,196,861	100	67,709,117	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.1.3.2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Percil Tanah yang ditata	%	33,46	53,09	668,678,100	72,72	696,829,448	92,35	746,374,021	100	799,590,489	-	856,681,250	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.1.4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,30	70,50	3,965,223,750	70,70	4,132,159,668	70,90	4,425,956,219	71,40	4,741,526,898	71,60	5,080,071,918		
2.1.4.1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	%	45	50	1,125,383,000	55	1,172,761,624	60	1,256,144,976	65	1,345,708,113	70	1,441,791,672	70	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.1.4.2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	30	40	10,470,000	50	10,910,787	70	11,686,543	80	12,519,794	100	13,413,707	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	14.30	28.60	243,505,750	42.90	253,757,342	60	271,799,489	78,60	291,178,792	100	311,968,958	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	1,03	1,04	582,432,600	1,05	606,953,012	1,06	650,107,371	1,07	696,460,027	1,08	746,187,273	1,08	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.4.2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan penghasil Limbah B3 yang diawasi	%	7.70	26.20	25,000,000	44.60	26,052,500	63.10	27,904,832	81.60	29,894,447	100	32,028,910	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	15	20	62,000,000	25	64,610,200	30	69,203,985	40	74,138,229	50	79,431,698	50	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	5.40	24.32	28,057,900	43.24	29,239,137	62.16	31,318,040	81.08	33,551,016	100	35,946,559	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan dan penilaian calon sekolah Adiwiyata	%	11.11	24.44	27,140,000	40.00	28,282,594	57.77	30,293,486	77.78	32,453,412	100	34,770,585	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	%	100	100	15,075,000	100	15,709,657	100	16,826,614	100	18,026,351	100	19,313,433	100	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.4.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terangkut ke TPA	%	12,80	13,97	1,846,159,500	15,25	1,923,882,815	16,65	2,060,670,883	18,18	2,207,596,717	19,32	2,365,219,123	19,32	Dinas Lingkungan Hidup
2.1.5.	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Level Ketahanan Bencana Daerah	nilai	3	3	3,022,705,850	3	3,149,961,767	3	3,373,924,047	4	3,614,484,832	4	3,872,559,050		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.1.5.1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	2,511,577,400	100	2,617,314,809	100	2,803,405,891	100	3,003,288,731	100	3,217,723,547	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.1.5.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	%	100	100	511,128,450	100	532,646,958	100	570,518,156	100	611,196,101	100	654,835,503	100	Dinas Sosial
3.	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI SEKTOR PERTANIAN, UMKM, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA					37,783,908,114		39,427,939,046		42,332,132,907		45,437,633,989		48,952,759,055		
3.1.	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,50	3,00		4,81		5,15		5,25		5,39		5,39	
3.1.1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	Rupiah	25930000	26530000	34,366,527,897	27480000	35,866,687,122	28570000	38,517,675,974	29720000	41,351,206,273	30970000	44,574,560,399		
3.1.1.2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Perkapita	Kg/Kapital/Thn	608,65	620,8	719,974,300	633	750,285,218	645,2	803,630,497	657,4	860,929,351	657,4	922,399,707	657,4	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi	Skor	85	85,5	179,206,250	86	186,750,833	86,5	200,028,817	87	214,290,872	87,5	229,591,240	87,5	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	15,38	15,38	243,821,000	15,38	245,665,864	15,38	248,912,707	15,38	252,400,183	15,38	256,141,556	15,38	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	%	80	80	148,999,000	80	151,061,858	80	154,692,356	80	158,591,921	80	162,775,384	80	Dinas Perikanan Dan Pangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.1.1.2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	%	5	5	271,379,000	5	274,384,056	5	279,672,762	5	285,353,430	5	291,447,665	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	%	5	5	274,999,790	5	278,157,281	5	283,714,264	5	289,683,091	5	296,086,464	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	%	5	5	124,749,670	5	125,791,631	5	127,625,416	5	129,595,108	5	131,708,199	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	%	35,92	49,80	597,999,990	63,41	602,125,790	76,75	609,386,933	89,84	617,186,222	99,25	625,553,318	99,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	%	5	5	6,186,490,310	5	6,531,141,552	5	7,137,705,716	5	7,789,224,134	5	8,448,174,737	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan, Jumlah	kelompok	30	40	245,765,200	70	256,111,915	80	274,321,472	85	293,880,593	90	314,863,667	90	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		lembaga adat yang difasilitasi														
3.1.1.2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	bh	33	20	187,629,650	20	195,528,858	15	209,430,960	15	224,363,388	15	240,382,933	15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.1.1.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5,6	5,6	1,163,370,000	5,6	1,212,347,877	5,6	1,298,545,811	5,6	1,391,132,127	5,6	1,490,458,961	5,6	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	7,50	7,83	600,000,000	8,25	625,260,000	8,61	669,715,986	8,95	717,466,736	9,30	768,693,861	9,30	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Nagari yang terfasilitasi penyusunan regulasi penggunaan alat tangkap	%	0	16,67	240,000,000	16,67	250,000,000	16,67	300,000,000	16,67	350,000,000	16,67	400,000,000	16,67	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	37	38,10	100,000,000	39,15	104,210,000	40,10	111,619,331	41	119,577,789	41	128,115,643	41	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.1.1.3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan	%	15	15	6,142,172,279	25	6,432,332,732	15	6,9422,996,589	10	7,491,507,246	5	8,079,950,863	5	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.1.1.3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan	Paket	3	3	600,000,000	4	625,260,000	5	669,715,986	6	717,466,736	6	768,693,861	6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.1.1.3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	HKI	0	15	100,000,000	20	150,000,000	25	200,000,000	30	250,000,000	35	300,000,000	35	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.1.1.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	0	10	297,992,000	15	310,537,463	20	332,616,677	25	356,332,246	30	381,774,368	30	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.1.1.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian	%	1	1,1	4,782,252,200	1,1	4,983,585,018	1,1	5,337,917,912	1,1	5,718,511,460	1,1	6,126,813,178	1,1	Dinas Pertanian
3.1.1.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian	%	2	2	5,798,512,940	2	5,963,680,335	2	6,330,358,007	2	6,781,622,532	2	7,319,380,381	2	Dinas Pertanian
3.1.1.3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	0,1	1,08	573,760,500	1,28	676,865,817	1,44	782,330,977	1,65	838,201,175	1,81	844,498,739	1,81	Dinas Pertanian
3.1.1.3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	%	1,2	1,67	286,556,500	1,67	289,620,529	1,67	319,852,448	1,67	342,657,928	1,67	367,123,704	1,67	Dinas Pertanian
3.1.1.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani yang Produktif	%	19	19	640,000,000	19	666,944,000	19	714,363,718	19	765,297,852	19	819,940,118	19	Dinas Pertanian
3.1.1.3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	2	9	439,979,220	9	458,502,345	9	491,101,862	9	526,117,425	27	563,682,209	27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas	%	23,21	23,71	267,969,220	24,71	270,830,724	24,71	275,866,789	25,21	281,276,091	25,71	287,079,204	25,71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																Dan Perdagangan
3.1.1.3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Event yang diikuti	%	100	100	199,988,660	100	208,408,183	100	223,226,004	100	239,142,018	100	256,216,759	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	15	17	201,430,568	20	209,910,795	23	224,835,452	26	240,866,220	100	258,064,068	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang difasilitasi	%	2	2	1,423,035,940	4	1,482,945,753	6	1,588,383,196	8	1,701,634,918	10	1,823,131,651	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	%	100	100	72,493,710	100	73,440,695	100	75,107,329	100	76,897,481	100	78,817,961	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.1.3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang Tersedia	%	15	25	56,000,000	45	75,000,000	75	100,000,000	100	130,000,000	100	393,000,000	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.1.2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,59	4,53	3,236,942,317	4,42	3,373,217,588	4,32	3,613,053,356	4,19	3,870,664,064	4,05	4,147,029,479		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.1.2.2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTK	%	100	100	68,434,300	100	69,210,384	100	70,576,242	100	72,043,328	100	73,617,222	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih	%	0,02	0,07	667,142,110	0,09	674,178,793	0,1	686,562,905	0,12	699,864,840	0,22	714,135,190	0,22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	0.05	0,11	413,973,700	0,14	418,771,993	0,17	427,216,681	0,21	436,287,231	0,27	446,018,139	0,27	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	41	50	178,850,000	55	182,169,585	60	188,011,842	75	194,287,087	85	201,019,185	85	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	%	5	5	122,500,000	5	123,447,250	5	125,114,349	5	126,905,003	5	128,826,020	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.1.2.2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Investasi dan Regulasi	%	20	40	146,353,000	50	152,514,461	100	163,358,239	100	175,005,682	100	187,501,088	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investasi	%	5	5	274,451,500	5	281,795,908	5	294,721,597	5	308,605,247	5	323,499,662	5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin usaha yang diterbitkan tepat waktu	%	85	86	2,205,241,707	87	2,298,082,383	88	2,461,476,040	89	2,636,979,282	90	2,825,259,603	90	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib administrasi	%	20	30	288,502,000	35	300,647,934	40	322,024,002	45	344,984,314	50	369,616,194	50	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
3.1.2.2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi	%	20	20	71,494,000	80	72,398,897	100	73,991,459	80	75,702,050	100	77,537,176	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH					717,585,150,311		743,325,191,578		802,207,059,713		859,998,433,986		922,532,314,675		
4.1.	TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKUALITAS	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (59,80)	B (60,20)		B (65,00)		BB (70,00)		BB (75,00)		A (80,00)			
4.1.1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Opini BPK	Nilai Nilai Opini	B (67,00) 3,15 WTP	B (69,00) 3,16 WTP	650,285,998,435	BB (70,00) 3,17 WTP	673,057,618,765	BB (75,00) 3,18 WTP	726,190,854,243	BB (78,00) 3,19 WTP	777,995,727,103	A (80,00) 3,20 WTP	834,123,141,242		
4.1.1.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Daerah	%	100	100	3,019,295,770	100	3,146,408,122	100	3,370,117,739	100	3,610,407,134	100	3,868,190,204	100	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
4.1.1.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	1,604,522,150	100	1,672,072,533	100	1,790,956,890	100	1,918,652,116	100	2,055,643,877	100	Badan Keuangan Daerah
4.1.1.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan aparatur sesuai Kompetensi (%)	%	60	65	3,242,369,950	68	3,378,873,725	70	3,619,111,647	72	3,877,154,307	75	4,153,983,125	75	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.1.1.5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30	40	9,353,739,138	50	9,747,531,556	60	10,440,581,049	70	11,184,994,478	85	11,983,603,084	85	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1.1.5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	238,766,850	100	248,818,934	100	266,509,961	100	285,512,121	100	305,897,686	100	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
4.1.1.X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	%	100	100	632,827,304,577	100	654,863,913,895	100	706,703,576,957	100	757,119,006,947	100	811,755,823,266	100	Semua SKPD
4.1.2.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Level Maturitas SPIP 3. Indeks SPBE	Indeks Level Indeks	59 3 2,3	62 3 2,5	2,307,425,198	65 3 2,8	2,404,567,799	68 4 3	2,575,532,569	71 4 3,2	2,759,168,041	74 4 3,4	2,956,172,639		
4.1.2.6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	Persen	100	100	2,082,593,198	100	2,170,270,372	100	2,324,576,595	100	2,490,318,906	100	2,668,127,676	100	Inspektorat Daerah
4.1.2.6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pembinaan APIP terhadap Audity	Persen	100	100	224,832,000	100	234,297,427	100	250,955,974	100	268,849,135	100	288,044,963	100	Inspektorat Daerah
4.1.3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks Indeks	3,4 60	3,45 62	33,245,136,357	3,51 64	34,644,756,591	3,55 66	37,107,998,779	3,60 68	39,753,799,080	3,65 70	42,592,220,345		
4.1.3.1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman ketertiban umum masyarakat kab/kota	%	100	100	634,699,100	100	661,419,932	100	708,446,889	100	758,959,152	100	813,148,836	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
4.1.3.1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	341,757,500	100	356,145,491	100	381,467,435	100	408,666,063	100	437,844,820	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1.3.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten	%	100	100	219,228,920	100	228,458,458	100	244,701,854	100	262,149,096	100	280,866,542	100	Dinas Sosial
4.1.3.2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99.05	99.15	449,508,750	99.20	468,433,068	99,34	501,738,660	99,39	537,512,626	99,40	575,891,027	99,40	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.1.3.2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1.00	1.00	215,940,500	1.00	225,031,595	1.00	241,031,341	1.00	258,216,876	1.00	276,653,561	1.00	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.1.3.2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8.69	9.69	135,988,000	10.69	141,713,095	11.69	151,788,896	12.69	162,611,444	13.69	174,221,901	13.69	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.1.3.2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95.00	96.86	121,775,500	97.71	126,902,249	98.07	135,924,998	98.92	145,616,451	99.53	156,013,465	99.53	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.1.3.2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	77,76	78	1,649,810,538	79	1,719,267,562	80	1,841,507,485	81	1,972,806,969	82	2,113,665,387	82	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4.1.3.2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	71,60	75	930,821,040	78	970,008,605	80	1,038,976,218	85	1,113,055,222	90	1,192,527,365	90	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4.1.3.2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam	%	100	100	171,290,063	100	178,501,374	100	191,192,822	100	204,824,870	100	219,449,366	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah														
4.1.3.2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	%	26,9	30	88,179,250	33	91,891,596	35	98,425,088	40	105,442,797	45	112,971,413	45	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4.1.3.2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	53,98	59,49	378,246,250	64,49	394,170,417	69,49	422,195,934	80	452,298,504	80	484,592,617	80	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4.1.3.2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	%	65	72	42,590,500	79	44,383,560	85	47,539,231	85	50,928,778	85	54,565,093	85	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4.1.3.2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	11	15	50,000,000	25	52,105,000	30	55,809,666	45	59,788,895	65	64,057,822	65	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4.1.3.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	7,877,580,346	100	8,209,226,479	100	8,792,902,481	100	9,419,836,428	100	10,092,412,749	100	Sekretariat Daerah
4.1.3.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	2,940,742,856	100	3,064,548,130	100	3,282,437,502	100	3,516,475,296	100	3,767,551,632	100	Sekretariat Daerah
4.1.3.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	%	100	100	12,441,445,150	100	12,965,229,991	100	13,887,057,843	100	14,877,205,067	100	15,939,437,509	100	Sekretariat DPRD



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.1.3.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	indeks	3,4	3,45	336,185,900	3,51	350,339,325	3,55	375,248,450	3,6	402,003,664	3,65	430,706,726	3,65	Semua Kecamatan
4.1.3.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	%	100	100	1,749,864,735	100	1,823,534,038	100	1,953,187,308	100	2,092,449,562	100	2,241,850,462	100	Semua Kecamatan
4.1.3.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	%	100	100	142,033,700	100	148,013,317	100	158,537,063	100	169,840,754	100	181,967,384	100	Semua Kecamatan
4.1.3.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	80,860,000	100	84,264,206	100	90,255,389	100	96,690,595	100	103,594,308	100	Semua Kecamatan
4.1.3.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan	%	100	100	121,290,500	100	126,396,829	100	135,383,643	100	145,036,492	100	155,392,102	100	Semua Kecamatan
4.1.3.8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	0	100	9,946,500	100	10,365,248	100	11,102,217	100	11,893,805	100	12,743,022	100	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.1.3.8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100	100	1,404,513,959	100	1,463,643,997	100	1,567,709,085	100	1,679,486,743	100	1,799,402,096	100	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.1.3.8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Ormas/ LSM Aktif	%	47,5	48,67	180,112,500	49,84	187,695,236	51,01	201,040,368	52,18	215,374,546	53,35	230,752,288	53,35	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
4.1.3.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	54,100,000	100	56,377,610	100	60,386,058	100	64,691,584	100	69,310,563	100	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.1.3.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial	%	100	100	476,624,300	100	496,690,183	100	532,004,855	100	569,936,801	100	610,630,289	100	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS					228,431,029,812		238,047,976,166		254,973,187,272		273,152,775,525		292,655,883,698		
5.1.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	69,99		70,54		71		71		72			
5.1.1.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun	7,86 13,5	7,90 13,7	200,000,000	7,95 13,9	208,420,000	8,00 14,4	223,238,662	8,05 14,7	239,155,579	8,10 15	256,231,287		
5.1.1.1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat	Sekolah	2	5	200,000,000	7	208,420,000	9	223,238,662	11	239,155,579	12	256,231,287	12	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan ; Merata dan Berkeadilan	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam	% % % %	83,50 99,57 97,19 4,25 97,88	84 99,59 97,30 4,50 98	132,000,000,000	85 99,61 97,50 4,75 98,25	137,557,200,000	86 99,63 97,98 5 98,50	147,337,516,920	87 99,65 98,50 5,25 98,75	157,842,681,876	88 99,67 99 5,50 99	169,112,649,362		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pendidikan Sekolah Dasar 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 5. Angka Partisipasi Sekolah														
5.1.2.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	%	97,88	98	130,000,000,000	98,25	135,473,000,000	98,50	145,105,130,300	98,75	155,451,126,090	99	166,550,336,493	99	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.2.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik / Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/ D4 dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	58,45	60,00	2,000,000,000	62,00	2,084,200,000	65,00	2,232,386,620	70,00	2,391,555,786	75,00	2,562,312,869	75,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.3.	Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan	1. Indeks Survei Karakter 2. Indeks Survei Lingkungan Belajar	Nilai Nilai	0 0	Baik Baik	400,000,000	Baik Baik	416,840,000	Baik Baik	446,477,324	Baik Baik	478,311,158	Baik Baik	512,462,574		
5.1.3.1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen Kurikulum Sekolah	%	70	75	200,000,000	80	208,420,000	85	223,238,662	90	239,155,579	95	256,231,287	95	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.3.1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	%	45	60	200,000,000	80	208,420,000	90	223,238,662	100	239,155,579	100	256,231,287	100	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.4.	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	4,410	4,412	687,660,400	4,415	716,610,903	4,420	767,561,938	4,425	822,289,104	4,430	881,000,546		
5.1.4.2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	39,70	39,75	618,504,900	39,80	644,543,956	42,16	690,371,032	43,17	739,594,486	44,12	792,401,532	44,12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
5.1.4.2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	4,410	4,411	69,155,500	4,413	72,066,947	4,417	77,190,906	4,420	82,694,618	4,440	88,599,014	4,440	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
5.1.5.	Meningkatnya Daya saing Pemuda dan Olahraga	1. Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 3. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	Medali % %	0 10,58 10	4 11,00 15	2,321,564,500	5 11,50 20	2,419,302,365	6 12,00 25	2,591,314,763	7 12,50 30	2,776,075,506	8 13,00 35	2,974,287,298		
5.1.5.2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	15	969,962,000	20	1,010,797,400	25	1,082,665,095	30	1,159,859,117	35	1,242,673,058	35	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.5.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemerolehan Medali dalam event Olahraga Nasional maupun Internasional	Medali	0	4	1,147,562,500	5	1,195,874,881	6	1,280,901,585	7	1,372,229,868	8	1,470,207,081	8	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.5.2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	%	25	35	204,040,000	40	212,630,084	45	227,748,083	50	243,986,521	60	261,407,159	60	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
5.1.6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Prevalensi stunting 2. Usia Harapan Hidup	% Tahun	17.9 68,79	17.4 69,01	85,904,121,477	15 69,22	89,520,684,991	14 69,44	95,885,605,694	13.5 69,66	102,722,249,379	13 69,87	110,056,617,986		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.6.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,44	3,49	84,081,358,950	3,54	87,621,184,162	3,59	93,851,050,356	3,64	100,542,630,246	3,69	107,721,374,046	3,69	Dinas Kesehatan
5.1.6.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumbar daya manusia sesuai standar	%	77	79,6	716,642,800	82,2	746,813,462	84,8	799,911,899	87,4	856,945,617	90	918,131,535	90	Dinas Kesehatan
5.1.6.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin	%	60	70	438,914,000	80	457,392,279	90	489,912,870	100	524,843,658	100	562,317,495	100	Dinas Kesehatan
5.1.6.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga	%	40,54	41,08	667,205,727	41,62	695,295,088	42,16	744,730,569	42,70	797,829,858	43,25	854,794,910	43,25	Dinas Kesehatan
5.1.7.	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif	1. Angka Kelahiran Total (TFR) 2. Indeks Pengarustamaan Gender	Rasio %	2,71 96,29	2,63 96,38	5,207,310,420	2,55 96,48	5,426,538,188	2,47 96,57	5,812,365,054	2,39 96,67	6,226,786,683	2,30 96,76	6,671,379,252		
5.1.7.2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD	%	0.0124	0.0128	56,058,300	0.0133	58,418,354	0.0137	62,571,899	0.0140	67,033,276	0.0143	71,819,452	0.0143	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO	Rasio	0.0002	0.0002	235,135,750	0.00018	245,034,965	0.00017	262,456,951	0.00016	281,170,132	0.00015	301,245,679	0.00015	Dinas Pengendalian Penduduk,



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		(per 100.000 Penduduk Perempuan)														Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	58,907,500	100	61,387,506	100	65,752,157	100	70,440,286	100	75,469,723	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	%	100	100	17,741,000	100	18,487,896	100	19,802,386	100	21,214,296	100	22,728,996	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	angka	650	650	66,235,350	700	69,023,858	700	73,931,455	750	79,202,767	800	84,857,845	800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.7.2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	%	100	100	228,556,000	100	238,178,208	100	255,112,678	100	273,302,212	100	292,815,990	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,05	0.93	234,938,500	0.81	244,829,411	0.69	262,236,782	0.57	280,934,265	0.45	300,992,971	0.45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	%	74.33	74.55	3,421,440,460	74.9	3,565,483,103	75.25	3,818,988,952	75.35	4,091,282,864	75.45	4,383,400,461	75.45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.7.2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	%	0	21,42	888,297,560	35,71	925,694,887	50	991,511,794	64,28	1,062,206,585	100	1,138,048,135	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.8.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Penduduk Miskin	%	7.56	7.31	1,710,373,015	7.06	1,782,379,719	6.81	1,909,106,917	6.56	2,045,226,240	6.31	2,191,255,393		
5.1.8.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/ pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	177,076,500	100	184,531,421	100	197,651,605	100	211,744,164	100	226,862,697	100	Dinas Sosial
5.1.8.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	%	95,98	96,73	924,353,015	97,48	963,268,277	98,23	1,031,756,651	98,98	1,105,320,901	99,72	1,184,240,813	99,72	Dinas Sosial
5.1.8.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	608,943,500	100	634,580,021	100	679,698,661	100	728,161,175	100	780,151,883	100	Dinas Sosial
6.	MENINGKATAN TATANAN HIDUP MASYARAKAT BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA, SYARA BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK)					4,220,234,225		6,908,171,087		4,969,929,550		5,302,940,526		5,658,375,480		
6.1.	MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT	Persentase cakupan ketahanan sosial budaya di nagari	%	50	60		70		80		90		100			
6.1.1.	Meningkatnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat nagari	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.672	0.678	3,640,287,525	0.683	3,793,543,631	0.690	4,063,264,582	0.700	4,352,975,346	0.712	4,663,777,786		
6.1.1.2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/ Dilestarikan	%	4	5	229,946,700	5	239,627,456	5	256,664,968	5	274,965,180	5	294,597,694	5	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
6.1.1.2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Sejarah Lokal	0	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6.1.1.2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang didirikan dan dikelola	%	0	1	250,000,000	1	2,750,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
6.1.1.2.22.07	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	8,3	10	353,320,000	11,11	368,194,772	12,5	394,373,420	14,28	422,492,245	16,67	452,658,191	16,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
6.1.1.2.22.08	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	47	52	52,564,100	57	54,777,049	62	58,671,697	67	62,854,989	72	67,342,835	72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
6.1.1.2.22.09	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	Indeks	0	3.5	1,643,443,625	3.6	1,712,632,602	3.7	1,834,400,780	3.8	1,965,193,555	3.9	2,105,508,375	3.9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
6.1.1.2.22.10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari	%	100	100	1,590,959,800	100	1,657,939,208	100	1,775,818,685	100	1,902,434,557	100	2,038,268,385	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari



Tabel 6.6
Proyeksi Anggaran Per Misi

No	Misi	Anggaran Pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat	164,356,382,765	165,519,880,040	172,488,266,990	184,752,182,772	197,925,013,404	212,056,859,362
2.	Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan	88,941,462,876	116,899,355,164	123,669,462,013	129,624,195,813	137,298,070,912	145,689,703,178
3.	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata	102,117,201,197	37,783,908,114	39,427,939,046	42,332,132,907	45,437,633,989	48,952,759,055
4.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	764,393,651,098	717,585,150,311	743,325,191,578	802,207,059,713	859,998,433,986	922,532,314,675
5.	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	157,973,442,018	228,431,029,812	238,047,976,166	254,973,187,272	273,152,775,525	292,655,883,698
6.	Meningkatan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	3,679,366,400	4,220,234,225	6,908,171,087	4,969,929,550	5,302,940,526	5,658,375,480
Total		1,281,461,506,354	1,270,439,557,666	1,323,867,006,880	1,418,858,688,027	1,519,114,868,342	1,627,545,895,448



The background of the slide is a scenic landscape. It features a calm lake in the foreground, with a small, dark, rectangular object floating on its surface. In the middle ground, there are lush green hills and a small village with several buildings, including one with a prominent corrugated metal roof. In the background, a large, forested mountain rises against a clear sky. A diagonal green overlay covers the top-left portion of the image, and a large green circle with a white dashed border is centered over the lake and hills.

Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah

BAB VII

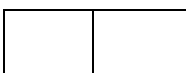
BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan merupakan penjabaran dari program pembangunan dari setiap urusan pemerintah daerah yang dituangkan dengan indikator dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan merupakan aspek operasional dalam penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Program strategis pembangunan merupakan program yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi, sedangkan program yang tidak mendukung secara langsung merupakan program penunjang atau pendukung.

Penyusunan program pembangunan dan kerangka pendanaan disusun berdasarkan tingkat prioritas. Prioritas pertama merupakan belanja wajib dan bersifat mengikat, selanjutnya merupakan program perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan perwujudan visi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah seperti hal nya amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana untuk Urusan Pendidikan dianggarkan minimal 20 persen dari belanja daerah dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana Urusan Kesehatan dianggarkan minimal 10 persen dari belanja daerah.

Program prioritas pembangunan ini dilengkapi dengan indikator capaian dan kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Sedangkan pendanaan per masing-masing program di perangkat daerah dihitung berdasarkan proyeksi terhadap kebutuhan dari masing-masing urusan yang ada dan juga melihat *trend* pendanaan sebelumnya dan juga memperhatikan program prioritas dari Kepala Daerah. Besaran pengeluaran per Perangkat Daerah dan juga per urusan untuk 5 tahun kedepan harus disesuaikan dengan proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 (lima) tahun. Kerangka Pembangunan Daerah Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 7.1



7.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Untuk mengetahui perkiraan pendapatan dan belanja dilakukan proyeksi untuk tahun 2021-2026. Proyeksi memberikan panduan kerangka pendanaan pembangunan lima tahun ke depan. Proyeksi kerangka pendanaan memperkirakan besaran penerimaan yang mungkin didapat dan besaran pengeluaran daerah yang mungkin terjadi seperti yang tercantum pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	75,264,756,698.00	82,016,536,505.00	86,818,890,956.98	91,913,977,703.55	97,320,379,452.36	103,057,904,003.39
4.1.01	Pajak Daerah	18,829,226,376.00	21,078,700,000.00	22,659,602,500.00	24,359,072,687.50	26,186,003,139.06	28,149,953,374.49
4.1.02	Retribusi Daerah	4,101,935,584.00	6,982,405,069.00	7,506,085,449.18	8,069,041,857.86	8,674,219,997.20	9,324,786,496.99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,123,169,476.00	7,020,000,000.00	7,371,000,000.00	7,739,550,000.00	8,126,527,500.00	8,532,853,875.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46,210,425,262.00	46,935,431,436.00	49,282,203,007.80	51,746,313,158.19	54,333,628,816.10	57,050,310,256.90
4.2	Pendapatan Transfer	1,113,578,100,906.00	1,103,126,790,832.00	1,183,580,015,923.60	1,270,003,205,323.53	1,362,845,908,639.99	1,462,591,982,182.41
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,053,103,431,000.00	1,053,103,431,000.00	1,131,055,488,100.00	1,214,852,451,108.75	1,304,937,616,714.47	1,401,788,275,660.62
4.2.01.01	Dana Perimbangan	931,816,802,000.00	931,816,802,000.00	1,001,703,062,150.00	1,076,830,791,811.25	1,157,593,101,197.09	1,244,412,583,786.88
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	40,029,310,000.00	40,029,310,000.00	44,032,241,000.00	48,435,465,100.00	53,279,011,610.00	58,606,912,771.00
4.2.01.05	Dana Desa	81,257,319,000.00	81,257,319,000.00	85,320,184,950.00	89,586,194,197.50	94,065,503,907.38	98,768,779,102.74
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60,474,669,906.00	50,023,359,832.00	52,524,527,823.60	55,150,754,214.78	57,908,291,925.52	60,803,706,521.79
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	60,474,669,906.00	50,023,359,832.00	52,524,527,823.60	55,150,754,214.78	57,908,291,925.52	60,803,706,521.79
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,922,000,000.00	50,922,000,000.00	53,468,100,000.00	56,141,505,000.00	58,948,580,250.00	61,896,009,262.50
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,922,000,000.00	50,922,000,000.00	53,468,100,000.00	56,141,505,000.00	58,948,580,250.00	61,896,009,262.50
	PENDAPATAN	1,239,764,857,604.00	1,236,065,327,337.00	1,323,867,006,880.58	1,418,058,688,027.08	1,519,114,868,342.35	1,627,545,895,448.30



No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5.1	Belanja Operasi	959,445,618,750.00	971,358,333,583.14	997,097,896,665.83	1,012,982,092,217.65	1,045,665,480,167.47	1,094,211,743,776.43
5.1.01	Belanja Pegawai	654,950,579,794.00	666,950,579,794.00	682,162,979,495.39	682,727,296,530.82	654,950,579,794.00	666,950,579,794.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236,957,389,797.00	254,813,572,632.70	252,897,965,336.98	253,338,373,746.00	295,188,668,582.63	306,867,204,738.22
5.1.03	Belanja Hibah	67,397,649,159.00	46,503,322,047.20	58,484,485,801.60	73,015,606,464.56	92,070,114,677.84	116,923,618,361.56
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	140,000,000.00	3,090,859,109.24	3,552,466,031.86	3,900,815,476.27	3,456,117,113.00	3,470,340,882.65
5.2	Belanja Modal	171,218,090,943.00	133,337,559,332.42	152,096,464,107.19	216,191,738,183.76	268,702,009,989.97	311,030,455,322.42
5.2.01	Belanja Tanah		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	57,274,282,647.00	42,692,679,590.32	45,428,473,514.02	49,239,043,622.03	23,840,149,425.00	23,840,149,425.00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	36,722,787,522.00	36,722,787,522.00	39,538,951,129.22	45,847,324,153.83	48,569,333,387.09	36,722,787,522.00
5.2.04	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	76,021,203,774.00	46,617,740,122.30	62,381,755,777.31	119,597,423,789.49	195,785,527,177.88	249,960,518,375.42
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,199,817,000.00	6,304,352,097.80	3,747,283,686.64	507,946,618.41	507,000,000.00	507,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	153,570,358,227.00	162,743,664,750.64	171,672,646,107.55	185,884,857,625.68	201,747,378,184.92	219,303,696,349.46
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,578,219,927.00	5,731,151,785.15	6,854,430,699.78	6,762,725,214.86	3,578,219,927.00	7,590,790,292.16
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149,992,138,300.00	157,012,512,965.49	164,818,215,407.77	179,122,132,410.82	198,169,158,257.92	211,712,906,057.30
	BELANJA	1,286,734,067,920.00	1,270,439,557,666.20	1,323,867,006,880.58	1,418,058,688,027.08	1,519,114,868,342.35	1,627,545,895,448.30
6.1	Penerimaan Pembiayaan	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	46,969,210,316.00	34,374,230,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Data Makro Tahun 2021



Tabel 7.2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Solok

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	97,88 %	98 %	130,000,000,000	98,25 %	135,473,000,000	98,50 %	145,105,130,300	98,75 %	155,451,126,090	99 %	166,550,336,493	99 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen Kurikulum Sekolah	70 %	75 %	200,000,000	80 %	208,420,000	85 %	223,238,662	90 %	239,155,579	95 %	256,231,287	95 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik / Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/ D4 dan Memiliki Sertifikat Pendidik	58,45 %	60,00 %	2,000,000,000	62,00 %	2,084,200,000	65,00 %	2,232,386,620	70,00 %	2,391,555,786	75,00 %	2,562,312,869	75,00 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang	2 Sekolah	5 Sekolah	200,000,000	7 Sekolah	208,420,000	9 Sekolah	223,238,662	11 Sekolah	239,155,579	12 Sekolah	256,231,287	12 Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		diselenggarakan Masyarakat													
1.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	45 %	60 %	200,000,000	80 %	208,420,000	90 %	223,238,662	100 %	239,155,579	100 %	256,231,287	100 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat	3,44 Indeks	3,49	84,081,358,950	3,54	87,621,184,162	3,59	93,851,050,356	3,64	100,542,630,246	3,69	107,721,374,046	3,69	Dinas Kesehatan
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumbar daya manusia sesuai standar	77 %	79,6 %	716,642,800	82,2 %	746,813,462	84,8 %	799,911,899	87,4 %	856,945,617	90 %	918,131,535	90 %	Dinas Kesehatan
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin	60 %	70 %	438,914,000	80 %	457,392,279	90 %	489,912,870	100 %	524,843,658	100 %	562,317,495	100 %	Dinas Kesehatan
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Nagari Siaga	40,54 %	41,08 %	667,205,727	41,62 %	695,295,088	42,16 %	744,730,569	42,70 %	797,829,858	43,25 %	854,794,910	43,25 %	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	40.2 %	44.2 %	25,875,139,700	48.2 %	27,234,127,081	52.2 %	29,185,508,572	56.2 %	30,411,105,268	60.2 %	31,885,008,187	60.2 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi	78,27 %	79,27 %	7,689,887,000	80,27 %	8,013,631,243	82,27 %	8,583,400,424	84,27 %	9,195,396,874	86,27 %	9,851,948,211	86,27 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	45 %	50 %	1,125,383,000	55 %	1,172,761,624	60 %	1,256,144,976	65 %	1,345,708,113	70 %	1,441,791,672	70 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	70,27 %	71,27 %	3,919,963,000	72,27 %	4,084,993,442	73,37 %	4,375,436,476	75,27 %	4,687,405,097	77,27 %	5,022,085,821	77,27 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Gedung dan Lingkungan	50 %	52 %	13,141,660,600	53 %	13,694,924,511	54 %	14,668,633,644	55 %	15,714,507,223	56 %	16,836,523,039	56 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemerintah Berkondisi Baik													Penataan Ruang
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59,80 %	61,80 %	44,024,542,752	63,80 %	47,456,976,002	65,80 %	47,977,966,996	67,80 %	50,685,796,042	69,80 %	53,590,761,880	69,80 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	19,61 %	22,06 %	299,000,000	24,51 %	311,587,900	26,96 %	333,741,799	29,41 %	357,537,590	31,86 %	383,065,773	31,86 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	54 %	55 %	1,968,900,950	57 %	2,051,791,680	58 %	2,197,674,068	59 %	2,354,368,230	60 %	2,522,470,121	60 %	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni	100 %	100 %	664,158,350	100 %	692,119,416	100 %	741,329,107	100 %	794,185,872	100 %	850,890,743	100 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Yang Tertata	14 %	25 %	5,000,000,000	35 %	5,210,500,000	45 %	5,580,966,550	55 %	5,978,889,465	65 %	6,405,782,173	65 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Dan Pertanahan
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	27,22 %	30,08 %	4,038,902,460	33,03 %	4,208,940,254	36,07 %	4,508,195,906	39,2 %	4,829,630,274	42,43 %	5,174,465,875	42,43 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60 %	62 %	533,150,117	65 %	555,595,736	70 %	595,098,593	75 %	637,529,123	80 %	683,048,703	80 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman ketertiban umum masyarakat kab/kota	100 %	100 %	634,699,100	100 %	661,419,932	100 %	708,446,889	100 %	758,959,152	100 %	813,148,836	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	2,511,577,400	100 %	2,617,314,809	100 %	2,803,405,891	100 %	3,003,288,731	100 %	3,217,723,547	100 %	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	341,757,500	100 %	356,145,491	100 %	381,467,435	100 %	408,666,063	100 %	437,844,820	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100 %	177,076,500	100 %	184,531,421	100 %	197,651,605	100 %	211,744,164	100 %	226,862,697	100 %	Dinas Sosial
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	95,98 %	96,73 %	924,353,015	97,48 %	963,268,277	98,23 %	1,031,756,651	98,98 %	1,105,320,901	99,72 %	1,184,240,813	99,72 %	Dinas Sosial
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %	608,943,500	100 %	634,580,021	100 %	679,698,661	100 %	728,161,175	100 %	780,151,883	100 %	Dinas Sosial
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi	100 %	100 %	511,128,450	100 %	532,646,958	100 %	570,518,156	100 %	611,196,101	100 %	654,835,503	100 %	Dinas Sosial



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten													
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten	100 %	100 %	219,228,920	100 %	228,458,458	100 %	244,701,854	100 %	262,149,096	100 %	280,866,542	100 %	Dinas Sosial
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTK	100 %	100 %	68,434,300	100 %	69,210,384	100 %	70,576,242	100 %	72,043,328	100 %	73,617,222	100 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih	0,02 %	0,07 %	667,142,110	0,09 %	674,178,793	0,1 %	686,562,905	0,12 %	699,864,840	0,22 %	714,135,190	0,22 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	0.05 %	0,11 %	413,973,700	0,14 %	418,771,993	0,17 %	427,216,681	0,21 %	436,287,231	0,27 %	446,018,139	0,27 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Pintu Dan Tenaga Kerja
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	41 %	50 %	178,850,000	55 %	182,169,585	60 %	188,011,842	75 %	194,287,087	85 %	201,019,185	85 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD	0.0124 %	0.0128 %	56,058,300	0.0133 %	58,418,354	0.0137 %	62,571,899	0.0140 %	67,033,276	0.0143 %	71,819,452	0.0143 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0.0002 Rasio	0.0002 Rasio	235,135,750	0.00018 Rasio	245,034,965	0.00017 Rasio	262,456,951	0.00016 Rasio	281,170,132	0.00015 Rasio	301,245,679	0.00015 Rasio	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Dan Perlindungan Anak
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	100 %	100 %	58,907,500	100 %	61,387,506	100 %	65,752,157	100 %	70,440,286	100 %	75,469,723	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	100 %	100 %	17,741,000	100 %	18,487,896	100 %	19,802,386	100 %	21,214,296	100 %	22,728,996	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	650 angka	650 angka	66,235,350	700 angka	69,023,858	700 angka	73,931,455	750 angka	79,202,767	800 angka	84,857,845	800 angka	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota	100 %	100 %	228,556,000	100 %	238,178,208	100 %	255,112,678	100 %	273,302,212	100 %	292,815,990	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Perkapita	608,65 Kg/Kapital/Thn	620,8 Kg/Kapital/Thn	719,974,300	633 Kg/Kapital/Thn	750,285,218	645,2 Kg/Kapital/Thn	803,630,497	657,4 Kg/Kapital/Thn	860,929,351	657,4 Kg/Kapital/Thn	922,399,707	657,4 Kg/Kapital/Thn	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi	85 Skor	85,5 Skor	179,206,250	86 Skor	186,750,833	86,5 Skor	200,028,817	87 Skor	214,290,872	87,5 Skor	229,591,240	87,5 Skor	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	15,38 %	15,38 %	243,821,000	15,38 %	245,665,864	15,38 %	248,912,707	15,38 %	252,400,183	15,38 %	256,141,556	15,38 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi	80 %	80 %	148,999,000	80 %	151,061,858	80 %	154,692,356	80 %	158,591,921	80 %	162,775,384	80 %	Dinas Perikanan Dan Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah yang diselesaikan	100 %	100 %	69,100,500	100 %	72,009,631	100 %	77,129,515	100 %	82,628,850	100 %	88,528,550	100 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang diselesaikan	71,9 %	75 %	52,850,000	78 %	55,074,985	80 %	58,990,816	90 %	63,196,861	100 %	67,709,117	100 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Percil Tanah yang ditata	33,46 %	53,09 %	668,678,100	72,72 %	696,829,448	92,35 %	746,374,021	100 %	799,590,489	--	856,681,250	--	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	30 %	40 %	10,470,000	50 %	10,910,787	70 %	11,686,543	80 %	12,519,794	100 %	13,413,707	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Persentase Pemantauan terhadap	14.30 %	28.60 %	243,505,750	42.90 %	253,757,342	60 %	271,799,489	78,60 %	291,178,792	100 %	311,968,958	100 %	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	pencemaran dan kerusakan lingkungan													
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	1,03 rasio	1,04 rasio	582,432,600	1,05 rasio	606,953,012	1,06 rasio	650,107,371	1,07 rasio	696,460,027	1,08 rasio	746,187,273	1,08 rasio	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan penghasil Limbah B3 yang diawasi	7.70 %	26.20 %	25,000,000	44.60 %	26,052,500	63.10 %	27,904,832	81.60 %	29,894,447	100 %	32,028,910	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggungjaw ab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	15 %	20 %	62,000,000	25 %	64,610,200	30 %	69,203,985	40 %	74,138,229	50 %	79,431,698	50 %	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	5.40 %	24.32 %	28,057,900	43.24 %	29,239,137	62.16 %	31,318,040	81.08 %	33,551,016	100 %	35,946,559	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan dan penilaian calon sekolah Adiwiyata	11.11 %	24.44 %	27,140,000	40.00 %	28,282,594	57.77 %	30,293,486	77.78 %	32,453,412	100 %	34,770,585	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	100 %	100 %	15,075,000	100 %	15,709,657	100 %	16,826,614	100 %	18,026,351	100 %	19,313,433	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terangkut ke TPA	12,80 %	13,97 %	1,846,159,500	15,25 %	1,923,882,815	16,65 %	2,060,670,883	18,18 %	2,207,596,717	19,32 %	2,365,219,123	19,32 %	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL														
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99.05 %	99.15 %	449,508,750	99.20 %	468,433,068	99,34 %	501,738,660	99,39 %	537,512,626	99,40 %	575,891,027	99,40 %	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran	1.00 Rasio	1.00 Rasio	215,940,500	1.00 Rasio	225,031,595	1.00 Rasio	241,031,341	1.00 Rasio	258,216,876	1.00 Rasio	276,653,561	1.00 Rasio	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	8.69 %	9.69 %	135,988,000	10.69 %	141,713,095	11.69 %	151,788,896	12.69 %	162,611,444	13.69 %	174,221,901	13.69 %	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan penerbitan akta kelahiran	95.00 %	96.86 %	121,775,500	97.71 %	126,902,249	98.07 %	135,924,998	98.92 %	145,616,451	99.53 %	156,013,465	99.53 %	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	8,3 %	10 %	353,320,000	11,11 %	368,194,772	12,5 %	394,373,420	14,28 %	422,492,245	16,67 %	452,658,191	16,67 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	47 %	52 %	52,564,100	57 %	54,777,049	62 %	58,671,697	67 %	62,854,989	72 %	67,342,835	72 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Pemerintah Desa	0 Indeks	3.5 Indeks	1,643,443,625	3.6 Indeks	1,712,632,602	3.7 Indeks	1,834,400,780	3.8 Indeks	1,965,193,555	3.9 Indeks	2,105,508,375	3.9 Indeks	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Nagari
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari	100 %	100 %	1,590,959,800	100 %	1,657,939,208	100 %	1,775,818,685	100 %	1,902,434,557	100 %	2,038,268,385	100 %	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Nagari
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05 %	0.93 %	234,938,500	0.81 %	244,829,411	0.69 %	262,236,782	0.57 %	280,934,265	0.45 %	300,992,971	0.45 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	74.33 %	74.55 %	3,421,440,460	74.9 %	3,565,483,103	75.25 %	3,818,988,952	75.35 %	4,091,282,864	75.45 %	4,383,400,461	75.45 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan Dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
															Perlindungan Anak
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	0 %	21,42 %	888,297,560	35,71 %	925,694,887	50 %	991,511,794	64,28 %	1,062,206,585	100 %	1,138,048,135	100 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	5 %	5 %	1,907,365,435	5 %	1,987,665,520	5 %	2,128,988,538	5 %	2,280,785,421	5 %	2,443,633,500	5 %	Dinas Perhubungan
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan transportasi air	5 %	10 %	58,126,600	15 %	60,573,729	20 %	64,880,522	25 %	69,506,503	30 %	74,469,267	30 %	Dinas Perhubungan
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	77,76 %	78 %	1,649,810,538	79 %	1,719,267,562	80 %	1,841,507,485	81 %	1,972,806,969	82 %	2,113,665,387	82 %	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	71,60 %	75 %	930,821,040	78 %	970,008,605	80 %	1,038,976,218	85 %	1,113,055,222	90 %	1,192,527,365	90 %	Dinas Komunikasi Dan Informatika



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		secara Online dan Terintegrasi													
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	5 %	5 %	122,500,000	5 %	123,447,250	5 %	125,114,349	5 %	126,905,003	5 %	128,826,020	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	5 %	5 %	271,379,000	5 %	274,384,056	5 %	279,672,762	5 %	285,353,430	5 %	291,447,665	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	5 %	5 %	274,999,790	5 %	278,157,281	5 %	283,714,264	5 %	289,683,091	5 %	296,086,464	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Koperasi yang Diberikan	5 %	5 %	124,749,670	5 %	125,791,631	5 %	127,625,416	5 %	129,595,108	5 %	131,708,199	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PERLINDUNGAN KOPERASI	Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten													Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	35,92 %	49,80 %	597,999,990	63,41 %	602,125,790	76,75 %	609,386,933	89,84 %	617,186,222	99,25 %	625,553,318	99,25 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas	5 %	5 %	6,186,490,310	5 %	6,531,141,552	5 %	7,137,705,716	5 %	7,789,224,134	5 %	8,448,174,737	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2.18.	USAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Investasi dan Regulasi	20 %	40 %	146,353,000	50 %	152,514,461	100 %	163,358,239	100 %	175,005,682	100 %	187,501,088	100 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investasi	5 %	5 %	274,451,500	5 %	281,795,908	5 %	294,721,597	5 %	308,605,247	5 %	323,499,662	5 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin usaha yang diterbitkan tepat waktu	85 %	86 %	2,205,241,707	87 %	2,298,082,383	88 %	2,461,476,040	89 %	2,636,979,282	90 %	2,825,259,603	90 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib administrasi	20 %	30 %	288,502,000	35 %	300,647,934	40 %	322,024,002	45 %	344,984,314	50 %	369,616,194	50 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi	20 %	20 %	71,494,000	80 %	72,398,897	100 %	73,991,459	80 %	75,702,050	100 %	77,537,176	100 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan	10 %	15 %	969,962,000	20 %	1,010,797,400	25 %	1,082,665,095	30 %	1,159,859,117	35 %	1,242,673,058	35 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	SAING KEPEMUDAAN	Ekonomi Mandiri													
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemerolehan Medali dalam event Olahraga Nasional maupun Internasional	0 Medali	4 Medali	1,147,562,500	5 Medali	1,195,874,881	6 Medali	1,280,901,585	7 Medali	1,372,229,868	8 Medali	1,470,207,081	8 Medali	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	25 %	35 %	204,040,000	40 %	212,630,084	45 %	227,748,083	50 %	243,986,521	60 %	261,407,159	60 %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	171,290,063	100 %	178,501,374	100 %	191,192,822	100 %	204,824,870	100 %	219,449,366	100 %	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	26,9 %	30 %	88,179,250	33 %	91,891,596	35 %	98,425,088	40 %	105,442,797	45 %	112,971,413	45 %	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan, Jumlah lembaga adat yang difasilitasi	30 kelompok	40 kelompok	245,765,200	70 kelompok	256,111,915	80 kelompok	274,321,472	85 kelompok	293,880,593	90 kelompok	314,863,667	90 kelompok	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan /Dilestarikan	4 %	5 %	229,946,700	5 %	239,627,456	5 %	256,664,968	5 %	274,965,180	5 %	294,597,694	5 %	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	0 Sejarah Lokal	1 Sejarah Lokal	100,000,000	1 Sejarah Lokal	125,000,000	1 Sejarah Lokal	150,000,000	1 Sejarah Lokal	175,000,000	1 Sejarah Lokal	200,000,000	1 Sejarah Lokal	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	33 bh	20 bh	187,629,650	20 bh	195,528,858	15 bh	209,430,960	15 bh	224,363,388	15 bh	240,382,933	15 bh	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang didirikan dan dikelola	0 %	1 %	250,000,000	1 %	2,750,000,000	1 %	500,000,000	1 %	500,000,000	1 %	500,000,000	1 %	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	39,70 Nilai	39,75 Nilai	618,504,900	39,80 Nilai	644,543,956	42,16 Nilai	690,371,032	43,17 Nilai	739,594,486	44,12 Nilai	792,401,532	44,12 Nilai	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI	Indeks Pembangunan	4,410 Indeks	4,411 Indeks	69,155,500	4,413 Indeks	72,066,947	4,417 Indeks	77,190,906	4,420 Indeks	82,694,618	4,440 Indeks	88,599,014	4,440 Indeks	Dinas Perpustakaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Literasi Masyarakat													Dan Kearsipan
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	53,98 %	59,49 %	378,246,250	64,49 %	394,170,417	69,49 %	422,195,934	80 %	452,298,504	80 %	484,592,617	80 %	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	65 %	72 %	42,590,500	79 %	44,383,560	85 %	47,539,231	85 %	50,928,778	85 %	54,565,093	85 %	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.04.	PROGRAM PERIZINAN	Persentase perangkat daerah yang	11 %	15 %	50,000,000	25 %	52,105,000	30 %	55,809,666	45 %	59,788,895	65 %	64,057,822	65 %	Dinas Perpustakaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PENGUNAAN ARSIP	mengelola arsip secara baku													Dan Kearsipan
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5,6 %	5,6 %	1,163,370,000	5,6 %	1,212,347,877	5,6 %	1,298,545,811	5,6 %	1,391,132,127	5,6 %	1,490,458,961	5,6 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	7,50 %	7,83 %	600,000,000	8,25 %	625,260,000	8,61 %	669,715,986	8,95 %	717,466,736	9,30 %	768,693,861	9,30 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Nagari yang terfasilitasi penyusunan regulasi penggunaan alat tangkap	0 %	16,67 %	240,000,000	16,67 %	250,000,000	16,67 %	300,000,000	16,67 %	350,000,000	16,67 %	400,000,000	16,67 %	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	37 Kg/Kapita	38,10 Kg/Kapita	100,000,000	39,15 Kg/Kapita	104,210,000	40,10 Kg/Kapita	111,619,331	41 Kg/Kapita	119,577,789	41 Kg/Kapita	128,115,643	41 Kg/Kapita	Dinas Perikanan Dan Pangan
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan	15 %	15 %	6,142,172,279	25 %	6,432,332,732	15 %	6,942,996,589	10 %	7,491,507,246	5 %	8,079,950,863	5 %	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata Terintegrasi	3 Paket	3 Paket	600,000,000	4 Paket	625,260,000	5 Paket	669,715,986	6 Paket	717,466,736	6 Paket	768,693,861	6 Paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	0 HKI	15 HKI	100,000,000	20 HKI	150,000,000	25 HKI	200,000,000	30 HKI	250,000,000	35 HKI	300,000,000	35 HKI	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	0 %	10 %	297,992,000	15 %	310,537,463	20 %	332,616,677	25 %	356,332,246	30 %	381,774,368	30 %	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian	1 %	1,1 %	4,782,252,200	1,1 %	4,983,585,018	1,1 %	5,337,917,912	1,1 %	5,718,511,460	1,1 %	6,126,813,178	1,1 %	Dinas Pertanian
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian	2 %	2 %	5,798,512,940	2 %	5,963,680,335	2 %	6,330,358,007	2 %	6,781,622,532	2 %	7,319,380,381	2 %	Dinas Pertanian
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN	Persentase Pengendalian dan	0,1 %	1,08 %	573,760,500	1,28 %	676,865,817	1,44 %	782,330,977	1,65 %	838,201,175	1,81 %	844,498,739	1,81 %	Dinas Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penanggulanga n Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1,2 %	1,67 %	286,556,500	1,67 %	289,620,529	1,67 %	319,852,448	1,67 %	342,657,928	1,67 %	367,123,704	1,67 %	Dinas Pertanian
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani yang Produktif	19 %	19 %	640,000,000	19 %	666,944,000	19 %	714,363,718	19 %	765,297,852	19 %	819,940,118	19 %	Dinas Pertanian
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 %	9 %	439,979,220	9 %	458,502,345	9 %	491,101,862	9 %	526,117,425	27 %	563,682,209	27 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas	23,21 %	23,71 %	267,969,220	24,71 %	270,830,724	24,71 %	275,866,789	25,21 %	281,276,091	25,71 %	287,079,204	25,71 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Event yang diikuti	100 %	100 %	199,988,660	100 %	208,408,183	100 %	223,226,004	100 %	239,142,018	100 %	256,216,759	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Terasah yang Berlaku	15 %	17 %	201,430,568	20 %	209,910,795	23 %	224,835,452	26 %	240,866,220	100 %	258,064,068	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5 %	5 %	180,437,900	5 %	188,034,336	5 %	201,403,577	5 %	215,763,652	5 %	231,169,177	5 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang difasilitasi	2 %	2 %	1,423,035,940	4 %	1,482,945,753	6 %	1,588,383,196	8 %	1,701,634,918	10 %	1,823,131,651	10 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Izin Usaha Industri	100 %	100 %	72,493,710	100 %	73,440,695	100 %	75,107,329	100 %	76,897,481	100 %	78,817,961	100 %	Dinas Koperasi,



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA A	yang Dikendalikan													Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang Tersedia	15 %	25 %	56,000,000	45 %	75,000,000	75 %	100,000,000	100 %	130,000,000	100 %	393,000,000	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	7,877,580,346	100 %	8,209,226,479	100 %	8,792,902,481	100 %	9,419,836,428	100 %	10,092,412,749	100 %	Sekretariat Daerah
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	2,940,742,856	100 %	3,064,548,130	100 %	3,282,437,502	100 %	3,516,475,296	100 %	3,767,551,632	100 %	Sekretariat Daerah
4.02.	SEKRETARIAT DPRD														
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi	100 %	100 %	12,441,445,150	100 %	12,965,229,991	100 %	13,887,057,843	100 %	14,877,205,067	100 %	15,939,437,509	100 %	Sekretariat DPRD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	TUGAS DAN FUNGSI DPRD	DPRD yang terlaksana													
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.01.	BIDANG URUSAN PERENCANAAN														
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	100 %	100 %	879,533,350	100 %	916,561,704	100 %	981,729,241	100 %	1,051,726,536	100 %	1,126,819,811	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	3,019,295,770	100 %	3,146,408,122	100 %	3,370,117,739	100 %	3,610,407,134	100 %	3,868,190,204	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
5.02.	URUSAN KEUANGAN														
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	162,739,740,894	100 %	169,591,083,986	100 %	181,649,010,057	100 %	194,600,584,474	100 %	208,495,066,206	100 %	Badan Keuangan Daerah
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100 %	100 %	1,604,522,150	100 %	1,672,072,533	100 %	1,790,956,890	100 %	1,918,652,116	100 %	2,055,643,877	100 %	Badan Keuangan Daerah
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	6.62 %	6.64 %	1,900,605,796	6.56 %	1,980,621,300	6.48 %	2,121,443,474	6.41 %	2,272,702,394	6.33 %	2,434,973,345	6.33 %	Badan Keuangan Daerah
5.03.	KEPEGAWAIAN														



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan aparatur sesuai Kompetensi (%)	60 %	65 %	3,242,369,950	68 %	3,378,873,725	70 %	3,619,111,647	72 %	3,877,154,307	75 %	4,153,983,125	75 %	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasip Pegawai Pendidikan tTinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	30 %	40 %	9,353,739,138	50 %	9,747,531,556	60 %	10,440,581,049	70 %	11,184,994,478	85 %	11,983,603,084	85 %	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %	100 %	238,766,850	100 %	248,818,934	100 %	266,509,961	100 %	285,512,121	100 %	305,897,686	100 %	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH														
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan APIP yang terlaksana sesuai PKPT	100 Persen	100 Persen	2,082,593,198	100 Persen	2,170,270,372	100 Persen	2,324,576,595	100 Persen	2,490,318,906	100 Persen	2,668,127,676	100 Persen	Inspektorat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pembinaan APIP terhadap Audity	100 Persen	100 Persen	224,832,000	100 Persen	234,297,427	100 Persen	250,955,974	100 Persen	268,849,135	100 Persen	288,044,963	100 Persen	Inspektorat Daerah
7.	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01.	KECAMATAN														
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	3,4 indeks	3,45 indeks	336,185,900	3,51 indeks	350,339,325	3,55 indeks	375,248,450	3,6 indeks	402,003,664	3,65 indek	430,706,726	3,65 indek	Semua Kecamatan
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	100 %	100 %	1,749,864,735	100 %	1,823,534,038	100 %	1,953,187,308	100 %	2,092,449,562	100 %	2,241,850,462	100 %	Semua Kecamatan
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100 %	100 %	142,033,700	100 %	148,013,317	100 %	158,537,063	100 %	169,840,754	100 %	181,967,384	100 %	Semua Kecamatan
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	80,860,000	100 %	84,264,206	100 %	90,255,389	100 %	96,690,595	100 %	103,594,308	100 %	Semua Kecamatan
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Nagari tertib administrasi dan keuangan	100 %	100 %	121,290,500	100 %	126,396,829	100 %	135,383,643	100 %	145,036,492	100 %	155,392,102	100 %	Semua Kecamatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PEMERINTAHAN DESA														
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0 %	100 %	9,946,500	100 %	10,365,248	100 %	11,102,217	100 %	11,893,805	100 %	12,743,022	100 %	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %	1,404,513,959	100 %	1,463,643,997	100 %	1,567,709,085	100 %	1,679,486,743	100 %	1,799,402,096	100 %	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/ LSM Aktif	47,5 %	48,67 %	180,112,500	49,84 %	187,695,236	51,01 %	201,040,368	52,18 %	215,374,546	53,35 %	230,752,288	53,35 %	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Koordinasi Pembinaan dan	100 %	100 %	54,100,000	100 %	56,377,610	100 %	60,386,058	100 %	64,691,584	100 %	69,310,563	100 %	Kantor Kesatuan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya													Bangsa Dan Politik
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial	100 %	100 %	476,624,300	100 %	496,690,183	100 %	532,004,855	100 %	569,936,801	100 %	610,630,289	100 %	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
X.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
X.XX.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
X.XX.0 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	664,573,894,898	100 %	688,082,162,318	100 %	743,036,251,079	100 %	796,608,746,709	100 %	854,616,603,715	100 %	Semua SKPD
Total					1,270,439,557,666		1,323,867,006,880		1,418,858,688,027		1,519,114,868,342		1,627,545,895,448		



Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VIII

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini disajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah digunakan indikator makro pembangunan sebagaimana tersajikan dalam Tabel 8.1

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke					
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat							
1.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	C	C	B	B	B	A
2.	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan							
2.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,59	62,45	63,71	64,82	65,98	67,14
2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*)	Indeks	70,30	70,50	70,70	70,90	71,40	71,60
3.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata							
3.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,69	3,18	4,47	4,81	4,91	5,05
3.2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	25.930.000	26.530.000	27.480.000	28.570.000	29.720.000	30.970.000
3.3	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	37.100.000	39.010.000	41.010.000	43.660.000	45.790.000	48.530.000
3.4	Pengeluaran Perkapita	(Rp.000)	10.296	10.344	10.527	10.748	10.985	11.242
3.5	PDRB Sektor pertanian	Juta Rupiah	3.654.349	3.724.358	3.794.366	3.864.375	3.934.383	4.004.391
3.6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	Persentase	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2
3.7	PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	1.152.559	1.196.292	1.240.025	1.283.758	1.327.491	1.371.224
3.8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	0,77	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00



No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke					
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05
4.	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih							
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (59,80)	B (60,20)	B (65,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	A (80,00)
4.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B (67,00)	B (69,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,00)
4.3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4.4	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.5	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	59	62	65	68	71	74
4.6	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4
4.7	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4
4.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,40	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65
4.9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60	62	64	66	68	70
5.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas							
5.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	69,99	70,54	71,00	71,00	72,00
5.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,7	13,9	14,4	14,7	15
5.3	Angka Kelahiran Total (TFR)	Rasio	2,71	2,63	2,55	2,47	2,39	2,30
5.4	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,79	69,01	69,22	69,44	69,66	69,87
5.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10
5.6	Indeks Pengarusutamaan Gender	Indeks	96,29	96,38	96,48	96,57	96,67	96,76
5.7	Persentase Penduduk Miskin	%	7.56	7.31	7.06	6.81	6.56	6.31



No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke					
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Meningkatan Tataan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)							
6.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	NA	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Keterangan *) : Pada tahun 2021 terjadi perubahan indikator perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Solok tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

Sedangkan untuk indikator makro daerah dan indikator per urusan secara umum yang merupakan indikator tujuan, sasaran dan program tersajikan dalam Tabel 8.2.



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Solok

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Indikator Kinerja Makro								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,50	3,00	4,81	5,15	5,25	5,39	5,39
1.2	Gini Ratio	Rasio	0,279	0,277	0,273	0,268	0,262	0,255	0,255
1.3	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	25.930.000	26.530.000	27.480.000	28.570.000	29.720.000	30.970.000	Rupiah
1.4	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	37.100.000	39.010.000	41.010.000	43.660.000	45.790.000	48.530.000	Rupiah
1.5	Tingkat Penduduk Miskin	Persen	7.56	7.31	7.06	6.81	6.56	6.31	6.31
1.5	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah	28.789	27.828	26.872	25.916	24.960	24.004	24.004
1.6	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05	4,05
1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,53	69,99	70,54	71,11	71,69	72,16	72,16
1.8	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,79	69,01	69,22	69,44	69,66	69,87	69,87
B	Aspek pelayanan Umum								
1.	Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1.1	Urusan Pendidikan								
1.1.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10	8,10
1.1.2	Harapan lama sekolah	Tahun	13,50	13,70	13,90	14,40	14,70	15,00	15,00
1.1.3	Jumlah penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat	Jumlah	2	5	7	9	1	12	12

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,50	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	88,00
1.1.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,57	99,64	99,67	99,69	99,70	99,72	99,72
1.1.6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97,19	97,50	98,00	98,50	98,75	99,00	99,00
1.1.7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,5
1.1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100	100
1.1.9	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B	%	95,81	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00
1.1.10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	%	53,50	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
1.1.11	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	33,50	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
1.1.12	Indeks Survei karakter	Nilai	0	baik	baik	baik	baik	baik	baik
1.1.13	Indeks Survei Lingkungan Belajar	Nilai	0	baik	baik	baik	baik	baik	baik
1.1.14	Persentase Sekolah yang menintegrasikan muatan loka dalam dokumen kurikulum sekolah	%	70	75	80	85	90	95	95
1.1.15	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi	%	45	60	80	90	100	100	100
1.1.16	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	4.410	4.412	4.415	4.420	4.425	4.430	4.430
1.1.17	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	39,70	39,75	39,80	42,16	43,17	44,12	44,12



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2									
1.2.1	Angka kematian ibu	Per 100,000 Kelahiran Hidup	154.6	154.38	154.16	153.95	153.73	153.52	153.52
1.2.2	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	9	8.78	8.56	8.35	8.13	7.92	7.92
1.2.3	Pravelensi gizi kurang pada anak balita	%	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4	4
1.2.4	Prevelensi Stunting pada anak balita	%	17.9	17,4	15	14	13.5	13	13
1.2.5	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child (UCI)	%	80	80	80	80	80	80	80
1.2.6	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.7	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.10	Persentase fasilitas layanan kesehatan yang memiliki Sumber daya manuai yang sesuai standar	%	77	79,6	82,2	84,8	87,4	90	90
1.2.11	Persentase usaha farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin	%	60	70	80	90	100	100	100
1.2.12	Cakupan Nagari Siaga	%	40,54	41,08	41,62	42,16	42,70	43,25	43,25
1.2.13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Per 1.000 Penduduk	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.14	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.15	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.18	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.19	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	53,37	100	100	100	100	100	100
1.2.20	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.22	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.23	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.24	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2.25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.3.1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	59,8	61,8	63,8	65,8	67,8	69,8	69,8
1.3.2	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	54	55	57	58	59	60	60
1.3.3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	70,27	71,27	72,27	73,27	75,27	77,27	77,27
1.3.4	Persentase rumah tangga berakses air minum	%	78,27	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27	86,27



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	1,03	1,53	2,53	3,03	3,53	4,03	4,03
1.3.6	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	21,51	37,21	52,9	68,6	84,3	100	100
1.3.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik **)	%	40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2	60,2
1.3.8	Persentase gedung dan lingkungan pemerintah berkondisi baik	%	50	52	53	54	55	56	56
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman								
1.4.1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	60	62	65	70	75	80	80
1.4.2	Persentase warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4.3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4.4	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	14	25	35	45	55	65	65
1.4.5	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	%	27,22	30,08	33,03	36,07	39,20	42,43	42,43
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.5.1	Persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kerugian materil dan/atau pengobatan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5.2	Persentase masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.3	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5.4	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5.5	Persentase Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Daerah dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh perangkat daerah pelaksana urusan/fungsi pemadam kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di Daerah dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan perangkat daerah pelaksana urusan/fungsi pemadam kebakaran terhadap jumlah kejadian kebakaran di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5.6	Persentase Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5.7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	60	70	80	90	93	100	100
1.5.8	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	10	20	40	60	80	100	100
1.6	Urusan Sosial								
1.6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.6	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
1.6.7	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan non Pelayanan Dasar								
2.1	Urusan Tenaga Kerja								
2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	7	7	8	9	10	11	11
2.1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	25.930.000	26.530.000	27.480.000	28.570.000	29.720.000	30.970.000	30.970.000
2.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	41	50	55	60	75	85	85
2.1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	10	10	11	12	13	14	14
2.1.6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kali	0	2	2	2	2	2	2
2.1.7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.1.8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	100	200	250	313	391	488	488
2.1.9	Keselamatan dan perlindungan	%	18	20	22	24	26	28	28

No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	3,78	3,94	4,11	4,27	4,43	4,59	4,59
2.1.11	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	100	200	250	313	391	488	488
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak								
2.2.1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.2	Persentase ARG pada belanja APBD	%	0,0124	0,0128	0,0133	0,1137	0,0140	0,0143	0,0143
2.2.3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,6	96,7	96,8	96,9	97	97,1	97,1
2.2.4	Rasio KDRT	Rasio	0.00018	0.00015	0.00013	0.00011	0.00009	0.00008	0.00008
2.2.5	Cakupan kelompok kegiatanyang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.6	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.7	Capaian kabupaten Layak anak	Angka	650	650	700	700	750	800	800
2.2.8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0.0002	0.0002	0.00018	0.00017	0.00016	0.00015	0.00015
2.2.9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif"	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2.10	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	1	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05
2.3	Urusan Pangan								
2.3.1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai	85	85,5	86	86,5	87	87,5	87,5
2.3.2	Persentase Coefisien variasi harga pangan strategis ditingkat konsumen dan produsen	%	11,00	10,50	10,30	9,80	9,50	8,90	8,90
2.3.3	Penguatan cadangan pangan	Ton	25	25	25	25	25	25	25
2.3.4	Penanganan daerah rawan pangan	Paket	100	500	500	500	500	500	500
2.3.5	Ketersediaan pangan utama (beras) berdasarkan neraca bahan makanan	Ton	608.65	620.80	633.00	645.20	657.40	669.82	669.82



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.6	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	80	80	80	80	80	80
2.3.7	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	16,22	14,86	13,51	12,16	10,81	9,46	9,46
2.3.8	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	80	80	80	80	80	80	80
2.4	Urusan pertanahan								
2.4.1	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100	100	100	100	100
2.4.2	Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan	%	71,9	75	78	80	90	100	100
2.4.3	Jumlah persil tanah yang ditata	Persil	341	200	200	200	78	0	1019
2.5	Urusan Lingkungan Hidup								
2.5.1	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	12,80	13,97	15,25	16,65	18,18	19,32	19,32
2.5.2	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	15,00	20	40	60	80	100	100
2.5.3	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Nilai	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	50,5
2.5.4	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Nilai	80	81	82	83	84	85	85
2.5.5	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5
2.5.6	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.5.7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	15	20	25	30	40	50	50



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan sipil								
2.6.1	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,69	0,72	0,76	0,79	0,82	0,86	0,86
2.6.2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.6.3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,80	99,05	99,29	99,54	99,78	99,93	99,93
2.6.4	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
2.6.5	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
2.6.6	Perekaman KTP Elektronik	%	99,00	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	99,50
2.6.7	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,45	40,02	50,59	60,16	66,74	70,31	70,31
2.6.8	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,00	96,86	97,71	98,07	98,92	99,53	99,53
2.6.9	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	5,88	6,88	7,88	8,88	9,88	10,88	10,88
2.6.10	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	4,40	8,15	11,90	15,64	19,39	23,13	23,13
2.6.11	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	%	0,57	0,60	0,63	0,65	0,68	0,71	0,71
2.6.12	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	0,91	0,93	0,96	0,98	0,99	1	1
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2.7.1	Indeks Desa Mambangun (IDM)	Indeks	0,672	0,678	0,683	0,690	0,700	0,712	0,712
2.7.2	Persentase peningkatan desa mandiri	%	47	52	57	62	67	72	72
2.7.3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	8,3	10	11,11	12,5	14,28	16,67	16,67
2.7.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan pemerintah Desa	Indeks	NA	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.5	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari	%	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk	%	1.05	0.93	0.81	0.69	0.57	0.45	0.45
2.8.2	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah Anak	2.71	2.63	2.55	2.47	2.39	2.30	2.30
2.8.3	Rasio Aseptor KB	Rasio	74,33	74,55	74,9	75,25	75,35	75,45	75,45
2.8.4	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera di kecamatan	%	NA	21,45	35,71	50	64,28	100	100
2.9	Urusan Perhubungan								
2.9.1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	5	5	5	5	5	5	5
2.9.2	Persentase Layanan Angkutan Air	%	5	10	15	20	25	30	30
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
2.10.1	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	77,76	78	79	80	81	82	82
2.10.2	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	71,60	75	78	80	85	90	90
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah								
2.11.1	Koperasi aktif	%	63,91	67,41	70,8	74,1	77,3	80,42	80,42
2.11.2	Persentase usaha mikro dan kecil	%	99,56	99,57	99,57	99,57	99,58	99,58	99,58
2.11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	66,67	69,05	71,43	73,81	76,19	78,57	78,57
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
2.12.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	5	5	5	5	5	5	5
2.12.2	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2.12.3	Jumlah investor berskala nasional	Perusahaan	7	10	13	16	19	22	22



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	229,73	241,22	253,28	264,94	279,24	293,2	293,2
2.12.5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	79	11,5	12,1	12,7	13,3	14	14
2.12.6	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	53,71	61,43	69,14	76,86	84,57	92,28	92,28
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
2.13.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	10,58	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,00
2.13.2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	15	20	25	30	35	35
2.13.3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	15	20	25	30	35	35
2.13.4	Pemerolehan Medali dalam event Olahraga Nasional maupun Internasional	Medali	0	4	5	6	7	8	8
2.13.5	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	%	25	35	40	45	50	60	60
2.14	Urusan Statistik								
2.14.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Urusan Persandian								
2.15.1	Tingkat keamanan informasi daerah	%	26,9	30	33	35	40	45	45
2.16	Urusan Kebudayaan								
2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	5	5	5	5	5	5
2.16.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jenis	10	12	15	19	19	19	19
2.16.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Lokasi	15	18	20	22	24	25	25
2.17	Urusan Perpustakaan								
2.17.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,40	0,50	0,60	0,70	0,95	1,20	1,20



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.775	9.775	9.875	9,925	9.975	10.300	10.300
2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	39,2	39,55	40,00	40,22	40,42	40,62	40,62
2.17.4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	39,70	39,75	39,80	42,16	43,17	44,12	44,12
2.17.5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	4,410	4,411	4,413	4,417	4,420	4,440	4,440
2.18	Urusan Kearsipan								
2.18.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	11	15	25	30	45	65	65
2.18.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	53,98	59,49	64,49	69,49	80,00	80,00	80,00
2.18.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	65	72	79	85	85	85	85
2.18.4	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Dokumen	15	20	30	40	55	65	65
2.18.5	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	20	21	23	25	30	35	35
3	Layanan Urusan Pilihan								
3.1	Urusan Kelautan Dan Perikanan								
3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Ton	4.748,06	5.105,88	5.509,86	5.963,31	6.473,13	7.030,51	7.030,51
3.1.2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita	37	38,1	39,15	40,1	41	42	42
3.1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persentase	25	46,87	46,87	46,87	46,87	46,87	46,87
3.1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	627	662	699	738	780	825	825
3.1.5	Produksi perikanan Budidaya	Ton	4.121,06	4.443,88	4.810,86	5.225,31	5.693,13	6.205,51	6.205,51



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Urusan Pariwisata								
3.2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,77	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1
3.2.2	Kunjungan wisata	Orang	806.219	850.561	897.342	946.696	1.022.432	1.053.105	1.053.105
3.2.3	Lama kunjungan wisata	Hari	0,85	1	1,25	1,5	1,75	2	2
3.2.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5	17,5	17,5
3.2.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	12,5	15	17,5	20	22,5	25	25
3.2.6	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Usaha	NA	10	15	20	25	30	30
3.3	Urusan Pertanian								
3.3.1	PDRB Sektor pertanian	Juta Rupiah	3.654.349	3.724.358	3.794.366	3.864.375	3.934.383	4.004.391	4.004.391
3.3.2	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	3,57	3,68	3,85	4,03	4,23	4,44	4,44
3.3.3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,6	3,09	4,38	4,72	4,82	4,96	4,96
3.3.4	Produksi sektor pertanian	Ton	373.041	380.502	388.112	395.874	403.792	411.868	411.868
3.3.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,41	5,90	7,19	7,53	7,63	7,77	7,77
3.3.6	Produksi sektor perkebunan	Ton	7.061,40	7.149,70	7.239,00	7.325,90	7.413,80	7.502,80	7.502,8
3.3.7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,75	5,87	5,99	6,1	6,23	6,35	6,35
3.3.8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	11,74	11,61	11,46	11,3	11,11	8,89	8,89
3.3.9	Cakupan bina kelompok petani	%	20	20	20	20	20	20	20
3.3.10	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	6,51	6,58	6,65	6,71	6,78	6,85	6,85
3.3.11	Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	1	2	2	2	2	2	2
3.3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	1	1	1	1	1	1	1



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Urusan Perdagangan								
3.4.1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	23,21	23,71	24,71	24,71	25,21	25,71	25,71
3.4.2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	14,84	17,31	19,78	22,26	24,73	27,3	27,3
3.4.3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100
3.4.4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
3.5	Urusan Perindustrian								
3.5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2	2	2	2	2	2	2
3.5.2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
3.5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Layanan urusan Penunjang								
4.1	Urusan Perencanaan Pembangunan								
4.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks	NA	70	76	82	88	94	94
4.1.2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
4.1.3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	48	57	65	69	72	75	75



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Urusan Keuangan								
4.2.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2.2	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah	Indeks	C	C	B	B	B	A	A
4.2.3	Persentase Belanja Pendidikan (minimal 20%)	%	22	22,2	22,4	22,6	22,8	23	23
4.2.4	Persentase Belanja Kesehatan (minimal 10%) diluar gaji	%	12,19	12,39	12,59	12,79	12,89	13,1	13,1
4.2.5	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rasio	32,86	33	33,5	34	34,5	35	35
4.2.6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	4	3	2	1	0	0
4.3	Urusan Kepegawaian								
4.3.1	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	%	60	65	68	70	72	75	75
4.3.2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	45,69	24,30	28,35	34,07	40,05	47,09	47,09
4.3.3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	16,8	17	18	18	18,5	19	19
4.3.4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	16	17	19	20	22	26	26
4.4	Urusan Pendidikan Dan Pelatihan								
4.4.1	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis	%	50	53	56	59	62	65	65
4.4.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	50	55	60	65	70	75	75
4.4.3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	31	33	36	39	42	45	45



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5	Urusan Penelitian Dan Pengembangan								
4.5.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1.512	1.532	1.552	1.572	1.592	1.612	1.612
4.5.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Urusan Pengawasan								
4.6.1	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4	4
4.6.2	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	74	78	82	84	86	90	90
4.7	Urusan Perizinan								
4.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,4	3,45	3,51	3,55	3,6	3,65	3,65
4.8	Urusan Penunjang Pemerintah Lainnya								
4.8.1	Indeks Reformasi birokrasi	Kategori	CC (59,80)	B (60,20)	B (65,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	A (80,00)	A (80,00)
4.8.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B (67,00)	B (69,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,00)	A (80,00)
4.8.3	Nilai LPPD	Nilai	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,20
4.8.4	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4.8.5	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.8.6	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran de dalam dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.9	Kesatuan Bangsa dan Politik								
4.9.1	Persentase Parpol dan ormas yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
4.9.2	Persentase penyelesaian konflik	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Urusan/Bidang/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun ke						
			Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9.3	Integrasi dan sinkronisasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota berbasis teknologi	Kegiatan	7	12	12	12	12	12	12
C	Aspek Daya Saing								
1	Fokus Kemampuan Keuangan Daerah								
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Milyar	7553,03	7662,53	7772,03	7881,03	7990,53	8100,03	8100,03
2.	Fokus Fasilitas Wilayah/ Insfrastruktur								
2.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	61,59	62,45	63,71	64,82	65,98	67,14	67,14

Keterangan **) : Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemutakhiran data irigasi berkondisi baik sehingga terjadi penurunan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020



Penutup

BAB
IX

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok tahun 2006-2025 merupakan dokumen acuan perencanaan untuk 20 tahun dan memiliki 5 tahapan dan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 merupakan tahapan akhir dari periode tersebut untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai di RPJPD yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah sekarang. Dokumen RPJMD ini merupakan landasan yuridis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok yang memuat, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, program pembangunan dan juga dilengkapi dengan pagu pendanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah tetapi juga menjadi acuan dan patokan oleh pihak swasta, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 memerlukan beberapa kaidah pelaksanaan dan dukungan semua pemangku kepentingan Kabupaten Solok demi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 menjadi dokumen acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan dokumen perencanaan ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dan perlu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh daerah;
3. Bupati berkewajiban menyebarluaskan dan menginformasikan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 kepada seluruh lapisan masyarakat;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026;
5. Penyusunan RKPD tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Solok tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
6. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 , yang nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.



9.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun kedepan. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan indikator 5 (lima) tahunan atau di akhir periode RPJMD dilaksanakan oleh Bupati.

Apabila terdapat hal-hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Solok dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok , maka konsepsi dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Solok untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI SOLOK,

EPYARDI ASDA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL																																	
KABUPATEN SOLOK																																	
No	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI						RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA									
		TARGET NASIONAL DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI						TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD PROVINSI						TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD KABUPATEN/KOTA									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	5	5,5	5,8	6	6,1	-1,6	3,44	3,4	4,57	4,6	4,7	4,84	-1,12	2,69	3,18	4,47	4,81	4,91	5,05	-1,12	1,50	3,00	4,81	5,15	5,25	5,39	
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	8,0-8,5			6,0-7,0	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55	6,56	6,4	6,28	6,16	6,03	5,9	5,77	8,16	8	7,88	7,75	7,62	7,49	7,36	7,81	7,56	7,31	7,06	6,81	6,56	6,31	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,0	4,8-5,0			3,4-4,3	5,5	5,3	5,2	4,7	4,4	6,88	6,7	6,6	6,45	6,31	5,94	4,38	4,65	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05	4,65	4,59	4,53	4,42	4,32	4,19	4,05	
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26			75,54						72,38	72,56	72,74	73,23	73,6	74,16	74,6	69,08	69,53	69,99	70,54	71,11	71,69	72,16	69,08	69,53	69,99	70,54	71,11	71,69	72,16	
5	Rasio Gini	0,375-0,380	0,375-0,379			0,360-0,370						0,301	0,299	0,298	0,296	0,293	0,289	0,284	0,285	0,279	0,277	0,273	0,268	0,262	0,255	0,28	0,279	0,277	0,273	0,268	0,262	0,255	
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)																																

BUPATI SOLOK,

EPYARDI ASDA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																								
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)	-	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9									
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6									
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26									
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3									
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82	82,5	83	84	84,5	85									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82	82,5	83	84	84,5	85									
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82	82,5	83	84	84,5	85									
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82	82,5	83	84	84,5	85									
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
										Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82	82,5	83	84	84,5	85									
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)		21	22	24	27	28	30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani		15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)		82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi		80	80	80	80	80	80
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (orang)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani yang Produktif		19	19	19	19	19	19

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani yang Produktif		19	19	19	19	19	19	19
		Peningkatan pengelolaan kematriman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59										
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7										
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000										
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350										
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	780	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59										
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7										
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000										
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		7,5	7,83	8,25	8,61	8,95	9,3	
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		7,5	7,83	8,25	8,61	8,95	9,3	
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		7,5	7,83	8,25	8,61	8,95	9,3	
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		7,5	7,83	8,25	8,61	8,95	9,3	
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		7,5	7,83	8,25	8,61	8,95	9,3	
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)		80	82	84	86	90	92										
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41	
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41	
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas		5	5	5	5	5	5		
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas		5	5	5	5	5	5		
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten		5	5	5	5	5	5		
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha		35,92	49,8	63,41	76,75	89,84	99,25		
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor ril, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)		82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi		80	80	80	80	80	80		
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
										Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian		2	2	2	2	2	2		
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100		Persentase Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian		2	2	2	2	2	2		
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)		0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		1,2	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67		
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)		0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		
										Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan (unit)		1.400	1.423	1.590	1.739	1.768	1.800		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		
										Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)		3	3	3	3	3	3		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		
										Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)		100	100	100	100	100	100		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)		220.615	222.693	225.081	227.546	230.081	232.762		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44		Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang difasilitasi		2	2	4	6	8	10
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)			72	74	76	78		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan		100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)			41.373	43.263	45.363	47.673		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang Tersedia		15	25	45	75	100	100
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kall)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19		Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target							Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan			3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan			3	5	10	15	20	25
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)			0	15	20	25	30	35
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan			0	10	15	20	25	30
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan			0	10	15	20	25	30
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Investasi dan Regulasi			20	40	50	100	100	100
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)		4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investasi			5	5	5	5	5	5
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp triliun))		4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib administrasi			20	30	35	40	45	50
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)		15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi			20	20	80	100	80	100
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)		0	2	1	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTK			100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih			0,02	0,07	0,09	0,1	0,12	0,22
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)		31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan			0,05	0,11	0,14	0,17	0,21	0,27
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih			0,02	0,07	0,09	0,1	0,12	0,22
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)			20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase sentra industri yang difasilitasi			2	2	4	6	8	10

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25		Persentase sentra industri yang difasilitasi		2	2	4	6	8	10	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19		Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		0	15	20	25	30	35
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan		0	10	15	20	25	30
										Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan		0	10	15	20	25	30
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US\$)			1.420,99	1.449,41	1.478,40	1.507,97		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Event yang diikuti		100	100	100	100	100	100
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)			5,5	5,8	6,2	6,5		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		2	9	9	9	9	27
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)			6	6	6	6		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas		23,21	23,71	24,71	24,71	25,21	25,71

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19		Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																		
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18																		
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17		Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
										Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19		Persentase Destinasi Wisata Unggulan/Prioritas yang dikembangkan		15	15	25	15	10	5
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
										Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88		Jumlah Paket Wisata yang dipasarkan/diPromosikan		3	5	10	15	20	25
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0		0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
									Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian		2	2	2	2	2	2	2
									Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100		Persentase Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian		2	2	2	2	2	2	2
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0		0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)		73,92	75	77	79	81	82	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		59,8	61,8	63,8	65,8	67,8	69,8	69,8
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0		0																					
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	0		0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100	100
									Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100	100
									Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0		0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99	99
									APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99	99
									APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99	99
								PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik / Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/ D4 dan Memiliki Sertifikat Pendidik		58,45	60	62	65	70	75	75
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	3,69
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	3,69
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	3,69
									Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	3,69
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi			78,27	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak			70,27	71,27	72,27	73,37	75,27	77,27

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Transtibum yang dapat ditindaklanjuti (%)		77	79	81	83	85	87	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		100	100	100	100	100	100	100
										Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		75	77	79	81	83	85		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72	
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100		Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72	
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100		Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72	
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100		Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72	
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten		100	100	100	100	100	100	100
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																									
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26,66	40	50	60	70	80	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		99,05	99,15	99,20	99,34	99,39	99,4	
										Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97,16	97,75	98	98,25	98,5	99		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		99,05	99,15	99,20	99,34	99,39	99,4	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91,47	94	95	96	97	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
										Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100		Rasio bayi berakte kelahiran		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
										Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100		Rasio bayi berakte kelahiran		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
										Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100		Rasio bayi berakte kelahiran		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)		3	6	9	12	15	18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		8.69	9.69	10.69	11.69	12.69	13.69	
										Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)		1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1		Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		8.69	9.69	10.69	11.69	12.69	13.69	
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)		3	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan penerbitan akta kelahiran		95.00	96.86	97.71	98.07	98.92	99.53	
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)		80	80	85	90	90	90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,05	0,93	0,81	0,69	0,57	0,45	
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		74.33	74.55	74.9	75.25	75.35	75.45	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan		0	21,42	35,71	50	64,28	100	
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100	100	100	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)			25	25	25	25	25	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			100	100	100	100	100	100	100	
										Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)			100	100	100	100	100	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			100	100	100	100	100	100		
										Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)			30	35	40	50		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			100	100	100	100	100	100		
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target							Target								Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19			Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masvarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masvarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masvarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masvarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masvarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		74,33	74,55	74,9	75,25	75,35	75,45
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		74,33	74,55	74,9	75,25	75,35	75,45
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		74,33	74,55	74,9	75,25	75,35	75,45
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan		0	21,42	35,71	50	64,28	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi		78,27	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak		70,27	71,27	72,27	73,37	75,27	77,27
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		60	62	65	70	75	80
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72
										Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100		Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72
										Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100		Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72
										Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100		Persentase PMKS yang tertangani		95,98	96,73	97,48	98,23	98,98	99,72

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)		290,59	291,79	292,98	294,15	295,31	296,4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
									Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)		82	82,5	83	84	84,5	85		Skor PPH konsumsi		85	85,5	86	86,5	87	87,5
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)		21	22	24	27	28	30	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani		15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
								PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)		82	83	83,5	84	84,5	85	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi		80	80	80	80	80	80
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)		10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari		100	100	100	100	100	100
									Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)		299	350	400	450	500	544		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari		100	100	100	100	100	100
									Jumlah LPM Mandiri (LPM)		0	7	15	25	37	50		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari		100	100	100	100	100	100
									Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)		2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakat Nagari dan Lembaga Adat Nagari		100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		0	21,42	35,71	50	64,28	100
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)		5	10	20	30	40	50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		77,76	78	79	80	81	82
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		37	38,1	39,15	40,1	41	41

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742		Angka Konsumsi Ikan			37	38,1	39,15	40,1	41	41
										Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44		Angka Konsumsi Ikan			37	38,1	39,15	40,1	41	41
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian			1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
										Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian			1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)		0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman			1,2	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)			4	8	12	16		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			100	100	100	100	100	100
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)			100	100	100	100		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD			100	100	100	100	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96			Indek Kepuasan Masarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6			Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
										Indeks Kepuasan Masarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96			Indek Kepuasan Masarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masvarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga			40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indeks Kepuasan Masyarakat			3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)			27	33	39	45	51	57	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen Kurikulum Sekolah			70	75	80	85	90	95
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)			69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik / Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/ D4 dan Memiliki Sertifikat Pendidik			58,45	60	62	65	70	75
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)			6	21	36	51	66	81	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat			2	5	7	9	11	12
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)			2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak			650	650	700	700	750	800
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota			100	100	100	100	100	100
			Prevalensi anak usia 13- 17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempu an: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)			2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak			650	650	700	700	750	800
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota			100	100	100	100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,21165	91,27794	91,27896	91,3347	91,38627	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD			0,0124	0,0128	0,0133	0,0137	0,0140	0,0143
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481	73,5005	73,74052	73,96592	74,17748	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD			0,0124	0,0128	0,0133	0,0137	0,0140	0,0143
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja APBD			0,0124	0,0128	0,0133	0,0137	0,0140	0,0143
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			81	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)			0,0002	0,0002	0,00018	0,00017	0,00016	0,00015
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)			69,5	70	70,5	71	71,5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga			100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)		14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		10	15	20	25	30	35
										Jumlah wirausaha muda baru (orang)		230	268	348	348	348	1890		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		10	15	20	25	30	35
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100	100	100	100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26									
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000									
			Bidang tanah yang didistribusi	750000		0		7750000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat dilindakkanuti (%)		65	70	75	80	85	90									
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6286087		0		56286087	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95									
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95									
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)		50	55	60	70	75	80	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Percil Tanah yang ditata		33,46	53,09	72,72	92,35	100	-
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
										APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57		Angka Partisipasi Sekolah		97,88	98	98,25	98,5	98,75	99
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih		0,02	0,07	0,09	0,1	0,12	0,22
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.																		
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilatih		0,02	0,07	0,09	0,1	0,12	0,22
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																								
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0		0				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)		2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Koordinasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		0	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0		0				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)			8	8	8	8		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Budaya Lokal yang Dikembangkan, Jumlah lembaga adat yang difasilitasi		30	40	70	80	85	90
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)			21	23	23	23		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan/Dilestarikan		4	5	5	5	5	5
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)			11	16	21	26										
										Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)			15	15	15	15										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)			15	15	15	15		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang didirikan dan dikelola		0	1	1	1	1	1
										Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)			30000	35000	40000	45000			Persentase Museum yang didirikan dan dikelola		0	1	1	1	1	1

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)			4	8	12	16		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	100	100	100	100	100
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0		0				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)		N/A	3	6	9	12	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi		45	60	80	90	100	100
										Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)		N/A	6	12	18	24	30		Persentase sekolah dengan kegiatan literasi		45	60	80	90	100	100
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk Provinsi sesuai SNP (%)			1,41	1,52	1,62	1,72		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase sekolah dengan kegiatan literasi		45	60	80	90	100	100
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100
										Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100
										Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100	100	100	100	100	100
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																								
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni		100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3		Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni		100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target							Target								Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95										
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4																			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak		70,27	71,27	72,27	73,37	75,27	77,27	
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		60	62	65	70	75	80	
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25	
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25	
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		60	62	65	70	75	80	
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)		75	75	75	75	75	75	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		5.40	24.32	43.24	62.16	81.08	100	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4%, BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1%, BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
										Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	
										Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96		Indek Kepuasan Masvarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
										Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6		Indek Kepuasan Masyarakat		3,44	3,49	3,54	3,59	3,64	3,69
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
										Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
										Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19		Cakupan Nagari Siaga		40,54	41,08	41,62	42,16	42,7	43,25
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		60	62	65	70	75	80
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Terlindungi		78,27	79,27	80,27	82,27	84,27	86,27
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang Terlayani dan Menjadi Layak Huni		100	100	100	100	100	100
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,5019	55,18146	57,06	58,10498	58,49863	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,17	115942,7	116142,7	116342,7	116342,7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target							Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	100	100	100	100	100
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
										Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5		Rasio Luas Di Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi		40,2	44,2	48,2	52,2	56,2	60,2
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitas kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)		1	10	10	10	10	10									
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		5	5	5	5	5	5
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalu lintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		5	5	5	5	5	5
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dlanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95									
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			0																				
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			0																				
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km/s)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)		1	1	1	1	1	5									
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		5	5	5	5	5	5
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalu lintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		5	5	5	5	5	5
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9									
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)		3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi		71,6	75	78	80	85	90
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3																		
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100																		
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7																		
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																								
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan		14,30	28,60	42,90	60	78,6	100
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan		14,30	28,60	42,90	60	78,6	100
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan		14,30	28,60	42,90	60	78,6	100
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan		14,30	28,60	42,90	60	78,6	100
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)		19	19	19	19	19	19	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1																		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15																		
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	100	100	100	100	100
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
										Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68		Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)		5	5	5	5	5	30	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
										Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100		Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		3	1,08	1,28	1,44	1,65	5,48	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		0,1	1,08	1,28	1,44	1,65	1,81
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)		0,65	0,63	0,6	0,57	0,54	0,53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		1,2	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)		3	5	7	8	10	12									
										Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)		3	3	3	3	3	15									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26									
										Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)		2	2	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia		45	50	55	60	65	70

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak		70,27	71,27	72,27	73,37	75,27	77,27
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)		1	2	10	15	25	36									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)			60	65	70	75		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Terangkut ke TPA		12,8	13,97	15,25	16,65	18,18	19,32
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan		14,30	28,60	42,90	60	78,6	100
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		5	5	5	5	5	5
										Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas		5	5	5	5	5	5
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59									
										Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7									
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000									
										Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350									
7		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik																								
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,3	75,35	75,4	75,45	75,5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)		3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Koordinasi Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67																		
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85																		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target									Target										Target							
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025					2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)		100	100	100	100	100	100													
										Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)		100	100	100	100	100	100													
										Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)		8	12	16	18	20	22													
										Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)		7	8	10	12	14	16													
										Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)		5	7	9	11	13	15													
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)		65	70	75	80	85	90	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pembinaan APIP terhadap Audity		100	100	100	100	100	100	100			
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70																						
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2																						
			Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	100	100	100	100	100	100			
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial		100	100	100	100	100	100	100			
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	100	100	100	100	100	100			
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial		100	100	100	100	100	100	100			

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target							Target								Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Keamanan dan Keterlibatan Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan konflik sosial		100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan konflik sosial		100	100	100	100	100	100

BUPATI SOLOK,

EPYARDI ASDA